PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN
WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR .....TAHUN 2024
TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

Kota Sawahlunto

TAHUN 2025







United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
World Heritage Convention
Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto inscribed on the World Heritage List in 2019

OCMHS

GEOPARK SAWAHLUNTO

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

Kota Sawahlunto
Jl. Soekarno-Hatta No. 3 - 27424

Telp / Fax
(0754) 61009 / 62200

Mail
bappedaswl@gmail.com

Website
https://barenlitbangda.sawahluntokota.go.id

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
    g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2025;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 05 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG ..... I- 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I- 4
1.3 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN ..... I- 5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ..... I- 8
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 ..... I- 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II- 1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II- 2
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II- 12
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II- 53
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-164
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2022 ..... II-185
2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYEENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN II-185
2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) II-214
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-216

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... III- 1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024 ..... III- 2
3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2025 ..... III- 6
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA SAWAHLUNTO 2025 ..... III- 7
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ..... III- 8
3.2.2 PROYEKSI KINERJA KEUANGAN MASA LALU ..... III- 10
3.2.3 PERMASALAHAN UMUM APBD KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 14
3.2.4 KEBIJAKAN TERHADAP PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 15

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ..... IV- 1
4.1.1 TELAAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 ..... IV- 1
4.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 ..... IV- 3
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-12
4.2.1 SINKRONISASI PRIORITAS KOTA SAWAHLUNTO DENGAN PRIORITAS PROVINSI IV-13
4.2.2 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 ..... IV-26
4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ..... IV-30
4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MEMUAT POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2025 ..... IV-51
4.5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RKPD 2025 YANG MENERAPKAN KONSEP TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL (THIS) IV-53

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V- 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO..... VI- 1
6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... VI- 3
6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH..... VI- 4

BAB VII PENUTUP
7.1 KAIDAH PELAKSANAAN ..... VII- 1
7.2 TINDAK LANJUT..... VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto II-2
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto II-4
Tabel 2.3 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto II-4
Tabel 2.4 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-6
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-8
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-9
Tabel 2.7 Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-10
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-10
Tabel 2.9 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-10
Tabel 2.10 Jenis Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-11
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (Supply Side) Tahun 2019 – 2023 ..... II-13
Tabel 2.12 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023 ..... II-13
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 ..... II-14
Tabel 2.14 Target Laju Inflasi Tahun 2022 – 2024 ..... II-15
Tabel 2.15 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 ..... II-17
Tabel 2.16 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-18
Tabel 2.17 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2019 – 2023 ..... II-19
Tabel 2.18 Perkembangan Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 ..... II-20
Tabel 2.19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 ..... II-22
Tabel 2.20 Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-23
Tabel 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 ..... II-24
Tabel 2.22 Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 ..... II-25
Tabel 2.23 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-27
Tabel 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-29
Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-31
Tabel 2.26 TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-32
Tabel 2.27 Perbandingan Target dan Realisasi TPT Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 ..... II-32
Tabel 2.28 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-32
Tabel 2.29 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-32
Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-34
Tabel 2.31 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-34
Tabel 2.32 Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-35
Tabel 2.33 Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-36
Tabel 2.34 Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2019 - 2023 ..... II-36
Tabel 2.35 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023 ..... II-39
Tabel 2.36 Produktivitas Padi Tahun 2019-2023 ..... II-39
Tabel 2.37 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2019-2023 ..... II-40
Tabel 2.38 Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2019-2023 ..... II-40
Tabel 2.39 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2019-2023 ..... II-41
Tabel 2.40 Perkembangan populasi (ekor) dan produksi daging (kg) dari Tahun 2019-2023 ..... II-42

Tabel 2.41 Perkembangan ternak unggas populasi ternak (ekor) produksi daging (kg) Tahun 2019-2023 ..... II-42
Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2.43 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-45
Tabel 2.44 Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-45
Tabel 2.45 Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.46 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 ..... II-46
Tabel 2.47 Peringkat nilai IPM se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-47
Tabel 2.48 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Tahun) II-47
Tabel 2.49 Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-48
Tabel 2.50 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Tahun) II-48
Tabel 2.51 Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-49
Tabel 2.52 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Satuan Dalam Tahun) II-49
Tabel 2.53 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-50
Tabel 2.54 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 ..... II-50
Tabel 2.55 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-51
Tabel 2.56 Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-51
Tabel 2.57 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-52
Tabel 2.58 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-52
Tabel 2.59 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-53
Tabel 2.60 Tabel Inovasi Dinas Pendidikan Tahun 2023 ..... II-53
Tabel 2.61 Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30 Tahun 2023 ..... II-54
Tabel 2.62 Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi dan Literasi Minimum) Tahun 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.63 Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2018 – 2022 ..... II-55
Tabel 2.64 Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 (%) II-55
Tabel 2.65 Angka Partispasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SMP Tahun 2019 – 2023 ..... II-55
Tabel 2.66 Angka Partispasi Murni (APM) Tahun 2019 – 2023 (%) II-55
Tabel 2.67 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2019–2023 ..... II-56
Tabel 2.68 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-56
Tabel 2.69 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017 ..... II-57
Tabel 2.70 Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-57
Tabel 2.71 Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-57
Tabel 2.72 Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-57
Tabel 2.73 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-58
Tabel 2.74 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 (%) II-58
Tabel 2.75 Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-59
Tabel 2.76 Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik II-59
Tabel 2.77 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%) II-59
Tabel 2.78 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto

Tahun 2019 – 2023 ..... II-60
Tabel 2.79 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 ..... II-61
Tabel 2.80 Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV Tahun 2019 - 2023 ..... II-61
Tabel 2.81 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%) II-62
Tabel 2.82 Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-64
Tabel 2.83 Jumlah kematian Balita Tahun 2019-2023 ..... II-65
Tabel 2.84 Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD Tahun 2019-2023 ..... II-65
Tabel 2.85 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2019-2023 ..... II-66
Tabel 2.86 Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-66
Tabel 2.87 Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-66
Tabel 2.88 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-67
Tabel 2.89 Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 ..... II-67
Tabel 2.90 Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-68
Tabel 2.91 Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-68
Tabel 2.92 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-68
Tabel 2.93 Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-69
Tabel 2.94 Sarana Kesehatan Kota Tahun 2019 – 2023 ..... II-69
Tabel 2.95 Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-69
Tabel 2.96 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-70
Tabel 2.97 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah II-70
Tabel 2.98 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2019– 2023 ..... II-71
Tabel 2.99 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-72
Tabel 2.100 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-72
Tabel 2.101 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2019– 2023 ..... II-73
Tabel 2.102 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-73
Tabel 2.103 Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-73
Tabel 2.104 Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-74
Tabel 2.105 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2019- 2023 ..... II-74
Tabel 2.106 Persentase Penduduk berakses Air Minum Tahun 2019- 2023 ..... II-75
Tabel 2.107 Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 - 2023 ..... II-75
Tabel 2.108 Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 - 2023 ..... II-76
Tabel 2.109 Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-76
Tabel 2.110 Penerima Bantuan RTLH Tahun 2019 -2023 ..... II-77
Tabel 2.111 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah II-77
Tabel 2.112 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel 2.213 Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-78
Tabel 2.114 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2019- 2023 ..... II-79
Tabel 2.115 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019- 2023 ..... II-79
Tabel 2.116 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2019- 2023 ..... II-79
Tabel 2.117 Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan Tahun 2019 - 2023 ..... II-80
Tabel 2.118 Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019 – 2023 ..... II-80
Tabel 2.119 Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-81
Tabel 2.120 Indikator Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-82
Tabel 2.121 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-83

Tabel 2.122 Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Sawahlunto II-83
Tabel 2.123 Data Pelayanan terhadap sasaran SPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-83
Tabel 2.124 Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-84
Tabel 2.125 Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-84
Tabel 2.126 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-85
Tabel 2.127 Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) di Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-85
Tabel 2.128 Jenis Bantuan Penanganan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-86
Tabel 2.129 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023 ..... II-86
Tabel 2.130 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel 2.131 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel 2.132 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-88
Tabel 2.133 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2019-2023 ..... II-89
Tabel 2.134 Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel 2.135 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2023 ..... II-90
Tabel 2.136 Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-91
Tabel 2.137 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-92
Tabel 2.138 Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023 ..... II-93
Tabel 2.139 Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2023 ..... II-93
Tabel 2.140 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 ..... II-94
Tabel 2.141 Persentase Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Tahun 2021-2023 ..... II-95
Tabel 2.142 Predikat Anugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-95
Tabel 2.143 Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023 ..... II-95
Tabel 2.144 Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2021 – 2023 ..... II-95
Tabel 2.145 Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2021- 2023 ..... II-96
Tabel 2.146 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ..... II-96
Tabel 2.147 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan Tahun 2019 - 2023 ..... II-97
Tabel 2.148 Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto II-100
Tabel 2.149 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2019-2023 ..... II-100
Tabel 2.150 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2019-2023 ..... II-101
Tabel 2.151 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 % Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel 2.152 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 % Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel 2.153 Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-103
Tabel 2.154 Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2019-2023 ..... II-103
Tabel 2.155 Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-104
Tabel 2.156 Inovasi Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk II-104
Tabel 2.157 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023 ..... II-105
Tabel 2.158 Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-105
Tabel 2.159 Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2023 ..... II-105
Tabel 2.160 Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2023 ..... II-106
Tabel 2.161 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023 ..... II-106
Tabel 2.162 Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (IKD) II-106
Tabel 2.163 Rasio Kependudukan Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-107
Tabel 2.164 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Tahun 2019 – 2023 ..... II-108
Tabel 2.165 Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 ..... II-108
Tabel 2.166 Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-109
Tabel 2.167 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2023 ..... II-109
Tabel 2.168 Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2023 ..... II-110
Tabel 2.169 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2019 – 2023 ..... II-110
Tabel 2.170 Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Tahun 2019-2023 ..... II-110
Tabel 2.171 Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 ..... II-111
Tabel 2.172 Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 ..... II-111
Tabel 2.173 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-111
Tabel 2.174 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-112
Tabel 2.175 Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 2.176 Jumlah petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/ kelurahan II-112
Tabel 2.177 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel 2.178 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel 2.179 Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-114
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel 2.181 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2023 ..... II-116
Tabel 2.182 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-116
Tabel 2.183 Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-117
Tabel 2.184 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 ..... II-117
Tabel 2.185 Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-118
Tabel 2.186 Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro < 60.000.000 Tahun 2019 - 2023 ..... II-118
Tabel 2.187 Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro > 60.000.000 Tahun 2019 - 2023 ..... II-118
Tabel 2.188 Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel 2.189 Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel 2.190 Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-120
Tabel 2.191 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-120
Tabel 2.192 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023 ..... II-121
Tabel 2.193 Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-122
Tabel 2.194 Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2019-2023 ..... II-122
Tabel 2.195 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2019–2023 ..... II-122
Tabel 2.196 Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2019–2023 ..... II-123
Tabel 2.197 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto Tahun 2019-2023 ..... II-123
Tabel 2.198 Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahluto Tahun 2019–2023 ..... II-123
Tabel 2.199 Prestasi Olahraga Menurut Cabang Tahun 2019 – 2023 ..... II-124

Tabel 2.200 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-125
Tabel 2.201 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-125
Tabel 2.202 Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto II-127
Tabel 2.203 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel 2.204 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Tahun 2019 - 2023 ..... II-128
Tabel 2.205 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023 II-129
Tabel 2.206 Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2019-2023 ..... II-129
Tabel 2.207 Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.208 Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.209 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2022 ..... II-130
Tabel 2.210 Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 2.211 Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 2.212 Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 2.213 SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-133
Tabel 2.214 Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 2022 ..... II-133
Tabel 2.215 Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2019-2023 ..... II-133
Tabel 2.216 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha) Tahun 2018-2022 ..... II-134
Tabel 2.217 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata Tahun 2019-2023 ..... II-134
Tabel 2.218 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk) Tahun 2019-2023 ..... II-135
Tabel 2.219 Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2019-2023 ..... II-135
Tabel 2.220 Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-137
Tabel 2.221 Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-139
Tabel 2.222 Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2019–2023 ..... II-140
Tabel 2.223 Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2019-2023 ..... II-141
Tabel 2.224 Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2019 – 2023 ..... II-143
Tabel 2.225 Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi Tahun 2019 -2023 ..... II-144
Tabel 2.226 Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-145
Tabel 2.227 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-145
Tabel 2.228 Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi Tahun 2019 -2023 ... II-146
Tabel 2.229 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-147
Tabel 2.230 Jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik dan jenis kelamin II-149
Tabel 2.231 Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2023 ..... II-149
Tabel 2.232 Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto, Tahun 2017-2023 ..... II-149
Tabel 2.233 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 – 2023 ..... II-150
Tabel 2.234 Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-151
Tabel 2.235 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-151
Tabel 2.236 Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2019-2023 ..... II-153
Tabel 2.237 Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-153
Tabel 2.238 Persentase IKPAK Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.239 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.240 Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2.241 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2.242 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2.243 Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kepegawaian

Tahun 2022 ..... II-156
Tabel 2.244 Kategori Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-157
Tabel 2.245 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 ..... II-158
Tabel 2.246 Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2022 ..... II-161
Tabel 2.247 Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022 ..... II-162
Tabel 2.248 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2018-2022 ..... II-162
Tabel 2.249 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-164
Tabel 2.250 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-167
Tabel 2.251 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 ..... II-168
Tabel 2.252 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-170
Tabel 2.253 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2019-2023 ..... II-171
Tabel 2.254 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-171
Tabel 2.255 Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-172
Tabel 2.256 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-174
Tabel 2.257 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-174
Tabel 2.258 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2019–2023 ..... II-175
Tabel 2.259 Realisasi Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang Tahun 2019–2023 ..... II-175
Tabel 2.260 Luas Wilayah Industri Tahun 2019-2023 ..... II-175
Tabel 2.261 Luas Wilayah Kota Sawahlunto II-176
Tabel 2.262 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2019-2023 ..... II-176
Tabel 2.263 Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP Tahun 2017- 2021 ..... II-177
Tabel 2.264 Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-178
Tabel 2.265 Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 ..... II-180
Tabel 2.266 Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-180
Tabel 2.267 Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-181
Tabel 2.268 Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d selanjutnya II-181
Tabel 2.269 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2019-2023 ..... II-183
Tabel 2.270 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 – 2023 ..... II-184
Tabel 2.271 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-184
Tabel 2.272 Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-184
Tabel 2.273 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ..... II-190
Tabel 2.274 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-214
Tabel 2.275 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Tahun 2023 ..... II-216
Tabel 3.1 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... III- 7
Tabel 3.2 Proyeksi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 ..... III- 8
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... III-10
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Kota Sawahlunto 2019-2023 ..... III-12
Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 ..... III-13
Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... III-14
Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV- 5
Tabel 4.2 Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto IV-11
Tabel 4.3 Konsistensi Permasalahan/Isu Strategis Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto IV-12
Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 Dalam Mendukung Program Prioritas/ Unggulan RKP Tahun 2025 ..... IV-16
Tabel 4.5 Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 Dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan Provinsi Sumatera Barat IV-21

Tabel 4.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ..... IV-27
Tabel 4.7 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Tahun 2025 ..... IV-30
Tabel 4.8 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan dengan arah kebijakan Tahun 2025 ..... IV-31
Tabel 4.9 Program Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ..... IV-33
Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah IV-35
Tabel 4.11 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan arah kebijakan tahun 2025 ..... IV-35
Tabel 4.12 Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ..... IV-38
Tabel 4.13 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah IV-39
Tabel 4.14 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan arah kebijakan tahun 2025 ..... IV-39
Tabel 4.15 Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Tahun 2025 ..... IV-40
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional IV-41
Tabel 4.17 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan pengelolaan pariwisata Dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional dengan arah kebijakan tahun 2025 ..... IV-41
Tabel 4.18 Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional Tahun 2025 ..... IV-42
Tabel 4.19 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal IV-42
Tabel 4.20 Sandingan prioritas daerah Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal dengan arah kebijakan tahun 2025 ..... IV-43
Tabel 4.21 Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal IV-45
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan tata Kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi IV-47
Tabel 4.23 Sandingan prioritas daerah Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan arah kebijakan tahun 2025 ..... IV-47
Tabel.4.24 Program Pembangunan Daerah Prioritas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi IV-49
Tabel 4.25 Program Pemerintah Daerah Yang Memuat Pokok-pokok pikiran DPRD IV-50
Tabel 4.26 Tujuan 3 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... IV-52
Tabel 4.27 Program-Program Pendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan IV-53
Tabel 4.28 Tujuan 3 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... IV-58
Tabel 4.29 Program-Program Pendukung Pengembangan dari Status OMCHS dan Geopark Nasional IV-59
Tabel 4.30 Tujuan 1 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... IV-62
Tabel 4.31 Program-Program Pendukung *prevalensi stunting* IV-63
Tabel 4.32 Tujuan 2 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ..... IV-66
Tabel 4.33 Program-Program Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup IV-67

Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Sawahlunto .....V- 2
Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Makro Kota sawahluntoTahun 2025 .....VI-1
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota sawahluntoTahun 2025.....VI-3
Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota sawahlunto Tahun 2025..... VI-5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-9
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 ..... II-12
Grafik 2.3 Perbandingan Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kota Sawahlunto Tahun 2023 (Dalam persen) II-13
Grafik 2.4 Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Jenis Pengeluaran Kota Sawahlunto Tahun 2023 (Dalam persen) II-14
Grafik 2.5 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-16
Grafik 2.6 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023 ..... II-17
Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-17
Grafik 2.8 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-19
Grafik 2.9 Gini Rasio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2019 – 2023 ..... II-21
Grafik 2.10 Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-22
Grafik 2.11 Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2023 ..... II-37
Grafik 2.12 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2019 – 2023 ..... II-44
Grafik 2.13 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 ..... II-44
Grafik 2.14 Prevalensi Balita Stunted Berdasarkan Kab/Kota Di Sumatera Barat II-64
Grafik 2.15 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 (Dalam Rp) II-165
Grafik 2.16 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 ..... II-166
Grafik 2.17 Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-168
Grafik 2.18 Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2018 – 2022 ..... II-169
Grafik 3.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-2
Grafik 3.2 Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-3
Grafik 3.3 Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-3
Grafik 3.4 Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-4
Grafik 3.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-4
Grafik 3.6 Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-5
Grafik 3.7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023 Dan Prediksi Tahun 2024 ..... III-5
Grafik 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019- 2023 ..... III-11
Grafik 3.9 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019- 2023 ..... III-12
Grafik 3.10 Realisasi Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2019- 2023 ..... III-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD ..... I- 2
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan ..... I- 6
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto ..... II- 3
Gambar 2.2 Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto ..... II- 38
Gambar 2.3 Peran Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi II-224

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun RKPD tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu, pertama pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

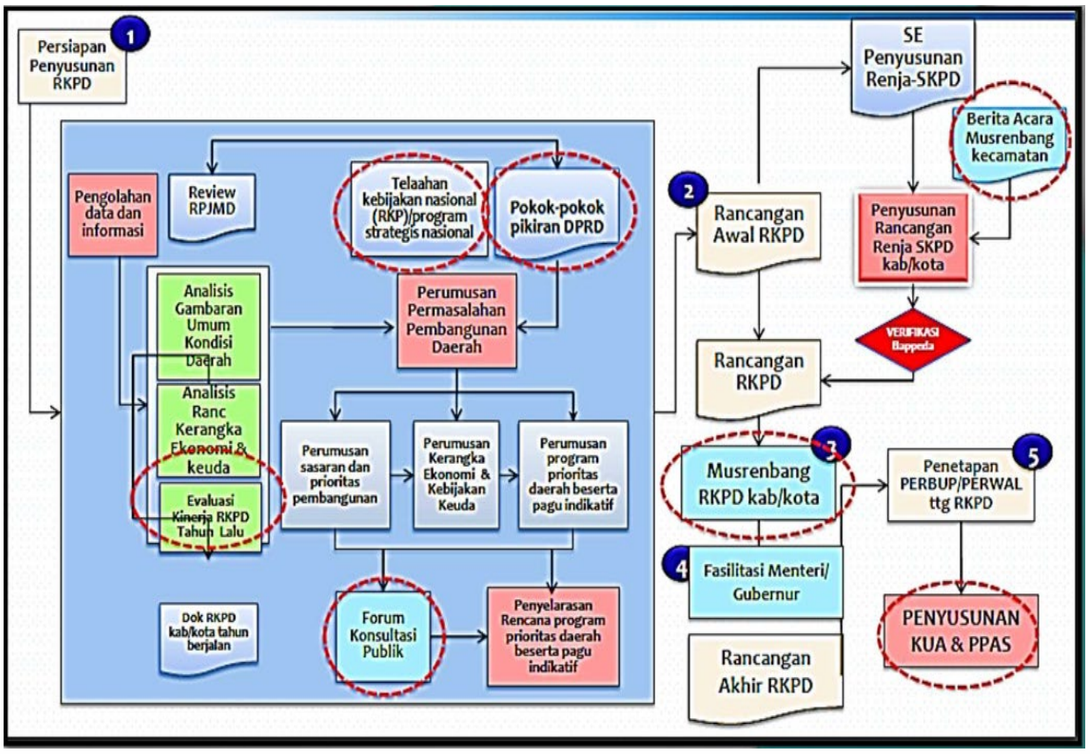
Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama pendekatan holistic-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Sawahlunto Tahun 2023, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka disusunlah Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2023.

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 juga telah memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, mempedomani Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Dengan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sehingga pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 mengangkat tema **“ AKSELERASI PRODUKTIVITAS KEUNGGULAN PARIWISATA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN””.**

Dalam melaksanakan pembangunan sesuai tema tersebut maka, disusunlah RKPD melalui beberapa tahapan dan tata cara sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, 2017

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, yang terdiri dari beberapa proses yaitu :
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 melalui Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-323.2023 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2023;
   b. orientasi mengenai RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, dengan melaksanakan rapat kerja tim dengan menghadirkan seluruh tim penyusun RKPD Tahun 2025;
   d. penyiapan data dan infomasi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 oleh tim pengumpul data pada SK Tim penyusun RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Penyusunan Rancangan awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 melalui beberapa tahapan dan rangkaian kegiatan yaitu:
   a. Tahap penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, mencakup:
      - analisis gambaran umum kondisi daerah;
      - analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      - analisis kapasitas rill keuangan daerah;
      - penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
      - perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      - penelaahan terhadap sasaran Rencana Pemerintah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
      - penelaahan terhadap arah kebijakan Rencana Pemerintah (RPD) Kota Sawahlunto

- Tahun 2024-2026;
- penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional;
- penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025;
- perumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025;dan
- perumusan rencana kerja program dan pendanaan Tahun 2025.

b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, DPRD Kota Sawahlunto telah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Barenlitbangda dengan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan hasil reses/jaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;

c. Rancangan Awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dibahas bersama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Tanggal 04 Januari 2024, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan untuk dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Penyusunan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 berdasarkan:
   a. Rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Maret 2024; dan
   b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2025, RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 04 April 2024, bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka:
   a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
   b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
   c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
   d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
   e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Februari 2024.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Perumusan rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 menjadi rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Rancangan akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwako RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025.
6. Penetapan Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, Rancangan Perwako tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Barenlitbangda kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Walikota tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dijadikan sebagai:
   a. pedoman perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
   b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 Tahun 2022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

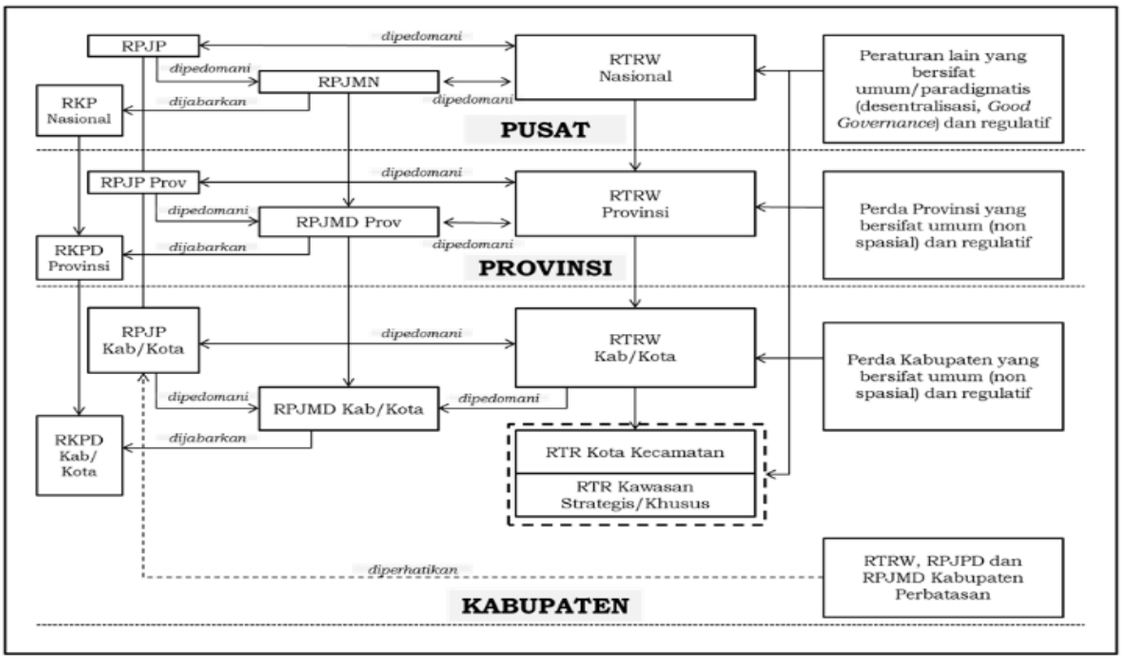
1.3 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunanya RKPD Kota Sawahlunto 2025 telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2012-2032, RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (dua puluh tahun),

(2) Rencana Pemerintah Daerah (tiga tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2025-2045, RPJPD Perubahan Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPD Kota Sawahlunto 2024-2026. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, 2017

1.3.1 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKP Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertubuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu. RKPD Kota Sawahunto Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani RKP Tahun 2025 yang mempunyai tema " **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**".

Berdasarkan tema RKP tersebut maka ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Kebijakan kewilayahan
   - Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi
   - Pengelolaan pusat pertumbuhan
2. Kebijakan Umum
   - Penguatan fondasi keuangan daerah
   - Percepatan reforma agraria
   - Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   - Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris
   - Penyediaan data dan informa geopasial dasar dan tematik
3. Infrastruktur dan layanan dasar
   - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   - Pengembangan konektivitas dasar
   - Peningkatan ketahanan Sumber Daya Alam berbasis alam
   - Reformasi pengelolaan sampah
     - Pemenuhan akses air minum dan sanitasi
     - Peningkatan akses Rumah Tangga terhadap hunian layak
     - Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
     - Pemerataan pelayanan ketenagalistrikan dan penuntasan konektivitas digital

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 wajib mengacu pada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan tema pembangunan Tahun 2025 **"Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Adapun Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

1.3.3 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Sawahunto Tahun 2024-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Rencana program serta kegiatan prioritas RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

1.3.4 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 memperhatikan RTRW Kota Sawahlunto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya meliputi: struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025. Perumusan Renja perangkat daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah:

1. Melakukan penjabaran terhadap RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipatif masyarakat.

Tujuan penyusunan Dokumen RKPD Kota Sawalunto Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sawahlunto Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengatur sistematika penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025, dasar hukum penyusunan RKP Tahun 2025, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan realisasi Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2025, kebijakan ekonomi dalam dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana kerja rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan kinerja tahun 2025 dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan kedalam Visi Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu "**Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Kerja keras Pemerintah Kota Sawahlunto perlahan menuai hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu: Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Purba Sangiran, dan *Cultural Landscape* Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak Tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015. OCMHS ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku, Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua Delegasi Prof. Rosa Surya Putra selaku Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc dan Deri Asta, SH selaku Walikota Sawahlunto.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam. Kota Sawahlunto telah mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk Kawasan Wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang. Pada tahun 2021, tengah menuju status UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri menjadi salah satu upaya Kota Sawahlunto untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta energi melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) Asia.*

Konsep pembangunan dan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga gambaran umum Kota Sawahlunto dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100˚41”00’ - 100˚49’60” Bujur Timur dan 00˚33”40’-00˚48”33’ Lintang Selatan sedangkan secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 231,94 km^2. Secara administrasi terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang yaitu 12.04% dari luas Kota Sawahlunto sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi yaitu 36.35% dari luas Kota Sawahlunto. Berikut merupakan jumlah RT, RW, dan Dusun per-Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan
Kota Sawahlunto

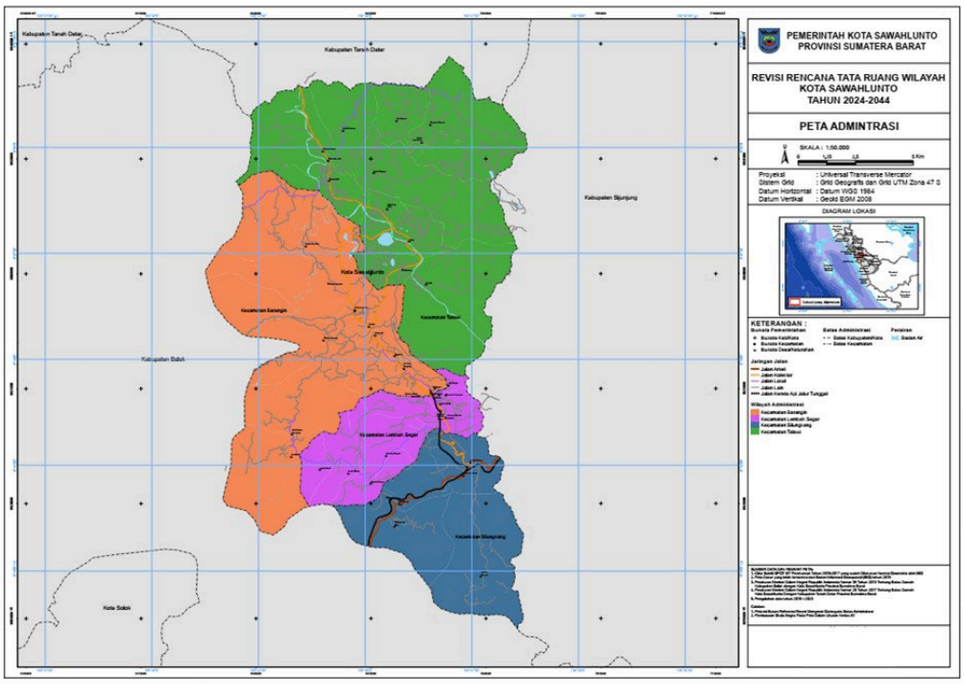
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun
(1) Kecamatan Barangin		**32**	**13**	**25**
01	Desa Lumindai	-	-	5
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3
03	Kel. Saringan	11	5	-
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-
05	Kel. Durian I	6	2	-
06	Kel. Durian II	8	4	-
07	Desa Talago Gunung	-	-	4
08	Desa Santur	-	-	5
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5
(2) Kecamatan Lembah Segar		**32**	**14**	**22**
01	Desa Lunto Barat	-	-	4
02	Desa Lunto Timur	-	-	4
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3
04	Desa Kubang Tangah	-	-	5
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6
06	Kel. Pasar	6	3	-
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-
11	Kel. Air Dingin	4	2	-
(3) Kecamatan Silungkang		**-**	**-**	**21**
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3
(4) Kecamatan Talawi			**-**	**39**
01	Desa Sikalang	-	-	4
02	Desa Rantih	-	-	2
03	Desa Salak	-	-	3
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4
09	Desa Kumbayau	-	-	4
10	Desa Data Mansiang	-	-	2
11	Desa Tumpuak Tangah	-	-	6
	Jumlah	**64**	**27**	**107**

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah kota. Faktanya, Kota Sawahlunto didominasi oleh desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

b. Topografi

Kondisi topografi Kota Sawahlunto didominasi daerah perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Namun sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 % dengan area seluas 6.768,08 Ha, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang.

- **Ketinggian**

Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariatif mulai dari 175 mdpl sampai dengan > 975 mdpl. Mayoritas terletak pada ketinggian 175–375 mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 Ha yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter diatas permukaan laut terletak di Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024

- **Kelerengan**

Kota Sawahlunto memiliki kemiringan yang beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah di Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar sebesar 18 % dari luas wilayah.

Untuk kelas kemiringan lahan yang terkategori datar yaitu 0 – 2 % berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 Ha dan di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha sementara kelas kemiringan lahan kategori Curam (> 40 %) berada di Kecamatan Silungkang. Selengkapnya Kemiringan lahan di Kota Sawahlunto dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)				
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110
Silungkang	29	288	735	340	1.901

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

c. Klimatologi

Kota Sawahlunto memiliki suhu rata – rata 22^{0}C sampai dengan 28 ^{0}C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 ^{0}C sampai dengan 7 ^{0}C. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 mm/tahun sampai dengan 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

d. Solum Tanah

Struktur rupa bumi dalam Geologi terbagi dalam 3 (tiga) jenis yang sering dijumpai pada batuan sebagai produk dari gaya yang bekerja pada batuan, yaitu:

1. Kekar (Fractures)
   Merupakan jenis struktur batuan yang berbentuk bidang pecah, sifat bidang ini memisahkan batuan menjadi bagian-bagian yang terpisah tetapi tidak mengalami perubahan posisinya.
2. Perlipatan (Folding)
   Batuan berlapis pada awalnya berbentuk sedimen yang diendapkan dalam lembaran Horizontal datar
3. Patahan/Sesar (Faulting)
   Fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan dimana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Menurut ilmu fisika, sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh.

Terdapat 3 (tiga) jenis Solum tanah yang ditemui di Kota Sawahlunto, yaitu:

- **Satuan Lempung Lanauan (S-sentimeter),** merupakan pelapukan dari F.Sawahlunto dan F.Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengan sisipan tipis pasir, memiliki ketebalan berkisar antara 0,5 m sampai dengan 2 m. Lempung

lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 26 % - 62 %, lanau 25 % - 50 %, pasir 4 % - 8 %, berat isi tanah asli 1.301 - 1.761 gr/cm^3, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm^2, sudut geser dalam 23.44^0 - 28.04^0.

- **Satuan Pasir Lanauan (S-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F.Sawah tambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), dengan ketebalan berkisar antara 1 meter sampai dengan 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat, agak lunak, kandungan pasir 59 %, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli1,579 gr/cm^3, kohesi 0,067 kg/cm^2, sudut geser dalam 24.81^0.
- **Satuan Lempung Lanauan (M-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F.Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 m - 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm^3, kohesi, 0,219 kg/cm^2, sudut geser dalam 25.46^0.

e. Geologi

Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman Kala *Eocen* sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu.

Kota Sawahlunto memiliki dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera. Jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional, struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah ke Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

f. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

- **Batang Ombilin**
  Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan, dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m^3/s
- **Batang Malakutan**
  Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.
- **Batang Lunto**
  Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Sumpahan**
  Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Lasi**
  Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Air Tanah

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 meter sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku di Kota Sawalunto.

Mata Air

Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter/s yang terdapat di Sikalang, mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah Tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih dari 5 liter/s, mengalir sepanjang musim, terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Sawahlunto.

g. Penggunaan Lahan

Luas Kota Sawahlunto adalah 231.94 km^2. Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar wilayah di Kecamatan Lembah Segar dan Barangin dimanfaatkan sebaga kebun campuran dengan persentase 36,24% dan 38%. Sedangkan di Kecamatan Talawi sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan di Kecamatan Silungkang masih berupa semak alang-alang. Berikut penjabaran penggunaan lahan per-kecamatan di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.4
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Penggunaan Lahan *The Land Use*	Kecamatan *District*			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Tidak ada Bangunan/ *Land No Buildings*	95,01	94,14	94,53	87,89
Tanah Permukiman/ *Residential Land*	3,69	5,34	4,41	4,04
Perairan/ *Waters*	0,44	-	0,39	1,39
Tanah Perkantoran dan Perdagangan/ *Office and Trading Land*	0,65	0,28	0,27	0,12
Tanah Industri dan Pergudangan/ *Industrial and Warehouse Land*	0,00	-	0,08	0,34
Tanah Jasa/ *Land of Services*	0,03	0,14	0,09	0,18
Taman/ *Park*	-	-	0,03	0,00
Penggunaan Tanah Lainya/ *Other Uses*	0,17	0,10	0,21	6,03
Jumlah/ *Total*	**100,00**	**100 ,00**	**100 ,00**	**100 ,00**

https://sawahluntokota.bps.go.id

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut. Berdasarkan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2024–2044 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:

a. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muaro Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.

b. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; (1). Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; (2).

Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

c. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu sedang dengan luas 15.003,77 Ha.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebanyak 67.760 orang, terdiri dari 34.090 orang laki-laki dan 33.670 orang perempuan, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2019		Jml	Jenis Kelamin 2020		Jml	Jenis Kelamin 2021		Jml	Jenis Kelamin 2022		Jml	Jenis Kelamin 2023		Jml
	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.075	3.008	6.083	2.809	3.011	5.820	3011	2810	5821	3019	2818	5837	3120	2950	6060
5 – 9	3.082	2.897	5.979	2.545	2.624	5.169	2598	2528	5126	2592	2526	5118	2750	2640	5400
10 – 14	2.668	2.712	5.380	2.608	2.837	5.445	2797	2581	5378	2751	2556	5307	2660	2590	5250
15 – 19	2.507	2.344	4.851	2.622	2.867	5.489	2860	2617	5477	2863	2621	5484	2840	2640	5480
20 – 24	2.076	1.945	4.021	2.597	2.721	5.318	2708	2582	5290	2701	2573	5274	2820	2590	5400
25 – 29	2.320	2.361	4.681	2.546	2.620	5.166	2640	2547	5187	2660	2553	5213	2710	2630	5340
30 – 34	2.371	2.330	4.701	2.337	2.422	4.759	2447	2361	4808	2479	2390	4869	2600	2530	5130
35 – 39	2.191	2.304	4.495	2.310	2.396	4.706	2430	2333	4763	2469	2364	4833	2420	2330	4750
40 – 44	2.215	2.239	4.454	2.217	2.260	4.477	2289	2242	4531	2323	2270	4593	2360	2270	4630
45 – 49	2.190	2.069	4.259	2.125	2.138	4.263	2179	2154	4333	2225	2194	4419	2190	2160	4360
50 – 54	1.706	1.750	3.456	1.950	1.907	3.857	1943	1982	3925	1984	2017	4001	2020	2030	4050
55 – 59	1.470	1.616	3.086	1.761	1.753	3.514	1800	1795	3595	1852	1836	3688	1820	1850	3670
60 – 64	1.071	1.243	2.314	1.367	1.246	2.613	1280	1403	2683	1319	1438	2757	1530	1580	3110
65 – 69	904	986	1.890	1.092	942	2.034	986	1140	2126	1030	1186	2216	1040	1200	2240
70 – 74	480	571	1.051	627	743	1.370	545	679	1224	588	726	1314	670	830	1500
75 +	494	703	1.197	638	500	1.138	542	878	1420	575	915	1490	540	860	1400
Jumlah	30.820	31.078	61.898	32.151	32.987	65.138	33.055	32.632	65.687	33.430	32.983	66.413	34.090	33.670	67.760

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menggambarkan banyak hal, diantaranya kebutuhan pelayanan, tingkat produktivitas serta konsumsi. Kelompok umur 0 - 14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar, seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur di atas 65 tahun, dimana produktivitas secara umum mulai menurun, di sisi lain mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan kelompok usia 15 - 64 tahun, produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini semakin besar peluang untuk meningkatkan produktivitas suatu wilayah.

Penduduk Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk di atas 100 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2023

Kecamatan	2023	
	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Lembah Segar	13.720	100,82
Barangin	21.380	99,80
Silungkang	11.810	102,35
Talawi	20.850	102,35
Total	67.760	101,25

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto sebesar 101,25 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101,25 penduduk laki-laki. Hanya terdapat satu kecamatan yang rasio jenis kelaminnya di bawah 100 (98), yakni kecamatan Barangin, dengan kata lain di Kecamatan Barangin pada setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 orang atau kurang dari 100.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Data laju pertumbuhan penduduk dibutuhkan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang dan memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan. Berikut disajikan laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto periode tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pernah terjadi pada tahun 2021, namun dua tahun berikutnya kembali meningkat

dengan laju pertumbuhan sebesar 1,11% dan1,49%. Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan memicu munculnya permasalahan kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan akan ketersediaan pangan, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.

Pertumbuhan penduduk disebabkan adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Berikut dinamika pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2023 :

Tabel 2.7
Jumlah Kelahiran, Kematian Dan Perpindahan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2023

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
Lembah Segar	152	103	357	558
Barangin	221	152	657	655
Silungkang	111	65	302	330
Talawi	236	146	754	629
Total	720	466	2.70	2.172

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada Tahun 2023 jumlah kelahiran tertinggi terjadi di kecamatan Talawi dan terendah di kecamatan Silungkang. Sedangkan tingkat kematian tertinggi terjadi di kecamatan Barangin dan terendah di kecamatan Silungkang. Perpindahan penduduk yang datang tertinggi terjadi di kecamatan Talawi dan terendah di kecamatan Silungkang, sedangkan penduduk keluar tertinggi terjadi di kecamatan Barangin dan terendah di kecamatan Silungkang.

Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Silungkang	344,94	346,46	348,80	352,08	358,61
Lembah Segar	247,98	253,94	255,04	256,83	260,97
Barangin	211,19	229,07	232,03	235,61	241,43
Talawi	195,44	202,16	203,69	205,78	209,76
Jumlah	228,65	238,21	240,22	242,87	247,79

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2023 kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan kecamatan Talawi paling luas wilayahnya dibandingkan kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Tingkat pendidikan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.9
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Tidak/Belum Sekolah	12,90	12,10	25,00
2	Belum Tamat SD/Sederajat	5,80	5,25	11,05
3	Tamat SD/Sederajat	8,16	7,05	15,21

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
4	SLTP/ Sederajat	6,82	6,35	13,17
5	SLTA/ Sederajat	12,58	11,86	24,44
6	Diploma I/II	0,29	0,51	0,80
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	0,88	1,55	2,43
8	Diploma IV/Strata-I	2,64	4,78	7,42
9	Strata-II	0,22	0,26	0,48
10	Strata-III	0,004	0,003	0,007
SAWAHLUNTO		50,29	49,71	100,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2023

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 25 %, dimana 12,90% diantaranya laki-laki dan 12,10% perempuan. Tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 24,44%, sebanyak 12,58% laki-laki dan 11,86% perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kota Sawahlunto didominasi oleh SLTA/sederajat ke bawah. Untuk itu perlu berbagai upaya oleh semua pihak untuk mendorong dan memotivasi generasi muda meningkatkan pendidikan melalui jalur formal, sehingga dapat meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah serta peningkatan IPM Kota Sawahlunto.

Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.10
Jenis Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Belum/Tidak Bekerja	10,74	9,10	19,84
2	Aparatur/Pejabat Negara	1,50	2,29	3,79
3	Tenaga Pengajar	0,09	0,47	0,57
4	Wiraswasta	3,44	0,33	3,77
5	Pertanian/Peternakan	4,50	0,43	4,93
6	Nelayan	0,001	0,00	0,001
7	Agama dan kepercayaan	0,03	0,00	0,029
8	Pelajar/mahasiswa	11,86	11,58	23,45
9	Tenaga kesehatan	0,04	0,20	0,24
10	Pensiunan	1,52	0,85	2,37
11	Lainnya	16,56	24,45	41,01
Kota Sawahlunto		**50,29**	**49,71**	**100**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2023

Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto sebagian besar adalah kelompok pekerjaan lainnya dengan jumlah 41,00 %, yang mana 16,56 % diantaranya laki-laki dan 24,45% perempuan. Berikutnya kelompok pekerjaan pelajar/mahasiswa sejumlah 23,44 % dan kelompok pekerjaan belum/tidak bekerja sejumlah 19,84 %. Hal ini menunjukkan 2 kelompok pekerjaan non produktif (pelajar/mahasiswa dan belum/tidak bekerja) cukup mendominasi senilai 43,29 %, angka inilah yang ditanggung oleh kelompok pekerjaan produktif (9 jenis kelompok pekerjaan lainnya). Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu kontribusi berbagai pihak dalam mendorong peningkatan persentase 9 jenis kelompok pekerjaan tersebut.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

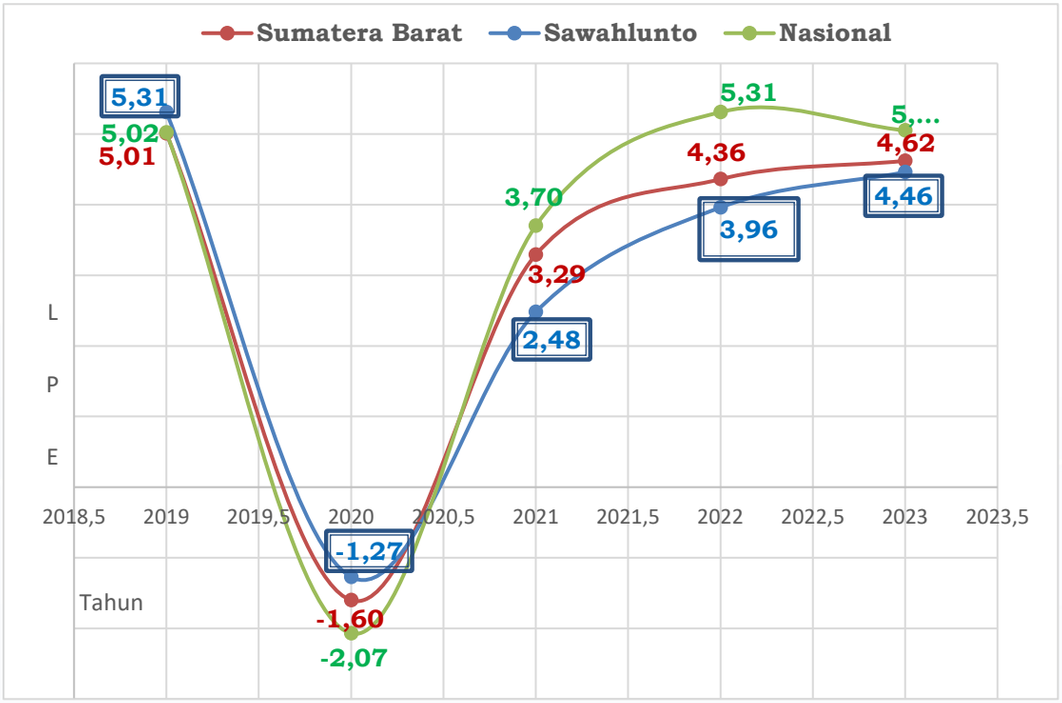
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja makro, seperti Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan. Berikut capaian indikator kinerja makro Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019-2023.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2023 mencapai 4,46 persen, meningkat sebesar 0,5 poin (12,63 %) dari tahun sebelumnya (3,96 persen). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun 2022 yang mencapai 1,48 poin (59,68 %). Meskipun demikian, secara umum selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan secara konsisten, kecuali tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami penurunan bahkan minus dengan capaian sebesar -1,27 persen sebagai dampak pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh dunia.

Grafik di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dan disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi Nasional :

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

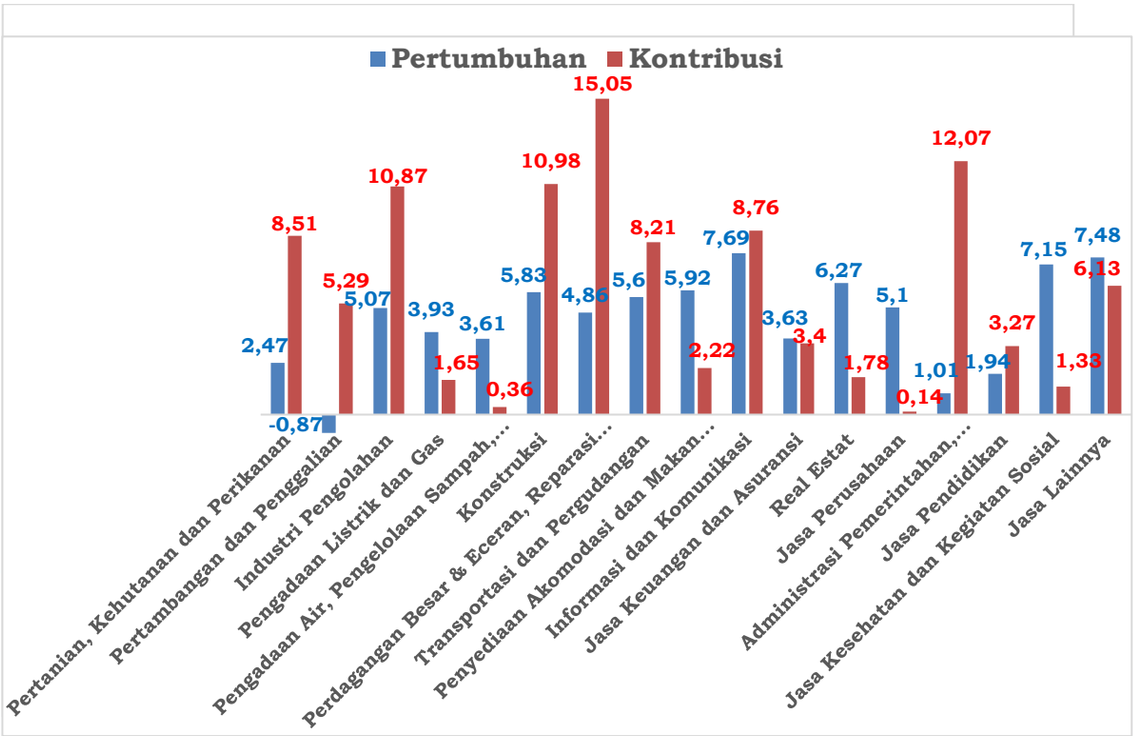
Grafik di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 berada di angka 5,31 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,60 persen. Namun pasca wabah covid 19 pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto hanya tumbuh sebesar 2,48 persen, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang tumbuh sebesar 3,29 persen dan 3,70 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dimana angka pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah tersebut, baik dari sisi lapangan usaha (*supply side*) maupun sisi pengeluaran (*demand*

side). Struktur perekonomian menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha dan jenis pengeluaran terhadap Total PDRB suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi suatu lapangan usaha dan jenis pengeluaran terhadap Total PDRB, semakin tinggi pula peranan lapangan usaha dan komponen pengeluaran tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Grafik di bawah ini memperlihatkan besarnya kontribusi dan laju pertumbuhan lapangan usaha (*supply side*) pada perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2023 :

Grafik 2.3
Perbandingan Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Kota Sawahlunto Tahun 2023 (Dalam persen)



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari grafik di atas terlihat lima lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2023, yaitu : 1).Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 persen); 2).Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 persen); 3).Konstruksi (10,98 persen); 4).Industri Pengolahan (10,87 persen); dan 5).Informasi dan Komunikasi (8,76 persen). Di sisi lain pada tahun 2023 tersebut, laju pertumbuhan kelima lapangan usaha dominan tersebut lebih rendah atau belum optimal sebagaimana kondisi sebelum Covid 19 melanda tahun 2019, bahkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang masih mengalami kontraksi (minus) sebesar 0,87 persen, padahal lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 5,29 persen terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2023 (lapangan usaha dengan kontribusi dominan ke-9 dari 17 lapangan usaha yang ada).

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan lapangan usaha selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Tahun 2019 – 2023

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,02	0,71	7,07	4,93	2,47
2	Pertambangan dan Penggalian	11,16	8,89	-28,23	-3,04	-0,87
3	Industri Pengolahan	-3,12	-2,98	4,91	2,56	5,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,07	-6,17	5,11	1,98	3,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,09	-0,31	5,35	-0,70	3,61
6	Konstruksi	6,64	-5,21	3,18	3,19	5,83
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,44	-0,69	4,17	5,08	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	8,58	-10,96	4,35	3,53	5,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,95	-10,10	9,38	11,63	5,92

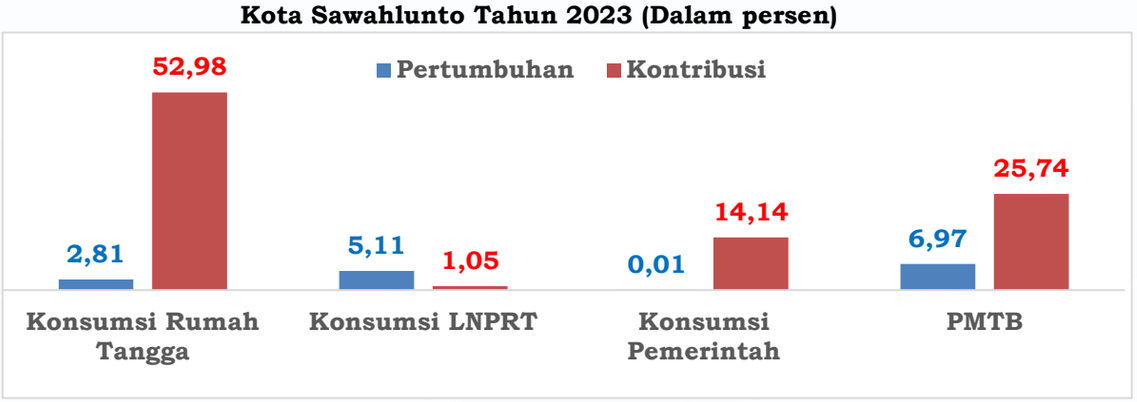
NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
10	Informasi dan Komunikasi	8,27	8,19	7,08	5,77	7,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,60	0,91	9,49	5,55	3,63
12	Real Estat	5,87	0,13	4,94	5,94	6,27
13	Jasa Perusahaan	6,13	-3,16	3,43	5,14	5,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	-0,62	2,09	2,05	1,01
15	Jasa Pendidikan	9,03	4,41	4,85	4,00	1,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,62	6,26	7,35	4,48	7,15
17	Jasa Lainnya	8,97	-9,28	6,83	9,32	7,48
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		**5,31**	**-1,27**	**2,48**	**3,96**	**4,46**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat selama tiga tahun terakhir laju pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian minus (-28,23 % pada tahun 2021, 3,04% pada tahun 2022 dan -0,87% pada tahun 2023). Hal ini berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, disamping terdapat beberapa lapangan usaha dominan yang tumbuh jauh lebih rendah pada tahun 2023 diibandingkan kondisi sebelum covid 19, seperti : 1). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 5,44 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,86 persen; 2). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 4,06 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 1,01 persen; 3). Kontruksi, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 6,64 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,83 persen; 4). Informasi dan Komunikasi, sebelum wabah Covid 19 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,27 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 7,69 persen.

Belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 sebagaimana kondisi sebelum wabah covid 19 melanda juga terjadi pada sisi pengeluaran (*demand side*). Grafik berikut memperlihatkan kontribusi jenis pengeluaran (*demand side*) terhadap PDRB Kota Sawahlunto tahun 2023 :

Grafik 2.4
Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Jenis Pengeluaran
Kota Sawahlunto Tahun 2023 (Dalam persen)



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari grafik di atas terlihat jenis pengeluaran yang dominan terhadap PDRB Kota Sawahlunto tahun 2023, adalah : 1). Konsumsi Rumah Tangga (52,98 persen); 2). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (25,74 persen); 3). Konsumsi Pemerintah (14,14 persen); 4). Konsumsi LNPRT (1,05) persen. Di sisi lain laju pertumbuhan jenis pengeluaran ini pada tahun 2023 belum seoptimal kondisi sebelum Covid 19 melanda tahun 2019. Berikut disajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berdasarkan sisi pengeluaran (***demand side***) selama kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2.12
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,61	-2,61	2,20	3,56	2,81
2. Konsumsi LNPRT	10,05	-4,25	2,12	-0,19	5,11
3. Konsumsi Pemerintah	4,47	-9,41	2,60	-3,07	0,01

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
4. PMTB	5,31	-3,59	2,11	4,50	6,97
PDRB	**5,31**	**-1,27**	**2,48**	**3,96**	**4,46**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 berdasarkan jenis pengeluaran belum tumbuh optimal sebagaimana kondisi sebelum wabah covid 19, kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh lebih tinggi. Lebih rinci dapat dijelas sebagai berikut : a).Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 4,61 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 2,81 persen; b).Pengeluaran Konsumsi LNPRT, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 10,05 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11 persen; c).Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 4,47 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 0,01 persen; d).Pembentukan Modal Tetap Bruto, sebelum wabah Covid 19 tumbuh sebesar 5,31 persen, tahun 2023 tumbuh sebesar 6,97 persen. Akibat belum optimalnya pertumbuhan jenis pengeluaran selama tiga tahun terakhir setelah pulihnya covid 19, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel di bawah ini memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	4,73	-1,85	2,87	4,94	4,04
Pesisir Selatan	4,78	-1,11	3,35	4,01	4,19
Solok	5,04	-1,12	3,28	4,28	4,36
Sijunjung	4,80	-1,10	3,14	3,93	4,26
Tanah Datar	4,98	-1,13	3,27	4,16	4,44
Padang Pariaman	2,40	-10,47	2,15	6,83	5,46
Agam	4,78	-1,38	3,70	4,21	4,52
Lima Puluh Kota	5,06	-1,16	3,33	4,02	4,55
Pasaman	4,80	-0,87	3,35	4,08	4,41
Solok Selatan	4,86	-1,24	3,32	4,01	4,57
Dharmasraya	4,94	-1,39	3,40	4,27	4,35
Pasaman Barat	4,45	-1,34	3,71	4,13	4,33
Kota					
Padang	5,65	-1,86	3,65	4,31	4,54
Solok	5,49	-1,42	3,55	4,60	4,81
Sawahlunto	***5,31***	***-1,27***	***2,48***	***3,96***	***4,46***
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61	4,67	4,79
Payakumbuh	5,89	-1,66	3,58	4,51	4,70
Pariaman	5,30	-1,32	3,51	4,53	4,79

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada posisi ke 6 dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebelum wabah covid 19 melanda. Namun pasca wabah Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di posisi terendah kedua dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021, terendah kedua setelah Kabupaten Sijunjung tahun 2022 dan pada tahun 2023 berada pada posisi ke-11 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

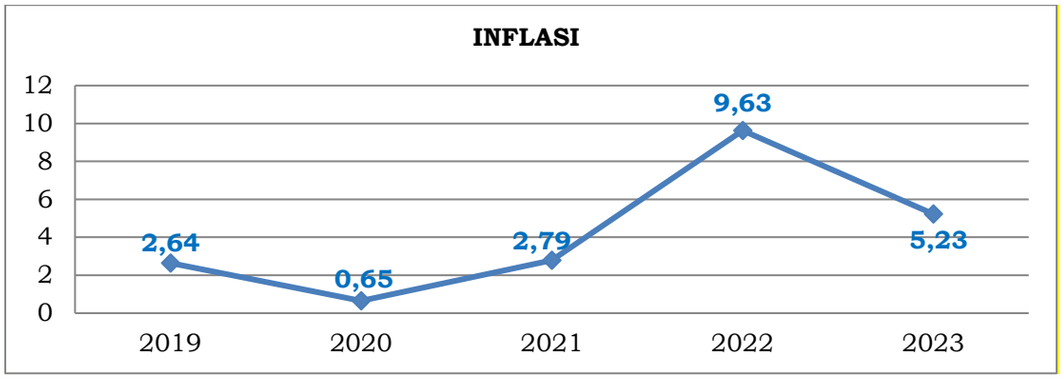
2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Laju Inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023 laju inflasi Kota Sawahlunto sebesar 5,23 persen, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelum yang mencapai 9,63 persen.

Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Pada grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahunto tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 9,63 persen dan angka ini melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023. Berikut target laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tahun 2022-2024 :

Tabel 2.14
Target Laju Inflasi Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target Inflasi
2022	3 % ± 1 %
2023	3 % ± 1 %
2024	2,5 % ± 1 %

Sumber Data : https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx

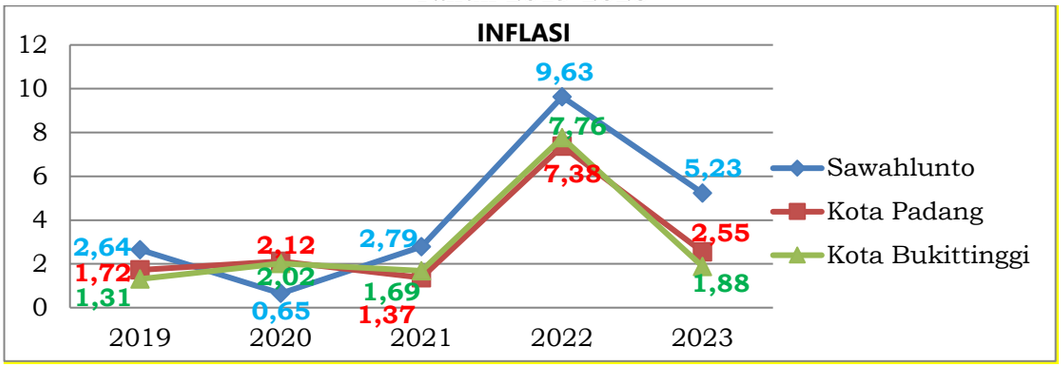
Tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 tentu saja berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sebagai ilustrasi, dengan tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dengan kata lain dengan tingginya harga-harga barang akan menyebabkan jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat menjadi lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi Kota Sawahlunto dihitung dengan menggunakan metode (GNP/PDB/PDRB) Deflator. PDRB Drflator membandingkan PDRB ADHB Kota Sawahlunto dengan PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Hasil perhitungan PDRB Deflator menunjukkan “laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi” dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama kurun waktu 2019-2023, kecuali tahun 2020. Dilakukan perbandingan dengan Kota Padang dan Kota Bukittinggi karena hanya pada dua kota ini BPS mengukur laju inflasi untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat sekaligus

kota perdagangan, dan Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang sekaligus juga merupakan kota perdagangan.

Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Tahun 2019-2023

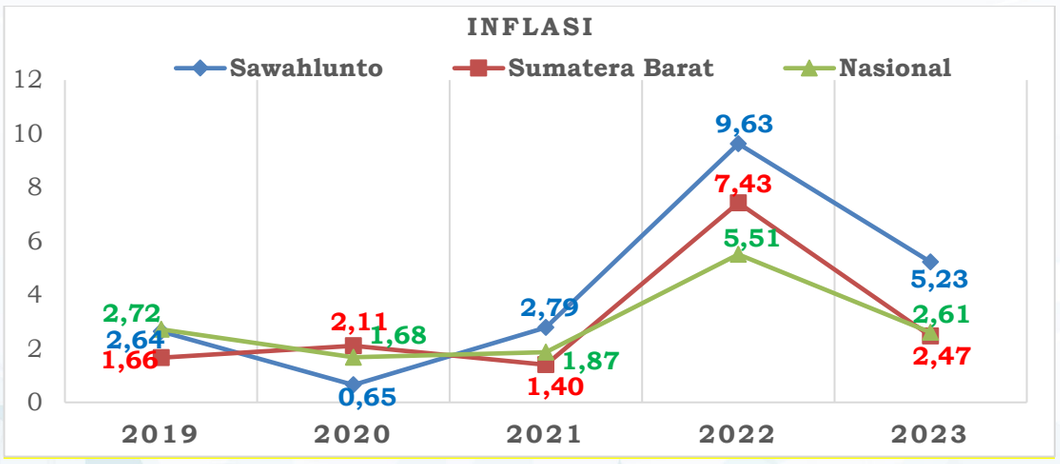


Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Pada grafik di atas terlihat bahwa fluktuasi laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi searah dan hampir sama dari tahun ke tahun. Namun fluktuasi laju inflasi Kota Sawahlunto "berlawanan arah" dengan fluktuasi laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2021. Hal ini terlihat ketika laju inflasi Kota Sawahlunto turun dari 2,64 persen pada tahun 2019 menjadi 0,65 persen tahun 2020, laju inflasi Kota Padang justru meningkat dari 1,72 persen pada tahun 2019 menjadi 2,12 persen pada tahun 2020, begitu juga dengan laju inflasi Kota Bukittinggi yang meningkat dari 1,31persen pada tahun 2019 menjadi 2,02 persen pada tahun 2020. Sebaliknya, ketika laju inflasi Kota Sawahlunto meningkat menjadi 2,79 persen pada tahun 2021, laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi malah menurun menjadi 1,37 persen dan 1,69. Namun pada tahun 2022 laju inflasi ketiga kota sama-sama meningkat dari tahun sebelumnya dan tahun 2023 sama-sama menurun dari tahun sebelumnya.

Laju Inflasi Kota Sawahlunto juga jauh lebih tinggi dari laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tiga tahun terakhir. Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.7
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Pada grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 saat covid 19 melanda, laju inflasi Kota Sawahlunto dan Nasional berada pada titik terendah dengan realisasi sebesar 0,65 persen dan 1,68 persen. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat justru mengalami laju inflasi terendah setelah covid 19 berakhir pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 1,40 persen. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan pada tahun 2023 sama-sama mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Tabel di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto menurut lapangan usaha dan jenis pengeluaran selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.15
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran
Tahun 2019 – 2023

Menurut Lapangan Usaha						
No	**Lapangan Usaha**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,23	-0,44	-1,17	5,76	4,62
2	Pertambangan dan Penggalian	4,54	-18,65	15,52	64,07	10,85
3	Industri Pengolahan	-2,62	3,91	4,16	6,99	5,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,06	1,12	0,63	1,49	1,83
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,15	0,20	1,12	5,59	3,41
6	Konstruksi	2,07	2,42	1,66	9,60	4,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,86	-0,35	-0,99	10,38	5,65
8	Transportasi dan Pergudangan	1,98	3,28	1,83	8,57	4,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	1,59	2,07	3,99	3,80
10	Informasi dan Komunikasi	5,09	-0,63	1,91	6,38	8,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	1,59	2,52	5,33	2,05
12	Real Estat	0,08	0,81	0,75	4,32	5,67
13	Jasa Perusahaan	3,49	0,84	0,98	2,86	5,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,50	8,12	3,07	7,61	4,59
15	Jasa Pendidikan	5,14	0,52	0,16	7,23	4,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,60	2,42	2,60	4,95	4,96
17	Jasa Lainnya	5,06	2,06	1,74	6,25	5,10
Menurut Pengeluaran						
No	**Jenis Pengeluaran**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,07	1,34	2,20	7,06	4,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,71	1,09	1,70	5,58	5,22
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,66	2,45	2,25	2,03	0,27
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,99	1,98	4,06	4,99	3,49
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		**2,64**	**0,65**	**2,79**	**9,63**	**5,23**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 sebagian besar lapangan usaha dan jenis pengeluaran (warna kuning dan coklat) mempunyai andil yang besar terhadap tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto dan nilainya melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 4 persen, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan inflasi sebesar 10,85 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,15 persen; Real Estat sebesar 5,67 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,65 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,42 persen; Industri Pengolahan sebesar 5,27 persen, dan seterusnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, yang memberi andil inflasi terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,22 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,25 persen.

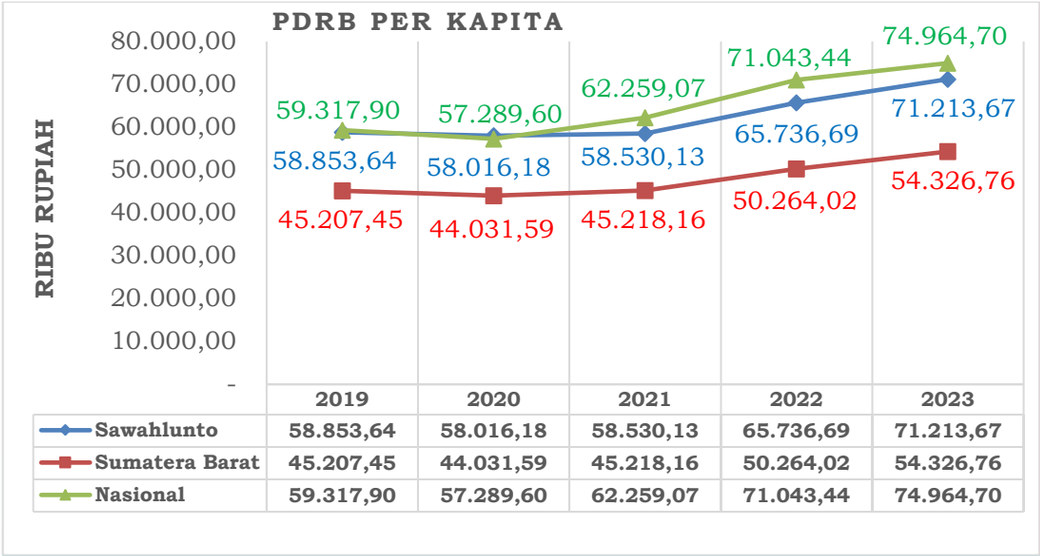
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita dianggap sebagai tanda

pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam suatu wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

PDRB per kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2023 mencapai Rp. 71,21 juta/jiwa, meningkat sebesar Rp 5,47 juta/jiwa atau 8,33% dari tahun sebelumnya dengan capaian Rp 65,74 juta/jiwa. Peningkatan PDRB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,31%. Grafik di bawah ini memperlihatkan PDRB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.8
PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Sawahlunto	58.853,64	58.016,18	58.530,13	65.736,69	71.213,67
Sumatera Barat	45.207,45	44.031,59	45.218,16	50.264,02	54.326,76
Nasional	59.317,90	57.289,60	62.259,07	71.043,44	74.964,70

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024
Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Pada grafik di atas terlihat PDRB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir, hal ini mengindikasikan pendapatan rata-rata penduduk Kota Sawahlunto di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Namun PDRB per kapita Kota Sawahlunto lebih rendah dari PDRB per kapita Nasional selama lima tahun terakhir kecuali tahun 2020.

Tabel di bawah ini memperlihatkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.679.850	3.656.590	3.851.692	4.389.764	4.825.295
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	8,09	-0,63	5,34	13,97	9,92
Jumlah Penduduk (Jiwa)	62,524	65,138	65,807	66,778	67,758
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,01	4,18	1,03	1,48	1,47
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	58,85	58,02	58.53	65,74	71,21
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	7,00	-1,41	0,88	12,32	8,32

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2023, kecuali pada tahun 2020, dimana PDRB ADHB Kota Sawahlunto mengalami kontraksi (minus) pertumbuhan sebesar 0,63%. Tren PDRB ADHB yang terus mengalami

peningkatan mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun dengan asumsi sebaran pendapatan masyarakat merata.

Di sisi lain, jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebagai variabel pembentuk PDRB Per Kapita lainnya, juga meningkat setiap tahunnya, apalagi saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebesar 4,18 % atau empat kali lipat dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya. Dengan demikian, Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus) sebesar 1,41%.

Tabel di bawah ini memperlihatkan PDRB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Pendapatan per kapita 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	50,44	49,46	54,60	60,45	64,69
Pesisir Selatan	30,25	29,96	29,27	32,08	34,31
Solok	36,36	35,96	35,88	39,42	42,72
Sijunjung	38,46	37,87	40,29	44,34	47,91
Tanah Datar	37,58	37,34	36,29	39,72	42,89
Padang Pariaman	51,14	42,94	42,31	50,02	55,54
Agam	41,80	41,19	39,91	43,94	47,41
Lima Puluh Kota	40,78	40,24	41,81	45,69	49,45
Pasaman	31,66	31,32	31,09	33,70	36,27
Solok Selatan	32,57	31,81	31,31	34,19	36,78
Dharmasraya	41,78	40,41	46,45	51,88	55,63
Pasaman Barat	34,68	33,75	36,47	40,31	43,43
Kota					
Padang	65,65	64,67	70,88	78,36	84,53
Solok	57,00	56,05	57,01	62,88	67,59
Sawahlunto	***58,85***	***58,02***	***58,53***	***65,74***	***71,21***
Padang Panjang	64,71	63,82	64,12	70,73	76,31
Bukittinggi	66.49	65,00	74,00	82,85	89,74
Payakumbuh	50,34	49,63	51,81	57,73	62,02
Pariaman	56,56	55,86	55,41	61,23	66,20
Sumatera Barat	45,21	44,03	45,22	50,26	54,33

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

4. Gini Rasio (Indeks Gini)

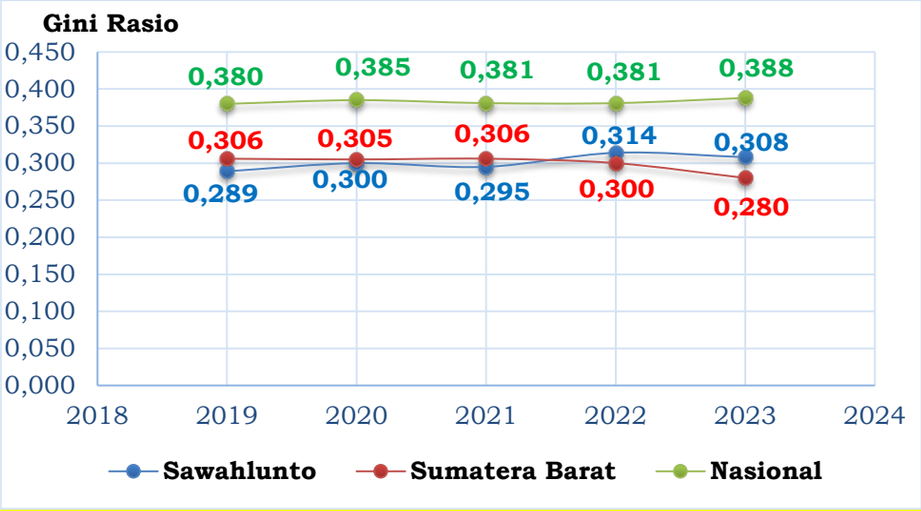
Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut :

1. Nilai Gini Rasio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai Gini Rasio terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.
3. Nilai Gini Rasio berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.

Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 0,308, angka ini menurun sebesar 0,006 poin (1,91%) dari Gini Rasio tahun 2022 yang mencapai 0,314. Penurunan Gini Rasio ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran atau pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto tahun 2023.

Grafik di bawah ini memperlihatkan Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, disandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.9
Gini Rasio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Gini Rasio Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, namun masih berada dalam rentang nilai interval 0,200 - 0,350 yang menurut Todaro (2006) menunjukkan tingkat ketimpangan Kota Sawahlunto berada dalam kondisi pemerataan relatif baik. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk di Kota Sawahlunto dalam kondisi pemerataan relatif baik. Di samping itu, Gini Rasio Kota Sawahlunto jauh berada di bawah Gini Rasio Nasional yang bermakna tingkat ketimpangan di Kota Sawahlunto jauh lebih baik dari Nasional. Namun pada tahun 2022 - 2023 Gini Rasio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2019-2021 dimana Gini Rasio Kota Sawahlunto lebih rendah dari Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat. Tabel di bawah ini memperlihat dengan Gini Rasio kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 :

Tabel 2.18
Perkembangan Gini Rasio
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,336	0,273	0,321	0,233	0,259
Pesisir Selatan	0,246	0,264	0,253	0,246	0,259
Solok	0,285	0,277	0,246	0,243	0,235
Sijunjung	0,293	0,269	0,270	0,243	0,263
Tanah Datar	0,278	0,273	0,250	0,251	0,260
Padang Pariaman	0,297	0,257	0,269	0,245	0,257
Agam	0,251	0,278	0,272	0,298	0,255
Lima Puluh Kota	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194
Pasaman	0,330	0,310	0,248	0,230	0,243
Solok Selatan	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271
Dharmasraya	0,278	0,280	0,268	0,287	0,291
Pasaman Barat	0,283	0,258	0,261	0,277	0,238
Kota					
Padang	0,312	0,312	0,343	0,354	0,312
Solok	0,271	0,286	0,277	0,288	0,256
Sawahlunto	***0,289***	***0,300***	***0,295***	***0,314***	***0,308***
Padang Panjang	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273

Bukittinggi	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255
Payakumbuh	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316
Pariaman	0,300	0,310	0,301	0,272	0,289
Sumatera Barat	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Payakumbuh (0,316) dan Kota Padang (0,312). Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan atau pengeluaran lebih tinggi di Kota Sawahlunto dibandingkan 16 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

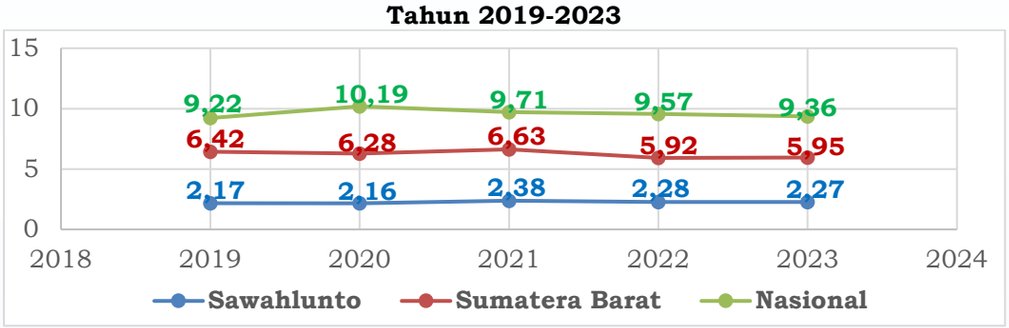
5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah antitesa dari Persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Dan tugas dari penyelenggaraan pemerintahan adalah mengurangi tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2023 sebesar 2,27 persen, menurun sebesar 0,01 poin (0,44 persen) dari tahun sebelumnya (2,28 persen). Penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2023 ini lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2022 yang mencapai 0,1 poin (4,20 persen).

Grafik di bawah ini memperlihatkan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.10
Tingkat Kemiskinan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Selanjutnya tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tingkat kemiskinan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
Solok	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88
Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80

Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
Kota					
Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
Sawahlunto	***2,17***	***2,16***	***2,38***	***2,28***	***2,27***
Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
Pariaman	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir. Bahkan selama tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional :

Tabel 2.20
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2019-2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Kota Tangerang Selatan	1. Kabupaten Badung	**1. Kota Sawahlunto 2,38**	**1. Kota Sawahlunto 2,28**	1. **Kota Sawahlunto 2,27**
2. Kabupaten Badung	2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan 2,45	2. Kota Balikpapan 2,31
3. Kota Depok	**3. Kota Sawahlunto**	3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat 2,46	3. Kota Depok 2,38
4. Kota Denpasar	4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57
5. Kota Sawahlunto	5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68
6. Kota Balikpapan	6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00
7. Kota Pekanbaru	7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89	7. Kabupaten Banjar 2,79	7. Kota Solok 3,05
8. Kabupaten Bangka Barat	8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96	8. Kota Denpasar 2,97	8. Kota Jakarta Selatan 3,10
9. Kabupaten Banjar	9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04	9. Kota Sungai Penuh 2,97	9. Kota Pekanbaru 3,16
10. Kota Jakarta Selatan	**10.** Kota Kota Solok	**10.** Kota Solok 3,12	**10.** Kota Solok 3,02	10. Kota Dumai 3,21

Sumber Data : Berita Resmi Statistik

Pada tabel di atas terlihat pada tahun 2019, Kota Sawahlunto berada pada posisi kelima terendah dalam 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional, kemudian meningkat di posisi ketiga pada tahun 2020, dan tahun 2021-2023 berhasil berada pada posisi pertama terendah tingkat nasional.

Meskipun Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa melakukan berbagai upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian Beasiswa dari pemerintah daerah, PKH dari Kementerian Sosial RI, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial RI, Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana sharing Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu dan Program Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. “Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin” dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. “Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran” di antara penduduk miskin.

Tabel di bawah ini memperlihatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2019 – 2023) dan

disandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.21
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan
Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Sawahlunto						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,23	0,07	0,33	0,34	0,17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,05	0,00	0,06	0,09	0,02
Provinsi Sumatera Barat						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,94	0,92	1,04	0,80	0,82
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,21	0,20	0,24	0,16	0,18

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2019-2023 berada pada kisaran 0,07 – 0,34. "Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terendah terjadi" pada tahun 2020 dan "tertinggi" terjadi pada tahun 2022. Pada dasarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto tergolong rendah, hal ini bermakna rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto jauh berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat, hal ini mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto "lebih tinggi" dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto adalah yang "terendah" dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2019-2023 berada pada kisaran 0,00 – 0,09. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti "tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kota Sawahlunto ini tergolong rendah". Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna "penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata" dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto adalah yang "terendah" dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

6. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2023 adalah 1,12%.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*), sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan World Bank persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2023 adalah 1,12%, sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem Nasional adalah 3,1 juta jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2023 adalah Rp. 11.571,21 per kapita per hari (Rp.351.957,4 per kapita per bulan).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah

sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi.
Arahan Presiden tersebut diantaranya :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ektsrem ini, dilaksanakan dengan prinsip Tepat sasaran : seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini. Pendekatan multidimensi : pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. Keterpaduan dan sinergi : penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBdes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. Tersampaikannya dan dipahaminya inforamsi : penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. Koordinasi dan kerjasama multipihak : pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur non pemerintah, serta Terpadu dan terkendali : pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrument dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan hasil estimasi BPS tahun 2023 dapat dilihat persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2023 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)				Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
13	Sumatera Barat	1,53	0,91	0,77	0,41	83,933	50,842	43,671	23.45
1301	Kepulauan Mentawai	7,78	3,97	2,14	2,12	7,254	3,826	2,104	2.12
1302	Pesisir Selatan	1,32	0,37	0,46	0,17	6,143	1,731	2,171	0.80
1303	Solok	2,47	0,56	0,74	0,49	9,256	2,122	2,811	1.89
1304	Sijunjung	2,10	0,73	2,21	1,35	5,033	1,804	5,561	3.44
1305	Tanah Datar	0,81	0,76	0,53	0,00	2,824	2,646	1,867	0.00
1306	Padang Pariaman	1,14	0,95	0,27	0,34	4,740	3,996	1,139	1.46
1307	Agam	2,50	1,82	0,18	0,00	12,364	9,096	0,918	0.00
1308	Lima Puluh Kota	1,72	1,24	1,63	0,66	6,634	4,845	6,412	2.64
1309	Pasaman	1,33	0,74	0,24	0,17	3,775	2,137	0,710	0.49
1310	Solok Selatan	1,86	1,80	1,53	1,32	3,214	3,204	2,770	2.43
1311	Dharmasraya	1,94	0,16	1,47	0,69	4,892	0,429	3,980	1.93
1312	Pasaman Barat	0,86	1,32	0,76	0,70	3,847	6,159	3,588	3.41
1371	Kota Padang	0,93	0,45	0,64	0,15	8,964	4,383	6,338	1.49
1372	Kota Solok	0,40	0,26	0,89	0,00	0,287	0,194	0,672	0.00
1373	Kota Sawahlunto	0,00	0,39	0,82	0,00	0,000	0,250	0,525	0.00
1374	Kota Padang Panjang	0,88	1,03	0,00	1,07	0,479	0,572	0,000	0.61
1375	Kota Bukittinggi	1,07	1,52	1,21	0,54	1,418	2,065	1,675	0.76

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)				Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1376	Kota Payakumbuh	1,55	0,77	0,10	0,00	2,124	1,078	0,148	0.00
1377	Kota Pariaman	0,77	0,34	0,31	0,00	0,685	0,305	0,282	0.00

Sumber Data : https://p3ke.kemenkopmk.go.id/Surat Kemenko PMK Nomor : B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir (2020-2023) terdapat 17 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan, dan 2 Kab/Kota yang mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin ekstrem yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 2,12%. Persentase dan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yaitu 0 % pada tahun 2020, naik menjadi 0,39% (0,250 ribu jiwa) pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 0,82% (0,525 ribu jiwa) tahun 2022, namun pada tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Sawahlunto sudah mencapai 0% kembali. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap berupaya dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mempertahankan kondisi kemiskinan ekstrem 0% ini.

7. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Berikut disajikan angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Angkatan Kerja 15 tahun ke atas (Jiwa)	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas (Jiwa)	22.297	22.756	45.053	24.295	24.409	48.704	25.204	25.287	50.491	25.068	25.083	50.151	25.560	25.500	51.060
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	81,01	57,95	69,36	77,99	57,65	67,80	75,19	52,56	63,86	77,20	58,29	67,74	80,70	59,51	70,11

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2019-2023 angka partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan sebesar 0,75% yaitu dari 69,36% tahun 2019 menjadi 70,11% tahun 2023, dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar dari angka partisipasi angkatan kerja perempuan. Kenaikan angka partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas banyak yang bekerja, ditambah dengan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja semakin meningkat.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. TPAK digunakan untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.

Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	22.349	22.808	45.157	23.138	23.648	46.786	23.450	23.930	47.380	23.748	24.205	47.953	25.641	25.572	51.213
TPAK (%)	80,82	57,82	69,20	81,89	59,50	70,57	80,81	55,55	68,05	81,49	60,40	70,85	80,44	59,34	69,90

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama rentang tahun 2019-2023, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto mengalami peningkatan sebesar 0,7% yaitu dari 69,20% tahun 2019 meningkat menjadi 69,90% tahun 2023, dengan TPAK laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Tingkat pengangguran terbuka memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.124	1.008	2.132	1.538	1.171	2.709	1.362	695	2.057	1.073	625	1.698	1.146	636	1.782
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**6,22**	**7,64**	**6,82**	**8,12**	**8,32**	**8,20**	**7,19**	**5,23**	**6,38**	**5,54**	**4,27**	**5,00**	**5.56**	**4.19**	**4.98**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian TPT Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar 6,82%, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 4,98%, terjadi penurunan sebesar 1,84 poin atau turun sebesar 26,98 %. Hal ini disebabkan mulai membaiknya perekonomian dan aktivitas ekonomi serta kondisi ketenagakerjaan setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Dibandingkan 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-9 pada tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, TPT Kota Sawahlunto jauh lebih rendah. Berikut disajikan perkembangan TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.26
TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	TPT Kota Sawahlunto	6,82	8,20	6,38	5	4,98
2	TPT Provinsi Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
3	TPT Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPT Kota Sawahlunto, TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2019-2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019-2020 TPT Kota Sawahlunto berada di atas TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, sedangkan pada tahun 2021-2023 TPT Kota Sawahlunto berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Untuk melihat keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, berikut disajikan target pada RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 dan realisasinya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Perbandingan Target dan Realisasi TPT Kota Sawahlunto
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,55	6,38	*115,50*	6,81	5	*126,58*	6,43	4,98	*122,55*

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024
Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian TPT Kota Sawahlunto selama rentang waktu tahun 2021-2023 sudah tercapai, bahkan melebihi target.

10. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli dimaksud maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.350,03	2.941.269,296	3.072.346,39
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46

Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	29.117	30.310	30.186	32.275	34.018
Pertumbuhan Tenaga Kerja %)	-3,97	4,10	-0,41	6,92	5,40
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa)	**96,04**	**91,09**	**93,74**	**91,16**	**90,32**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) yang mencapai 96,04 juta rupiah/jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 90,32 juta rupiah/jiwa. Tingginya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2019 disebabkan tingginya jumlah output (PDRB ADHK) tahun 2019 yang tumbuh mencapai 5,31% , sementara input (tenaga kerja) berkurang sebanyak 3,97%. Ketika pandemic covid 19 melanda pada tahun 2020, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menurun menjadi 91,09 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan output (PDRB ADHK) berkurang sebanyak 1,27%, sebaliknya input (tenaga kerja) meningkat sebanyak 4,10%. Setelah covid 19 usai tahun 2021, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja kembali meningkat menjadi 93,74 juta rupiah/jiwa seiring dengan meningkatnya jumlah output (PDRB ADHK) sebesar 2,49% dan berkurangnya jumlah input (tenaga kerja) sebesar 0,41%. Dan pada tahun 2022 ketika output (PDRB ADHK) meningkat sebesar 3,96%, justru Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menurun menjadi 91,16 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan tinggi pertambahan input (tenaga kerja) yang mencapai 6,92%, jauh melebihi pertumbuhan output (PDRB ADHK). Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2023, dimana Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja kembali menurun menjadi 90,32 juta rupiah/jiwa.

Untuk melihat Lapangan usaha mana yang paling produktif tenaga kerjanya, maka Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dirinci berdasarkan output (produksi) dan input dari masing-masing lapangan usaha yang ada. Dengan kata lain Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja diperoleh dengan membandingkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha tertentu yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha dimaksud.

Sejak tahun 2019 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga lapangan usaha besar, yaitu : "Pertanian; Manufaktur; dan Jasa". Lapangan usaha *Pertanian* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha *Manufaktur* terdiri dari Lapangan usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha *Jasa* terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.29
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	217.981,59	219.533,32	235.048,04	246.628,78	252.708,32
Manufaktur	872.139,94	860.221,60	829.590,12	843.735,70	879.530,55
Jasa	1.706.414,89	1.681.169,26	1.764.711,88	1.850.904,82	1.940.107,51
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	4.027	5.646	5.547	4.646	5.300
Manufaktur	8.367	7.361	7.350	8.766	8.126
Jasa	16.723	17.303	17.289	18.863	20.592
Produktivitas Total Daerah (Juta Rupiah / Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	54,13	38,88	42,37	53,08	47,68
Manufaktur	104,24	116,86	112,87	96,25	108,24
Jasa	102,04	97,16	102,07	98,12	94,22

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tenaga kerja paling produktif adalah yang bekerja di lapangan usaha manufaktur, kecuali pada tahun 2022 dimana tenaga kerja yang

bekerja di lapangan usaha Jasa lebih produktif. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha Jasa. Pada Tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha Jasa "empat kali lipat" lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha pertanian dan "dua setengah kali lipat" lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha manufaktur. Dan lapangan usaha yang paling rendah produktivitasnya adalah lapangan usaha pertanian.

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto adalah rendahnya kualitas SDM (39,46% angkatan kerja Kota Sawahlunto masih di dominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, informasi pasar kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Kota Sawahlunto belum mampu merespons perubahan cepat dari jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja

11. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.30
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Penduduk yang bekerja :**	**29.117**	**30.310**	**30.186**	**32.275**	**34.018**
	- Laki-laki	16.938	17.410	17.589	18.280	19.480
	- Perempuan	12.179	12.900	12.597	13.995	14.538
2	**Angkatan Kerja :**	**31.249**	**33.019**	**32.243**	**33.973**	**35.800**
	- Laki-laki	18.062	18.948	18.951	19.353	20.626
	- Perempuan	13.187	14.071	13.292	14.620	15.174
3	***Rasio penduduk yang bekerja :***	***93,18***	***91,80***	***93,62***	***95,00***	***95,02***
	- Laki-laki	*93,78*	*91,88*	*92,81*	*94,46*	*94,44*
	- Perempuan	*92,36*	*91,68*	*94,77*	*95,73*	*95,81*

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuasi dengan rasio perempuan lebih besar dari rasio laki-laki. Pada tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja sebesar 93,18 turun menjadi 91,80 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 93,62, dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 95, dan tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 95,02. Hal tersebut berarti 95,02 % dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 4,98% yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.

12. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja adalah persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	29.117	30.310	30.186	32.275	34.018
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)	45.157	46.786	47.380	47.953	51.213
3	**Rasio Kesempatan Kerja (%)**	**64,48**	**64,78**	**63,71**	**67,31**	**66,42**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2024, Data Diolah 2024

Dilihat dari tabel di atas, perkembangan rasio kesempatan kerja di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan trend yang berfluktuasi dengan kisaran antara 63,71% hingga 67,31%. Rasio kesempatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah tahun 2021. Rendahnya rasio kesempatan kerja pada tahun 2021 sebagai dampak covid 19, dimana pekerja informal banyak yang tidak bekerja. Sedangkan rasio kesempatan kerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 menunjukkan rendahnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Rasio kesempatan kerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan/skill dan usia tenaga kerja serta investasi.

13. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah.

Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangannya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.32
Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**619.181.974.790,86**	**605.315.736.275,64**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**65.779.505.807,86**	**59.943.839.179,64**
	Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718	5.602.920.091,75	5.993.540.247	7.434.834.333	8.149.995.371
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.625.062.865	2.788.116.593	2.731.559.922	3.550.241.052	2.691.622.325
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.832.616.199	12.026.462.819	10.806.423.680	13.477.268.009	15.663.529.464
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	41.317.162.413,86	33.438.692.019,64
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**521.592.899.623**	**468.737.786.340**	**538.147.448.116**	**550.785.091.283**	**545.371.897.096**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*495.141.841.033*	*445.561.937.322*	*509.421.068.591*	*516.526.120.023*	*514.079.683.094*
	Dana Perimbangan	-	-	*442.021.996.681*	*491.383.273.023*	*492.740.370.094*
	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	28.949.393.592	35.571.241.367	34.188.263.466
	Dana Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961	8.109.612.714	-	4.196.019.461	6.901.138.466
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	17.783.593.665	6.705.943.539	-	21.259.996.181	27.287.125.000
	Dana Alokasi Umum (DAU)	390.050.861.000	347.498.276.000	341.393.550.000	340.799.183.261	357.769.014.914
	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.377.889.407	83.248.105.069	71.679.053.089	115.012.848.395	100.783.091.714
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			*67.399.071.910*	*25.142.847.000*	*21.339.313.000*
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	37.290.036.000	5.044.116.000	0
	Dana Desa	-	-	30.109.035.910	20.098.731.000	21.339.313.000
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	*26.451.058.590*	*23.175.849.018*	*28.726.379.525*	*34.258.971.260*	*31.292.214.002*
	Pendapatan Bagi Hasil	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	27.492.214.002
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525	34.258.971.260	27.492.214.002
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	600.000.000	3.800.000.000
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**59.262.570.000**	**48.582.691.793,90**	**8.418.079.800**	**2.617.377.700**	**0**
	Pendapatan Hibah	8.858.200.000	8.148.061.693	-	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	7.553.170.000	-	-
	Pendapatan Dana Darurat	-	11.503.247.000	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	50.404.370.000	28.931.383.100,90	-	-	-
	Dana Alokasi Desa	-	-	-	-	
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	864.909.800	2.617.377.700	0
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	***8,96***	***10,32***	***8,61***	***10,62***	***9,90***
	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah (%)	***81,75***	***81,26***	***89,99***	***88,95***	***90,10***

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data Diolah 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan trend berfluktuasi. Selama tahun 2019 hingga 2023 rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 7,72%. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 68,57%, ini menyatakan bahwa ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap pendapatan transfer sangat tinggi. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer/dana perimbangan. Untuk itu perlu peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kota Sawahlunto dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia agar menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

14. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan penilaian profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut diatas. Berikut disajikan Opini BPK terhadap penilaian Laporan Keuangan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.33
Opini BPK Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan. Hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan Kota Sawahlunto telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP/SPKN). Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

15. Pola Pangan Harapan

Pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Untuk Kota Sawahlunto pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
Pola Pangan Harapan Hasil Survei
Tahun 2019 - 2023

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun				
		Skor PH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi-padian	20,2	20,4	22,5	23,7	25,0
2.	Umbi-umbian	0,8	0,9	0,8	1,5	1,0
3.	Pangan hewani	21,5	22,7	22,5	23,6	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0
6.	Kacang-kacangan	7,5	6,1	6,8	5,1	5,6
7.	Gula	0,9	0,8	0,5	0,6	1,3
8.	Sayur dan Buah	29,5	26,7	25,4	24,9	25,2
9.	Lain-lain	0,0	0	0	0,0	0,0
	Total	**86,5**	**83,7**	**84,5**	**85,1**	**88,2**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2023

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survey, proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sangat berpengaruh terhadap skor PPH suatu daerah, sehingga untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, caranya dengan meningkatkan konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.11
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2023

Dilihat dari grafik diatas untuk kelompok pangan rata-rata berada dibawah kondisi ideal, kecuali pada kelompok pangan minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang jauh dari skor idealnya, sehingga sangat perlu usaha-usaha melalui program/kegiatan dalam meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersedian konsumsi pangan akan terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.
2. Pengetahuan Gizi
3. Tingkat Pendidikan
4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan

16. Penguatan Cadangan Pangan

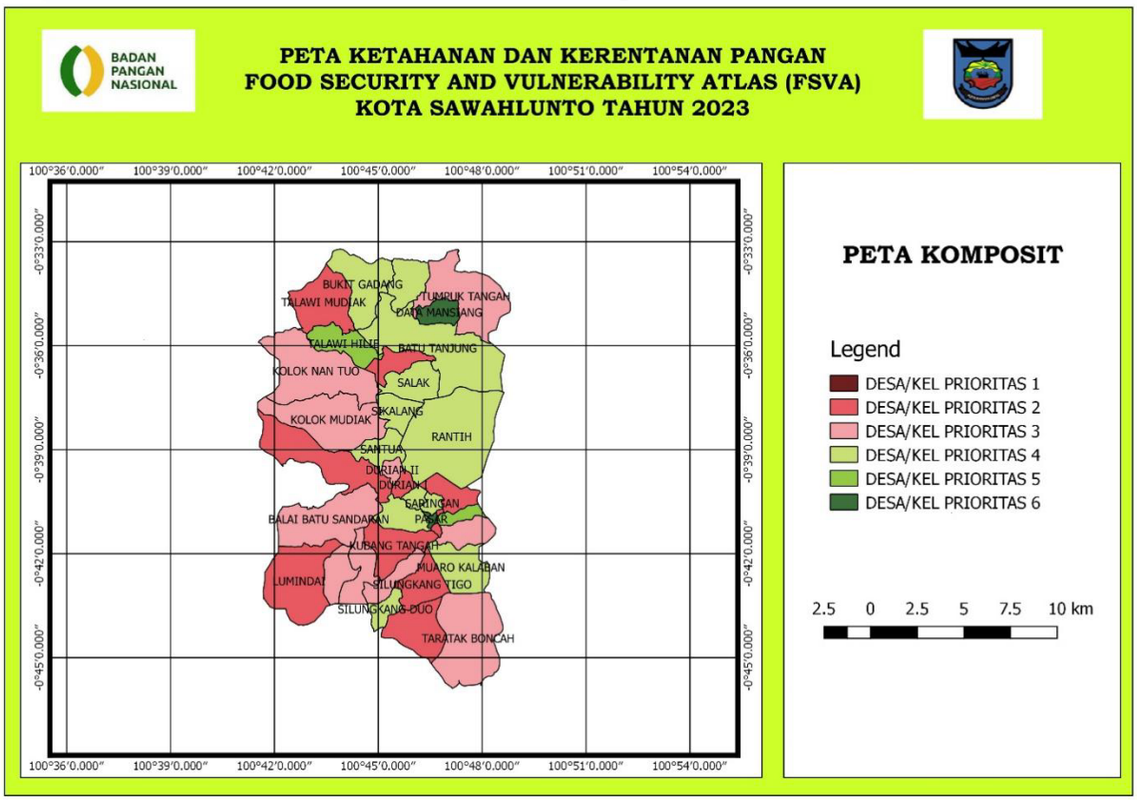
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah menetapkan cadangan pangan Nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan cadangan pangan Nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Keberadaan cadangan pangan pangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, perhitungan cadangan pangan pemerintah daerah pemerintah daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Untuk Kota Sawahlunto pengadaan cadangan pangan dalam bentuk penguatan cadangan pangan pada tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kota Sawahlunto yaitu berupa beras sebanyak 2 Ton, Seharusnya Kota Sawahlunto harus menyediakan Cadangan Pangan sebesar 26,48 ton setiap tahun dilihat dari kriteria dan kondisi Kota Sawahlunto dan baru dapat direalisasikan sebesar 2 Ton dan dalam penggunaan cadangan pangan ini harus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahunto Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga pada tahun 2022 hanya bisa menyediakan sebanyak 2 ton, disamping itu Sawahlunto juga memiliki sawah seluas 1.571 Ha dengan hasil produksi padi 17.733,35 Ton pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada dilaksanakan penguatan Cadangan Pangan tersebut karena Alokasi anggaran tidak mencukupi.

17. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam penanganan dan pencegahan daerah rawan pangan perlu adanya sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di Kota Sawahlunto daerah rawan pangan dapat diklasifikasikan berdasarkan peta berikut :

Gambar 2.2
Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2023

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa di kota Sawahlunto tidak ada daerah yang sangat rawan pangan (prioritas 1). Namun berdasarkan prioritas penanganannya daerah- daerah rawan pangan adalah sebagai berikut :

1. Desa- Desa prioritas 2, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara dan Kelurahan Tanah Lapang , Kelurahan AirDingin, Desa Kubang Tangah, Desa Silungkang Oso, Desa Silungkang Tigo, Desa Lumindai, Desa Talago Gunuang, Kelurahan Durian I, Desa Sijantang Koto, Desa Talawi Mudik ;
2. Desa- Desa prioritas 3, Desa Tumpuk Tengah, Desa Balai Batu Sandaran, Kelurahan Durian II , Desa Kolok Mudik , Desa Kolok Nan Tuo, Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur, Desa Pasar Kubang, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, dan Desa Taratak Bancah;
3. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 4, Desa Silungkang Oso, Desa Muaro Kalaban, Desa Silungkang Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Saringan, Kelurahan Lubang Panjang , Desa Sanutr , Desa Sikalang, Desa Rantih, Desa Salak, Desa Bukik Gadang, Desa Batu Tanjung, dan Desa Kumbayau.
4. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 5, Kelurahan Aur Mulyo, Desa Talawi Hilie.
5. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 6, Kelurahan Pasar dan Desa Datar Mansiang.

18. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian meliputi Tanaman pangan, Tanaman hortikultura, Tanaman perkebunan, Peternakan dan Jasa pertanian. PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kota Sawahlunto dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah)	325.395,50	326.254,20	345.211,69	383.096,89	410.681,37
Total PDRB (juta rupiah)	3.679,850,22	3.656.590,97	3.851.692,19	4.389.764,91	4.825.295,86
Rasio (%)	8,84	8,92	8,96	8,73	8,51

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas terlihat kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB selama tahun 2019-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Semakin rendah kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, mengindikasikan semakin menurun kinerja dan produktivitas sektor pertanian di Kota Sawahlunto.

19. Produksi Sektor Pertanian

Untuk Produksi Sektor Pertanian ini diwakilkan pada perkembangan tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Produktivitas Padi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tanaman padi GKG (Ton)	17.926	17.874,45	16.691,71	17.733,35	18.175,11
Luas panen (ha)	3.476	3.461,84	3.002,50	2.979,85	3.051,24
Produktifitas (ton/ha)	5,16	5,16	5,56	5,95	5,96

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2023

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktifitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, namun tahun 2020-2021 sedikit terjadi penurunan dikarenakan menurunnya luas panen, namun tidak mempengaruhi produktifitasnya dan Pada Tahun 2022 Produksi Tanaman Padi Juga Mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dan pada tahun 2023 ini juga mengalami peningkatan dinanding tahun 2022. Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya),

alsintan, sarana dan prasarana produksi. Adapun perkembangan luas sawah menurut jenis pengairan dari tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pengairan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Irigasi sederhana (ha)	762	738,5	693	693	693
2.	Sawah Tadah Hujan (ha)	918	941,5	878	878	878

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 2023

Dari tabel diatas Tahun 2023 tidak mengalami penambahan atau penurunan terhadap sawah tadah hujan dan ini juga terjadi terhadap jumlah sawah yang beririgasi sederhana, ini disebabkan karena tahun 2021 dimulai penghitungan secara detail mengenai luas sawah yang ada di Kota Sawahlunto dalam dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga didapat data untuk tahun 2023 seperti diatas, selain itu juga recofusing anggaran untuk covid ini menyebabkan pengurangan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sederhana di Kota Sawahlunto.

Untuk itu diharapkan tahun ke depannya kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari kegiatan lainnya, apalagi masa pandemic ini yang bisa berakibat terhadap kehidupan masyarakat terutama petani.

20. Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto.

a. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas areal tanam (ha)	2.446,23	2.420,23	2.389,23	2.393,03	2.386,44
Produksi (ton)	1.540,16	2.012,87	2.223,87	2.230,91	2.338,75
Produktivitas (ton/ha)	0,63	0,83	0,93	0,93	0,98

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2019-2023 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Secara keseluruhan luas areal tanam mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yang mana berbanding terbalik dengan jumlah produksi setiap tahunnya. Dari luas areal tanam karet yang ada, perlu revitalisasi terhadap tanaman karet dalam menambah luas area tanam untuk karet. Tahun 2023 belum menghasilkan, sehingga perlu perhatian lebih dimulai dari pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), pemeliharaan tanaman, proses panen , Pemeliharaan tanaman seperti Sanitasi Lahan dan Pemupukan Tanaman sesuai Anjuran Budidaya Tanaman Karet.

b. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, adapun perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.39
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas areal tanam (ha)	596,22	550,46	523,15	540,31	540,31
Produksi (ton)	565,73	566,11	572,44	588,80	590,85
Produktivitas (ton/ha)	**1,08**	**1,14**	**1,09**	**1,08**	**1.09**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2019-2023, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini sama, namun untuk produksi mengalami kenaikan produktifitas tanaman kakao pada tahun 2023 ini mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2023 ini tidak ada memberikan bantuan pupuk kepada penani kakau, karena keterbatasan anggaran dan pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2023 ini hanya ada petugas lapangan disetiap kecamatan yang bertugas untuk membantu petani dalam hal budidaya dan pemeliharaan kakao yang sesuai dengan aturan teknisnya dan untuk memberi kemudahan dalam meningkatkan produksi melalui Gerakan masal Pemangkasan dan Pemupukan Tanaman Kakao. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar, meskipun secara target sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

21. Produksi Sektor Kehutanan

Kota Sawahlunto yang mempunyai Luas Kawasan Hutan yang merupakan kewenangan Dishut Provinsi yaitu seluas 9.389,58 Ha (0,62%) dari total luas hutan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan dengan PP No 23 Tahun 2021 tentang menyelenggaraan kehutanan serta diimplementasikan dalam permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pegelolaan dan Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan pemungutan dan pemanfatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Pada tanggal 3 November 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan Kota Sawahlunto sebagai sentra madu Sumatera Barat. Kota Sawahlunto juga dijadikan *pilot project* untuk penelitian propolis berdasarkan penawaran kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sektor swasta yaitu PT. Nano Teknologi Jakarta. Selain itu Kota Sawahlunto juga pernah dilirik oleh eksportir swasta yang mempunyai jejaring luas hingga ke benua Amerika dalam mencari daerah yang mempunyai sumber produksi madu galo-galo dan produk sampingannya. Dengan adanya peluang-peluang tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto khususnya madu Kota Sawahlunto sebagai pemasok bahan baku produk madu.

Pengembangan lebah madu di Kota Sawahlunto dikelola oleh kelompok tani hutan (KTH) maupun perorangan yang tersebar di Kota Sawahlunto. Terdapat 12 Kelompok Tani Hutan yang terdaftar di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 6 KTH diantaranya sudah membudidayakan lebah madu antara lain :

- KTH Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin (Lebah Galo galo)
- KTH Dulur Sekapal Desa Santur Kecamatan Barangin (Lebah Galo galo)
- KTH Puncak Vila Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang (Lebah Galo galo)
- KTH Andesa Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin (Lebah Galo galo)
- Kelompok HKM Lurah Basuang Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi (Lebah Galo galo)
- KTH Kampung Madu Zam Zam Desa Pasar kubang Kecamatan Lembah Segar (Lebah Sengat)

Jumlah koloni lebah madu yang ada di Kota Sawahlunto baik yang kelompok maupun perorangan sampai tahun 2023 tercatat berjumlah 1.667 koloni, yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok lebah bersengat sebanyak 150 koloni, dan untuk kelompok Galo galo sebanyak 1.517 koloni. Data produksi Lebah besengat menghasilkan 480 kg/ bulan sedangkan untuk madu Galo galo menghasilkan produksi sebanyak 175,9/ bulan (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2023).

Potensi produktivitas lebah madu yang dihasilkan peternak dalam jangka panjang dengan telah dicanangkannya sebagai Sentra Madu di Sumatera Barat mempunyai peluang yang sangat besar dimasa yg akan datang. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah mengembangkan

kelompok-kelompok yang bisa menghasilkan produksi secara konsisten apabila akan memasuki pasar yang lebih besar.

22. Produksi Sektor Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan nilai tambah bagi pendapatan petani ternak di Kota Sawahlunto. Adapun yang menjadi target dari sektor peternakan adalah produksi daging dan produksi telur. Adapun perkembangan produksi daging seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Perkembangan Populasi Dan Produksi Daging
Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kambing					
	Populasi (ekor)	3.137	2.091	2.238	2.373	2.593
	Produksi Daging (kg)	11.700	12.500	2.750	14.450	12.050
2.	Sapi					
	Populasi (ekor)	6.705	5.679	5.427	4.866	4.953
	Produksi Daging (kg)	336.987	334.530	319.977	339.445	344.442
3.	Kerbau					
	Populasi (ekor)	1.420	1.033	968	958	940
	Produksi Daging (kg)	17.136,68	13.015,2	1.952,28	5.423,00	10.195,24

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari ternak kambing dan sapi mengalami peningkatan dilihat dari populasi dan produksi daging yang dihasilkan di tahun 2023 kecuali kerbau mengalami sedikit penurunan. Meningkatkan populasi ternak kambing karena Pemerintah daerah tahun 2023 sudah merealisasikan pemberian bantuan ternak kambing yang mana tahun 2023 terealisasi untuk 20 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2020 terealisasi untuk 87 KK yang mana masing-masing KK mendapat 3 ekor kambing. Namun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan bimbingan dan binaan dari OPD teknis yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan melalui penyuluh pertanian yang ada di Desa/Kelurahan setempat. Pada ternak sapi untuk meningkatkan populasi telah dilaksanakan kegiatan pengembangan Inseminasi Buatan (IB) yang mana pada tahun 2023 dengan realisasi jumlah kelahiran sapi dari IB 436 ekor yang tersebar di empat kecamatan di Kota Sawahlunto. Dilihat dari tingkat keberhasilan IB ini sangat perlu perhatian lebih dalam penanganan IB di Kota Sawahlunto untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di Kota Sawahlunto.

Selain ternak sapi, kerbau dan kambing di Kota Sawahlunto juga ada produksi daging dan telur unggas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Sawahlunto. Adapun perkembangan populasi dan produksi daging ternak dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 2.41
Perkembangan Ternak Unggas Populasi Ternak Produksi Daging
Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ayam Buras					
	Populasi (ekor)	46.033	47.065	50.197	50.004	49.870
	Produksi Daging (kg)	45.227,87	50.789	51.479,74	53.077,75	54.538,78
2.	Ayam Ras Pedaging					
	Populasi (ekor)	177.200	155.386	186.000	164.465	150.548
	Produksi Daging (kg)	849.589,42	825.370	932.691,43	935.287,42	827.804,20
3.	Daging Ayam Ras					
	Populasi (ekor)	17.869	23.048	32.776	47.829	46.374
	Produksi Daging (kg)	6.848,12	9,414	12.734,38	17.512,59	19.301,49
4.	Itik					
	Populasi (ekor)	7.440	18.654	20.971	18.872	16.898
	Produksi Daging (kg)	2.479.75	5.780	8.279,60	6.958,48	7.204,43

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dilihat dari tabel di atas perkembangan ternak unggas di Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2023, untuk ayam buras dan itik tahun 2023 mengalami penurunan jumlah populasi sedangkan produksi daging mengalami peningkatan, ini disebabkan karena adanya program dari pemerintah daerah bantuan ternak ayam dan itik untuk keluarga yang kurang mampu melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, yang mana tahun 2023 ternak ayam

untuk 6 Kelompok untuk kecamatan talawi dan barangin total sebanyak 3000 ekor sedangkan itik dibagikan untuk 1 Kelompok dikecamatan Talawi sebanyak 500 ekor.

Ternak yang dibagikan disertai dengan makanan ternak. Dalam pemeliharaan masyarakat mendapat bimbingan dari penyuluh peternakan yang ada di desa/kelurahan. Karena besarnya peranan peyuluh, maka Dinas sudah menyediakan kegiatan untuk peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain produksi daging, unggas juga menghasilkan telur.

23. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Hal ini terlihat dari sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan kontribusi sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (juta rupiah)	553.593,38	547.822,20	564.985,93	655.300,60	725.979,26
Total PDRB (juta rupiah)	3.679.850,22	3.656.590,97	3.851.692,19	4.389.764,91	4.825.295,86
Kontribusi (%)	**15,04**	**14,98**	**14,67**	**14,93**	**15,05**

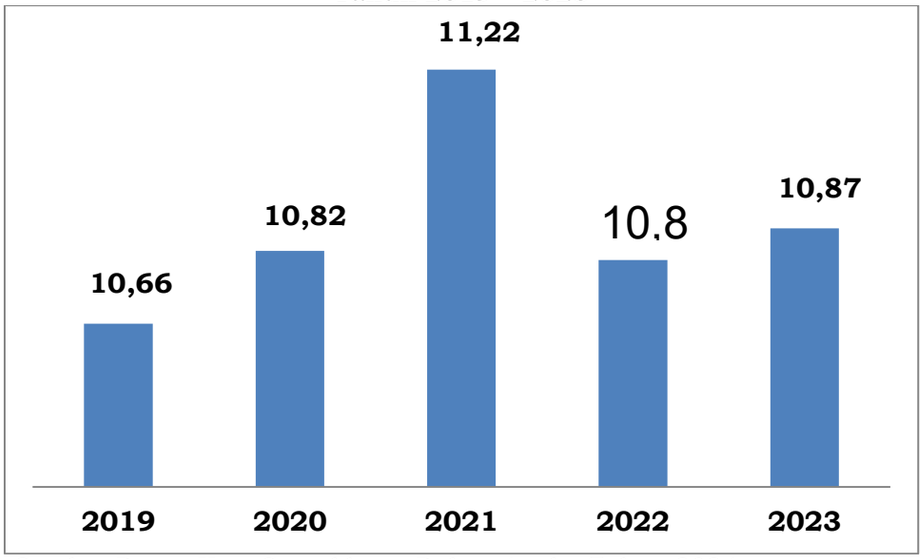
Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2019-2023 berkisar antara 14,67% hingga 15,05%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 15,05 % dan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 14,67 %. Penurunan kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi terjadi tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan dampak covid 19 yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena adanya pelarangan aktivitas di luar rumah, sehingga pasar menjadi sepi dan juga sebagai akibat maraknya transaksi online pada masa pandemi covid 19.

24. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Industri Pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.12
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2019 – 2023

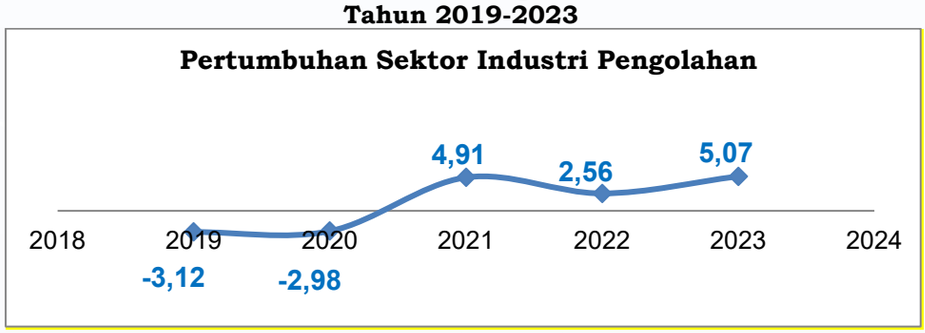


Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2024

Pada grafik di atas terlihat bahwa kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,22% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,66 %. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah yang dominan keempat setelah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 %), lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 %), lapangan usaha Kontruksi (10,98 %) dan lapangan usaha Industri Pengolahan (10,87 %).

Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh suatu lapangan usaha terhadap PDRB suatu daerah, semakin besar pula peranannya dalam meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berikut disajikan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto tahun 2019-2023.

Grafik 2.13
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pertumbuhan Industri Pengolahan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Pada Tahun 2019-2020 Industri Pengolahan tumbuh minus sebagai dampak pandemic Covid 19 karena adanya pembatasan aktivitas. Tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan yang signifikan pada industri pengolahan, dari -2,98 % tahun sebelumnya menjadi 4,91 %, hal ini sejalan dengan menggeliatkannya perekonomian setelah covid 19 usai. Namun pada tahun 2022 kembali terjadi pelambatan pertumbuhan industri pengolahan sebagai dampak melambatnya perekonomian global. Dan tahun 2023 pertumbuhan Industri Pengolahan kembali meningkat secara signifikan menjadi 5,07 persen. Dengan demikian perlu ditingkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga.

25. Pertumbuhan Industri

Untuk menghasilkan besar kecilnya kontribusi sektor perindustrian pada PDRB Kota Sawahlunto, salah satu faktor pendukungnya adalah pertumbuhan industri yang berkaitan dengan perkembangan jumlah unit usaha, nilai produksi dan bahan baku yang digunakan. Berikut perkembangan pertumbuhan industri yang ada di Kota Sawahlunto pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah unit Usaha (unit)	1.432	1.584	1.703	1.779	1.755
2	Nilai produksi (rupiah)	53.423.210.000	32.215.322.519	35.173.529.700	50.286.890.700	73.021.520.700
3	Bahan Baku (rupiah)	23.466.143.000	14.180.596.950	15.511.583.950	22.817.019.070	35.901.538.570

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari tabel pertumbuhan industri diatas maka dapat disimpulkan yaitu Pada jumlah unit Usaha terjadi peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah unit usaha mengalami penurunan dikarenakan beberapa jenis usaha mengalami penutupan. Untuk nilai produksi pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Penurunan yang paling signifikant terjadi pada tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi Virus Corona. Untuk Bahan Baku juga mengalami Fluktuatif dari Tahun 2019-2022. Ini dikarenakan transisi pandemi Virus Corona. Dan pada tahun 2023 Bahan Baku mengalami kenaikan yang signifikant. Kenaikan ini disebabkan oleh kebijkan kebijakan pemerintah daerah dalam membantu UMKM Kota Sawahlunto.. Pengaruh pasca covid 19 sedikit menganggu pedapatan dan usaha-usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk itu sangat perlu kebijakan daerah dalam membangkitkan kembali usaha industri setelah masa pandemi ini. Pembinaan-pembinaan yang intens pada usaha industri salah satu pembangkit semangat pengusaha dalam meningkatkan usahanya.

26. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kota Sawahlunto berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2019-2023. Berikut perkembangan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 :

Tabel 2.44
Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta rupiah)	82.406,43	75.255,42	84.016,91	97.528,6	107.222,77
Total PDRB (juta rupiah)	3.679.850,22	3.656.590,97	3.851.692,19	4.389.764,91	4.825.295,86
Kontribusi (%)	2,24	2,06	2,18	2,22	2,22

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto berfluktuasi. Pada tahun 2019 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto di atas 2,20%, namun tahun 2020 dan 2021 berada di bawah 2,20% dan tahun 2022-2023 kembali meningkat di atas 2,20%.

1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan pendapatan ditinjau dari pajak hiburan pada tahun 2021 tidak ada tetapi ada penambahan pendapatan ditinjau dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PAD dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	94.965.756	47.335.931	168.914.129	266.384.955	224.164.516
2	Pajak Restoran	532.945.719	477.464.758	617.303.460	993.108.403	899.703.543
3	Pajak Hiburan	109.485.500	1.650.000		61.170.000	66.241.500
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	682.737.000	516.801.000	436.895.000	847.974.000	726.647.000
5	PT.WWS	0	0			
6	Bagian Laba Hotel Parai	0	0			
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	1.500.000	3.600.000	7.750.000
	PAD Sektor Pariwisata	1.420.133.975	1.043.251.689	1.224.612.589	2.172.237.359	1.924.506.559
	Total PAD	57.171.093.865,09	59.537.385.897,66	51.470.645.905,45	65.778.630.408,26	59.943.839.179,64
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	**2,484**	**1,752**	**2,38**	**3.302**	**3,2**

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2023

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun perkembangan IPM Kota Sawahunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
IPM Kota Sawahlunto	72.39	73,97	74,35	75,21	75,91	1,22
IPM Provinsi Sumatera Barat	72.39	74,29	74,56	75,16	75,64	1,12
IPM Nasional	71.92	72,81	73,16	73,77	74,39	0,86

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

IPM Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan, dari 72,39 tahun 2019 menjadi 75,91 tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,22 %, angka ini sudah melampaui IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dan berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, IPM Kota Sawahlunto masuk kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80). Hal ini merupakan hasil berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya penduduknya. Penyumbang kenaikan IPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 berasal dari semua indikator pembentuk IPM, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran per Kapita yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada tabel di bawah ini disajikan IPM dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.47
Peringkat IPM Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
Kota Padang	83,98	1
Kota Bukittinggi	81,88	2
Kota Payakumbuh	80,14	3
Kota Padang Panjang	79,76	4
Kota Pariaman	79,76	5
Kota Solok	79,66	6
Kota Sawahlunto	75,91	7
Kab. Tanah Datar	75,57	8
Kab. Padang Pariaman	74,54	9
Kab. Agam	74,44	10
Kab. Dharmasraya	73,87	11
Kab. Sijunjung	72,30	12
Kab. Pesisir Selatan	72,24	13
Kab. Solok Selatan	72,24	14
Kab. Lima Puluh Kota	72,05	15
Kab. Pasaman Barat	72,03	16
Kab. Solok	71,92	17
Kab. Pasaman	69,85	18
Kab. Kepulauan Mentawai	65,79	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Peringkat IPM Kota Sawahlunto Tahun 2023 berada pada posisi ke-7 dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Adapun perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
RLS Kota Sawahlunto	9.97	10.17	10.32	10.43	10.44	1.18
RLS Provinsi Sumatera Barat	8.92	8.99	9.07	9.18	9.28	1.01
RLS Nasional	8.34	8.48	8.54	8.69	8.77	1.29

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Dari tabel di atas, angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,18%. RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebesar 10,44 yang menunjukkan rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto telah dapat menempuh bangku kelas II SMA, dan telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Nilai RLS Kota Sawahlunto lebih tinggi dari RLS Provinsi Sumatera Barat dan RLS Nasional dan menduduki peringkat ke 7 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Kabupaten/Kota	RLS (Tahun)	Peringkat
Kota Padang Panjang	11,94	1
Kota Bukittinggi	11,64	2
Kota Padang	11,62	3
Kota Solok	11,36	4
Kota Payakumbuh	10,88	5
Kota Pariaman	10,79	6
Kota Sawahlunto	10,44	7
Kab. Agam	9,22	8
Kab. Tanah Datar	9,02	9
Kab. Pasaman Barat	8,81	10
Kab. Dharmasraya	8,71	11
Kab. Solok Selatan	8,69	12
Kab. Pesisir Selatan	8,58	13
Kab. Sijunjung	8,57	14
Kab. Padang Pariaman	8,41	15
Kab. Pasaman	8,13	16
Kab. Lima Puluh Kota	8,12	17
Kab. Solok	7.90	18
Kab. Kepulauan Mentawai	7,76	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Beberapa indikator yang mempengaruhi RLS adalah : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya. Semua indikator ini perlu terus ditingkatkan tiap tahun untuk menaikkan RLS dan IPM.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Adapun perkembangan HLS kota Sawahunto pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
HLS Kota Sawahlunto (Tahun)	13.16	13.17	13.18	13.42	13.69	1,01
HLS Provinsi Sumatera Barat (Tahun)	14.01	14.02	14.09	14.10	14.11	0.18
HLS Nasional (Tahun)	12.95	12.98	13.08	13.10	13.15	0.39

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Selama periode 2019-2023, rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto sebesar 1,01 % per tahun. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahun menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,69 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,42 tahun. Berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2023, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,69 tahun atau menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun kedua dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan/tidak ada perubahan berarti.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.51
Peringkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	HLS (Tahun)	Peringkat
Kota Padang	16,56	1
Kota Padang Panjang	15,29	2
Kota Bukittinggi	15,01	3
Kota Pariaman	14,79	4
Kab. Tanah Datar	14,78	5
Kota Solok	14,36	6
Kota Payakumbuh	14,30	7
Kab. Padang Pariaman	14,19	8
Kab. Agam	13,89	9
Kab. Pasaman Barat	13,70	10
Kota Sawahlunto	13,69	11
Kab. Solok	13,55	12
Kab. Lima Puluh Kota	13,41	13
Kab. Pesisir Selatan	13,36	14
Kab. Pasaman	13,25	15
Kab. Kepulauan Mentawai	12,90	16
Kab. Solok Selatan	12,80	17
Kab. Sijunjung	12,72	18
Kab. Dharmasraya	12,68	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Posisi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto tahun 2023 berada pada peringkat ke 11 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Perlu upaya maksimal seluruh pihak untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan di Sawahlunto.

4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selama periode 2019 hingga 2023, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup rata-rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Adapun perkembangan Usia Harapan Hidup kota Sawahunt adalah sebagai berikut :

Tabel 2.52
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
UHH Kota Sawahlunto (Tahun)	69.87	72,81	73,20	73,50	73,79	0,33
UHH Provinsi Sumatera Barat (Tahun)	69.31	73,50	73,60	73,88	74,14	0,21
UHH Nasional (Tahun)	71.34	73,37	73,46	73,70	73,93	0,19

Sumber Data : Berita Resmi Statistik 2024

Pada tahun 2019, Usia Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,87 tahun, dan pada tahun 2023 telah mencapai 73,79 tahun. Usia Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2023 memiliki usia harapan hidup 73,79 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 73,50 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Usia Harapan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2020 - 2023 lebih rendah dari Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.53
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	Peringkat
Kota Bukittinggi	75.33	1
Kota Payakumbuh	74.77	2
Kota Padang	74.94	3
Kota Solok	74.56	4
Kota Padang Panjang	74,24	5
Kab. Agam	74,22	6
Kota Pariaman	74,20	7
Kab. Tanah Datar	74,19	8
Kab. Dharmasraya	74,04	9
Kota Sawahlunto	73,79	10
Kab. Padang Pariaman	73,77	11
Kab. Pesisir Selatan	73,27	12
Kab. Lima Puluh Kota	73,25	13
Kab. Sijunjung	72,59	14
Kab. Pasaman Barat	72,44	15
Kab. Solok	72,31	16
Kab. Solok Selatan	72,22	17
Kab. Pasaman	72,04	18
Kab. Kepulauan Mentawai	71,06	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2023 berada pada peringkat ke-10 (Sepuluh) dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

5. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.10,829 ribu per orang tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh rata-rata sebesar 1,44 % per tahun. Berikut perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Sawahunto selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.54
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto (Ribu Rupiah)	10.238	10.182	10.195	10.537	10.829	1,44
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat (Ribu Rupiah)	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380	1,04
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Nasional (Ribu Rupiah)	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899	1,33

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024
Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran Per Kapita Nasional.

Berikut Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan dengan delapan belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.55
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	Peringkat
Kota Padang	15.089	1
Kota Payakumbuh	13.978	2
Kota Bukittinggi	13.859	3
Kota Pariaman	13.355	4
Kota Solok	12.709	5
Kab. Dharmasraya	11.901	6
Kab. Padang Pariaman	11.432	7
Kota Padang Panjang	11.310	8
Kab. Sijunjung	11.018	9
Kab. Tanah Datar	10.905	10
Kab. Solok Selatan	10.884	11
Kota Sawahlunto	10.829	12
Kab. Solok	10.717	13
Kab. Agam	10.402	14
Kab. Lima Puluh Kota	10.285	15
Kab. Pesisir Selatan	9.953	16
Kab. Pasaman Barat	9.538	17
Kab. Pasaman	8.908	18
Kab. Kepulauan Mentawai	6.891	19

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah dibandingkan enam kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun jika dibandingkan dengan delapan belas kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto berada posisi ke 12 (dua belas).

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari perkembangan jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Sawahlunto setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Group Kesenian Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	47	38	38	35	38
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	62,52	65,14	65,69	65,69	68,34
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,75**	**0,58**	**0,58**	**0,53**	**0,55**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan group kesenian dari lima tahun terakhir mengalami penurunan yang mana tahun 2022 menjadi 35 group kesenian tetapi tahun 2023 kembali terjadi kenaikan menjadi 38 group Adapun penurunan ini terjadi disebabkan terjadinya penurunan anggaran pada seluruh OPD Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 35 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 7 grup kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.57
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	12	20	20	20	19
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	62,52	65,14	65,69	66,41	67,76
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,19**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,28**

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (*indoor*) sebanyak 7 tempat dan luar ruangan (*outdoor*) 12 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda yang saat ini juga tidak bisa digunakan karena musibah kebakaran pada tanggal 03 November 2022 yang lalu. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertujukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sawahlunto dalam rangka mendukung prestasi olahraga di Kota Sawahlunto seperti salah satunya gedung olahraga, dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota SawahluntoTahun 2019-2023

No	Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Klub Olahraga	75	93	93	95	97
2.	Jumlah Gedung Olahraga	11	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gedung olahraga dari 11 unit menjadi 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak

termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga. Sedangkan untuk klub olahraga di Kota Sawahlunto terjadi peningkatan yang disebabkan banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti setiap cabang olahraga yang ada.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.59
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	**Pendidikan**						
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	78,76	93,27	100	100	100
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	85,99	92,09	100	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85,05	56,70	70,64	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019 - 2023 terus mengalami peningkatan dan telah dapat mencapai angka 100%. Demikian juga halnya dengan Bidang Pendidikan Dasar yang terus mengalami peningkatan dari 2019-2023 dan telah mencapai 100%. Kemudian pada bidang Pendidikan Kesetaraan, Pencapaian SPM berfluktuasi, namun dua tahun terakhir sudah dapat terlaksana hingga 100%.

Dalam mendukung pencapaian SPM, Dinas Pendidikan telah melaksanakan inovasi, seperti tabel dibawah :

Tabel 2.60
Tabel Inovasi Dinas Pendidikan
Tahun 2023

No	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI
1	ELEARNING DISDIK (Refreshment Regulasi Pegawai Dan Ujian Sekolah)	Pelayan Publik
2	DASHDIK (Dashboard PTIK Disdik)	Pelayan Publik
3	PPDB (Penerima Peserta Didik Baru) ONLINE	Pelayan Publik
4	KADIF (KomunitAs DesaIn Grafis)	Pelayan Publik
5	WEDIS (Web And Android SMA)	Pelayan Publik
6	SORTICS (Software Robotic Pelajar SMP)	Pelayan Publik
7	Disdik Innovation Award	Inovasi bentuk Lainnya
8	GURU INGGRIS (Translate Buku Karya Guru Ke Bahasa Inggris)	Pelayan Publik
9	SALJU ABADI (Sawahlunto Jurnal Dan Karya Ilmiah Pengabdian)	Pelayan Publik
10	SAWAHLUNTO POST (Majalah Digital Disdik Berbentuk PDF)	Pelayan Publik
11	Podcast Disdik	Pelayan Publik
12	PELAYAN (Pelatihan Layanan Receptionist Dan Unit Lainnya Sekali Seminggu Seusai Apel Pagi)	Inovasi bentuk Lainnya
13	PELURU (Penjualan Buku Karya Guru Online)	Inovasi bentuk Lainnya
14	UBI JALAR (UMKM Berbasis Sekolah Untuk Pelajar SD SMP)	Inovasi bentuk Lainnya
15	COCOCIP (Coding Kids Course Kecerdasan Ilmu Pemrograman SD di Sawahlunto)	Pelayan Publik
16	CLINIC DISDIK (Klinik Solusi Permasalahan IT Dinas Pendidikan)	Pelayan Publik
17	CHECKLIST CLEAN (Cekricek Sekali Seminggu Kebersihan Kantor)	Inovasi bentuk Lainnya
18	PERFECTO (Pendidikan Non Formal Edukasi Percontohan Di Lapas Kota Sawahlunto)	Pelayan Publik
19	GETUK (Gerakan Tukar Buku Antar Siswa Bisa Dengan Pinjam Pustaka Atau Pribadi Sekali Sebulan)	Inovasi bentuk Lainnya

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

2. Persentase Lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30

Salah satu indikator kinerja daerah adalah Persentase lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30. Adapun perkembangan siswa Sekolah Dasar yang lulus minimal Juz 30 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.61
Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30
Tahun 2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Persentase Lulusan SD Yang Hafiz Alquran Juz 30 (%)	12	15	21,5	30

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020-2023 terjadi peningkatan jumlah murid lulusan SD yang mampu menghafal Al Quran Juz 30.

3. Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (*Numerasi Literasi Minimum*)

Assesment Nasional adalah Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ini adalah alat ukur keberhasilan sekolah sebagai pengganti dari Ujian Nasional yang selama beberapa tahun kebelakang ini dilaksanakan. Adapun perkembangan dari Nilai Assesment Kompetensi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62
Nilai *Assesment* Kompetensi (Numerasi dan Literasi Minimum)
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata nilai ujian UN SD	7,41	7,42	-	-	-
2	Rata rata nilai ujian UN SMP	5,53	5,55	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SD	-	-	56	44,97	68,80
4	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	-	60,67	51,05	57,52
3	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SD	-	-	65,67	81,49	83,87
4	Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	-	68,67	80,28	80,10

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Indikator rata-rata nilai ujian SD dan SMP hanya digunakan sampai tahun 2020. Mulai tahun 2021 kedua indikator tersebut tidak digunakan lagi karena ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan, sebagai gantinya digunakan inkator kinerja “persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi dan literasi minimum)” tingkat SD dan SMP dengan rentang nilai 1- 100.

Selama rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 capaian Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi dan literasi minimum) SD dan SMP bervariasi. Untuk Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SD berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sedangkan Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Selanjutnya untuk nilai Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SD memiliki kecenderungan meningkat, sementara nilai Persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (Literasi minimum) SMP berfluktuasi dengan kcenderungan menurun. Dalam upaya meningkatkan nilai literasi dilakukan peningkatan pembelajaran berbasis *Assesmen*t Kompetensi Minimum (AKM) melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam menyusun dan mengolah soal AKM.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi

syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan APK di Kota Sawahlunto yaitu:

Tabel 2.63
Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%)	60,52	61,24	59,35	83,47	89,62

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2022

Sesuai dengan Permendikbud nomor 32/2022 pasal 13 ayat 1, APK PAUD tidak lagi diukur mulai tahun 2023. APK hanya untuk tingkat SD dan SMP. Berikut adalah data jumlah murid PAUD Kota Sawahlunto :

Tabel 2.64
Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023 (%)

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Siswa PAUD	2.842	2.741	2.833	2.655	2.724

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Sawahlunto tahun 2019 - 2023 mengalami fluktuasi setiap tahun. Bayak faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ini, diantaranya seperti : motivasi siswa dan orang tua, jarak rumah siswa dengan sekolah, usia siswa, faktor ekonomi dan kesehatan siswa.

Tabel 2.65
Angka Partispasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SMP
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Angka partisipasi kasar (APK)(%)					
1	SD / MI	108,96	112,44	108,67	110,24	106,90
2	SMP / MTs	92,57	84,76	93,75	105,42	97,01

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2023

5. Angka Partispasi Murni (APM)

Angka Partisipas Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang Pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM di Kota Sawahlunto dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66
Angka Partispasi Murni (APM)
Tahun 2019 – 2023 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD / MI	99,66	99,38	99,44	99,03	90,17
2	SMP / MTs	82,94	81,46	82,87	82,94	80,29

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2023

APM Kota Sawahlunto untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2019 - 2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2023, APM SD/MI sebesar 90,17% berarti bahwa penduduk umur 7 - 12 tahun telah bersekolah SD/MI tepat waktu sebanyak 90,17%. Untuk APM jenjang SMP/MTs sebesar 80,29% berarti bahwa penduduk Sawahlunto umur 13 - 15 tahun telah bersekolah SMP/MTs tepat waktu sebanyak 80,29%. Dengan belum tercapainya angka 100% berarti masih perlu upaya maksimal pemerintah Kota dan seluruh stake holder terkait mendorong tingginya minat masyarakat untuk sekolah.

6. Angka Partispasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui

cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2019-2023 :

Tabel 2.67
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto
Tahun 2019–2023

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2019	99,66	97,95	81,79
2.	2020	99,73	97,44	82,64
3.	2021	99,94	97,67	82,99
4.	2022	99,03	98,03	95,98
5	2023	99,22	97,08	96,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi pada setiap kelompok umur. Hal ini dapat dipengaruhi oleh PDRB, tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah sekolah. Dalam meningkatkan nilai APS ini, pemerintah telah mengupayakan pemberian bantuan beasiswa (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan & rehab sarana prasarana & utilitas sekolah.

7. Rasio Murid dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersedian kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.68
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1.200	1.335	1.335	898	942
1.2	Jumlah Kelas	99	89	71	63	77
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	12,12:1	18,80:1	18,80:1	14,25:1	12,23 : 1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	6.727	7.247	7.064	6233	6848
2.2	Jumlah Kelas	378	400	386	396	412
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,11 : 1	17,45 : 1	18,30:1	15,74:1	16,62 : 1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2.930	3.527	3.275	2355	3314
3.2	Jumlah Kelas	130	130	152	93	133
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	22,53:1	22,53:1	21,55:1	25,32:1	24,92 : 1

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat terjadi penurunan jumlah murid per kelas pada tahun 2022 ke 2023, dengan arti jumlah murid per kelas sudah mencapai posisi ideal menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Hal ini disebabkan oleh penambahan ruang kelas dalam mengimbangi pertambahan jumlah murid di tiap tingkat pendidikan. Berikut adalah rasio jumlah murid terhadap kelas menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.69
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas
Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

8. Persentase Sekolah yang Berakreditasi A

Akreditasi adalah proses evaluasi serta penilaian kualitas sebuah institusi yang dilaksanakan oleh tim ahli yang disebut sebagai *assessor* berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Persentase sekolah berakreditasi di Kota Sawahlunto dibedakan antara sekolah SD dengan SMP.

Tabel 2.70
Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah SD/MI Berakreditasi A	42	41	41	40	41
2	Total Jumlah SD/MI	65	67	67	67	67
3	Persentase SD/MI Berakreditasi A	64,62	61,19	61,19	59.70	61,19

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tahun 2022 nilai akreditasi turun menjadi 59,70 % dikarenakan ada sekolah yang tidak memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar akreditasi. Namun kembali meningkat pada tahun 2023.

Tabel 2.71
Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah SMP/MTs Berakreditasi A	2	2	2	3	3
2	Total Jumlah SMP/MTs	14	15	15	15	15
3	Persentase SMP/MTs Berakreditasi A	14,28	13,33	13,33	20	20

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tahun 2019-2023 terjadi peningkatan jumlah sekolah yang naik status akreditasinya menjadi A. Namun demikian secara keseluruhan, persentase sekolah berakreditasi A masih sedikit. Perlu upaya maksimal seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas semua aspek pendidikan yang ada disekolah agar terjadi peningkatan nilai akreditasi sekolah di Sawahlunto.

9. Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur formal, non formal dan informal. Adapun kualitas dari lembaga PAUD yang ada di kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72
Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi	76	70	70	102	104
2	Total Jumlah Lembaga PAUD	88	87	87	119	124
3	Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi	86,36	80,46	80,46	80,71	83,87

Sumber Data: Profil Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Data Persentase Lembaga PAUD berakreditasi pada tahun 2019 berjumlah 86,36 %. Mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 80,46 %, karena ada lembaga PAUD yang sudah tutup sehingga mengurangi persentase PAUD yang berakreditasi. Sampai tahun 2023

jumlah PAUD yang berakreditasi meningkat menjadi 83,87%. Karena beberapa lembaga PAUD yang belum terakreditasi dilakukan visitasi oleh BAH PAUD Provinsi Sumatera Barat.

10. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.73
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**SD**					
	Ikut Ujian	1139	1050	1065	1076	1065
	Lulus Ujian	1139	1050	1065	1076	1065
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	**MI**					
	Ikut Ujian	80	323	90	90	106
	Lulus Ujian	80	323	90	90	106
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	**SMP**					
	Ikut Ujian	851	783	758	818	758
	Lulus Ujian	851	783	756	816	758
	Persentase (%)	100	100	99,73	99,75	100
4.	**MTs**					
	Ikut Ujian	192	252	258	258	258
	Lulus Ujian	192	252	258	258	258
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 tingkat kelulusan siswa SD dan MI di Kota Sawahlunto mencapai 100%. Pada tingkat SMP kelulusan siswa meningkat dari 99,73% tahun 2021 menjadi 100% sampai tahun 2023.

11. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.74
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 (%)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	11	0	0	0	0
1.2	Jumlah Murid	7.247	7.122	7.064	6233	6110
1.3	Angka Putus sekolah	0,03	0	0	0	0
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	5	38	0	0	0
2.2	Jumlah Murid	3.338	3.527	2.833	2355	2481
2.3	Angka Putus sekolah	0,15	1,07	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Angka putus sekolah pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sudah tidak ada lagi anak putus sekolah. Angka putus sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan putus sekolah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, kurang perhatian dari orang tua, tidak adanya kemauan dari anak untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan anak untuk bersekolah.

12. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dapat dilihat dari jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat atasnya, adapun perkembangan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah setelah kelulusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.208	1.373	1.137	786	879
2	Jumlah Lulusan pada jenjang SD tahunajaran sebelumnya	1.156	1.126	1.115	1065	1064
3	Angka Melanjutkan (%)	104,50	121,94	101,97	73,80	82,61

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Angka melanjutkan pada tingkat SMP mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022-2023 angka melanjutkan berada dibawah 100%, hal ini disebabkan banyaknya anak SD/MI yang melanjutkan sekolah di luar Kota Sawahlunto.

13. Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik

Sekolah dalam kondisi baik sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Secara keseluruhan keadaan kondisi sekolah yang ada di Kota Sawahlunto seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.76
Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	JumlahKelas SD/ MI dalam Kondisibaik	151	41,03	91	23,7	92	23,83	392	99,74	412	99,28
2	JumlahKelas SD/ MI dalam kondisi rusak ringan	189	51,36	293	76,3	294	76,16	1	0,25	3	0,72
3	JumlahKelas SD/ MI dalam kondisi rusak sedang	27	7,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JumlahKelas SD/ MI dalam kondisirusak berat	1	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Total Jumlah Kelas SD/ MI**	**368**	**100**	**384**	**100**	**386**	**100**	**393**	**100**	**415**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Sejak tahun 2019-2023, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas ruang kelas SD/MI. Dimana pada tahun 2019, persentase ruang kelas dalam kondisi baik sekitar 41,03%. Diakhir tahun 2023 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sudah sebanyak 99,28%. Sedangkan keadaan kondisi sekolah untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.77
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%)

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	JumlahKelas SMP/ MTS dalamKondisi baik	60	55,05	60	39,47	60	39,47	64	42,11	133	97,79
2	JumlahKelas SMP/MTS Dalamkondisi rusak ringan	49	44,95	92	60,53	92	60,53	88	57,89	3	2,21

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
3	JumlahKelas SMP/MTS dalam kondisi rusaksedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JumlahKelas SMP/MTS dalam kondisi rusak berat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5	**Total Jumlah Kelas SMP/ MTS**	**109**	**100**	**152**	**100**	**152**	**100**	**152**	**100**	**136**	**100**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas kondisi baik juga mengalami peningkatan kualitas sejak tahun 2020-2023. Dari 39,47% ditahun 2021 menjadi 97,79% di akhir 2023. Perbaikan ruang kelas dengan memanfaatkan anggaran dari pusat dan daerah.

14. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Definisinya adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Interpresetasinya adalah rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia dasar. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Sawahlunto seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.78
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah (jumlah TK,RA, Paud)	131	131	124	124	124
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	3.404	3.394	3.394	3.394	2.228
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	1:25,98	1:25,91	1:27,37	1:27,37	1 : 17,97
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	64	67	67	67	67
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	7.222	7.122	7083	7083	7013
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:112,84	1:106,30	1:105,72	1:105,72	1 : 104,67
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	14	15	15	15	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3.532	3.602	3.561	3.561	3.569
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:252,2	1:240,13	1:237,4	1:237,4	1 : 237,93

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Dari rasio ketersediaan sekolah diatas diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat Pendidikan TK termasuk didalamnya paud mengalami penurunan di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya jumlah penduduk kelompok umur 5-6 tahun. Sementara untuk tingkat SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah cenderung stabil di tiga tahun terakhir.

15. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio Guru dan Murid di Kota Sawahlunto terihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	594	400	399	399	399
1.2	Jumlah Murid	2.200	2.913	2.833	2.833	2.724
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:3,70	1:7,28	1;7,10	1;7,10	1 : 6,83
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	428	579	600	539	910
2.2	Jumlah Murid	7.247	7.122	7.064	6235	6.669
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:16,93	1:12,30	1:11,77	1:11,56	1 : 7,33
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	322	320	320	264	332
3.2	Jumlah Murid	3.338	3.527	3.275	2262	3.314
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:10,36	1:11,02	1:10,23	1: 8,56	1 : 9,98

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Selama kurun waktu 2019–2023 rasio ketersediaan guru di berbagai tingkat pendidikan mengalami perubahan setiap tahun. Untuk tahun 2023, ketersediaan guru terhadap murid pada jenjang pendidikan TK adalah 1 guru melayani 6-7 murid TK. Tingkat SD/MI, 1 guru melayani 7-8 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 9-10 murid SMP/MTs.

16. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/D IV

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1, sehingga mendorong peningkatan kualifikasi guru. Jumlah guru Kota Sawahlunto yang memenuhi Kualitas S1/D- IV sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.80
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Guru Yang memenuhi kualitas SI/D IV	953	1.020	971	971	1.366
2	Total Guru	1.344	1.299	1.319	1.202	1.641
3	Persentase Guru yang memenuhi Kualitas SI/D IV(%)	70,91	78,52	73,34	73,34	83,24

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2023

Jumlah guru yang memenuhi kualitas S1/DIV tahun 2023 mengalami peningkatan karena bertambahnya jumlah guru. Tahun 2021 persentase menurun menjadi 73,34%. karena meningkatnya jumlah guru dan guru yang memenuhi kualifikasi ada yang pindah serta pensiun.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait bidang Kesehatan, untuk tahun 2019-2023 diperoleh fluktuasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	64,6	67,66	71,70	72,28	69,03
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	75,54	76,78	79,90	79,11	77,23
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	79,49	79,68	83,66	82,25	80,18
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	74	76	74,6	89,50	88,73
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	100	100	68,36	100	94,24
6	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	86,23	76,05	49,83	52,29	78,65

7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	38,11	46,66	44,5	54,38	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	39,49	16,72	7,95	32,39	45,52
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	60,34	88,06	50,59	76,89	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	100	150	100	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	27,14	13,1	26,03	52,30	81,14
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20 ditambah Persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan dasar sebesar 80	30,83	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yaitu bidang kesehatan dari 12 indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan mengalami peningkatan dari pencapaian indikator tahun sebelumnya.

2. Kasus Stunting Balita

Pencegahan stunting dilakukan agar anak-anak Indonesaia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi ditingkat global. Pemerintah Kota Sawahlunto juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting, terbuktinya dengan menurunnya kasus stunting di dua tahun terakhir ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

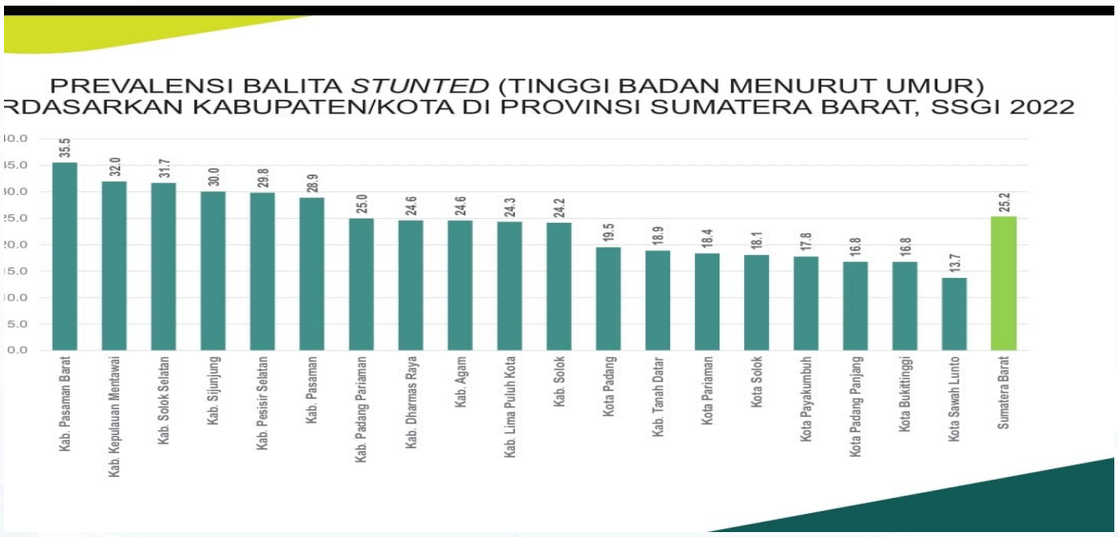
Tabel 2.82
Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

NO	PUSKESMAS	2019	2020	2021	2022	2023
1	Talawi	6,6	8,0	7,5	5,7	3,2
2	Kolok	19,7	13,3	7,3	8,6	9,0
3	Sungai Durian	7,2	3,3	1,7	1,7	1,7
4	Kampung Teleng	3,3	4,3	4,4	3,8	3,2
5	Lunto	16,0	11,8	12,2	11,9	12,7
6	Silungkang	21,7	10,3	5,6	5,6	5,7
	KOTA	**11,1**	**8,0**	**6,1**	**5,6**	**4,6**

Sumber Data: E-PPGBM, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2023

Prevalensi kasus Stunting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 berjumlah 11,1% ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola Asuh, faktor Perilaku, faktor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konseling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2022 persentasi kasus stunting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 5,6 %. Dan pada tahun 2023 Jumlah kasus stunting di Kota Sawahunto dapat ditekan menjadi 4,6%.

Grafik 2.14
Prevalensi Balita Stunted Berdasarkan Kab/Kota Di Sumatera Barat



Sumber: SSGI 2022, BKKBN 2023

Berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Nasional) Prevalensi Balita Stunted di Kota Sawahlunto mengalami penurunan.Pada tahun 2021 Prevalensi stunting di Kota Sawahlunto sebesar 21,1 %. Menurun menjadi 13,7 % pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Kota Sawahlunto daerah terendah Prevalensi Stunting di Sumatera Barat, serta telah mencapai target nasional yang pada tahun 2024 adalah 14 %, sedangkan Kota Sawahlunto telah mencapai 13,7 % pada tahun 2022.

Upaya kovergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Progaram dan Kegiatan. Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistim Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Pulikasi Stunting, Melakukan Evalusi Stunting untuk memastikan :

a. Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
b. Intervensi gizi yang diperioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukan pada perencanaan dan penganggaran
c. Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
d. Melakukan Sistim manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
e. Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

3. Jumlah Kasus Kematian Balita

Jumlah kasus kematian balita adalah jumlah kasus kematian balita pada usia 0-59 bulan. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian balita ini berjumlah 16 orang. 13 diantaranya dibawah usia 1 tahun yang termasuk juga bayi. Sedangkan usia diatas 1 tahun berjumlah 3 orang. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 23 orang. Angka kematian balita dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mati dengan angka kelahiran hidup, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.83
Jumlah kematian Balita Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kasus Kematian Balita	27	21	16	23	16

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2023

Jumlah kematian balita di Kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian balita ada sebanyak 27 orang. Sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 21 orang. Begitu juga pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 16 orang. Pada pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi menjadi 23 orang. Pada tahun 2023 jumlah kematian balita menurun lagi menjadi 16 orang.

4. Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan RSUD

Persentase cakupan ayanan rujukan di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik dengan capaian 100 persen setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio daya tampung Rumah Sakit persatuan penduduk jumlahnya dari tahun 2018 adalah 0,0023. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,155. Persentase Rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi maka nilainya adalah utama. Sedangkan indikator Rumah Sakit terakreditasi adalah 100 %. Apabila dilihat secara keseluruhan maka indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan RSUD ini telah mencapai target yang diharapkan.

Tabel 2.84
Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	95	100
2.	Rasio daya tampung rumah sakit per satuan penduduk	0,0022	0,0016	0,155	0,0016	0,0015
3.	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	utama	utama	utama	utama	paripurna
4.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

5. Angka kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 2.85
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	22	19	13	18	16

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2023

Jumlah kematian Bayi di Kota Sawahlunto tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi 22 orang menurun menjadi 19 orang pada tahun 2019. Dan menurun pada tahun 2021 menjadi 13 orang dan naik lagi tahun 2022 menjadi 18 orang. Pada tahun 2023 telah menurun lagi menjadi 16 orang. Adanya angka kematian bayi ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilan ke petugas Kesehatan, sehingga jika ditemukan resiko tinggi lainnya tidak terdeteksi secara Dini.

6. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cidera.

Tabel 2.86
Jumlah Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Puskesmas	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Talawi	2	0	1	1	0
2.	Kolok	1	1	0	0	0
3.	Sungai Durian	0	0	0	1	0
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	0	1	0	0	0
	Jumlah Kematian Ibu	3	2	1	2	0

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Dari tabel diatas angka kematian ibu di Kota Sawahlunto di tahun 2019 terjadi angka kematian ibu sebanyak 3 orang, 2 orang di kecamatan Talawi dan 1 orang di Kecamatan Barangin dan ditahun 2020 angka kematian Ibu sebanyak 2 Orang, 1 orang di Kecamatan Barangin dan 1 orang di Kecamatan Silungkang, Dan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang. 1 orang di kecamatan Talawi yang disebabkan karena pendarahan dan pada tahun 2022 angka kematian meningkat menjadi 2 orang yaitu 1 orang di kecamatan Talawi dan 1 orang di Kecamatan barangin. Pada tahun 2023 tidak ada kasus kematian ibu.

Tabel 2.87
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kematian Ibu	3	2	1	2	0
2	Jumlah Kelahiran Hidup	980	973	970	894	861
3.	Angka Kematian Ibu	306,12	205,55	103,09	233,71	0

Dari tabel diatas diperoleh angka berdasarkan rumus metadata yaitu Angka Kematian Ibu diperoleh dari jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran ibu dikali 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup di Kota Sawahlunto tidak sampai 100.000 kelahiran hidup. Jadi Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 adalah 306,12 per 100.000 angka kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 103,09 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 naik kembali menjadi 233,71 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi nol Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto. Adanya penurunan ini disebabkan berbagai upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Parinatal (RMP) serta peningkatan sosialisasi tentang kelas ibu dan program P4K.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta faktor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan. Balita gizi buruk adalah balita usia 0 sampai dengan 59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 sentimeter bagi balita 6 sampai dengan 59 bulan.

Tabel 2.88
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Pencapaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,3	0,1	0,04	0,04	0,02

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Berdasarkan data diatas pesentase balita gizi buruk di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlahnya 0,3 % menurun pada tahun 2022 menjadi 0,04 %. Pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 0,02%. Hal ini karena berbagai program dan kegiatan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokter spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah.

8. Rasio Posyandu per satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayakan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan anggka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.89
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Posyandu	Unit	103	103	103	104	103
2.	Jumlah Balita	Anak	6.040	5.983	4.578	6.663	4461
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	17,05	17,22	44,01	15,61	23,08

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Jumlah Posyandu dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 hanya mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 103 posyandu. Pada Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2021 yaitu 44,01 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2021 rata-rata melayani 44 orang. Pada tahun 2022 turun menjadi 15,61 % berarti bahwa setiap posyandu melayani 15 orang balita. Pada tahun 2023 jumlah balita yang dilayani adalah 23 balita per posyandu. Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata di Posyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.90
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	6.040	5.983	5.716	5663	5619
2	Jumlah D/S	4.605	3.751	4.239	4213	4144
3	Persentase D/S	76,2	62,7	68,9	74,3	73,7
4	Jumlah N/D	4.605	3.751	2.476	2351	2430
5	Persentase N/D	67,5	66,7	63,9	64,6	62,9

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2024

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu.Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizi pada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevelensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang di Kota Sawahlunto Tahun 2019 adalah sebesar 76,2 % dan yang naik timbangannya 67,5 % dari jumlah balita sasaran 6.040 orang. Pada tahun 2023 cakupan balita ditimbang sebesar 73,7% dan yang naik timbangannya adalah 62,9% dari jumlah balita sasaran sebanyak 5.619 orang. Ini menunjukan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.91
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	48	48	48	10	10
3	Jumlah Pustu	Unit	26	26	26	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas,Praktek Dokter dan Pustu	Unit	80	80	80	42	42
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	62.524	65.138	65.687	64.470	67.760
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	1,27	1,22	1,22	0.06	0,06

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024 (data olahan)

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend kenaikan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang yang diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto.

10. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.92
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	62.524	65.138	65.687	64.470	67.760
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0159	0,0153	0,0152	0,0155	0,0015

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Apabila

dilihat dari rasio perbandingan rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dari tahun 2019 rasionya 0,0159 menurun menjadi 0,0015 dan pada tahun 2023.

11. Rasio Dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 0,049 persen dan menurun pada tahun 2023 menjadi 0,037%.

Tabel 2.93
Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter umum	Jiwa	25	30	30	18	16
2	Jumlah Dokter Gigi	Jiwa	7	12	12	10	9
3	Total Dokter	Jiwa	32	42	42	28	25
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	65.138	65.687	65.687	64.470	67.760
	Rasio Dokter persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,049	0,064	0,064	0,434	0,037

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2023 (data olahan)

Berdasarkan peraturan Kepmenko Bidang Kesra No 54 Tahun 2013 Standart target Rasio Kebutuhan SDMK pada tahun 2013 target dokter per 100.000 penduduk adalah 45 orang pada tahun 2019. Kota Sawahlunto telah mencapai 30 orang dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 100.000 orang. Sehingga dengan kondisi ini sudah mencapai target standar rasio dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2023 jumlah dokter menurun jumlahnya menjadi 25 orang.

12. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.94
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Nama Sarana	2019	2020	2021	2022	2023
1	Polindes	6	6	6	6	5
2	Poskesdes	1	1	2	1	2
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	26	26	25	26	26
5	Puskesmas Keliling	17	10	8	8	8
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	48	48	48	12	12
8	Bidan Praktek	25	25	25	4	4
9	Klinik KB	7	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	**120**	**138**	**136**	**72**	**72**

Sumber Data :Profil Kota Sawahlunto, 2024

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 26 Puskesmas Pembantu, 5 Polindes dan 2 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Tenaga kesehatan Kota Sawahlunto pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan Kota Sawahlunto adalah 384. Pada tahun 2023 tahun 2023 meningkat menjadi jadi 387 orang.

Tabel 2.95
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter umum	19	25	30	18	16
2	Dokter gigi	9	7	12	10	9
3	Perawat	127	231	234	111	108
4	Bidan	75	149	154	130	139
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	31	29	29	32	29

No	Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
6	Ahli Gizi	18	20	22	15	13
7	Analisis Laboratorium	17	16	16	8	8
8	Perawat Gigi	10	10	10	8	8
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	13	15	15	15	10
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	40	49	49	17	19
11	Teknisi Elektromedis	1	1	1	1	1
12	Apoteker	9	7	7	6	9
13	Rekam Medis	7	7	7	8	8
14	Tenaga Keterapian Fisik	3	6	6	0	5
15	Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0
16	Teknisi Transfusi Darah	5	5	5	0	5
	Jumlah	**384**	**577**	**579**	**379**	**387**

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaaan umum merupakan urusan kewenangan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan ruang untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.96
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (%)	84,00	85,26	86,00	91,67	100
2	Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	60,00	99,86	90,00	93,33	100

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Sesuai tabel diatas realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100 %, hal ini disebabkan karena ada keseriusan yang dilakukan oleh OPD pemangku SPM untuk mencapai realiusasi SPM 100 %.

Realisasi indikator kinerja Daerah (IKD) untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.97
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	92,5	78,00	93,23	94,66	98.01
2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	43,98	46,75	44,21	44,91	45,38
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	79,27	66,98	81,71	83,06	88,56
4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	47,35	48,35	45,95	46,87	47,75
5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	-	-	11,11	17,09	17,09
6	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	78,00	81,00	85,45	85,10	87.30
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	93,69	95,24	62,32	62,4	62,61
8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,38	66,5	69,43	70,23	72.09
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,83	78,3	84,42	84,04	84,04
10	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	59,45	62,34	66,90	69,40	70,36

11	Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi (%)	45,35	45,35	46,84	50,73	45,72
12	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	86,00	87,50	84,15	84,15	84,15
13	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	86,92	90,00	91,99	98,00	96.21

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Sesuai tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sudah cukup baik.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi terjadi penurunan sebesar (5,01%) hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi kerusakan akibat bencana dan umur konstruksi pada jaringan irigasi serta kurangnya perbaikan terhadap jaringan irigasi tersebut dan ketersediaan sumber air baku, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan alokasi anggaran yang memadai.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs) mengalami penurunan sebesar 1,79 %, hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah rumah tangga tidak seimbang dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) maka perlu dilakukan upaya kegiatan untuk penambahan SR.

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan panjang 12,37 kilometer. Jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang ada di kota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino sampai dengan Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Jalan Rawang - Talawi dan Jalan Simpang Napar – Bukit Bual dengan panjang 43,20 kilometer yang berbatasan dengan kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung sangat strategis untuk pengembangan integrasi wisata sejarah (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung). Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan kota dengan panjang jalan 454,87 kilometer. Sesuai dengan Permen PU Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang, disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap ini menggambarkan tingkat aksesibilitas pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. Peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan. Berikut secara lengkap tabel proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Sawahlunto selama periode 2019-2023 :

Tabel 2.98
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto
Tahun 2019– 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kondisi Jalan baik (Km)	301,94	302,49	315,82	319,45	327.91
2	Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	66,38	66,5	69,43	70,23	72,09

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Sesuai tabel diatas, dari tahun 2019 hingga tahun 2023, terjadi peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 5.71 persen. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan/menjaga proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah dengan pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase karena salah satu penyebab kerusakan jalan adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didefenisikan dengan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk kota sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.99
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi (Km)	30,65	30,65	43,20	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara (Km)	11,35	11,35	12,37	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total (Km)	496,87	496,87	510,44	510,44	510,44
5	Jumlah Penduduk (orang)	62.524	63.500	65.687	66.413	67.760
6	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Km/orang)	0.0079	0.0078	0,0077	0,0077	0.0075

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki nilai yang cenderung menurun, Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik-titik tertentu.

Standar Pelayanan Minimal rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di kota Sawahlunto adalah 0.74 kilometer per 100 pnduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2023 adalah 0,0075 kilometer per orang atau 0,75 kilometer per 100 orang. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2023 dibawah SPM rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, menyikapi hal tersebut dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk perlu adanya pembangunan jalan baru. Mengingat terdapat jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan nasional di Kota Sawahlunto, maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional.

3. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dibagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100. Data lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.100
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar (%)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,82 persen dari panjang jalan. Dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan, karena pada rentang tahun tersebut Perangkat daerah terkait lebih fokus pada pembangunan drainase dan bahu jalan. Untuk tahun berikutnya perlu difokuskan untuk pembangunan trotoar sehingga akan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki terutama di daerah pusat kota daerah yang lalu lintas baik orang atau kendaraan yang cukup ramai.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tersedianya sistem drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan

perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota. Rincian drainase dalam kondisi baik Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2019– 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	56,00	60,36	58,12	59,27	59,92
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	127,34	129,12	131,48	131,98	132.37
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.(%)	43,98	46,75	44,21	44,91	45.27

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat terjadi peningkatan namun secara keseluruhan masih di bawah 50%, hal ini disebabkan karena tingkat kerusakan drainase tidak seimbang dengan pemeliharaannya. Langkah-langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah lebih memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan drainase agar target drainase dalam kondisi baik semakin meningkat.

5. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan dikali 100%. Irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.102
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	40,72	41,26	41,45	43,39	44,37
2	Panjang Saluran Irigasi (Km)	91,85	92,39	92,59	92,59	92,93
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	44,33	44,66	44,77	46,87	47,75

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,42 %, namun secara keseluruhan persentase saluran irigasi dalam kondisi baik masih dibawah 50 %. Untuk meningkatkan Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik maka harus lebih memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masayrakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

6. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya dikali 100 persen. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di Kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	762	762	787	797	718,25
2	Luas Lahan sawah (Ha)	1.680	1.680	1.571	1.571	1.571
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	45,35	45,35	50,09	50,73	45,72

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Perkembangan persentase luas lahan terairi irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan, namun capaian pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 5,01 %, hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi dan kurangnya perbaikan terhadap jaringan irigasi dan ketersediaan sumber air baku tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan alokasi anggaran yang memadai.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Berikut tabel rasio jaringan irigasi kota Sawahlunto pada tahun 2019 – 2023 :

Tabel 2.104
Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	91,85	92,39	92,78	92,78	93,12
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	1.680	1.680	1.571	1.571	1.571
3	Rasio Jaringan Irigasi	0,0547	0,0549	0,0590	0,0590	0,0592

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahun, namun tahun 2022 tidak ada peningkatan karena tidak ada pembangunan Saluran irigasi. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan rasio jaringan irigasi karena adanya penambahan panjang saluran irigasi.

8. Sanitasi dan Air Bersih

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100° C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.105
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2019- 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	16.542	16.542	16.542	16.603	16,940
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (RT)	14.379	14.889	15.218	16.271	16.298
3	Persentase (%)	86,92	90,00	91,99	98,00	96,210

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan oleh tersedianya sumber-sumber air bersih yang baru, baik yang disediakan oleh PDAM, maupun oleh program-program yang berbasis

masyarakat, seperti Pamsimas yang bersumber dari dana DAK dan dana APBD, namun tahun 2023 terjadi penurunan karena pertambahan jumlah rumah tangga tidak sebanding dengan penambahan SR, untuk itu diperlukan kegiatan air minum yang menambah SR baik dari anggaran pusat maupun anggaran daerah atau kegiatan infarstruktur berbasis masyarakat (IBM).

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses terhadap air minum dapat melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP). Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal.

Tabel 2.106
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Tahun 2019- 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	62.524	63.500	65.687	66.413	67.760
2	Penduduk berakses air minum	57.516	59.556	60.872	65.084	65.192
3	Persentase (%)	91,99	93,79	92,67	98,00	96.21

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2023

Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan kisaran antara 91,99 persen hingga 98 persen. Penurunan Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2023 disebabkan bertambahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan penambahan sambungan rumah, untuk itu perlu adanya program penambahan sambungan rumah baik melalui anggaran APBN atau APBD.

c. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah (unit)	13.601	14.257	14.314	14.371	14.404
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.601	14.257	14.245	13.362	13.763
3	Jumlah rumah dengan jamban (unit)	12.714	13.352	13.558	12.851	13.553
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat (unit)	10.809	11.752	11.801	11.256	12.415
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	85,00	88,00	87,00	87,60	91,6

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2023

Dalam lima tahun terakhir ini Pemerintah Kota Sawahlunto telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2019 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 85,00 persen. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi kenaikan hal ini disebabkan keseriusan pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan rumah dengan jamban sehat melalui program dan kegiatan di OPD terkait. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacingan dan lainnya.

d. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada faktor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya. Persentase RT dengan SPAL yang memenuhi syarat sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.108
Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat
Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
14.404	Jumlah rumah (unit)	13.601	14.257	14.314	14.371	14.404
13.763	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.601	14.257	14.257	13.362	13.763
14.257	Jumlah rumah dengan SPAL (unit)	13.173	13.983	14.192	13.351	14.257
11833	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat (unit)	11.434	11.363	11.903	11.028	11833
83,00	Persentase yang memenuhi syarat (%)	86,80	81,00	83,90	82,60	83,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2023

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan dan penurunan namun realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,40 %. Kenaikan dan penurunan persentase yang memenuhi syarat ini disebabkan banyak faktor salah satunya terkait perilaku penghuni rumah seperti adanya genangan air, tersumbat dan sebagainya.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang mengampu Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.109
Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah warga negara terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah mencapai 100 persen. Adapun setiap tahun diberikan bantuan untuk Rumah Layak huni untuk peningkatan/rehab dengan anggaran sebesar 20 juta rupiah bagi masing-masing rumah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk material dan 2,5 juta rupiah untuk upah. Sedangkan pembangunan rumah layak huni sebesar 40 Juta dengan rincian 35 juta rupiah untuk material pembangunan rumah dan 5 juta rupiah untuk upah. Perkembangan jumlah penerima bantuan sebagai berikut :

Tabel 2.110
Penerima Bantuan RTLH Tahun 2019 -2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerima bantuan RTLH	473	172	98	115	99

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Tahun 2023 total penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 99 unit dengan rincian 79 unit RTLH Lokasi dikawasan Kumuh, 4 Unit RTLH dilokasi luar kawasan kumuh dan 16 unit RTLH Bencana.

Selain SPM Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman mempunyai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terlihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	65,00	70,00	75,00	79	66,27
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)(%)	5,40	11,29	10,08	1,15	8,62
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) (%)	65,00	70,00	75,00	80	85
5	Persentase RTLH (%)	4,01	2,62	10,63	7,38	8,94
6	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	32,62	0	49,37	42.15	19,08

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2023 sudah cukup baik. Kegiatan untuk pengurangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh tetap dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh yang ada di Kota Sawahlunto.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan design unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber

penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). (Badan Pusat Statistik, 2015). Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni kota Sawahlunto dari tahun 2019 – 2023 :

Tabel 2.112
Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Silungkang	9	246	246	315	259
2	Kecamatan Barangin	39	571	571	726	534
3	Kecamatan Talawi	31	365	365	318	251
4	Kecamatan Lembah Segar	85	339	339	302	264
	Total	**164**	**1.521**	**1.521**	**1.661**	**1.308**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 – 2023 terjadi peningkatan pada jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2022 sebesar 1.661 unit rumah dan tahun 2023 turun menjadi 1.308 unit rumah. Peningkatan jumlah RTLH yang sangat besar ini disebabkan karena perubahan standar rumah, penurunan jumlah RTLH yang cukup besar ini salah satunya karena adanya intervensi dari pemerintah Kota sebesar 99 unit dan pendataan ulang yang dilakukan oleh DPKP2LH.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman kumuh atau *slum* merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Berdasarkan nota dinas dari Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor: 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019, seluruh kabupaten/kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan pada baseline program KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019. Berikut Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto tahun 2020:

Tabel 2.113
Surat Keputusan Walikota Sawahlunto
Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tangah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03
8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tangah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
	JUMLAH		**135,21**

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Adapun perkembangan pemukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2019- 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	9,36	135,21	85,84	43,69	24,61
2	Luas Permukiman)(Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	0,60	8,66	5,50	2,80	1,58

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikkan karena adanya revisi SK Kumuh pada tahun 2020, dimana luasan kumuh kota sawahlunto bertambah menjadi 135,21 Ha. Dengan adanya intervensi dari program KOTAKU dan berkolaborasi dengan kegiatan pemerintah daerah maka persentase lingkungan permukiman kumuh kota sawahlunto tahun 2023 hanya tinggal 1,58%.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan air bersih. Berikut ini tabel rasio rumah layak huni:

Tabel 2.115
Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2019- 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah yang layak huni (unit)	13.056	13.884	12.793	12,742	13.322
2	Jumlah rumah (unit)	13.601	14.257	14.314	14.371	14.630
3	Rasio rumah layak huni	0,9599	0.9738	0,8937	0,8866	0,9106

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Sesuai tabel diatas, terjadi peningkatan rasio rumah layak huni di tahun 2023, disebabkan karena adanya intervensi dari pemerintah kota sawahlunto berupa kegiatan RTLH, sehingga rumah yang awalnya termasuk kategori tidak layak huni di tahun 2022, menjadi rumah layak huni di tahun 2023. Jumlah unit rumah tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 14.630 unit, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas DPKP2LH akhir tahun 2023, hal ini dimungkinkan karena adanya pembangunan unit rumah baru.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman. Berikut ini tabel rasio permukiman layak huni:

Tabel 2.116
Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2019- 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas permukiman yang layak huni (Ha)	1.552,27	1.426,42	1.475,79	1.515,79	1534,87
2	Luas permukiman (Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Rasio permukiman layak huni	0,99040	0,91354	0,9450	0,9706	0,9829

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan rasio permukiman layak huni pada tahun 2023, meskipun ditahun 2023 tidak ada intervensi kegiatan dari Program program penanganan permukiman kumuh. Peningkatan Rasio Permukiman Layak Huni ini

dimungkinkan disebabkan oleh adanya intervensi kegiatan dari Pemerintah Kota tahun 2023, Baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

3. Persentase Luas Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan

Menurut UU No.1 tahun 2011, permukiman yang tidak layak huni terjadi karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepandatan bangunanan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh diperkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat. Berikut tabel persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan tahun 2019 – 2023:

Tabel 2.117
Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan
Tahun 2019 - 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas permukiman kumuh diperkotaan (Ha)	9,36	18,09	18,09	18,09	-
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	9,36	135,21	85,84	43,69	24,61
3	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (%)	100,00	13,38	21,07	41,40	-

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2023

Berdasarkan SK Walikota Nomor : 188.45/249/WAKO-SWL/2015 tanggal 18 November Tahun 2015, luas permukiman kumuh di Kota Sawahlunto adalah 42,58 hektar dan setelah dilakukan penanganan melalui berbagai program diantaranya Program KOTAKU, Sanimas, Pamsimas, BSPS dan DAK Perumahan sampai tahun 2019, tercatat luasan kumuh kota sawahlunto berkurang menjadi 9,36 hektar, dan seluruhnya berlokasi di wilayah perkotaan dan tidak bisa dilakukan penanganan atau intervensi karena berada di lokasi Tanah Milik PT. Bukit Asam dan PT. KAI. Pada tahun 2020 diterbitkan SK Walikota Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Sawahlunto dan teridentifikasi seluas 135,21 hektar lokasi kumuh yang tersebar di 16 desa/kelurahan. Pada tahun 2023 sisa luas permukiman kumuh adalah 24,61 hektar, berada diluar Kawasan perkotaan.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk Penanggulangan Bencana dan Kebakaran)

Urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Dalam penerapannya dibutuhkan peraturan sebagai norma yang berisi aturan dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan norma dan menjadi salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab urusan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama dengan memberdayakan PPNS yang berada di Perangkat Daerah untuk melakukan penegakan Perda. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto. Pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari indikator berikut ini :

Tabel 2.118
Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	0	0	0	0	0
Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (IKD)	0,046	-50	-3300	33,06	70,14
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (IKD	100	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (IKD)	100	100	100	100	100
Jumlah Linmas per desa/kelurahan (IKD)	10	10	10	10	10

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (linmas)	1 : 21,75	1 : 21,53	1 : 22,96	1 : 22,98	1 : 22,91
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100
Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran	85	75	56	87	165
Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (IKD)	34	33	33	33	56,45
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rute) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit) (WMK) (IKD)	15	15	15	15	15

Sumber Data: Satpol PP & Pemadam Kebakaran, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban dari tahun 2019 sampai dengan 2023, secara keseluruhan pencapaiannya sudah 100 persen, Indikator tersebut merupakan SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan msyarakat.

Petugas Satpol PP menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Penurunan pelanggaran perda dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dua tahun terakhir terjadi penurunan pelanggaran perda, dari 228 kasus menjadi 134 kasus. Sehingga terjadi penurunan kasus yang signifikan sebanyak 94 kasus.

Pada indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 56,45% yakni dari 62 orang petugas damkar sudah bersertifikasi sebanyak 35 orang. Pertambahan jumlah ini adalah dari penerimaan pegawai P3K yang mewajibkan persyaratan khusus petugas damkar harus bersertifikasi.

Petugas Satpol PP juga berperan dalam mengantisipasi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Sebagai bentuk pengawasan Satpol PP melaksanakan patroli keamanan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan yang bersinergi dengan pihak kepolisian dalam upaya menekan angka kriminalitas. Berikut data kriminalitas di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.119
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Curat (pencurian dan pemberatan)	21	19	9	6	11
Penggelapan	2	3	1	3	11
KDRT	3	4	-	1	2
Penipuan	3	3	2	4	3
Pengrusakan	4	2	1	3	1
Pencurian Kendaraan Bermotor	6	8	5	4	3
Pembakaran	1	-	-	-	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	1	1	1	1	1
Perkosaan	6	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah kriminal	**47**	**40**	**21**	**22**	**32**
Jumlah penduduk	**62.524**	**63.138**	**65.687**	**66.413**	**67.760**
Angka kriminalitas (%)	**0,121**	**0,075**	**0,060**	**0,031**	**0,047**

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2022 secara umum mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dari 0,031% di tahun 2022 menjadi 0,047%. Penambahan ini yakni terjadi pada jumlah kasus pencurian, pemberatan, dan penggelapan.

Angka kriminalitas masih saja terjadi di Kota Sawahlunto. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan, yakni; kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor psikologis.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan menekan angka kriminilitas, Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama dengan kepolisian Resor Sawahlunto telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta sekolah-sekolah dengan sasaran para pelajar.

Urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat juga mencakup pada indikator penanggulangan bencana daerah. Berikut indikator pencapaian urusan ketentraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah :

Tabel 2.120
Indikator Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,49	0,44	0,56	0,50	0,46
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	238	395	330	450	350
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	213	147	290	450	350
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	117	599	339	525	305
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKD)	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKD)	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKD)	100	100	100	100	100
8	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (IKD)	100	100	100	100	100
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar BPBD Kota Sawahlunto, 2024

Indikator penanggulangan bencana merupakan SPM yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menyiapkan informasi bencana, pelayanan dan penyelamatan bencana serta sarana prasarana kebencanaan. Semua aspek tersebut harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sawahlunto dari tahun 2019 sampai 2023 fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai IKD Kota Sawahlunto pada tahun 2023 adalah 0,46 mengalami penurunan dari tahun 2022 nilai 0,50 dengan kelas risiko ‘sedang’. Hal ini berarti kapasitas pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghadapi bencana pada kategori ‘sedang’. Pengukuran IKD ini meliputi 7 pengukuran; Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penangangan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam pahlawan)

Urusan Sosial adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara melindungi rakyatnya. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain merupakan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari 26 indikator serta masyarakat yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan manusia .

Memenuhi amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan SPM Bidang Sosial dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.121
Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar pantI (%)	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti (%)	-	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Pencapaian SPM di bidang Sosial sampai akhir Desember 2023 sudah mencapai 100. Untuk Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti tidak memiliki sasaran yang terdata dari tahum ke tahun. Terlaksananya capaian SPM adalah berkat kerjasama yang baik oleh semua pihak serta dukungan dana dari APBD Kota maupun APBN. Pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.122
Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial di Kota Sawahlunto

No	Program	Kegiatan
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
3	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Adapun data jumlah sasaran SPM yang terbantu pada tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.123
Data Pelayanan terhadap sasaran SPM Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No	URAIAN	Jumlah (orang)	Target Terbantu (orang)	Jumlah Terbantu (orang)	% Terbantu Dari target
1	Anak balita terlantar	4	4	4	100
2	Anak Terlantar	30	30	30	100
3	Anak DIsabilitas	161	85	85	100
4	Lanjut usia terlantar	1587	1587	1587	100

No	URAIAN	Jumlah (orang)	Target Terbantu (orang)	Jumlah Terbantu (orang)	% Terbantu Dari target
5	Penyandang disabilitas	467	237	237	100
6	Gelandangan	0	0	0	-
7	Pengemis	0	0	0	-
8	Pemulung	0	0	0	-
9	Korban bencana alam	61	61	61	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Salah satu sasaran SPM adalah masyarakat dengan kondisi disabilitas. Adapun rincian datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.124
Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Penyandang Cacat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyandang Tuna Netra	21	21	21	15	15
2	Penyandang Tuna Rungu	19	19	19	26	26
3	Penyandang Tuna Wicara	30	30	30	38	38
4	Penyadang Tuna Daksa	140	140	140	164	152
5	Penyandang Tuna Grahita	133	133	133	220	207
6	Cacat Lainnya/Mental Psikotik	19	44	44	29	29
	Jumlah	362	387	387	492	467

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Dalam rangka melaksanakan pelayanan serta mendukung salah satu pencapaian SPM urusan sosial, maka DinsosPMDPPA sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan sosial melahirkan inovasi DIMANJA (Disabilitas Mandiri dan Berjaya) yang digagas sejak tahun 2021. Inovasi DIMANJA merupakan wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yaitu melalui layanan rehabilitasi sosial dengan menyalurkan bantuan transportasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ke sekolah, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, pelaksanaan kelas kemandirian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Program ini melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI) Kota Sawahlunto, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Selain disabilitas, adapula kelompok PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang beberapa indikatornya menjadi sasaran SPM. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). PPKS memilik 26 indikator yang dapat diurai sebagai berikut :

Tabel 2.125
Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	URAIAN	Jumlah (orang)
1	Anak balita terlantar	4
2	Anak Terlantar	30
3	Anak yang berhadapan dengan hokum	6
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Disabilitas	161
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	7
7	Anak yang memerlukan Perlindungan khusus	0
8	Lanjut usia terlantar	1.587
9	Penyandang disabilitas	467
10	Tuna susila	0
11	Gelandangan	0
12	Pengemis	0
13	Pemulung	0
14	Kelompok minoritas	0
15	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	18
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
17	Korban penyalahguynaan NAPZA	2
18	Korban Trafficking	0
19	Korban tindak kekerasan	0

No	URAIAN	Jumlah (orang)
20	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	0
21	Korban bencana alam	61
22	Korban bencana sosial	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	665
24	Fakir miskin	961
25	Keluarga Bermasalah Sosial psikologis	2
26	Komunitas Adat Terpencil	0
	Jumlah	3971

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, perlu penanganan/partisipasi bersama antara pemerintah, tokoh agama/adat, masyarakat serta pihak ketiga lainnya. Program kegiatan harus lebih tajam, terpadu (lintas sektoral) dan berkelanjutan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayan Dasar.

Mayoritas program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial dengan sasaran yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto 2023 hasil pemutakhiran oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai dasar pemberian bantuan-bantuan pemerintah.

Tabel 2.126
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto
Tahun 2023

URAIAN	L. SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
Jumlah penduduk DTKS (jiwa)	3.821	6.077	3.584	3.852	17.334
Jumlah kepala keluarga DTKS (jiwa)	1.325	2.179	1.238	1.442	6.184

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

DTKS ini memuat data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diverifikasi rutin secara berjenjang mulai dari Petugas Sosial Masyarakat (PSM) disetiap Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Teknis Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

a. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
b. Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
c. Desil 3, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30 persen terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
d. Desil 4, yaitu rumah tangga dalam kelompok 30-40 persen terendah (rentan miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Pemerintah Berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang masuk dalam DTKS tidak terlepas dari peran PSM di setiap desa/kelurahan dan TKSK di setiap kecamatan. Adapun jumlah serta persentase keaktifan tiap unsur tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.127
Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)
di Kota Sawahlunto Tahun 2023

	Jumlah	Persentase Keaktifan
Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	37	100
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	4	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Pada tahun 2023, Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS. Jenis bantuan ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan maupun sebagai salah satu upaya penanganan stunting. Adapun jenis bantuan serta jumlah penerima manfaat bantuan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial dan APBD melalui DinsosPMDPPA dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.128
Jenis Bantuan Penanganan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Jenis Bantuan	Penerima manfaat (org)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
I	**Kegiatan APBD Kota Sawahlunto**			
1	Bantuan permakanan untuk lansia	160	61.200.000	APBD
2	Bantuan uang tunai untuk lansia	110	198.000.000	APBD
3	Penyediaan alat bantu untuk disabilitas	11	10.600.000	APBD
4	Bantuan transportasi sekolah anak berkebutuhan khusus	85	153.000.000	APBD
5	Bantuan permakanan untuk ABK disabilitas	25	13.485.000	APBD
6	Bantuan permakanan untuk anak atau disabilitas terlantar	25	13.485.000	APBD
7	Bantuan Tidak Terencana (BTT)	63	150.500.000	APBD
8	Usaha ekonomi produktif (UEP)	4	12.300.000	APBD
9	Bantuan Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor	61	39.271.000	APBD
	Jumlah	**544**	**651.841.000**	**APBD**
II	**Prog/Kegiatan dari Kementerian**			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1.669	5.235.071.676	APBN
2	Program Sembako (BPNT)	1.436	3.446.400.000	APBN
3	Bantuan Alat Bantu	19	59.500.000	APBN
4	Bantuan Kewirausahaan (SKA (Sentra Kreasi Atensi) Balai Mulya Jaya Kemensos)	89	588.904.737	APBN
5	Permakanan lansia	18	48.764000	APBN
6	Permakanan Disabilitas	22	71.056.000	APBN
7	Bantuan Langsung Tunai Dampak El Nino	1.428	571.200.000	APBN
	Jumlah	**4.681**	**9.449.696.413**	**APBN**
	T O T A L KESELURUHAN	**5.225**	**10.101.537.413**	**APBD dan APBN**

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto 2023

Pada tahun 2023, masyarakat Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan, baik dari APBD Kota dan Pemerintah Pusat untuk peserta DTKS sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta perlindungan sosial. Namun jumlah bantuan ini secara kuantitatif masih rendah, karena hanya 5.225 orang yang mendapat bantuan dari total 17.334 peserta DTKS (30.14%).

Tabel 2.129
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial
Tahun 2021 – 2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian		
		2021	2022	2023
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2023

Dari kedua indikator IKD urusan sosial, sudah mencapai realisasi 100%. Diharapkan upaya pemerintah dalam pelaksanaan SPM tetap konsisten untuk mengupayakan yang terbaik dan maksimal agar kesejahteraan, perlindungan serta jaminan kehidupan masyarakat semakin meningkat.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berikut ini dijelaskan tentang ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terkahir.

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adalah karena adanya pengaduan terkait masalah hak, masalah jamsostek, masalah upah pekerja, sistem kontrak kerja waktu tertentu dan PHK. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.130
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sengketa Pekerja - Pengusaha	2	2	3	3	10
2	Jumlah Sengketa Selesai	2	2	3	3	10
3	Jumlah Perusahaan	86	80	66	58	65
4	*Rasio Sengketa*	*2,33*	*2,50*	*4,55*	*5,17*	*15,38*

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sengketa pekerja-pengusaha tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari 2 sengketa tahun 2019 menjadi 10 sengketa tahun 2023. Sengketa pada tahun 2019-2023 dipicu oleh masalah jamsostek, dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sengketa pengusaha dengan pekerja selama tahun 2019-2023 ini diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan status 100% terselesaikan.

2. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Objek perlindungan tenaga kerja antara lain meliputi perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Berikut disajikan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja dan capaian indikator perlindungan tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.131
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan	86	80	66	58	65
2	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	4.061	3.070	2.922	2.705	2.604
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	2.927	2.679	2.125	2.125	2.464
	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (%)	72,08	87,26	72,72	78,56	94,62
4	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Peraturan Perusahaan)	5	7	11	16	7
	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (%)	5,81	8,75	16,67	27,59	10,77
5	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan (PKB)	2	2	2	2	2
	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB (%)	2,33	2,50	3,03	3,45	3,08
6	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (Perusahaan)	3	4	6	10	11
	Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	3,49	5,00	9,09	17,24	16,92
7	Struktur Skala Upah	-	-	-	-	-
8	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (Perusahaan)	11	12	18	16	14
	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 (%)	12,79	15,00	27,27	27,59	21,54
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	59,3	71,25	77,27	86,21	89,23

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)					

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2019 sebanyak 72,08%, naik menjadi 87,26% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 72,72%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 78,56%, dan tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 94,62%. Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan, PKB dan LKS Bipartit dari tahun 2019-2023 rendah yaitu kurang dari 30%. Sedangkan untuk struktur skala upah belum ada, selama tahun 2019-2023 Kota Sawahlunto memakai dan berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan tren yang meningkat yaitu 12,79% tahun 2019 naik menjadi 21,54% tahun 2023, tapi persentase ini juga rendah karena tidak sampai 30% dari perusahaan yang ada. Dengan rendahnya capaian indikator perlindungan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1. Berikut disajikan pencari kerja yang ditempatkan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.132
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	44	65	109	2	2	4	6	23	29	11	23	34	66	9	75
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1 (Orang)	238	221	459	181	222	403	165	135	300	163	115	278	139	53	192
3	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)**	**18,49**	**29,41**	**23,75**	**1,10**	**0,90**	**0,99**	**3,64**	**17,04**	**9,67**	**6,75**	**20,00**	**12,23**	**47,48**	**16,98**	**39,06**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2019-2023, persentase pencari kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 23,75%, dan turun signifikan menjadi 0,99% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,67%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 12,23%, pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 39,06%. Masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaaan yang tersedia, tidak adanya pencari kerja yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPTSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja.

Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Persaingan dunia kerja
b. Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
c. Kemampuan, skill dan pendidikan

d. Kemampuan, skill dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
e. Pengalaman
f. Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
g. Minim informasi pekerjaan/networking dan lowongan kerja.

4. Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan skill tenaga kerja di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas PMPTSPNaker telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Pada pertengahan tahun 2019 DPMPTSPNaker telah mendirikan/membentuk UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD dari Dinas PMPTSPNaker), yang mana UPTD BLK ini khusus bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Pelatihan yang telah dilaksanakan di UPTD BLK antara lain adalah service hp, otomotif, menjahit, listrik, las, mebel, tata boga, bangunan, ac split dan lain-lain.

Berikut disajikan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.133
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Kategori	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga Kerja yang dilatih (orang)	Orang	166	86	160	128	240
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi (orang)	Orang	223	125	200	150	295
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi (%)**	**Persen**	**74**	**69**	**80**	**86**	**81**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Tenaga Kerja yang dilatih (orang)	Orang	90	106	92	90	44
2	Pendaftar Pelatihan berbasis kewirausahaan (orang)	Orang	100	120	105	110	265
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)**	**Persen**	**90**	**88**	**88**	**82**	**17**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	Orang	40	-	115	-	64
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat (orang)	Orang	50	-	170	-	80
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)**	**Persen**	**80**	**-**	**68**	**-**	**80**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023
Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2019-2023 besaran tenaga kerja Kota Sawahlunto yang mendapat pelatihan menunjukkan tren fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan BLK, masih terbatasnya instruktur yang ada di BLK, masih terbatasnya daya tampung BLK dan paket-paket pelatihan yang ada di BLK, serta masih kurangnya minat pencari kerja Kota Sawahlunto untuk mengikuti pelatihan, baik pelatihan yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kewirausahaan.

Untuk mendukung program unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif maka Kota

Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja dengan peserta pelatihan sebanyak 16 orang per paket untuk masing-masing jenis pelatihan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan dengan peserta pelatihan sebanyak 30 orang per angkatan. Yang mana dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para lulusan pelatihan bisa bekerja mandiri atau berwirausaha, dan membuka/menciptakan lapangan kerja baru. Berikut disajikan data UMKM Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.134
Jumlah UMKM Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
UMKM Kota Sawahlunto	3.708	3.708	4.114	4.328	4.677

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha/UMKM karena UMKM adalah jaring pengaman dan penggerak perekonomian.

5. Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Berikut disajikan data lapangan usaha selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.135
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2023

No	Lapangan Usaha Tiga Kategori	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pertanian	2.658	1.369	4.027	3.710	1.936	5.646	3.628	1.919	5.547	2.881	1.765	4.646	3.729	1.571	5.300
2	Manufaktur	6.350	2.017	8.367	5.521	1.840	7.361	5.295	2.055	7.350	5.945	2.821	8.766	5.942	2.184	8.126
3	Jasa	7.930	8.793	16.723	8.179	9.124	17.303	8.666	8.623	17.289	9.454	9.409	18.863	9.809	10.783	20.592
Total		**16.938**	**12.179**	**29.117**	**17.410**	**12.900**	**30.310**	**17.589**	**12.597**	**30.186**	**18.280**	**13.995**	**32.275**	**19.480**	**14.538**	**34.018**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama rentang tahun 2019-2023 penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Sawahlunto menunjukkan tren yang terus meningkat dan yang paling banyak bekerja pada lapangan usaha jasa. Pada tahun 2019 penduduk yang bekerja pada lapangan usaha jasa yaitu berjumlah 16.723 orang (laki-laki sebanyak 7.930 orang dan perempuan sebanyak 8.793 orang), dan pada tahun 2023 penduduk yang bekerja pada lapangan usaha jasa meningkat menjadi 20.592 orang (laki-laki sebanyak 9.809 orang dan perempuan sebanyak 10.783 orang).

Secara keseluruhan penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak pada sektor jasa seperti : Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan dan jasa kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu perlu peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi angkatan kerja untuk menambah skill agar dapat menciptakan lapangan usaha sendiri dalam meningkatkan wirausaha di Kota Sawahlunto.

6. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/diselesaikan oleh seseorang yang ditandai dengan ijazah/sertifikat. Berikut disajikan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.136
Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Kegiatan Utama	2019					2020					2021					2022					2023				
		Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan yang ditamatkan				Jml	Pendidikan yang ditamatkan				Jml
		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	
1	Bekerja	7761	5336	10325	5695	29117	8867	4841	9969	6633	30310	8299	4995	10275	6617	30186	8.612	4.471	12.040	7.152	32.275		13.423	12.868	7.727	34.018
2	Pengangguran Terbuka	488	285	840	519	2132	476	286	1377	570	2709	170	368	981	538	2057	452	456	445	345	1.698		400	1.079	303	1.782

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 berfluktuatif. Tahun 2019 pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang terbanyak adalah tamatan SLTA/Sederajat yaitu 35,73% atau sebanyak 11.165 orang, dan tahun 2023 pendidika tertinggi yang ditamatkan yang terbanyak juga tamatan SMA/Sederajat yaitu meningkat menjadi 38,96% (13.947 orang). Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir yang terbanyak juga adalah tamatan SLTA/Sederajat yaitu pada tahun 2019 sebesar 39,40% atau sebanyak 840 orang, dan pada tahun 2023 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA/Sederajat mengalami peningkatan menjadi 60,55% atau sebanyak 1.079 orang. Akan tetapi pengangguran pada tamatan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 24,34% atau sebanyak 519 orang tahun 2019 turun menjadi 17% atau sebanyak 303 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik. Oleh karena itu dibutukan upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terdidik antara lain adalah :

1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja

Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dinilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya sistem informasi tersebut, diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat.

2. Reformasi Pelatihan Kerja

Reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Reformasi tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dari metode pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja sebelumnya. Dengan adanya reformasi sistem, BLK diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Terobosan yang digagas adalah Revitalisasi, Rebranding, dan Re-orientasi BLK (3R). Program tersebut bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Jadi, diharapkan tenaga kerja terdidik tersebut mampu memantapkan kemampuannya agar dapat bersaing di dunia kerja dan juga tersertifikasi dengan baik sehingga cepat diserap DUDI.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan angka pengangguran terdidik semakin menurun setiap tahunnya, berdasarkan kebijakan tersebut, diharapkan terdapat kebijakan yang lebih efektif lagi seperti pelatihan berwirausaha sejak dini. Dengan adanya pelatihan berwirausaha, tenaga kerja terdidik semakin tergerak untuk menciptakan lapangan kerja sehingga peningkatan jumlah lapangan kerja bisa berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.137
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran (%)	6,82	8,20	6,38	5	4,98
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Orang)	109	4	29	34	75
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Berwirausaha (Orang)	10	15	31	0	64
4	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja (%)	88	64	100	67	69
5	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	5,06	10,9	65,63	76,56	55,80
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	96,044	91,089	93,738	91,161	90,315
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Perserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	59,3	71,25	77,27	86,21	89,23
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota) (%)	23,75	0,99	9,67	12,23	39,06
9	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	0	0	0
10	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	72,08	87,26	72,72	78,56	94,62

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3	14,10	14,02	15,46	15,28	15,10

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capain indikator kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 masih tergolong rendah terutama pada persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2023 persentase tenaga kerja yang ditempatkan hanya 39,06%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya skill pencari kerja, mismatch antara kualifikasi pendidikan dengan pekerjaan (DUDI), minimnya informasi lowongan kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Sawahlunto, kurangnya minat dan motivasi angkatan kerja Kota Sawahlunto untuk berwirausaha, serta kurangnya minat dan motivasi pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah/luar negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan Job Fair, pemagangan pencari kerja, pelatihan keterampilan dan vokasi bagi pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan, mengadakan MoU dengan perusahaan-perusahaan lokal tentang penginformasian lowongan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Kota Sawahlunto, meningkatkan koordinasi di dalam menguatkan fungsi-fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja antara pemerintah provinsi, kota serta industri dan perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Gambaran umum pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.138
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah KDRT	3	3	6
2.	Jumlah Rumah Tangga/ KK	20.658	21.258	21.718
3.	Rasio KDRT	0,0145	0,0141	0,0276
4.	Persentase bantuan penanganan KDRT (%)	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA Tahun 2023, data Disdukcapil 2023

KDRT ibarat fenom ena gunung es, dimana kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Sawahlunto harus tetap waspada. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diharapkan KDRT makin dapat ditekan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan:

Tabel 2.139
Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2023

NO	Jenis Kasus	Tahun 2023	
		Perempuan	Anak
1	Kekerasan Fisik	-	1
2	Kekerasan Seksual	-	4
3	Kekerasan Psikis	1	-

NO	Jenis Kasus	Tahun 2023	
		Perempuan	Anak
4	Penelantaran Rumah Tangga	-	2
5	Eksploitasi	-	-
6	Trafficking	1	-
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6	-
8	Pemenuhan Hak Anak	-	2
9	Anak Berhadapan dg Hukum	-	9
10	Kenakalan anak	-	4
11	Bullying	-	1
Total		8	23
Persentase Bantuan Penanganan Kasus		100%	100%

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Masih terdapat banyak kasus di tahun 2023 yang harus diselesaikan oleh P2TP2A Kota Arang. Dari data di atas diketahui bahwa jumlah korban anak-anak lebih banyak. Anak-anak adalah warga Negara yang rentan dikenai tindakan kekerasan ketika ada masalah dalam keluarga atau lingkungannya. Faktor penyebab seperti : ketimpangan ekonomi, metal & spritual orang tua yang lemah, lingkungan yang tidak kondusif dan lainnya mengakibatkan perempuan dan anak-anak sering jadi korban. Hal ini adalah PR besar bagi Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi seluruh kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, bantuan hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.140
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,73	95,17	95,36
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,48	65,62	62,55

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki- laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Adapun persentase keterlibatan perempuan dilembaga pemerintahan serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.141
Persentase Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Pemerintahan
Tahun 2021-2023

	2021			2022			2023		
	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan	L	P	Persentase Perempuan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi di Kota Sawahlunto	689	1395	66.94%	665	1375	67.40%	641	1314	67.21%
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal di Kota Sawahlunto	112	139	55.38%	127	147	53.65%	130	156	54.55%
Jumlah	801	1534	65.70%	792	1522	65.77%	771	1470	65.60%

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2022-2024

Tabel 2.142
Predikat Anugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2021	2023
Anugerahan Parahita Ekapraya	Madya	Utama	Utama

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilakukan. Penganugerahan ini dilaksanakan satu kali dalam dua tahun dan dalam hal ini, Kota Sawahlunto sudah 2 periode penilaian berturut-turut memperoleh predikat utama.

Di sisi lain, partisipasi Anak dalam Pembangunan dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2.143
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Forum Anak Tk. Kota Sawahlunto	1	1	1
2	Forum Anak Tingkat Kecamatan	4	4	4
3	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2022

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak dan partisipasi anak dalam pembangunan. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Di sisi lain, adapun data kasus kenakalan remaja yang masuk ke UPTD PPPA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.144
Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir
Tahun 2021 – 2023

URAIAN	2021	2022	2023
Jumlah Kenakalan Remaja	1 kasus	2 kasus	4 kasus
Kasus Kenakalan Remaja yang Terselesaikan	1 kasus	2 kasus	4 kasus
Persentase (%)	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Tahun 2023 terdapat empat kasus kenakalan remaja terlapor dan yang diselesaikan oleh P2TP2A. Diharapkan kedepan tidak ada kasus di tahun-tahun berikutnya. Perlu peran serta keluarga, lingkungan dan Pemerintah untuk menjaga, mengawasi dan melindungi remaja dari tindak kenakalan.

Data kenakalan remaja yang ditampilkan di atas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto. Kasus tersebut berdasar laporan yang diterima melalui masyarakat dan dibantu penyelesaian nya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah- sekolah. Untuk kedepannya akan diupayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

Tabel 2.145
Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2021- 2023

URAIAN	2021	2022	2023
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak Anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak Sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta 5. Perlindungan Khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pemerintah Kota Sawahlunto akan berupaya untuk meningkatkan kriteria KLA.

Tabel 2.146
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian		
		2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG	65,48	65,62	62,55
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	20	20	20
3	Rasio KDRT	0,0145	0,0141	0,0276
4	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	50	50	50
5	Persentase sekolah ramah anak (%)	100	100	100
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	3,4	4,4	16.2
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	100	100
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,019	0,02	0.02
9	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	94.84	98.98	98.99

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka Rasio KDRT dan Rasio kekerasan terhadap perempuan. Serta mendorong peningkatan nilai indikator lainnya. Untuk indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD menanjak naik dikarenakan tagging anggaran pendukung ARG lebih kompleks disbanding sebelumnya. Sedangkan untuk indikator persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan telah mendakati capaian 100%. Indikator tersebut diukur melalui jumlah peserta SILO yang di wisuda per jumlah keseluruhan peserta SILO.

Program SILO (Sekolah Istri teLadan Sawahlunto) merupakan salah satu inovasi yang diciptakan sebagai upaya pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Sawahlunto. Inovasi SILO ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya persoalan sosial lainnya dalam pola asuh anak di keluarga. SILO pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 di 8 (delapan) desa dan dilaunching pada tanggal 26 Juni 2021 oleh Walikota Sawahlunto. Tahun selanjutnya 2022 SILO dilaksanakan di seluruh Desa (27 Desa) dan tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Desa dan Kelurahan se-Kota Sawahlunto (27 Desa 10 Kelurahan). Tahun 2021 dari 155 orang peserta ada sebanyak 147 orang yang

diwisuda (94,8%), tahun 2022 dari 394 orang peserta ada sebanyak 390 orang yang diwisuda (98,9%), dan tahun2023 dari 495 peserta 490 peserta (98.9%) diwisuda. Artinya sudah ada 1027 keluarga yang ditingkatkan kualitas keluarganya.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Ineks Ketahanan Pangan yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1).

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam Indeks Ketahanan Pangan didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.147
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan
Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	65,89	67,36	68,91	73,85	84,38
Konsumsi keragaman pangan (kkal/kapita/hari)					
padi-padian	870,20	858,40	944	995,2	1050,08
Umbi-umbian	35,90	38,60	32,2	62,6	43,91
Pangan Hewani	231,10	238,30	236,3	247,4	262,22
Minyak dan Lemak	350,80	310,50	343	314,3	298,91
Buah/Biji Berminyak	49,60	45,70	39,9	34,3	42,34
Kacang-kacangan	80,60	64,20	71,8	53,3	58,93

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Gula	39,40	33,20	21,3	25,4	54,53
Sayur dan buah	126,80	112,30	106,7	104,4	106,03
lain-lain	9,60	10,60	9,5	11,3	33,62
Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	90,1	96,33	95,14	95,20	98,00
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	191	184	165	184,2	189,68
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,50	83,70	84,5	85,1	88,2
Ketersediaan Pangan Utama (Kal/hr)	1533	1579	1618	1849	1757
Ketersediaan Energi Protein Perkapita Gr/Kap/hr)	3564	3131	3133	3473	3447
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan kali)	4	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Mulai Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan indeks Ketahanan pangan ini menandakan bahwa kondisi terpenuhinya pangan kota Sawahlunto yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu yang mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Untuk konsumsi keragaman pangan seperti padi padian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 1050,08,2 kal/hr dan tahun 2022 sebesar 995,2 kal/hr dan untuk umbi-umbian dan pangan hewani mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2023, untuk minyak dan lemak mengalami penurunan walaupun tidak terlalu banyak turunnya.

Dan untuk buah dan biji berminyak mengalami penurunan dari pada Tahun 2022. Sedangkan Kacang- kacangan mengalami sedikit peningkatan. Untuk Gula mengalami peningkatan dari pada Tahun 2022, sayur dan buah mengalami peningkatan pada Tahun 2022 ini dan lain-lain pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari pada Tahun 2022. Dan untuk Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 95,20 % sedangkan tahun 2023 sebesar 98,00 %. Secara keseluruhan untuk konsumsi keragaman pangan yang paling besar konsumsi keragaman pangan kota Sawahlunto sampai 2023 adalah pada padi-padian, ini dikarenakan konsumsi keragaman pangan sangat berpengaruh dari pola konsumsi masyarakat, untuk Sumatera Barat pada umumnya menjadi padi-padian sebagai bahan utama yang wajib di konsumsi terutama beras.

Dengan konsumsi keragaman pangan ini agar pola konsumsi tidak berfokus pada satu jenis bahan pangan saja, sehingga itu perlu adanya diversifikasi produk untuk makanan pokok di Kota Sawahlunto dengan menggiatkan sosialisasi terhadap aneka ragam konsumsi untuk beberapa bahan pangan. Untuk Ketersediaan Pangan Utama mengalami peningkatan yang pada Tahun 2022 sebesar 3027 Kal/hr pada Tahun 2022 naik menjadi 3133 Kal/hr, yang mana seiring dengan menurunnya produksi tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2022. Untuk konsumsi keragaman pangan padi-padian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2022, namun secara ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ini berarti Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan ketersedian pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Ini terlihat dari persentase ketersediaan pangan terutama beras di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2022, dimana jumlah protein yang tersedia mengalami penurunan di Tahun 2022. Begitu juga dengan Ketersediaan Energi Protein Perkapita juga mengalami Penurunan pada Tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Dilihat dari keamanan pangan Berdasarkan itu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 97,14 % ini ditandainya dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan setiap triwulannya sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pada Urusan Bidang Pangan Tahun 2022 mempunyai Inovasi Kampung manggis, dengan memfokuskan pengembangan kawasan Holtikultura khususnya tanaman manggis untuk menjadi satu desa/kampung sebagai sentra pengembangan tanaman manggis menjadi contoh atau model serta kedepannya dapat dijadikan tempat Agro Wisata. Selain itu ada juga inovasi Mamareso Kaladang (MAK ADANG) yaitu dengan Pemeriksaan Cemaran Pestisida pada lahan lahan para petani terpilih di Kota Sawahlunto sehingga pencemaran Pestisida dapat

terdeteksi. Adapun Inovasi di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Informasi Via Billboard Running Texs (Info Barek) yaitu menyampaikan Info Harga Pasar Pagan hasil Survey pada 2 Pasar Utama di Kota Sawahlunto sebagai bahan Informasi Harga Pangan dan Fluktuasi Harga sehingga di ketahui Masyarakat.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanahan terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

a. Terdapat Kawasan Permukiman dilokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berada di 11 desa/kelurahan (Talawi Mudik, Kolok nan Tuo, Kolok Mudik, Talago Gunung, Santur, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tangah dan Kubang Utara Sikabu).
b. Isu terhambatnya pelaksanaan kegiatan redistribusi Tanah karena persoalan non teknis (Ninik Mamak). Kota Sawahlunto memiliki objek Redistribusi Tanah, yang tersebar di Kecamatan Talawi, Barangin dan Lembah Segar yaitu Datar Mansiang, Salak, Rantih, Batu Tanjung, Talago Gunung dan Air Dingin, Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh izin ninik mamak.
c. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Ulayat Nagari dan Kaum, sampai saat ini telah di inventarisasi dan identifikasi baru Balai Batu Sandaran-Lumindai, Lumindai-Lunto dan Lunto-Balai Batu Sandaran. untuk Kubang-Lunto, Kubang-Balai Batu Sandaran masih dalam proses, sedangkan Silungkang-Taratak bancah sampai saat ini belum ada kesepakatan, untuk itu perlu dilakukan inventarisasi khusus.
d. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaian status haknya, isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat, banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.
e. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Provinsi maupun sebaliknya terkait dengan diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah derah.
f. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum. Untuk tapal batas Sawahlunto-Solok, Sawahlunto-Tanah Datar telah selesai, sedangkan untuk Tapal Batas Sawahlunto Sijunjung saat ini sedang menunggu SK Kementerian Dalam Negeri.
g. Isu adanya kebutuan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah
h. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum. Saat ini telah ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tanah-tanah terdata dan dapat disertifikatkan.

Tabel 2.148
Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto

NO	Nama OPD	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total Bidang Tanah
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	11	22	33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	0	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416
5	Dinas Sosial PMDes dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
6	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan	5	3	8
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	2	0	2
8	Dinas Perhubungan	0	1	1
9	Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja	1	0	1
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	2
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0	3	3
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
14	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
15	Inspektorat	1	0	1
16	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
17	Sekretariat DPRD	2	0	2
18	PPKD	4	0	4
19	Badan Kesbang Politik dan PBD	1	0	1
20	Kecamatan Silungkang	2	1	3
21	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
22	Kecamatan Barangin	12	0	12
23	Kecamatan Talawi	1	0	1
	Total	126	550	676

Sumber Data: BPKAD Sawahlunto, 2023

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawahlunto sebanyak 23 Perangkat Daerah yang bersertifikat sebanyak 126 dan yang belum bersertifikat sebanyak 550 dengan total sebanyak 676.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.149
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbit kan (%)	-	-	-	-	-
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100	-	-	-	-
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	72,80	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	-	56.25	-	-	-
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	-	-	-	-	-
6	Tersedianya tanah objek landreform9TOL yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	-
7	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	-

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2023, untuk persentase pemanfaat tanah dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin diterbitkan (%), realisasinya tidak dapat didata, karena

penerbitan izin dilaksanakan secara Online melalui aplikasi OSS yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%) realisasinya pada tahun 2023 tidak ada (0%), pada tahun 2022 telah ditetapkan lokasi Redistribusi Tanah di Kota Sawahlunto yaitu Batu Tanjung dan Talago Gunung, akan tetapi kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena adanya pertentangan dari ninik mamak.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Kualitas SDM dan peran dalam serta masyarakat pengelolaan lingkungan masih rendah menjadi tantangan dalam Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya menjaga keanekaragaman hayati dengan Langkah-langkah mitigasi yang jelas dan peningkatan tutupan lahan/hutan.

A. Indeks Kinerja Daerah (IKD)

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.150
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	58,01	62,74	62,39	62,89	63,10
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	68,26	70,00	74,64	76,00	98,64
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	81,36	75,00	75,00	75,00	75,00
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	68,12	59,89

Sumber Data :DKP2LH, 2023

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan lingkungan hidup terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2023 adalah 63,10 % dan sudah mencapai target RPJMDP.

Capaian terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota sudah sesuai dengan target RPJMDP namun perlu Langkah untuk mengurangi sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami stagnan karena banyak pelaku usaha yang tidak aktif lagi atau tidak beroperasi.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan salah satu kriteria penialaian Adipura, indeks tersebut di hitung apabila pada tahun tersebut dilaksanakan penilaian Adipura dari pusat, penilanan indeks kinerja pengelolaan sampah tahun 2023 sebesar 59,89. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan sarana dan prasarana di TPA, sehingga pengelolaan terhadap sampah tidak berjalan optimal.

B. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk di jawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup berada dalam kategori baik, sedang atau buruk.

Indeks Kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu.

Berikut ini table hasil pengukuran kualitas air (IKA) :

Tabel 2.151
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	%	55,69	50,00	50,00	52,00	48.89

Sumber Data :DKP2LH, 2023

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2023 adalah sebesar 52 persen. Pemantauan IKA ini diambil pada 3 sungai yang dianggap mewakili kualitas air di Kota Sawahlunto. Dari hasil pemantauan sungai tersebut didapati beberapa parameter sudah melewati ambang batas baku mutu, untuk upaya penanggulangannya dilakukan pengendalian pada sumber-sumber yang berpotensi mencemari kualitas air sungai tersebut. Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sejak tahun 2019. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai Indek Kualitas Air Kota Sawahlunto menjadi 48,89%, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas air melalui perubahan pola curah hujan, suhu air, dan pola aliran sungai, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan kualitas air serta perubahan sirkulasi air.

B. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %

Tabel 2.152
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Udara (IKU) 40,5 %	%	82,69	87,54	87,65	87,00	89.9

Sumber Data :DKP2LH, 2023

Indeks kualitas udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan perundang-undangan. Perhitungan indeks ini didasari dari pengambilan sampel di beberapa wilayah yang dianggap mewakili kualitas udara kab/ kota dalam waktu tertentu. Capain indeks tahun 2023 ini adalah sebesar 89,90.

2. Persentase Penanganan Sampah

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

1) Sudah dilayani : 90% atau 34 desa/kelurahan
2) Belum terlayani : 10% atau 3 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 13 sampai dengan 14 ton/hari, sementara timbulan

sampah per hari sekitar 18 ton/hari . Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.153
Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Pengelolaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah kota (ton/hari)	18,72	18,77	18,75	18,86	18,89
Rata-rata Timbulan (Ton/org/hari)	0,00028	0,00028	0,00028	0,00028	0,00028
Jumlah sampah penanganan sampah (Ton)	14,81	14.10	13,99	13,94	13,87
Persentase Sampah Tertangani dengan Timbulan Sampah (%)	80,01	75,1	74,64	73,66	73,46
Persentase jumlah sampah yang terkurangi (%)	19	21,49	20,57	24,72	25,18

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2023

Dari tabel diatas Persentase Sampah Tertangani dengan Timbulan Sampah kota Sawahlunto tahun 2023 sebesar 73,46%. Semakin banyak sampah terkurangi di sumber sampah maka semakin baik pengolahan sampah. Salah satu penyebab sampah tidak terkurangi disumber adalah prilaku dari masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dan kurangnya sarana pengurangan sampah seperti TPST, TPS3R dan Bank sampah.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk Bank sampah di desa maupun Kelurahan serta memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah. Selain itu dilakukan inovasi untuk mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah yaitu SISABER-RT (Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga). Inovasi ini merupakan penjemputan sampah terpilah secara terjadwal lansung ke rumah masyarakat. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DKP2LH adalah berupa :

Tabel 2.154
Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun
2019-2023

NO.	JENIS SARANA	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
1	TPA Lontiek Maloweh (Ha)	-	-	-	-		Tidak aktif
2	TPA Kolok Nan Tuo (Ha)	1,50	1,50	1,50	-		Tidak aktif
3	TPA KayuGadang (Ha)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	Dijadikan Sanitary Landfill
4	TPST (unit)	5	5	5	5	5	
5	TPS	-	-	-	-		
6	Truck Sampah						
A	Arm Roll Truck (unit)	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4	
B	Dump Sampah (unit)	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 unit	3	
7	Container (unit)	17 Unit	17 Unit	17 Unit	31 unit	30 unit	
8	Bak Sampah (buah)	30 Buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	30 unit	
9	Drum/Tong Sampah (buah)			25	25	25	
10	Gerobak Sampah (unit)	10 unit	10 unit	10 unit	29 unit	22 unit	
12	Becak Motor (unit)	22 Unit	22 Unit	22 Unit	18 unit	16 unit	
13	Petugas K3 (orang)	152	152	152	152	152	
14	Bulldozer	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	
15	Incenerator	4 unit	4 unit	4 unit	4 Unit	-	
16	Mesin Kompos	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	1 unit	
17	Excavator	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2023

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan truk sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistim control landfield menjadi sanitary landfield melalui dana APBN.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara

teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.155
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPSS (unit)	344	344	344	344	344
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m^3)	147,92	147,92	147,92	147,92	147,92
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	61.898	62.524	65.138	67.334	67.769
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m^3/1000 jiwa)	2,32	2,36	2,21	2,20	2,18

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2023

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2019 – 2023 sebanyak 344 unit dengan daya tampung 147,92 meter kubik.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.156
Inovasi Pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Inovasi	Latar Belakang Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	PELAYANAN MENGUTAMAKAN LANSIA DAN DISABILITAS (PETA LINTAS)	Karena melihat antrian pada masyarakat yang tergolong Lansia dan Disabilitas harus menunggu seperti masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan	Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Lansia dan Disabilitas sehingga mereka tidak perlu menunggu lama
2	TETAP MELAYANI PADA JAM ISTIRAHAT (TELEPATI)	Karena melihat masyarakat desa yang jauh datang untuk pengurusan administrasi kependudukan banyak menunggu pada saat jam istirahat siang.	Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan adminduk yang walaupun pada jam istirahat tetapi tetap dapat dilayani dengan baik sehingga tidak perlu menunggu lama.
3	LAYANAN JEMPUT BOLA NYASARIN REKAM KTP SISWA (JEMPOL NARSIS)	Bentuk kegiatan perekaman KTP-el bagi siswa disekolah SLTA Kota Sawahluno	Memberikan kemudahan kepada siswa sekolah SLTA yang sudah cukup usia yaitu 16 tahun keatas belum melakukan perekaman KTP-el tidak perlu lagi datang ke Kantor Dukcapil pada jam sekolah
4	LAYANAN HASIL OLAH DATA NARAPIDANA (HALO DA NAPI)	Dilakukan untuk pengecekan Biometrik narapidana di Lapas Narkoba Sawahlunto dan bagi narapidana di Rumah Tahanan Sawahlunto, dan bagi yang telah memiliki NIK tetapi belum rekam, maka langsung dilakukan perekaman KTP –el nya walaupun mereka berasal dai luar daerah.	Dilakukan khusus bagi narapidana yang di Lapas Narkoba maupun di Rutan Sawahlunto, diaman bentuk layananyang diberikan adalah cek irish mata, agar mendapat informasi yang akan akurat terkait data narapidana darimana mereka berasal
5	LAYANAN JEMPUT BOL PADA DESA KELURAHAN (JEMPOL PAKDEKU)	Pelayanan yang diberikan untuk Desa dan Kelurahan dimana pelayanan yang diberikan adalah berupa perekaman KTP el bagi warga yang menjadi WKTP, melayani dokumen kependdukan bagi masyarakat yang tidak bisa datang mengurus ke Kantor Dinas Dukcapil	Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan keliling yang dilakukan khusus diberikan kemudahan ke Desa dan Kelurahan terkait perekaman KTP –el dan layanan dokumen administrasi kependudukan lainnya.
6	MELAYANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KIA KESEKOLAH ANAK (MAKAN KOLAK)	Khusu s untuk melayani menerbitkancetak KIA anak sekolah dari tingkat PAUD, Tk, SD sampai SMP dimana KIA setelah dicetak akan diantarkan ke sekolah tersebut.	Agar anak berusia 0-17 tahun kurang 1 hari mendapatkan haknya yaiutu memperoleh KIA dengan mudah
7	NIKAH MANTAP DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEKALIGUS JADI (NIKMAD SEKALI)	Kerjasama antara Dinas Dukcapil bersama Kemenag Kota Sawahlunto dan seluuh KUA Kota Sawahlunto, diaman inovasi ini menyasar calon pengantin yang akan melakukan pernikahan	Khusu untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar kependudukan langsung dapat up date dengan status terbaru.
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL GERAK CEPAT MENGHENTIKAN TANGSIS (KECAP MANIS)	Kegiatan ini khusus untuk berbagi kesedihan dengan masyarakat yang ditimpa kemalangan seperti bencana kebakaran, tanah longsor, kebajiran dan lainya. Dimana Dinas Dukcapil bekerja sama dengan Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan setempat untuk mengakomodir dokumen kependudukan masyarakat yang ditimpa bencana agar dapat diterbitkan kembali, dan dokumen ini diserahkan paling lambat 2 hari setelah	Agar masyarakat yang ditimpa bencana dapat kembali memiliki dokumen kependudukannya untuk keperluan penting.

No	Inovasi	Latar Belakang Kegiatan	Tujuan Kegiatan
		bencana terjadi, dokumen ini diserahkan langsung oleh pejabat baik itu Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Kepala Dinas Dukcapil atau yang mewakili	

Hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kota Sawahlunto pada kondisi lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.157
Data Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lembah segar	4.222	4.312	4.376	4.401	4.495	4.222	4.312	4.345	4.401	4.492
2	Barangin	6.139	6.345	6.463	6.540	6.793	6.139	6.345	6.429	6.540	6.790
3	Silungkang	3.464	3.530	3.547	3.627	3.759	3.464	3.530	3.522	3.627	3.753
4	Talawi	5.993	6.143	6.272	6.372	6.671	5.993	6.143	6.236	6.372	6.662
	Total	**19.818**	**20.330**	**20.658**	**20.940**	**21.718**	**19.818**	**20.330**	**20.532**	**20.940**	**21.697**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2023

Berdasarkan gambaran tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah seluruh Kepala Keluarga memiliki Kartu Keluarga. Upaya jemput bola melalui pelayanan keliling tetap dilakukan oleh dinas teknis guna memberi kemudahan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Tabel 2.158
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP					Jumlah Penduduk Memiliki KTP –El				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lembah segar	10.255	10.236	10.207	10.320	10.586	9.915	9.987	10.099	10.237	10.324
2	Barangin	14.561	14.776	14.884	15.087	15.306	13.965	14.380	14.643	14.922	15.306
3	Silungkang	8.275	8.307	8.306	8.446	8.774	7.899	8.049	8.188	8.343	8.538
4	Talawi	14.563	14.678	14.753	15.062	15.691	14.086	14.408	14.591	14.950	15.313
	T o t a l	47.054	47.654	47.997	4.815	50.750	45.865	46.824	47.521	48.452	49.481

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2023

Sampai akhir tahun 2023, jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 97,50 persen dari 50.750 orang penduduk wajib ber-e KTP. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Sawahlunto terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e-KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Tabel 2.159
Rekapitulasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
1	LEMBAH SEGAR	3.973	3.951	99,45	22	0,55
2	BARANGIN	6.284	6.245	99,38	39	0,62
3	SILUNGKANG	3.596	3.572	99,33	24	0,67
4	TALAWI	6.176	6.143	99,47	33	0, 53
	JUMLAH	**20.029**	**19.911**	**99,41**	**119**	**0, 59**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2023

Dari segi kepemilikan Akta Kelahiran penduduk berusia 0 – 18 tahun, Kota Sawahlunto mencatat sudah 99,41% penduduk yang memilikinya. Bagi penduduk yang belum memiliki masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk. Termasuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih berada diangka 74,98% (seperti tabel dibawah berikut ini).

Tabel 2.160
Rekapitulasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Sawahlunto
Tiap Kecamatan Per 31 Desember 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)				
		Wajib KIA	Kepemilikan KIA	%	Belum Memiliki KIA	%
1	LEMBAH SEGAR	3722	2812	75,55	910	24,45
2	BARANGIN	5923	4527	76,43	1.396	23,57
3	SILUNGKANG	3381	2197	64,98	1.184	35,02
4	TALAWI	5848	4616	78,93	1.232	21,07
	JUMLAH	**18.874**	**14.152**	**74,98**	**4.722**	**25,02**

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2023

Tabel 2.161
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Cakupan KTP (%)	99,14	106,36	97.87	99,05	97,50
2	Cakupan Akte kelahiran (%)	56,05	56,06	67.32	99,23	70,73
3	Cakupan KK (%)	100	100	99.52	100	100
4	Cakupan akte kematian (%)	100	100	100	100	97,50
5	Validitas database kependudukan (%)	100	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik (%)	98,05	106,64	97.49	99,05	97,50
7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	38,44	57,55	63.87	72,93	74,98
8	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	97,24	98,13	98.73	99,28	99,41
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	0,00	0,00	83.33	92,30	24

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2023

Dari sembilan indikator diatas, rata-rata capaian IKD dapat diketahui sudah memperoleh nilai yang sangat baik. Upaya maksimal harus tetap dilakukan agar dokumen kependudukan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu juga terus mendorong OPD untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan program kegiatan.

Tabel 2.162
Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan
Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (IKD) :

No	PKS	OPD	Ket
1	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	
2	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretariat Dprd Kota Sawahlunto	Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	
3	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Inspektorat Kota Sawahlunto	Inspektorat Kota Sawahlunto	
4	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	
5	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto	
6	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Sawahlunto	
7	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	
8	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	

No	PKS	OPD	Ket
9	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto	
10	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	
11	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	
12	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	
13	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto	
14	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	
15	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto	
16	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	
17	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	
18	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	
19	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	
20	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	
21	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	
22	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	
23	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto	Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto	
24	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Hak Akses Ke Web Portal dalam Layanan Lingkup Tugas Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto	Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto	

Sumber : Diolah Bidang PIAK Tahun 2023

Tabel 2.163
Rasio Kependudukan Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No	INDIKATOR KEPENDUDUKAN	RASIO 2023
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,975
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,9941
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,9471
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Sudah
5	Cakupan penerbitan KTP	97,50%
6	Cakupan KK	99,90%
7	Cakupan akte kematian	100%
8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	70,73%

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dapat berperan aktif melalui

wadah/lembaga yang ada di Desa/Kelurahan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pembangunan. Dalam satu cara untuk menuangkan aspirasi tersebut bisa melalui keikutsertaan dalam berbagai macam organisasi atau lembaga yang ada di tengah masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.164
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan
Tahun 2019 – 2023

No	Nama Lembaga	2019	2020	2021	2022	2023
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	23	23	23	23	23
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	37	37	37	37	37
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	42	42	42	42	42
4	Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (BPSPAM)	64	64	64	64	64
5	Posyandu Balita	103	103	103	103	103
6	Posyandu Lansia	55	55	55	55	55
7	Badan Permusyawarahan Desa (BPD)	27	27	27	27	27
8	Karang Taruna	37	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Di Kota Sawahlunto telah terbentuk sebanyak 23 Bumdes dari sebanyak 27 desa yang ada (85,18%). Adapun desa yang belum membentuk/memiliki Bundes yaitu desa Batu Tanjung, Kolok Mudik, Lunto Barta dan Lunto Timur. Dari total 23 Bumdes yang telah terbentuk, pada tahun 2023 hanya sebanyak 8 Bumdes (34,7%) yang aktif yaitu Bumdes pada Desa Pasa Kubang, Kubang Utara Sikabu, Santur, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Rantih, Sikalang, dan Salak. Adapun mayoritas kendala yang menyebabkan 15 Bumdes lainnya tidak aktif yaitu kepengurusan yang pasif serta usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali 15 Bumdes yang telah ada salah satunya dengan memberikan peningkatan kapasitas serta perhatian yang intens pada masing-masing pengurus Bumdes.

Disamping itu, lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Karang Taruna yang telah terbentuk keseluruhan aktif pada masing-masing desa/kelurahan serta tetap eksis dalam melakukan tupoksi masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya. Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan kategori Swasembada. Dimana pada kondisi ini daya dukung masyarakat/ Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, kelembagaan, prasarana dan sarana memberikan efek positif bagi pengembangan investasi di wilayahnya. Untuk Kota Sawahlunto, status desa berdasar inputan aplikasi Profil Desa/Kelurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.165
Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2021-2023

No	Status Desa	2021		2022		2023	
		Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%
1	Swasembada	8	21,62	6	16,22	4	14.81
2	Swakarya	9	51,35	17	45,94	17	62.96
3	Swadaya	10	27,82	4	14,81	6	22.22

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Terdapat empat desa yang meraih kategori swasembada pada tahun 2023 yaitu desa Lunto Timur, Kubag Tangah, Balai Batu Sandaran dan Rantih. Perolehan desa dengan kategori swasembada pada tahun 2023 berkurang dari tahun sebelumnya yang telah mendapat 6 predikat swasembada pada desa Lunto - Barat, Lunto Timur, Balai Batu Sandaran, Kolok Nan Tuo, Salak dan Data Mansiang. Pengukuran indeks profil desa dilakukan dengan cara menginput beberapa data-data yang dibutuhkan seperti pengukuran ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, keamanan dan ketertiban, politik serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini, salah satu factor penyebab beberapa desa masih berada pada tingkat swadaya dikarenakan masih terdapat desa yang belum optimal dalam menginput data yang dibutuhkan pada system profil desa. Upaya kedepan adalah meningkatkan status desa yang masih swakarya dan swadaya menuju swasembada dan sangat diperlukan inovasi positif

dari tiap desa / kelurahan untuk dapat menarik banyak peluang investasi bagi kemajuan wilayahnya dari segala sumber.

Tabel 2.166
Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Klasifikasi Desa	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%	Jumlah (desa)	%
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Berkembang	21	77,77	17	62,96	14	51,85	10	37,03	6	22.22
4	Maju	5	18,51	9	33,33	12	44,44	14	51,85	17	62.96
5	Mandiri	1	3,7	1	3,7	1	3,7	3	11,11	4	14.81

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari (i) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang mencakup dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman, (ii) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang mencakup dimensi ekonomi dan (iii) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dengan dimensi ekologi. Dalam pengukurannya, suatu desa dapat dikatakan Mandiri jika memiliki skor akhir lebih besar (>) 0.8155 dari total seluruh pengukuran dimensi.

Di Kota Sawahlunto, desa Talawi Mudik merupakan satu-satunya desa yang telah menyandang klasifikasi Desa Mandiri sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 klasifikasi Desa Mandiri juga dicapai oleh Desa Muarokalaban dan Desa Santua. Dan di tahun berikutnya, Desa Silungkang Tigo pun berhasil meraih klasifikasi Desa Mandiri sehingga total Desa Mandiri di Kota Sawahlunto sudah sebanyak 4 Desa pada tahun 2023.

Tabel 2.167
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengentasan Desa Tertinggal (%)	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	23,8	52,94	85,71	140	283

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2023

Pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal dari tahun 2019 hinggal tahun 2023 konsisten berada pada angka 0. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun seluruh desa pada kota Sawahlunto sudah tidak ada lagi yang berada pada klasifikasi desa tertinggal. Untuk indikator persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2023 berada pada angka 283%. Hal ini dapat dijelaskan sesuai dengan rumus indikator tersebut yang tertuang pada Permendagri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu "Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasar Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang dikali 100%. Dalam hal ini di tahun 2023 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri atau bisa disebut dengan desa maju sejumlah 17 desa, sedangkan untuk desa berkembang itu sendiri adalah sebanyak 6 desa. Oleh sebab itu capaian indikator persentase peningkatan status desa mandiri berada pada angka 283%.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam satu dekade terakhir keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu keadaan stagnan yang ditandai dengan kurangnya perbaikan beberapa

indikator KB yaitu CPR, unmet need dan Total Fertility Rate (TFR), Negara ASEAN dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan KB serta kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.168
Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	64	63	71,92	70,46	96,53
2	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,31	17,58	10,87	12	12,31
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01	1,4	0,99	1,11	1,49
3	TFR (Angka Kelahiran Total	2,38	2,33	2,00	2,02	2,02
4	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui kampung KB	56	60	64	64	89,2
5	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	2,75	2,32	2,00	2,02	2,02
6	Rasio Akseptor KB	72,68	73,03	71,92	70,46	87,15
7	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempun menikah usia15-48	77,05	73,04	71,92	70,46	83,6
8	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan1	37	37	37	37	37
9	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	00	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern

Capaian Kota Sawahlunto pada urusan pemerintah Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ada beberapa indikator Kinerja. Pada kinerja Persentase pemakaian Kontrasepsi modern mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebanyak 64 Persen menurun menjadi 63% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi yaitu 71,92 %, dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 70,46%. Serta meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 96,53 %.

Tabel 2.169
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ mCPR)	64	63	71,92	70,46	96,53
2	Pertumbuhan		1,54	1,81	-2,03	26,07

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Unmet need menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (**BKKBN**) adalah kebutuhan PUS untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi dengan kata lain PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi PUS yang sedang Hamil, Ingin anak segera dan Ingin Anak ditunda, namun angka Unmet Need dikota Sawahlunto, sudah baik dan berada dibawah angka Nasional.

Indikator kinerja Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 angka unmet need ini adalah 19,31 % mengalami fluktuasi hingga tahun 2021 menjadi 10,87 % pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 12 %. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 12,2 persen.

Tabel 2.170
Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,31	17,58	10,87	12	12,2
2	Pertumbuhan (%)		-8,96	-38,17	0,10	1,67

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan pertumbuhannya mengalami pertumbuhan yang negative pada tahun 2020 yaitu -8,96 meningkat pada tahun 2023 menjadi pertumbuhan yang positif yaitu 1,67%. Selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping.

3. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.Angka kelahiran Total (TFR) ini digunakan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkatya kelahiran.

Kondisi TFR tahun 2023 di Kota Sawahlunto sudah menuju perbaikan berada di angka 2,02, artinya Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun rata-rata sudah mempunyai anak 2 orang, sesuai juga dengan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto mengalami penurunan secara signifikan. Mudah-mudahan kondisi ini menjadikan Kota Sawahlunto semakin maju dan berkembang serta terwujudnya visi dan misi kota Sawahlunto yang sudah ada.

Tabel 2.171
Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Sawahlunto tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA pad tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	TFR (Angka Kelahiran Total	2,38	2,33	2	2,02	2,02
2	Pertumbuhan (%)		-2,10	-14,16	1,1	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024

4. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Tabel 2.172
Persentase Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	56	60	64	64	89,2
2	Pertumbuhan		7,14	6,66	0	85,8

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

Hal ini dilihat dari Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Kota Sawahlunto yang berada pada tingkatan berkelanjutan sudah 33 Kampung KB berkelanjutan. Sedangkan masih ada 4 desa lagi yang masih dalam Kampung KB Mandiri. Pada Kampung KB Berkelanjutan seluruh OPD telah ikut serta adalam pembangunan.

5. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pendudukan pembangunan keluarga adalah dengan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai pembanungan yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dalam mencapai program keluarga berencana ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB dan hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan KIE. Secara demogafi program keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.173
Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata – rata jumlah anak per keluarga	2,75	2,32	2,00	2,02	2,02

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Tahun 2019-2023 jumlah anak dalam keluarga mengalami trend penurunan. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik. Dengan tingkat rata jumlah anak per rumah tangga adalah 2,02.

6. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencanaa dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta kematian ibu. Dalam pola pemikiran dimasyarakat harus diubah dari pembatasan kelahiran saja tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan mensinergisitaskan program keluarga berencana dengan sudut pandangan agama.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yag sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 rasio akseptor KB berjumlah 72,68 % dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 73,03 %. Dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 70,46%. Akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2023 menjdi 96,53%.

Tabel 2.174
Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Akseptor KB	72,68	73,03	71,92	70,46	96,53
2	Pertumbuhan		0,48	-1,52	-2,03	26,13

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto,2024

7. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka Pemakaian Kontrasepsi adalah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kota Sawahlunto CPR ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 adalah 77,05% turun pada tahun 2020 menjadi 73,04% dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 71,92%. Pada tahun 2022 menurun menjadi 70,46%. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 83,6%.

Tabel 2.175
Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia15-48	77,05	73,04	71,92	70,46	83,6
2	Pertumbuhan		-5,20	-1,53	-2,10	18,6

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

8. Rasio petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/kelurahan

Petugas pembantu Pembina KB Desa Setiap Desa/Kelurahan berjumlah 37 orang. Hal ini sama dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Dimana di setiap desa ada satu orang petugas Pembina KB. Peran PPKDB ini adalah berperan aktif dalam mengelola program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/kelurahan.

Tabel 1.176
Jumlah petugas pembantu Pembina KB/Desa (PPKDB) setiap desa/kelurahan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

9. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan ditribusi alat dan oabt kontrasepsi di Kota Sawahlunto telah sangat baik. Karena telah mencapai 100%. Hal ini mendukung program KB di Kota Sawahlunto dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.177
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontreasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2024

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Dinas yang menangani sektor transportasi di Kota Sawahlunto berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai. Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.178
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota (IKD)	0,49	0,44	0,56	0,58	0,25
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (IKD)	45	56	65	65	0,11
3	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (IKD)	32	26	35	30	59,38
4	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (IKD)	2	2	2	2	2
5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (IKD)	67	25	40	60	73,32
6	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (IKD)	100	100	100	100	52,96
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	149.474	25.200	28.350	55.006	23.385
8	Jumlah uji KIR angkutan umum	981	382	24	727	1316
9	Persentase layanan angkutan darat	70	55	75	75	0
10	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	73,4	30	65	70	73,32
11	Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan	0,0993056	0,1006944	0,09375	0,0972222	0,097

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator urusan perhubungan pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ada beberapa indikator mengalami penurunan seperti Kinerja lalu lintas dari 65 % menjadi 0,11 hal ini disebabkan adanya perubahan indikator. Terjadinya penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum disebabkan terbatasnya mobilitas orang dan barang sehingga jumlah orang dan barang yang keluar masuk Kota Sawahlunto jauh menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan persentase layanan angkutan darat menjadi 0 karena tidak adanya angkutan penumpang (angkot) yang beroperasional.

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan,

khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi. Berikut data sarana perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.179
Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kaca Tikungan (unit)	82	82	82	89	104
2	Warningh Light (unit)	12	12	12	12	12
3	Traffic Light (unit)	1	1	1	1	1
4	Rambu-rambu (unit)	229	218	235	247	268
5	Guadril (unit)	147	147	147	147	148
6	Diliniatur (unit)	100	100	100	100	100
7	Trapikun (unit)	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan (M')	113.885	113.885	113.885	113.885	113.885
9	Jembatan Penyebrangan (unit)	0	0	0	0	0
10	Papan Penunjuk Arah (unit)	46	46	46	46	46
11	Papan Informasi lalu Lintas	0	0	0	0	0
12	Zebra cross (unit)	724	724	724	724	725
13	Trotoar (M')	8.3	8.3	8.3	8,3	8,3
14	RPPJ (M')	10	10	10	10	10

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pada pengadaan kaca tikung dan rambu-rambu. Secara kebutuhan sampai tahun 2023 ketersediaan rambu dan sarana perlengkapan jalan sudah 50%.

Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - Muaro Kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mereaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Kota Sawahlunto mulai ingin menghidupkan kembali kereta api sebagai wisata sejarah. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 Kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya tanpa menghilangkan niai sejarahnya.

Kereta api wisata mak itam Kota Sawahlunto telah beroperasi kembali semenjak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Tohir pada tanggal 20 Desember 2022. Pengoperasian kereta api kembali merupakan hasil dukungan dari 4 BUMN yaitu PT.Kereta Api Indonesia, PT.Semen Indonesia, PT. Pupuk Indonesia dan PT. Biofarma dibawah koordinasi Project Manajemen Office (PMO) BUMN untuk Pariwisata Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memfasilitasi operasional kereta api yang menjadi icon Pariwisata di Kota Sawahlunto.

Sebagai bentuk inovasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dalam penyelamatan berlalu lintas, yaitu dengan menempatkan aparat perhubungan dalam zona selamat sekolah. Aparat bertugas pada jam masuk dan pulang sekolah dan bertugas di sekolah-sekolah yang berada di lokasi jalan utama. Inovasi ini sebagai bentuk pencegahan dan salah satu upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Perlayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten atau kota. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto mulai bulan November tahun 2022, sedangkan sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 hingga tahun 2023.

Tabel 2.180
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	%	70	70	60	65	95
Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota	%	75	75	50	60	100
Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,45	2,88	2,07	2,84	3,09
Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	%	100	100	100	100	77

Sumber Data: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian beberapa indikator kinerja yang melekat pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto ada yang telah terpenuhi 100 %. Namun masih ada capaian beberapa indikator kinerja yang masih di bawah 100 % dan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, indikator kinerja yang dimaksud adalah : 1). Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK; 2). Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota; dan 3). Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di samping rendahnya capaian beberapa indikator kinerja di atas, permasalahan lain yang dihadapi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sawahlunto adalah rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten atau kota. Permasalahan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1). Belum semua Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi/website untuk penyebaran informasi; 2). terbatasnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang keahlian Infomasi dan teknologi (IT); 3). Sulitnya pembangunan jaringan internet yang disebabkan kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit; 4).Terbatasnya pembangunan dan pelayanan jaringan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi; 5). Belum optimalnya integrasi data.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah berupaya untuk mewujudkan daerah yang terdigitalisasi dengan meluncurkan program smart city dan berbagai inovasi diantaranya adalah dengan memberlakukan transaksi non tunai, memilih provider dengan kecepatan yang lebih baik, melakukan sosialisasi pendidikan berbasis IT, namun masih terkendala dikarenakan Kota Sawahlunto dengan kontur perbukitan yang mengakibatkan jaringan internet agak sulit dijangkau bagi daerah yang berada diperbukitan. Program kegiatan dan inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan smart city juga telah memberikan dampak terhadap masyarakat, peningkatan kelompok informasi masyarakat yang meningkat tiap tahunnya menggambarkan keberhasilan program kegiatan dan inovasi yang dilakukan. Berikut kami sajikan capaian indikator kinerja Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 2.181
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok	45	45	36	56
Jumlah Daerah Blank Spot	Desa/Kel	4	4	9	3
Jumlah Warung Internet	Unit	14	14	14	5

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2024

Dari capaian indikator kinerja urusan kewenangan Pemerintah Daerah dapat digambarkan peningkatan yang sangat signifikan dalam indikator kelompok informasi masyarakat, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat digital di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan, dan penurunan jumlah warung internet yang ada justru menunjukkan semakin banyaknya rumah tangga yang ada di Kota Sawahlunto menggunakan internet secara mandiri.

Dan juga berdasarkan data table diatas terlihat pada tahun 2023 hanya terdapat 3 titik Blank Spot di Kota Sawahlunto. Hal ini terwujud disebabkan oleh peningkatan di beberapa daerah yang sebelumnya dinyatakan Blank Spot, namun Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya agar tidak ada lagi daerah yang tidak memiliki akses internet dengan mengajukan penambahan tower untuk akses jaringan.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.182
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	56	53	54	53	46
2	Jumlah koperasi (unit)	68	68	68	69	69
3	Persentase koperasi aktif	77,9	77,9	79,4	77	66.67

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari Tahun 2019-2023 persentase koperasi yang aktif mengalami fluktuatif. Fluktuatif ini disebabkan karena terkait transisi pasca pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sudah mulai bisa untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dlihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.183
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi (unit)	68	68	68	69	69
2	Jumlah Koperasi Aktif	53	53	54	53	46
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	15	15	14	16	23
4	Jumlah Koperasi RAT	50	43	35	35	35
5	Jumlah Anggota orang)	8.972	8.775	8.221	8.162	8.096
6	Jumlah Tenaga Kerja	113	113	113	113	59
7	Volume Usaha (Rp))	103.589.617.000	57.792.083.000	38.567.300.000	32.069.047.000	41.426.853.000
8	Modal Sendiri (Rp)	46.255.521.000	48.055.094.000	46.707.152.000	48.755.020.000	49.765.884.000
9	Modal Luar (Rp)	33.295.190.000	33.169.494.000	29.679.215.000	29.404.939.000	29.713.792.000
10	Asset (Rp)	79.550.711.000	81.224.588.000	70.711.781.000	78.159.959.000	79.479.676.000
11	SHU (Rp)	4.510.185.000	4.427.901.000	4.427.901.000	2.075.983.000	2.524.182.000

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dilihat dari tabel diatas volume usaha pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya SHU. SHU pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikant dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan Volume Usaha mengalami kenaikan. Seiring dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi yang mana di tahun 2021 berjumlah 8.221 orang dengan volume usaha Rp. 38.567.300.000,-, disebabkan adanya kebijakan Provinsi tetang cara penghitungan volume usaha. Perkembangan SHU juga tidak begitu baik di sebabkan adanya pandemi yang berdampak pada perkembangan usaha koperasi di Kota Sawahlunto. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.184
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

No	Kriteria Koperasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sehat (%)	11,76	14,71	9,37	14,50	26.08
2.	Cukup sehat (%)	39,70	32,35	39,06	31,89	34.78
3.	Kurang sehat (%)	4,41	10,29	4,69	2,90	4.35
4.	Belum dinilai (%)	4,41	5,88	0	27,54	34.78
5	Tidak dinilai (%)	39,72	36,77	46,87	23,19	33.33

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami persentase kenaikan yang baik. Pada Tahun 2023 Persentase koperasi sehat adalah 26.08 persen naik jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya 14.50 %. Kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2023 rata-rata masih dalam kondisi cukup sehat, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota.

Tabel 2.185
Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	77,94	77,94	10,29	8,70	13.04
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wira Usaha (%)	0,22	1,12	36,17	0,4	0.32
3.	Persentase UMKM yang meningkat Skala Usahanya (%)	0,22	1,12	0,40	0,3	0.32
4.	UMKM	3.708	3.708	4.114	4.328	4.677
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,78	99,78	100	99.80	99.81

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Tabel 2.186
Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro < 60.000.000
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	127	129	131	133	314
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	1413	1425	1439	1459	1573
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0	0	0
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	1430	1450	1476	1487	1613
7.	Penganggkutan / Komunikasi	0	0	0	0	0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
9.	Jasa Lainnya	198	202	207	211	267

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Kurang dari 60.000.000 dapat disebutkan bahwa capaian indikator tersebut setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Ini bertanda dukungan pemerintah daerah terhadap usaha mikro yang ada di kota sawahlunto positif, apakah itu dari regulasi maupun permodalan.

Tabel 2.187
Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro > 60.000.000
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6	8	8	8	10
2.	Pertambangan danPengendalian	0	0	0	0	2
3.	Industri Pengolahan	120	125	125	125	182
4.	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0
5	Bangunan	0	0	1	1	2
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	573	580	586	594	550
7.	Penganggkutan / Komunikasi	0	0	0	0	0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	1
9.	Jasa Lainnya	80	82	86	90	134

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Lebih dari 60.000.000 dapat dijelaskan bahwa capaian indikator setiap tahunnya mengalami kenaikan yang positif. Dengan pertumbuhan yang positif ini akan berdampak pada PAD Pemerintah Daerah.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Berikut ini disajikan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.188
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang Berinvestasi	19	11	67	100	116

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha/berinvestasi di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, pada tahun 2019 sebanyak 19 perusahaan, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11 perusahaan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 67 perusahaan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 100 perusahaan, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 116 perusahaan. Kenaikan ini disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSPNaker seperti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perusahaan, pengawasan dan monev, pendampingan berupa klinik perizinan dan klinik LKPM.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut disajikan realisasi investasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.189
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Jenis	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PMDN	200.440	28.276	45.831	112.593	212.792
2	PMA	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi investasi selama rentang tahun 2019-2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.440 milyar, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. 28.276 milyar, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 45.831 milyar, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 112.593 milyar, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 212.792 milyar. Kenaikan ini disebabkan oleh membaiknya perekonomian dan aktivitas ekonomi, adanya

peningkatan pemahaman pelaku usaha/perusahaan dalam pelaporan LKPM dan adanya eksplorasi PT. BA untuk sektor pertambangan. Meskipun nilai realisasi investasi ini meningkat, tapi nilai ini masih rendah (peringkat ke-12 terendah di Provinsi Sumatera Barat).

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, lahan di Kota Sawahlunto kebanyakan adalah tanah ulayat, 2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah, masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi tentang peluang investasi; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan perlu dilakukan.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah pekerja pada seluruh proyek penanaman modal terhadap total jumlah proyek penanaman modal. Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi rasio daya serap tenaga kerja. Berikut disajikan rasio daya serap tenaga kerja Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.190
Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	3.673	2.638	2.957	2.705	2.604	7,09
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	81	78	84	100	116	9,76
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	45	34	35	27	22	15,38

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 15,38 %, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing.

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kota Sawahlunto secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.191
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kenaikan Jumlah Nilai Investasi (%)	132,05	-85,89	62,08	145,67	88,99
2	Persentase Kenaikan Jumlah Investor (%)	-87,97	-42,11	509,09	49,25	16
3	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	200.440	28.276	45.831	112.593	212.792
4	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Aplikasi (%)	55	75	85	100	100
5	Persentase Layanan PTSP yang Memenuhi Standar Waktu Layanan sesuai SOP (%)	90	95	95	100	100
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	87,47	83,59	88,29	89,15	90,36
7	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat (%)	50	30	50	33,3	75
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	114	-172	17	66	100

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2023 secara keseluruhan realisasi capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal sudah cukup baik.

Investasi mulai meningkat, meningkatnya investasi ini berpengaruh terhadap penggerakan ekonomi pada umumnya. Kemudahan-kemudahan investasi yang diberikan dan inovasi yang dilakukan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal serta kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Sawahlunto sangat berpengaruh terhadap jumlah investasi yang ada di Kota Sawahlunto, ini terbukti pada tahun 2023 Dinas PMPTSPNaker mendapatkan penghargaan inovasi terhadap pelayanan perizinan di Kota Sawahlunto. Untuk itu peningkatan pelayanan perizinan menjadi hal penting dalam peningkatan investasi di Kota Sawahlunto.

Investasi perlu terus ditingkatkan karena investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi/ memacu pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja/menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata/pembangunan ekonomi yang inklusif.

Agar dapat memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif. Untuk menarik minat bagi investor agar mau menanamkan modalnya maka diperlukan adanya kepastian akan keamanan dan menciptkan kondisi dan situasi perekonomian yang baik.
2. Melaksanakan promosi investasi dan menyediakan data yang tepat dan akurat mengenai sektor-sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto.
3. Prosedur yang sederhana dan pelayanan yang lancar. Para investor diberikan kemudahan didalam mengakses dan menanamkan modalnya serta dalam memperoleh informasi/gambaran mengenai keadaan dari Kota Sawahlunto. Dengan kata lain didalam prosedur dan pelayanan harus benar-benar yang profesional dan tidak berbelit-belit.
4. Sarana dan Prasarana yang menunjang. Peraturan yang konsisten yang menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi yang dibuktikan dengan adanya kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dalam bidang penanaman modal (investasi) baik investor asing/domestik.
5. Aksesibiliti/infrastruktur

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu organisasi kepemudaan dan olahraga harus ada dalam suatu daerah Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas, masalah sosial dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto. Perkembangan kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.192
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	15	15	16	4,13	5,3
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	109	82	162	177	406
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	1	0,008	2,77

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Pada tabel di atas terlihat selama kurun waktu lima tahun terakhir prestasi olahraga Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapat 109 medali, dan meningkat menjadi 406 medali pada tahun 2023. Penurunan perolehan medali terjadi pada tahun 2020, dimana Kota Sawahlunto hanya memperoleh 82 medali, namun kondisi ini segera membaik dengan meningkatnya perolehan

medali pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 162 dan 177 medali. Pada tahun 2023 kenaikan perolehan medali sangat signifikan karena banyaknya event event yang diikuti.

Dari kegiatan tersebut banyak terbentuk organisasi kepemudaan yang cukup aktif dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 ke tahun 2020 tetap tapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 16% serta tahun 2022 kembali terjadi penurunan menjadi 4,13% kemudian tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 5,3 %. Tingkat partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah Kota dilihat dari berbagai event event yang diikuti pemuda. Pada tahun 2020, Sawahlunto mengutus salah satu pemudanya menjadi perwakilan dalam ajang pemuda pelopor dan berhasil mendapatkan peringkat pertama ditingkat nasional sehingga setelah itu banyak pemuda pemudi Kota Sawahlunto yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti mengikuti pelatihan kewirausahaan, berikut pelatihan kewirausahaan yang diikuti pemuda pada tahun 2023 :

Tabel 2.193
Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto
Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1.	Pembuatan Roti dan Kue	-	27	27
2.	Teknisi Sepeda Motor Konvesional	12	-	12
3.	Pengelasan SMAW Posisi 2F	44	-	44
4.	Refrigerator/AC	16	-	16
4.	Menjahit	8	-	8
Total				**107**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Adapun Perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.194
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Tahun 2019-2023

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	HIPMI	V	V	V	V	V
2.	AMPI	V	V	V		V
3.	Fatayat NU	V	V	V		V
4.	Pemuda Muhammadiyah	V	V	V	V	V
5.	BM PAN	V	V	V		V
6.	Gema Kosgoro	V	V	V		
7.	GM Kosgoro	V	V	V		
8.	GP Anshor	V	V	V		
9.	BKPRMI	V	V	V		V
10.	Garda Keadilan	V	V	V		
11.	Nasyatul Assiyah	V	V	V		V
12.	IPTI	V	V	V		
13.	KNPI Sawahlunto	V	V	V	V	
14.	KNPI Kec. Talawi	V	V	V		
15.	KNPI Kec. Barangin	V	V	V		
16.	KNPI Kec. Lembah Segar	V	V	V		
17.	KNPI Kec. Silungkang	V	V	V		
18.	GM FKPPI	V	V	V		
19.	Pemuda Pancasila	V	V	V	V	V
20.	Purna Paskibraka	V	V	V	V	V
21.	Organisasi Siswa Intern Sekolah					

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Tabel 2.195
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Tahun 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif (organisasi)	19	19	19	6	9

2	Jumlah Total organisasi Pemuda (organisasi)	19	19	19	21	21
3	**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)**	**100**	**100**	**100**	**28,6**	**42,9**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Pada tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 19 organisasi kepemudaan yang aktif tetapi tahun 2022 secara keseluruhan aktif serta mempunyai badan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan. Tetapi pada tahun 2022 dan tahun 2023 kembali ada peningkatan jumlah organisasi pemuda menjadi 21 organisasi tetapi dalam hal keaktifan terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 6 organisasi yang disebebkan setelah dilakukan monev ternyata tidak seluruh orgnaisasi tersebut termasuk kedalam organisasi pemuda.

Tabel 2.196
Cakupan Pembinaan Olahraga
Tahun 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina (cabor)	36	38	44	45	45
2	Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar (cabor)	36	38	44	45	45
3	**Cakupan pembinaan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kota Sawahlunto tahun 2019 sebanyak 36 cabor, tahun 2020 sebanyak 38 cabor, tahun 2021 sebanyak 44 dan tahun 2022 sebanyak 45 cabor sedangkan tahun 2023 kembali tetap 45 cabor, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 seluruh cabor tersebut dibina dengan baik melalui monitoring dan evaluasi ke cabor tersebut.

Tabel 2.197
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelatih yang bersertifikat (orang)	11	12	22	25	27
2	Jumlah Seluruh Pelatih (orang)	72	76	88	90	92
3	**Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)**	**15,3**	**15,8**	**25**	**27,8**	**29,3**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat pada tahun 2019 ada penambahan jumlah pelatih menjadi 72 orang dengan penambahan pelatih bersertifikat menjadi 11 orang kemudian pada tahun 2020 kembali ada penambahan pelatih manjadi 76 orang dan penambahan pelatih yang bersertifikat menjadi 12 orang, dan pada tahun 2021 terjadi penambahan yang cukup banyak menjadi 88 orang dan penambahan untuk pelatih yang bersertifikat menjadi 22 orang kemudian pada tahun 2022 terjadi lagi peningkatan jumlah pelatih menjadi 90 orang dan pelatih yang mempunyai sertifikat menjadi 25 orang kemudian tahun 2023 terjadi lagi peningkatan jumlah pelatih menjadi 92 orang dan pelatih yang bersertifikat menjadi 27 orang.

Tabel 2.198
Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahluto
Tahun 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Atlet Pelajar Yang dibina (orang)	101	110	113	163	193
2	Jumlah Seluruh Atlet Pelajar (orang)	181	188	200	250	250
3	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)**	**55,8**	**58,5**	**56,5**	**65,2**	**77,2**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari cakupan pembinaan atlet pelajar Kota Sawaahlunto terlihat terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023, begitu juga dengan jumlah atlet pelajar yang dibina tetapi secara persentase perbandingan antara jumlah atlet pelajar dan atlet pelajar yang dibina terjadi penurunan karena banyaknya tambahan atlet pelajar sedangkan yang dibina tidak semua atlet pelajar yang ada. Dari tingkat perolehan medali dalam setiap ajang turnamet olahraga juga

terlihat fluktuatif dari tahun 2019-2023 karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto, tahun 2023 kembali terjadi peningkatan karena telah dibukanya kran pelaksanaan kegiatan baik tingkat Kota maupun Tingkat Provinsi dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.199
Prestasi Olahraga Menurut Cabang
Tahun 2019–2023

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	KEMPO	10	-	19	19	27
2.	AERO SPORT	2	-	2	-	
3.	ANGKAT BESI	-	-	-	-	
4.	TARUNG DERAJAT	13	-	1	3	17
5.	BALAP MOTOR (IMI)	1	-	-	1	
6.	CRICKET	2	-	1	-	
7.	PANJAT TEBING	30	13	33	79	53
8.	TENIS MEJA	2	-	1	-	1
9.	KARATE	5	20	2	2	41
10.	TAEKWONDO	12	-	49	44	144
11.	BRIDGE	12	-	4	2	7
12.	ATLETIK	4	-	3	8	14
13.	CATUR	1	-	-	-	13
14.	TENIS LAPANGAN	12	1	9	-	54
15.	PERTINA	2	-	-	3	
16.	PANAHAN	-	-	18		
17.	GULAT	-	-	3	12	
18.	WUSHU	-	-	16	-	
19.	BILYARD (POBSI)	-	-	-	-	
20.	BOLA BASKET (PERBASI)	-	-	-	-	
21.	BOLA VOLLY (PBVSI)	-	-	-	-	
22.	BULU TANGKIS (PBSI)	-	-	-	-	
23.	MENEMBAK (PERBAKIN)	-	-	-	-	
24.	PENCAK SILAT (IPSI)	-	-	-	-	
25.	RENANG (PRSI)	-	-	-	-	
26.	SENAM (PERSANI)	-	-	-	-	9
27.	SEPAK BOLA (PSSI)	-	-	-	-	
28.	SEPAK TAKRAW (PSTI)	-	-	-	-	
29.	BINARAGA FITNES (PBFI)	1	-	1	-	
30.	ANGKAT BERAT (PABERSI)	-	-	-	4	
31.	FUTSAL	-	-	-	-	
32.	MUAYTHAI (MI)	-	-	-	-	
33.	SEPATU RODA (PORSEROSI)	-	-	-	-	
34.	GATEBALL	-	-	-	-	
35.	ARUNG JERAM (FAJI)	-	-	-	-	
36.	BERKUDA (PORDASI)	-	-	-	-	
37.	YONG MOO DO	-	-	-	-	
38.	SOFT TENIS (PESTI)	-	-	-	-	
39.	BOLA TANGAN (ABTI)	-	-	-	-	
40.	DRUM BAND (PDBI)	-	-	-	-	
41.	IBA MMA	-	-	-	-	
42.	ESPORT	-	-	-	-	
43.	HOCKEY	-	-	-	-	2
44.	KICKBOXING	-	-	-	-	
45.	PETANQUE (FOPI)	-	-	-	-	
Total Medali		**109**	**82**	**162**	**177**	**382**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel diatas juga dapat dilihat peningkatan perolehan medali pada tahun 2021 tidak lepas dari pengaruh pelatih pelatih yang sudah mempunyai sertifikat kepelatihan yang diperoleh Kota Sawahlunto sebanyak 22 orang yang tersebar dalam berbagai cabang olahraga. Begitu juga dengan pembinaan terhadap atlit muda yang selalu meningkat dari tahun 2019 sebanyak 181 orang, tahun 2020 menjadi 188 orang dan pada tahun 2021 menjadi 200 orang serta 2022 menjadi 250 orang. Kemudian dari tabel diatas juga tergambar jumlah atlit yang dianggap berprestasi fluktuatif dari tahun 2019 yang berjumlah 109 kemudian tahun 2020 turun menjadi 82 orang karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto dan naik pada tahun 2021 menjadi 162 orang kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 177 orang dan kembali terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 menjadi 382.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.200
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Kota Sawahlunto Dalam Angka	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kota Sawahlunto	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kominfo Kota Sawahlunto, 2023

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa ketersediaan sistem data dan statistik terintegrasi serta data statistik berupa buku Kota Sawahlunto Dalam Angka beserta Buku PDRB Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2023 telah terpenuhi, data tersebut merupakan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

Meskipun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik telah terpenuhi, namun masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi, yakni belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1). Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi; 2). Belum optimalnya hasil forum satu data; 3).Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengamanan informasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto melalui Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian merupakan Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini yang sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Berikut capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.201
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemda (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, Penyelenggaraan pengamanan informasi daerah di Kota Sawahlunto terlihat berjalan dengan baik, tercermin dari terpenuhinya target setiap tahunnya sehingga tingkat capaian keamanan informasi pemerintah menunjukkan angka 100 % setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang berakibat pada belum optimalnya pengamanan informasi, yakni: 1). Belum memadainya sarana dan prasarana persandian; 2). Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto adalah Kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian besar telah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" dan terus melestarikan peninggalan hindia Belanda di Sawahlunto dan menjadikan Kota Sawahkunto sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat sejak produksi pertambangan terus menurun. Pada tanggal 6 Juli 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Kawasan WTBOS meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yang meliputi : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman. Gambar 2. 1 Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan, 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Borobudur, Prambanan, Sangiran, dan Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009 yang lalu, namun penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (tentative list) pada 30 Januari 2015 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua delegasi Prof. Rosa Surya Putra (Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) serta Deri Asta (Walikota Sawahlunto) Proses sidang dimulai dengan ICOMOS membacakan hasil misi evaluasi, tanggapan para anggota komite warisan dunia, hingga Pimpinan Sidang yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Republik Azerbaijan mengetok palu tanda pengakuan kekayaan budaya Ombilin Sawahlunto sebagai kekayaan budaya dunia. Tentunya penetapan ini tidak berjalan mulus dengan berbagai kondisi baik di daerah maupun di pusat, terutama peraturan perundangan pelestarian yang masih belum secara menyeluruh dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan situs warisan dunia maupun cagar budaya.

Sawahlunto ditetapkan sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) adalah contoh representatif dan luar biasa dari kesatuan teknologi perintis yang direncanakan dan dibangun oleh insinyur Eropa di koloni mereka serta dirancang untuk mengekstraksi sumber daya batubara yang strategis. Properti ini tidak hanya memiliki nilai universal yang luar biasa karena menunjukkan perkembangan teknologi perintis, memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan kearifan lingkungan lokal dan praktikpraktik tradisional dalam pengorganisasian tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan dampak mendalam dan berkelanjutan dari perubahan hubungan sosial dalam konteks produksi yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di koloni mereka, dalam hal mensuplai material dan tenaga kerja guna menopang industrialisasi di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20

Merujuk pada dokumen rencana pengelolaan (management plan) situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto ini dikelola dengan 3 (tiga) tingkat, pertama tingkat kebijakan yang melibatkan 12 (dua belas) kementerian dibawah koordinasi sebagai Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Wakil Ketua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Walikota Sawahlunto, Walikota Solok, Walikota Padang Panjang, dan Kota Padang. Kedua tingkat perencanaan dengan pengelola harian berada pada kantor pengelola situs, meskipun secara resmi belum terbentuk, dengan koordinasi dan konsultasi dengan unit pengelola teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Barat (Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya), pemilik aset objek signifikan, dan instansi terkait di provinsi, untuk dewan penasehat terdiri dari akademisi, ahli, dan komunitas, ketiga adalah tingkat operasional berada pada instansi teknis membidangi perencanaan, dan Kebudayaan di 7 (tujuh) kabupaten kota situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto.

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering

menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.202
Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1
7.	Paguyuban Sunda	1
8.	Komunitas Kota Tua Sawahlunto	1
9.	Komunitas Anak Nagari Sawahlunto (KANS)	1
Total Komunitas Budaya		**27**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Jumlah Komunitas Budaya yang ada dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berjumlah 25 komunitas budaya sedangkan pada tahun 2021 bertambah 2 komunitas budaya sehingga menjadi 27 komunitas budaya, 5 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 18,5 persen, sementara masih ada 22 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 81,5 persen. dan tahun 2023 jumlah komunitas tidak ada penambahan dan pengurangan sama sekali tetapi ada 10 komunitas yang aktif pada tahun 2023 dan masih ada yang belum aktif sebanyak 17 komunitas artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto. Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan serta dengan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prisip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.203
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian (set)	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	73	83	85	88	92
3.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	130	144	153	164	163
4.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (persen)	56,15	57,63	55,55	65,5	70,78
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	21	94	102	137
6.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	130	144	153	164	163
7.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (persen)	16,15	14,58	61,44	69,95	84,05

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tahun 2021, dari 20 jumlah sarana penyelenggara kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 7 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat, dan dari 153 total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 164 dan terdapat 88 buah yang sudah dilestarikan, tahun 2023 turun menjadi 163 dan ada kenaikan menjadi 92 buah yang sudah dilestarikan. Situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada terdapat 102 buah yang sudah dikelola, terjadi penambahan yang sangat dari tahun 2021 yang hanya sebanyak 94 buah. Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 70,78%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi peningkatan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya terjadi penambahan di tahun 2022, penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 11 cagar budaya, sehingga dari jumlah yang awalnya cuma 153 keseluruhan menjadi berjumlah 164 serta Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola juga meningkat dari tahun 2021 berjumlah 94 buah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 102 buah dan tahun 2023 menjadi 137 buah.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.204
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*)
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	46	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	12	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	27	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
	Total	**225**	**225**	**215**	**215**	**215**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK)) yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah sebanyak 225 OPK sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi pengurangan menjadi 215 OPK yang disebabkan karena setelah dilakukan regestrasi/penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 2020 ada beberapa kriteria yang tidak termasuk kedalam OPK, seperti Tradisi Lisan yang awalnya berjumlah 46 menjadi 43, begitu juga dengan Teknologi Tradisional yang awalnya 27 menjadi 19 sedangkan pada Ritus terjadi penambahan 1 buah, namun ada dua (2) buah warisan budaya tak benda (intangible) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) yaitu Songket Silungkang yang termasuk kedalam Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Tangsi yang termasuk kedalam Bahasa. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tabel 2.205
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	40,28	62,50	69,44	88,70	53,85
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	27,78	37,50	55,56	64,51	38,46
3	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	22,2	26,7	20	25,05	20,93
4	Persentase Budaya Benda yang Lestari	66,37	68,46	57,1	60,5	70,54
5	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	18,598	20,458	15.937	34.658	38,339

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

3. Jumlah Kunjungan Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karena disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya "Mak Itam". Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.206
Jumlah Kunjungan Objek Wisata Museum
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Museum Goedang Ransum	15.309	5.980	5.605	8797	12.451
2	Lubang Tambang Mbah Soero	8.492	3.957	3.884	6373	10.018
3	Museum Kereta Api	6.503	3.250	2.869	6159	9.275
	Jumlah	**30.267**				

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Kota Sawahlunto. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 – khususnya urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan – menjadi fenomena baru bagi perkembangan perpustakaan di daerah terutama dalam hal sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerinrah Kabupaten/Kota. Dengan adanya sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan pencapaian program pembangunan di bidang perpustakaan dapat lebih realistis

dan terukur. Untuk perkembangan urusan perpustakaan di Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.207
Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022 *	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	173.452	52.530	86.936	158.045	210.971
	Perpustakaan Daerah	64.500	26.860	27.089	55.948	65.009
	Perpustakaan SD/MI	68.322	9.627	34.385	36.146	53.247
	Perpustakaan SMP/MTs	19.241	5.399	7.878	43.032	69.868
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	16.843	7.201	11.496	16.783	16.256
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1.450	613	1.229	1.233	1.688
	Taman Bacaan Masyarakat	3.096	2.830	4.859	4.903	4.903
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (%)	2.53	-69.71	65.50	84,57	1,33
	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	62.524	65.138	65.807	66.778	67.758
3	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	2.77	0.83	1.32	2.40	3,18

Sumber Data : Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Untuk perkembangan koleksi buku pada Perpustakaan Kota Sawahlunto dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.208
Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (buku)	163.330	183.204	200.907	174.361	191.883
	Perpustakaan Daerah	14.335	14.819	15.249	15.461	16.863
	Perpustakaan SD/MI	119.005	138.602	131.692	117.252	131.605
	Perpustakaan SMP/MTs	20.311	18.954	34.956	25.057	25.520
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	6.044	6.354	6.373	6.631	6.860
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	2.142	2.069	8.391	6.637	7.712
	Taman Bacaan Masyarakat	1.493	2.406	4.246	3323	3.323
2	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat (orang)	11	12	14	14	9
3	Koleksi Buku yang tersedia Per satuan Penduduk (%)	2.61	2.78	3.05	2.65	2.89

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa koleksi buku yang ada di perpustakaan di Kota Sawahlunto berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan meningkat. Hal ini disebabkan adanya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Sawahlunto dengan menganggarkan membeli buku buku terbaru setiap tahunnya.

Tabel 2.209
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2018- 2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Layanan Perpustakaan (layanan)					
	Pustaka : Umum	3	3	3	3	2
	Pustaka : Keliling	-	-	-	-	2
	Pustaka : Khusus	-	-	-	-	6
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	-	5
	TOTAL	**122**	**122**	**122**	**122**	**134**
2.	Jumlah Koleksi (koleksi)					
	Pustaka : Daerah	32,624	33,674	34,450	34.956	36.912
	Pustaka : SD/MI	119,005	138,602	131,692	345.676	374.088
	Pustaka : SMP/MTs	20,311	18,954	34,956	185.058	189.706
	Pustaka : SMA/SMK/MA	6,044	6,354	6,373	257.940	272.085

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pustaka : Desa/Kelurahan	2,142	2,069	8,391	13.260	13.260
	Pustaka Khusus	-	-	-	-	8.936
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	-	5.558
	TOTAL	**180,126**	**199,653**	**215,862**	**836.890**	**900.545**
3.	Jumlah Tenaga Perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Umum	11	12	14	14	19
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	28
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	115
	Pustaka : Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
	Pustaka Khusus	-	-	-	-	6
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	-	5
	TOTAL	**130**	**131**	**133**	**133**	**173**
4.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Daerah	64,500	26,860	27,089	55.948	65.009
	Pustaka : SD/MI	68,322	9,627	34,385	36.146	53.247
	Pustaka : SMP/MTs	19,241	5,399	7,878	43.032	69.868
	Pustaka : SMA/SMK/MA	16,843	7,201	11,496	16.783	16.256
	Pustaka : Desa/Kelurahan	1,450	613	1,229	1.233	1,688
	Pustaka Khusus	-	-	-	-	1.433
	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-	-	4.903
	TOTAL	**170,356**	**49,700**	**82,077**	**153.142**	**212.404**
5.	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi (pustaka)					
	Pustaka : Daerah	0	0	2	2	2
	Pustaka : SD/MI	0	0	1	9	9
	Pustaka : SMP/MTs	0	0	2	5	5
	Pustaka : SMA/SMK/MA	0	0	1	3	3
	Pustaka : Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	**6**	**19**	**19**
6.	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (taman baca)	4	5	5	5	5
7.	Jumlah Pustaka Khusus	-	-	-	-	6
8.	Jumlah Anggota Perpustakaan (anggota)	4.612	4.862	5.137	5.671	6.105
9.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	-	72.13	72.45	74.14	88,33
10.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Msyarakat (%)	-	50.2	50.4	60,1	64,13
11.	Kerjasama Perpustakaan	1. Rumah Tahfiz Qur'an Ar-Rasyiid 2. SDN 13 Sungai Durian 3. MIS Lunto 4. MIN 3 Kota Sawahlunto 5. SDN 02 Lunto Timur 6. SDN 03 Aur Tanjungkang 7. Bawaslu Kota Sawahlunto 8. SDN 06 Kubang Tangah 9. SDN 12 Kubang Barat 10. SDN 03 Lubang Panjang 11. Yayasan Penyantun Anak Yatim, Panti Asuhan (YPAP) Mudik Air 12. TK Aisyiyahh III Sawahlunto 13. TK AL irsyad Sawahlunto				

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan Uraian diatas dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, setiap unsurnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana, akan berdampak pada indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun berikutnya.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya.

Tabel 2.210
Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi	Arsip	1.981	3.532	2.147	5.284	2419

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif antara 1.981 arsip hingga 5,284 arsip. Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi tertinggi terjadi tahun 2022, kemudian turun menjadi 2.419 pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan.

Tabel 2.211
Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	11.5	7.7	11.5	11.5	9,3

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur pengelola arsip tentang Kearsipan. Pola pembinaan pengelolaan arsip selama ini hanya berupa bimtek dan monitoring saja, untuk itu di masa yang akan datang perlu dilakukan pendampingan langsung kepada pengelola arsip di lapangan secara intensif dan berkelanjutan sampai perangkat daerah mampu mengelola arsip secara mandiri sesuai standar baku kearsipan.

Tabel 2.212
Persentase Kesediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	20	25	25	100	44,5

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat Tingkat Kesediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional masih minim. Hal ini disebabkan sarana prasarana, kompetensi SDM, manajemen sistem kearsipan dan komitmen pimpinan belum memadai. Oleh sebab itu pada masa yang akan datang perlu dilakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022, perangkat daerah sudah melakukan kebijakan dan Inovasi terhadap perencanaan sehingga perencanaan pembangunan maupun perencanaan teknis berjalan efektif dan efisien.

Tabel 2.213
SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	7	10	10	10	10

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat jumlah pegawai yang mengelola kearsipan dari tahun 2020-2023 stagnan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai pengelola arsip setiap tahunnya tidak mengalami penambahan.

Tabel 2.214
Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2023
1	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	31%
2	Arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	46%
3	arsip statis yang telah dibuatkan sarana Bantu temu balik	100%
4	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1%
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	39,64 %
6	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip NSPK	100%
7	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana NSPK	-
8	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran Daerah kota dengan NSPK	50,30 %
9	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	80,66%
10	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	5,90%
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1%

Sumber Data : Dinas Perpustaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2023

Dari beberapa Indikator Kinerja Daerah (Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 20230, hanya terdapat dua indikator yang sudah mencapai 100%, tujuh indikator capaiannya masih berada di bawah 50%.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan kota Sawahlunto bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.215
Produksi dan Konsumsi Ikan
Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Ikan (Ton)	217,26	206,27	189,79	235,55	238,88
Konsumsi ikan (kg)	1.908.507	2.456.822	2.472.273	2.072.506	2.982.807
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	28,55	36,66	36,43	41,49	43,83

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2023

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ikan darat di Kota Sawahlunto dari tahun 2019 sampai 2023 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Namun tahun 2021 produksi ikan mengalami penurunan yaitu menjadi 189,79 ton dan pada Tahun 2022 ini produksi ikan sebesar 235,55. Namun dilihat dari jumlah konsumsi ikan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2021 konsumsi ikan kota Sawahlunto adalah 36,43 kg perkapita per tahun dan pada tahun 2022 jumlah produksi ikan Kota Sawahlunto kembali mengalami peningkatan menjadi 235,55 ton.

Dilihat dari kinerja produksi ikan tahun 2023 mengalami peningkatan. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.216
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)
Tahun 2019-2023

Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
Sungai/perairan umum	195,97	195,97	195,97	195,97	195,97
Kolam	62,621	39,02	39,02	39,02	39,02
Sawah	-	-	-	-	-
Total	**258,591**	**234,99**	**234,99**	**234,99**	**234,99**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa luas area budidaya perikanan di tahun 2023 menjadi 234,99 hektar. Dilihat dari jenis areal budidaya perikanan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan areal kolam tetap 39,02 hektar. Tidak adanya kenaikan budidaya ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi ikan yang dihasilkan, untuk tahun 2021 untuk produksi ikan budidaya sungai/peraian umum adalah 28,76 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan 177,52 ton. Untuk itu sangat perlu di lakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Untuk mendukung *Brand Image* Pariwisata Halal, Pemko Sawahlunto telah menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2020 pada Program/Kegiatan dan beberapa Subkegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain : Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata dan subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.

Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik khusus dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Berikut adalah capaian indikator kinerja daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata tahun 2019-2023.

Tabel 2.217
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB sektor Pariwisata (Juta rupiah)	82.406,43	75.255,42	84.016,91	97.528,6	107.222,77
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,24	2,06	2,18	2,22	2,22
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2,48	1,75	1,86	3,302	3,21
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan (%)	0,12	-0,98	2	385,7	20,58
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	-9	-59	14,59	59,8	60,13
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	14,74	15,84	19,27	10,52	4,830
7	Persentase pengunjung yang menga takan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	65	65	75	80	1.147,18
8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	32,25	38,24	50	50	60
9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	60,55	60,55	64,26	34	67,60
10	Jumlah Wisatawan (orang)	235.524	95.995	88.248	141.020	225.805

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang professional (%)	13,22	13,22	15,30	51	25,34

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.218
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk)
Tahun 2019-2023

Objek Wisata	2019	2020	2021	2022	2023
Museum Gudang Ransum	15.309	5.959	5.574	9.568	12.451
Museum Kereta Api	6.503	3.246	2.867	6.030	9.275
Water Boom	68.709	23.024	31.150	38.692	34.137
Taman Satwa Kandi	57.715	15.894	14.890	34.507	25.445
Lubang Tambang Mbah Soero	8.492	3.932	3.704	6.745	10.018
Desa Wisata Rantih	5.599	2.822	2.406	1.082	200
Kelok 16	-	-	-	-	
Puncak Cemara	44.627	21.682	17.812	20.990	16.563
Taman Buah	4.897	3.363	6.556	2.943	6.650
Camping Ground Kandi	9.611	9.627	3.289	3.025	346
Sinema 4 Dimensi				2.795	
Museum Tari				184	
Museum Musik				510	524
Museum Lukis				314	277
Iptek Center				5.385	5.794
Kampung Lebah Zam Zam				94	
Puncak Sati				81	
Kolam Pemandian Mudiak Lugha				8.075	20.214
Total	**235.524**	**95.995**	**88.248**	**141.020**	**141.894**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto 2023
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2023

Kalau dilihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing objek terjadi penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga objek objek wisata tersebut ditutup dan bagi yang masih dibuka harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat serta turunnya minat masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata yang disebabkan ikut turunnya pendapatan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan kunjungan. Camping Ground Kandi terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena adanya penambahan atraksi baru pada Camping Ground pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 kembali terjadi penurunan dan 2023 ada sedikit kenaikan sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata, adapun rincian kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.219
Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Tahun 2019-2023

Pengunjung	2019	2020	2021	2022	2023
Wisatawan Mancanegara	403	7	7	34	41
Wisatawan Nusantara	235.121	95.988	88.241	140.986	225.764
Total	**235.524**	**95.995**	**88.248**	**141.020**	**225.805**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Kalau dilihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara pada tahun 2019 cukup bagus dimana terdapat 403 orang karena banyaknya kegiatan kegiatan yang bertaraf internasional seperti Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival dan Sawahlunto Internasional Musik Festival yang diadakan di Kota Sawahlunto, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 7 orang, penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang disebabkan juga karena perekonomian masyarakat yang juga ikut terdampak karena wabah covid-19 begitu juga dengan tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara tetap 7 orang tetapi pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan menjadi 34 orang, kunjungan wisatawan nusantara terjadi kenaikan dari 88.241 orang menjadi 140.986 orang yang disebabkan mulai hilangnya dampak wabah covid-19 sehingga seluruh masyarakat sudah kembali bebas

melakukan aktifitas diluar rumah dan tahun 2023 kembali ada kenaikan yang sangat signifikan.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022, Terkait dengan itu destinasi pariwisata sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikut sertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom dan Bioskop 4 Dimensi. Potensi objek wisata yang terdata sampai 2022 tercatat sebanyak 30 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional.

Tabel 2.220
Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Taman Satwa Kandi	Barangin	√		√	√	√	√	√
2	Camping Ground Wisata	Barangin	√		√	√	√	√	√
3	Taman Buah	Barangin	√		√	√	√	√	√
4	Batu Tanjung/Paralayang	Talawi	√		√	√	√	√	√
5	Hutan Kota	Talawi	√		√	√	√		√
6	Desa Wisata Rantih	Talawi	√		√	√	√	√	√
7	Makam M.Yamin	Talawi	√		√	√	√	√	√
8	Makam Syeh Kolok	Talawi	√		√	√	√		√
9	Kuburan Keramat	Talawi		√					√
10	Waterboom	Silungkang	√		√	√	√	√	√
11	Goa Lakuak Kuali	Silungkang		√		√	√		√
12	Kawasan Tenun Silungkang	Silungkang	√		√	√	√	√	√
13	Kawasan Kota Lama	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
14	Museum Gudang Ransum	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
15	Lubang Tambang Mbah Soero	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
16	Museum Kereta Api	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
17	Kelok 16	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
18	Puncak Polan	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
19	Puncak Cemara	Barangin	√		√	√	√	√	√
20	Panorama Bukik Gadang	Talawi		√					√
21	Panorama Guguk Bungo	Barangin		√					√
22	Goa Slamet	Barangin		√					√
23	Goa Bunian	Talawi		√					√

No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2019	2020	2021	2022	2023
24	Panorama Sundak Langik	Talawi		√					√
25	Kawasan Kebun Serai Wangi	Barangin	√						√
26	Wisata Batu Runcing	Silungkang		√					√
27	Wisata Batu Hitam	Lumindai		Rencana Pengembangan					√
28	Danau Biru	Talawi							
29	Goa Janjian	Talago gunuang					√	√	√
30	Puncak Sati	Saringan					√	√	√
	JUMLAH				**17**	**20**	**20**	**21**	**29**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 22 objek, dan 7 objek wisata yang belum dikembangkan dan 1 objek wisata dalam tahap rencana pengembangan. Untuk objek wisata yang sudah dikembangkan ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2.221
Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Hotel					
	-Bintang 1	1	1	1	1	0
	-Bintang 2	1	1	1	1	0
	-Bintang 3					2
	-Non Bintang/Melati	9	9	54	54	51
2	Usaha Perjalanan Wisata					
	-Agen Perjalanan Wisata	8	8	6	6	5
3	Jasa Transportasi (termasuk penyewaan kendaraan)	3	3	3	3	4
4	Usaha Pondok Wisata	50	50	50	48	48
5	Usaha Cafe	10	12	12	14	8
6	Rumah Makan	58	56	56	56	50
7	Toilet Umum Berfungsi dan Bersih	6	6	6	6	6
8	Usaha Karaoke	4	4	4	1	1
9	Usaha Kawasan Pariwisata	7	7	7	7	16
10	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	1	1	3	3
11	Usaha Taman Rekreasi	3	3	3	3	3
12	Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran/Fasilitas Meeting (termasuk dalam hotel)	4	4	4	4	4
13	Usaha Pentas Pertunjukan Seni Terbuka	2	2	2	-	
14	Usaha Lapangan Tenis	4	4	4	-	
15	Usaha Sanggar Seni	43	43	43	-	40
16	Usaha Bumi Perkemahan	2	2	2	2	2
17	Usaha Pusat Penjualan Makan/Cinderamata	6	6	6	6	53

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis usaha pariwisata dari tahun 2019-2023 tidak berkembang, hanya ada beberapa jenis usaha yang ada peningkatan namun tidak signifikan. Tapi Hal ini disebabkan karena terjadi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Di samping itu Kota Sawahlunto merupakan kota wisata minat khusus, karena objek-objek wisata yang berada di kawasan kota lama merupakan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga pengunjung umumnya memiliki minat khusus untuk melihat objek-objek bekas tambang tersebut.

Sementara itu, agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang berada di lokasi tempat tinggalnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga muncul berbagai lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata yang berkembang. Adapun data kelembagaan pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.222
Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto
Tahun 2019–2023

No	Nama Pokdarwis/Lembaga Desa/Asosiasi Homestay	Tahun					Ket.
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Objek Wisata Muaro Kalaban				V	V	Aktif
2.	Meranti				V	V	Aktif
3.	Muaro Kalaban				V	V	Aktif
4.	Bukik Batu				V	V	Aktif
5.	Desa Silungkang Tigo				V	V	Aktif
6.	Kampung Hijau dan Seni				V	V	Aktif
7.	Batu Ponjong Dusun Sionsek				V	V	Aktif
8.	Objek Wisata Batu Runcing				V	V	Aktif
9.	Lembah Sajonang	V			V	V	Aktif
10.	Silungkang Oso		V		V	V	Aktif
11.	Puncak Sati				V	V	Aktif
12.	Lunto Barat				V	V	Aktif
13.	Gudang Ransum				V	V	Aktif
14.	Lunto Timur				V	V	Aktif
15.	Lembaga Desa Wisata Rantih				V	V	Aktif
16.	Desa Kolok Nan Tuo			V	V	V	Aktif
17.	Asosiasi Homestay				V	V	Aktif

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023

Pada tahun 2019, jumlah kelembagaan yang ada dan berkembang di Kota Sawahlunto hanya 2 (dua) lembaga yang aktif, namun tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata atau kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa dan tahun 2023 semua kelembagaan pariwisata mulai aktif, karena masyarakat mengakui dengan adanya objek wisata yang berada di lokasi desanya, yang dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, tentu akan berdampak terhadap pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Sehingga banyak bermunculan penginapan penginapan rumahan seperti Homestay dan juga ada beberapa hotel dan wisma yang telah terlebih dahulu berdiri seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.223
Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2019-2023

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2019		2020		2021		2022		2023		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
1.	HOTEL OMBILIN	1700	25	0	0	0	0	0	0	4164	10	
2.	WISMA W 39	725	3	222	0	0	0	0	0	0	0	
3.	WISMA MUTIARA	800	7	254	0	0	0	0	0	0	0	
4.	WISMA CAHAYA	51	5	53	0	0	0	24	0	26	0	
5.	HOTEL PARAI	4915	47	4.292	119	0	0	0	0	2408	0	
6.	WISMA ANUGRAH	250	0	110	0	0	0	88	0	0	0	
7.	WISMA AGRA II	661	0	216	0	0	0	0	0	0	0	
8.	HOTEL LAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	WISMA BDBT	740	0	421	0	0	0	0	0	0	0	
10.	HOMESTAY OMA	1163	28	1.539	26	366	0	1.051	0	1.875	40	
11.	HOMESTAY BUNGA	166	0	265	0	0	0	65	0	289	0	
12.	DARA KEMBAR	6	0	9	1	10	0	0	0	62	0	
13.	HOMESTAY AILA	239	0	290	0	13	0	195	0	373	0	
14.	HOMESTAY BALQIS	430	0	0	0	14	0	109	0	63	0	
15.	HOMESTAY KATE	70	3	0	0	0	0	142	11	90	0	
16.	HILLSIDE HOMESTAY	112	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
17.	CENDANA HOMESTAY	355	0	0	0	108	0	303	15	249	0	
18.	TERATAI HOMESTAY	154	0	0	0	0	0	9	0	0	0	
19.	ALIYAR HOMESTAY	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	IKHSAN HOMESTAY	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	AYAH SAKI HOMESTAY	8	0	0	0	0	0	38	0	28	0	
22.	KASIH IBU	81	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
23.	BUNDA HOMESTAY	25	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
24.	VYRA HOMESTAY	84	0	0	0	0	0	5	0	1	0	
25.	UKHTY HOMESTAY	56	0	3	0	0	0	42	0	7	0	
26.	HARISHA HOMESTAAY	64	0	130	0	164	0	11	0	0	0	
27.	MAIMUN HOMESTAY	15	0	0	0	0	0	8	0	0	0	
28.	MEUTYA HOMESTAY	501	0	39	0	248	0	674	0	335	0	

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2019		2020		2021		2022		2023		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
29.	DWI TANIYA HOMESTAY	8	0	9	0	0	0	18	0	48	0	
30.	ALIMAR HOMESTAY	8	0	0	0	0	0	6	0	2	0	
31.	PAUSIL HOMESTAY	32	0	19	0	0	0	11	0	0	0	
32.	J- CHI HOMESTAY	15	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
33.	TAPIAN TITI HOMESTAY	20	0	0	0	0	0	20	0	30	0	
34.	ELVI SUMANTI HOMESTAY	55	0	36	0	0	0	0	0	0	0	
35.	ASMILDA HOMESTAY	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	GUSPRIADI HOMESTAY	135	0	11	0	0	0	8	0	0	0	
37.	IDA LENI HOMESTAY	55	0	30	0	0	0	8	0	0	0	
38.	SANUSI RASYID HOMESTAY	71	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
39.	KITO HOMESTAY	28	2	0	0	0	0	0	0	19	0	
40.	ERWATI SAID HOMESTAY	87	0	0	0	0	0	6	0	0	0	
41.	SURAU LAKUAK HOMESTAY	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
42.	RAMLI HOMESTAY	56	0	39	0	0	0	0	0	0	0	
43.	ERITA HOMESTAY	24	0	0	0	0	0	8	0	0	0	
44.	YUNIWARI HOMESTAY	35	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
45.	HASNIL MISBAH HOMESTAY	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46.	TIBARAU HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	KAJATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	SAWAH PULAU HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	ARITA HOMESTAY	39	0	28	0	0	0	22	0	2	0	
50.	IDA MANCA HOMESTAY	37	0	38	0	0	0	153	0	126	0	
51	Savanah Guest House					438	0	1143	0	278	0	
JUMLAH		**10461**	**151**	**840**	**0**	**2.395**	**0**	**12.411**	**76**	**10.477**	**50**	
TOTAL		**10.612**		**840**		**2.395**		**12.487**		**10.527**		

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2023

Dari 51 penginapan yang ada di Kota Sawahlunto tersebut secara keseluruhan aktif dan mempunyai tingkat kunjungan yang bagus tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tinggi, ini diakibatkan oleh rendahnya minat wisatawan karena dampak wabah covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi melemah. Dan pembatasan pembatasan masyarakat yang membuat pergerakan masyarakat menjadi tidak leluasa seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat masyarakat lebih cenderung tidak keluar rumah tetapi pada tahun 2021 kembali ada peningkatan kunjungan meskipun itu hanya pengunjung domestik kemudian tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan yang cukup tinggi karena seluruh objek wisata di Kota Sawahlunto mulai menggeliat kembali setelah hilangnya wabah virus covid-19.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidag Pertanian, Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi target pencapaian pemerintah daerah di urusan bidang pertanian, adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.224
Capaian Indikator Bidang Pertanian
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Sektor Pertanian	325.354,30	326.224,79	345.211,69	383.196,89	410.681,37
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	8,84	8,92	8,96	8,73	8,51
Produksi Padi	17,926,00	17.874,45	16.691,72	17.733,35	18.175,13
Produksi Kakau(ton)	565,73	566,11	572,44	588,80	590,85
Produksi Karet (ton)	1540,16	2012,87	2223,86	2230,91	2.338,76
Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton)	217,26	206,27	215,92	235,55	238,88
Produktifitas Pertanian Per hektar/Tahun (padi sawah)(%)	5,16	5,16	5,56	5,95	5,96
Persentase Penurunan Kejadian danJumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	20,00	20,00	0	100	0
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	11,29	-0,29	-6,61	6,24	2,49
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	4,37	0,06	1,11	2,86	0,35
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet(%)	21,98	30,69	10,48	0,32	4,83
Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	-3,91	-0,73	-4,45	6,09	4,78
Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	-	-2,59	33,30	13,47	-10,35
Indek Penanaman (IP)	2,14	2,07	2,12	2	2,05

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2023

Dari tabel diatas PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami Peningkatan setiap tahunnya, dan untuk Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan kembali walaupun tidak terlalu signifikan sedangkan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Untuk Produksi Padi pada Tahun 2023 mengalami penurutan dari tahun 2022 hal ini disebabkan karena produktivitas meningkat dan pendampingan di lapangan terutama di lokasi kerangka samping area (KSA) BPS, luas baku lahan sawah dari 1.860 hektar menjadi 1.571 hektar dan untuk Produksi Tanaman Kakao dapat dilhat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh karena adanya pelatihan bagi Petani tentang pemeliharaan tanaman kakao dan diberikan bantuan pupuk npk, adanya bantuan gunting pangkas untuk memangkas Tanaman. Dan untuk Produksi Tamanan Karet juga mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 2012,87 Ton dan Tahun 2021 sebesar 2223,86 Ton dan tahun 2022 sebesar 2230,91 ton dan pada tahun 2023 sebesar 2338,76, hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan tanaman yang baik oleh petani dan pembinaan oleh penyuluh tentang pemeliharaan tanaman dan tentang pengendalian hama penyakit.

Jumlah Produksi Ikan Konsumsi pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan yaitu 238,88Ton hal ini disebabkan oleh banyak nya pembudidayaan yang mengisi ulang kolam tersebut. Dan Untuk Produktifitas Pertanian Perhektar juga mengalami peningkatan pada

Tahun 2023 Sebesar 5,96 % (padi Sawah) disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian benih unggul berlebel sebanyak 3.000 kg benih gadang rumpun kumbayau, disamping itu juga ada bantuan pupuk NPK ponska plus sebanyak 22.500 kilogram untuk peningkatan Produksi dan Produktivitas padi. Untuk Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus Penyakit Hewan menular pada tahun 2022 ini dengan 100 % sedangkan tahun 2023 o%. Untuk Persentase Peningkatan Tanaman Padi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 6,24. Dan untuk Persentase Peningkatan Tanaman Kakao mengalami penurunan pada Tahun 2023 ini yaitu sebesar 0,35 %. Dan Untuk Persentase Peningkatan Persentase Produksi Tanaman Karet mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,83% hal ini disebabkan anatara lain kerena harga murah biasanya petani enggan untuk memanen. Dan untuk Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi pada Tahun 2023 sebesar 4,78%. Untuk Persentase Peningkatan Produksi daging Ayam pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu -10,35% Dan Untuk Indek Penanaman juga mengalami sedikit Kenaikan menjadi 2,05% pada Tahun 2023 hal ini disebabkan karena adanya perbaikan jaringan irigasi baik melalui dana APBD maupun APBN.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Adapun perkembangannya Sektor Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.225
Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi
Tahun 2019 -2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	553.593,38	547.822,20	564.865,95	655.300,60	725.979,26
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	%	15,9	14,98	14,67	14,93	15.05
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	%	10	10	10	42,7	46
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80	80	98	67	49.1
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapann (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40	0	37,7	0	11.2
jumlah omset dipasar pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	23.900,00	22.885,00	25.048	25.563	26.490

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari Tabel Urusan bidang Perdagangan di atas terlihat PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2023 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, dari 655.300,60 tahun 2022 menjadi 725.979,26 pada tahun 2023. Untuk Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15.05 dari Tahun 2022.

Untuk Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko dan Swalayan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 dan 2023 Mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan program pemerintah daerah antara lain adanya kebijakan dana bergulir dengan bunga rendah, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk Persentase Penilaian Realisasi Pupuk tahun 2022 dan 2023 mengalami

Penurunan dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena Kondisi Keuangan Daerah Kota Sawahlunto.

Dan Untuk Jumlah Omset Pasar Tradisional Sawahunto juga mengalami kenaikan dari Tahun 2022-2023. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antra lain Daya Beli Masyarakat. Daya beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.226
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasar Sawahlunto	779	779	779	779	779
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	72
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	140
4.	Pasar Sapan	50	50	50	50	50
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tangah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10
9.	Pasar Songket	75	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami penambahan, ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan tidak adanya penambahan pedagang yang menempati kedai di Pasar Sawahlunto ini dikarenakan karena keadaan Kota Sawahlunto yang sekarang masih dalam keadaan pasca pandemi Covid-19. Peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tersendat dan sekarang pada Tahun 2023 Pasca Pandemi Perdagangan di Kota Sawahlunto sudah mulai naik. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.227
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Nama Pasar	Pedagang Kaki Lima											
		Asli Sawahlunto					Luar Sawahlunto						
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
1.	Pasar Sawahlunto	160	160	160	160	166	213	213	213	213	154	160	160
2.	Pasar Silungkang	105	105	105	105	105	32	32	32	32	32	105	105
3.	Pasar Talawi	96	98	98	98	98	221	221	221	221	221	96	98
4.	Pasar Sapan	38	41	41	41	51	18	18	18	18	12	38	41
5.	Pasar Tak Bancah	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	10	10
6.	Psr Tumpuak Tangah	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3
7.	Pasar Lumindai	12	12	12	12	12	5	5	5	5	5	12	12
8.	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	5	5
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	407	420	434	434	450	495	495	495	495	430	407	420

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto tidak mengalami kenaikan, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto.Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, untuk pasar sawahlunto pada hari rabu dan sabtu dan untuk Pasar Talawi pada hari selasa dan jumat.namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umunya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan

lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedaganga cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang berasal luar sawahlunto, seperti tanah datar dan solok.

Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari propinsi. Dengan telah diberlakukanya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP, Tahun 2020 tidak melakukan tera ulang sehingga tahun 2021 tera ulang sebanyak 1650 buah timbangan yang ditera dengan kenaikan 80% dan Pada Tahun 2022 ini telah dilakukan Tera Ulang sebanyak 377 buah timbangan.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian indikator kinerja bidang perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.228
Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi
Tahun 2019 -2023

uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB sektor Industri	Juta Rupiah	392.312,53	395.492,23	432.174,39	474.213,39	524.486,90
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	%	10,66	10,82	11,22	10,80	10.87
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	%	10,62	10,62	10,62	4,46	0.013
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	78	RPIK Belum ditetapkan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan						

uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait	%	100	100	100	0	0 (Koperindag tidak memiliki kewenagan untuk mengeluarkan izin))
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	0 (Belum ada penetapan kawasan Industri)
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100
Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu	%	0	0	0,004	0,007	0,061
Persentase IKM yang memanfaatkan teknologiindustri	%	0	0	0,007	0,026	0.029

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dari tabel Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian dapat disebutkan antara lain yaitu untuk Nilai PDRB Sektor Industri pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan dari Tahun 2022. Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 474.213,39 dan tahun 2023 sebesar 524.486,90. Dan untuk Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (2010=100) dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Tenaga Kerja dan Teknologi.

Untuk Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tahun 2019 sampai Tahun 2023 mencapai 100 %. Dan Untuk Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu Tahun 2023 sebesar 0,061 % ada pergerakan sedikit di bandingkan Tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penerimaan standar mutu Produksi. Dan Untuk Persentase IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri untuk tahun 2023 sebesar 0,029 % dan ini disebabkan karena IKM pada Tahun 2022 ada menerima alat produksi seperti Komputer, Printer, Alat Pencacah Plastik, Spiner.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara rinci capaian kinerja urusan kesekretariatan daerah tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	na	B (80)	B (81,21)	B (83,40)	B (86,59)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	B(60,06)	B (61,03)	B (61,61)	B (61,92)	B (62,84)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pemerintah (SAKIP)						
Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto	%	2,23 %	- 1,99 %	54,67 %	25,05 %	4,63 %
LPPD	Skor	na	na	na	na	na

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 80 pada tahun 2020 menjadi 86,59 pada tahun 2023 dengan kategori B. Indeks Kepuasan Masyarakat ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan realita. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota Sawahlunto mulai terlaksana pada tahun 2020 bekerja sama dengan Lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumatera Barat dengan sampel 10 Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum tahun 2020, penilaian IKM dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Kinerja Kesekretariatan Daerah berikutnya adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki prediket SAKIP B dengan skor yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari skor 60,06 pada tahun 2019 menjadi 62,84 pada tahun 2023. Masih rendahnya Nilai SAKIP Kota Sawahlunto disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1).Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup; 2).Cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional; 3).sebagian besar dokumen penjenjangan kinerja Perangkat Daerah belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan logical framework; 4).belum dilakukan perbaikan terhadap dokumen IKU beserta formulasi perhitungan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

Peningkatan zakat di Kota Sawahlunto adalah Kinerja Kesekretariatan Daerah lainnya. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa peningkatan zakat di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 54,67 % dari Rp.2.856.875.200 pada tahun 2020 menjadi Rp. 4.418.653.451 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp.5.525.690.987 atau terjadi peningkatan sebesar 25,05%. Pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp.5.915.087.137. Peningkatan zakat ini sangat tergantung pada jumlah muzaki. Dan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat yang mungkin diperoleh setiap tahun di Kota Sawahlunto adalah dengan mengetahui seberapa banyak potensi jumlah muzaki yang ada di Kota Sawahlunto. Saat ini terdapat kendala untuk mengetahui jumlah muzaki, karena penyerahan zakat yang dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah tanpa melaporkan jumlah konkrit muzaki yang ada pada instansi/lembaga/perangkat daerah tersebut, sehingga tidak diketahui perkembangan jumlah muzaki di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun. Namun Baznas Kota Sawahlunto rencananya akan melakukan pendataan muzaki berdasarkan nama, instansi dan alamat.

Dan indikator kinerja urusan kesekretariatan daerah Kota Sawahlunto berikutnya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai LPPD Kota Sawahlunto yang tersedia hanya pada tahun 2018 dengan skor 3,0965. Sedangkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019-2023 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum ada diumumkan.

B. Sekretariat DPRD

a. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat-alat DPRD Kota
b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)
c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 2019 – 2024 adalah 20 orang, dengan 4 fraksi, yaitu:

- Fraksi PKPI
- Fraksi Persatuan Pembangunan, Demokrat, Perindo
- Fraksi PAN, Golkar, PDI Perjuangan
- Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya

Tabel 2.230
Jumlah Anggota Dewan
Berdasarkan Partai Politik Dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	1	1	2
PPP	1	2	3
PKPI	2	1	3
PKS	2	-	2
PAN	2	-	2
Perindo	1	-	1
Demokrat	2	-	2
PDIP	2	-	2
Gerindra	1	-	1
Nasdem	2	-	2
Jumlah/total	16	4	20

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Tabel 2.231
Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2019 - 2023

No.	Rapat	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rapat Paripurna/Istimewa	14	18	20	27	27
2	Rapat Pimpinan/Gab. Pimpinan	43	43	42	5	12
3	Rapat Badan Musyawarah (Bamus)	19	18	20	16	16
4	Rapat Badan Anggaran (Banggar)	25	14	16	13	14
5	Rapat Panitia Khusus (Pansus)	-	8	10	-	2
6	Rapat Konsultasi	12	12	10	14	14
7	Rapat Fraksi	14	18	18	-	-
8	Rapat Kerja/Dengar Pendapat/gabungan Komisi	38	38	36	3	12
9	Rapat Badan Kehormatan (BK)	5	-	3	3	3
10	Rapat Badan Legislatif Daerah	64	64	60	2	3
11	Rapat Komisi	30	36	36	24	36
	Jumlah/total	268	269	271	107	139

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Tabel 2.232
Jumlah Keputusan DPRD
Menurut Jenis Keputusan Di Kota Sawahlunto,
Tahun 2019-2023

	Jenis Keputusan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keputusan DPRD	14	8	30	12	12
2	Keputusan Sekwan	37	48	13	15	32
	Jumlah/total	**51**	**56**	**43**	**27**	**44**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang akan ditetapkan selanjutnya RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Pada masa periode transisi saat ini, Kota Sawahlunto mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2024-2026, serta Dokumen Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Kota Sawahlunto pada urusan perencanaan untuk lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.233
Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2019 – 2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8	9	10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I	**PERENCANAAN**						
1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat	-	4	4	4	3
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	92	99	98,3	98,3
3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	100	99	83,3	88,9
4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	21,43	26,55	28,3	4,09	5,2
5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	100	100	100	100	100
6	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA (Ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	92	99	100	100
11	Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	99	100	100
12	Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : RPJMD 2018-2023, Data Diolah 2024

Dari Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa catatan adalah pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Provinsi) yang berhasil meningkat pencapaiannya dari tahun 2019 sampai 2023 meskipun dibawah target yang ditetapkan. Sawahlunto juga belum berhasil menjadi peringkat pertama di Sumatera Barat untuk diajukan ke tingkat nasional sebagaimana pernah diraih Kota Sawahlunto pada periode sebelumnya. Hal tersebut masih perlu ditingkatkan terutama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari perencanaan seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang harus menjadi prioritas utama melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, studi tiru serta peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas perencanaan yang dihasilkan. Dalam hal ini perlu pelibatan pihak-pihak lain seperti Akademisi melalui Dewan Pakar yang dapat memberikan penajaman terhadap perencanaan kota Sawahlunto yang mempunyai karakteristik spesifik dibandingkan daerah-

daerah lain di Sumatera Barat. Belum maksimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan yang bisa dijadikan rujukan dalam perencanaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan masih sangat rendah di setiap tahun perencanaan terutama di tahun 2019 s.d 2021 (berada di kisanan 20%-30%). Angka ini semakin menurun tajam ditahun 2022 dan 2023 (4,09% dan 5,2%). Keterbatasan keuangan daerah masih menjadi faktor utama belum maksimalnya perencanaan partisipatif diakomodasi dalam perencanaan pembangunan kota. Pengaruh politik yang kuat, tingginya belanja pegawai serta alokasi anggaran yang sudah ditentukan (*earmark*) mengurangi ruang gerak pembangunan yang akomodatif terhadap usulan masyarakat. Dibutuhkan political will yang kuat oleh Kepala Daerah terpilih dalam mempedomani sumber-sumber perencanaan yang akan memperkaya pencapaian tujuan pembangunan.

B. Unsur Keuangan

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Realisasi keuangan Kota Sawahlunto yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.234
Realisasi APBD Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.315.736.275,64
Belanja	622.472.823.122,01	544.263.658.204,79	599.185.054.472,27	643.653.414.741,00	607.064.912.961,00
Pembiayaan	-2.184.587.830,61	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	35.121.134.786,76	10.746.689.591,38
SILPA	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.259,38	8.997.512.906,02

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi APBD Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 638.026.463.488,09 mengalami penurunan menjadi Rp. 605.315.736.275,64 tahun 2023. Realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp.622.472.823.122,01 mengalami penurunan menjadi Rp. 607.064.912.961,00 tahun 2023. Realisasi pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp. -2.184.587.830,61 mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.746.689.591,38 tahun 2023. Realisasi SILPA tahun 2019 sebesar Rp. 13.369.052.535,47 mengalami penurunan menjadi Rp. 8.997.512.906,02 tahun 2023.

Tabel 2.235
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,21	0,04	-0,14	0,28	-0,10
3	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja (%)	89,04	89,58	92,11	94,47	90,71
5	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)	37,40	50,50	96,21	40,19	40,67
6	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)	15,16	11,70	13,16	18,07	13,90
7	Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8,96	10,32	8,44	10,62	9,90
9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	92,12	98,88	97,71	101,80	103,05
10	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	88,56	89,70	83,54	76,35	65,12
11	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (buah)	19	19	20	20	21
12	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	20,55	20,55	20,55	20,55	29,68
13	Rasio PAD (%)	1,68	1,74	1,95	1,95	1,95
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (%)	68,21	60,02	10,15	10,15	10,15
15	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)	89,04	89,58	91,10	91,10	91,10
16	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	94,98	98,19	100,94	96	96
17	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)	2,09	6,30	6,37	0,71	1,40
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	29,531	26,775	39,307	58,225	77,005
19	Manajemen Aset : - Apakah ada Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak) - Apakah Ada Manual untuk Menyusun Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak) - Apakah Ada Proses Inventar isasi Asset Tahunan (Ya/Tidak) - Apakah Nilai Asset Tercantum Dalam Laporan Anggaran (Ya/Tidak)	 Ya Ya Ya Ya	 Ya Ya Ya Ya	 Ya Ya Ya Ya	 Ya Ya Ya Ya	 Ya Ya Ya Ya
20	Persentase SILPA (%)	0,69	2,19	6,72	0,66	1,34
21	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,69	2,19	6,72	0,66	1,34
22	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana (%)	0	0	0	0	0
23	Persentase Belanja Pendidikan (20 %)	20	20	20	20	20
24	Persentase Belanja Kesehatan (10 %)	18	23	24	24	24
25	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) Perbandingan antara Belanja Langsung dengan APBD	54	46	62	62	62
	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan APBD	46	54	38	38	38
26	Bagi Hasil Kabupatan/Kota dan Desa	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 tergolong cukup baik. Namun ada 3 indikator yang realisasinya rendah dan dibawah target yang telah ditetapkan yaitu persentase peningkatan PAD, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, dan persentase realisasi penerimaan retribusi daerah, bahkan persentase realisasi ketiga indikator ini mengalami penurunan dari tahun 2022. Rendahnya capain ketiga indikator tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya, belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, masih belum optimalnya penerimaan oleh pos-pos retribusi daerah, belum optimalnya pembukaan tempat wisata sehingga retribusi daerah yang berasal dari tempat rekreasi dan olahraga masih rendah, belum maksimalnya penerimaan retribusi dari pelayanan kesehatan karena masih belum optimalnya pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas, rendahnya penerimaan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor karena jumlah kendaraan yang melakukan pengujian menurun yang dipengaruhi oleh adanya sistem pengujian kendaraan online. Untuk itu pada tahun berikutnya perlu di optimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada.

Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang Serta Asuransi

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja

pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.236
Jumlah Bank dan Asuransi
Tahun 2019-2023

No	Bank dan Asuransi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Bank (unit)	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2023 :

1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Santur
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri
9. Bank BNI Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto
11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian
14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2023 :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

C. Unsur Kepegawaian

Penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksananya. Pemerintahan Daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien jika didukung dengan ASN yang senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau Core Values ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Core Values ini merupakan inti dari nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mewujudkan ASN yang menerapkan core values ASN sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin ASN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Berangkat dari uraian tersebut, adapun gambaran penanganan kasus kepegawaian di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.237
Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	%	60	120	80	130	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel dan data di atas dapat diketahui bahwa ASN di Kota Sawahlunto dalam segi penanganan disiplin maupun penanganan administrasi lainnya relatif baik dengan realisasi rata-rata sudah mencapai 100%. Untuk menekan angka kasus kepegawaian agar semakin kecil demi mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang lebih baik dari tahun ke tahun, diperlukannya pemupukan core values ASN agar menjadi karakter pada setiap ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Upaya pembinaan internal secara preventif juga harus dilakukan secara rutin agar Pemerintah Kota Sawahlunto terbebas dari munculnya kasus kepegawaian baik dari segi penanganan disiplin maupun penanganan kasus administrasi lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini, adapun Indeks Kepuasan Pelayanan Administratif Kepegawaian pada Pemerintah Kota Sawahlunto urusan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.238
Persentase IKPAK Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Indeks Kepuasaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bagian kepegawaian saat ini sudah memenuhi harapan penerima layanan. Hal ini dapat diketahui dari tingginya persentase indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian dari tahun ke tahun bertahan di angka 100%. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dihitung berdasarkan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk dan yang dilayani. Hal ini merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah, misalnya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan Kota Sawahlunto, terdapat perubahan jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintahan Kota Sawahlunto dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang diurai pada tabel berikut :

Tabel 2.239
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	26	26	26	28	28
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	99	99	99	105	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan uraian data di atas dapat dijelaskan bahwasanya Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi sebelum dan setelah dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2603/OTDA tanggal 22 April 2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Namun di tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak dua Jabatan Pimpinan Tinggi dan enam Jabatan Administrasi, hal ini dikarenakan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan hasil dari pemisahan Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya masih dalam satu payung organisasi, sehingga pada tahun 2023 terdapat 28 Jabatan Pimpinan Tinggi dan 100 Jabatan Administrasi. Jabatan Administrasi pada Tahun 2023 berkurang dari tahun sebelumnya disebabkan terdapat lima jabatan yang pejabatnya telah memasuki usia purna bakti.

Dilain sisi, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah penambahan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu ini tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.240
Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1143	1125	1279	1314	1687

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 544 orang atau terjadi peningkatan sebesar 48 % selama lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang merupakan tindak lanjut salah satu dari lima Visi Pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di masa bakti 2019-2024 yaitu “Reformasi Birokrasi”.

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai. Adapun persentase ASN Kota Sawahlunto yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.241
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	n/a	n/a	n/a	7.22	9,02

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baru dianggarkan khusus pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto pada tahun 2022 dan 2023. Di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan Perangkat Daerah masing-masing. Adapun realisasi persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di tahun 2022 dan 2023 masih sangat rendah. Hal ini cukup menjadi perhatian mengingat pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan demi pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peruntukan anggaran penyelenggaraan ataupun anggaran untuk mendukung ASN dalam mengikuti kegiatan pendidikan serta pelatihan formal.

Tabel 2.242
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Orang	n/a	n/a	n/a	7.22	7,3

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 menyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan

Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Adapun persentase pejabat ASN yang telah megikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan anggaran pada Badan Kepegawainan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto.

Tabel 2.243
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kepegawaian Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	Realisasi Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2022
32	**KEPEGAWAIAN**						
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi (%)	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	91	92	93	94	95
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	80	80	85	85	85
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi (%)	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	100	100	76	80	80
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi (%)	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	90	90	100	100	100
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik (%)	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	100	99,99	100	99.95	97
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian (%)	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	600	120	80	130	100
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	-	61	63	63	60,15
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintahan	-	-	103,5	157	220
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,66	2,29	2,55	2,95	4,26
32.11	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,03	0,09	0,19	0,25	0,33
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,64	0,64	0,34	0,39	0,14

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2024

D. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan sangat perlu dilakukan sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2023 adalah sebanyak 107 Inovasi dengan mendapatkan predikat Kota Terinovatif. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi Perangkat Daerah yang unggul dalam pelaporan inovasi perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksanaan inovasi di Perangkat Daerah tersebut. Adapun capaian predikat inovasi yang telah diraih Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.244
Kategori Inovasi Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Kategori Inovasi**	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat Inovasi Daerah Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) terbaik 5 (lima) tingkat nasional dan terbaik 1 (satu) tingkat kota Provinsi Sumatera Barat dengan predikat kota sangat inovatif. Untuk mempertahankan pencapaianpada tahun sebelumya Pemerintah Kota Sawahlunto lebih aktif melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah dengan tujuan munculnya inisiator-inisiator inovasi pada setiap perangkat daerah. Bahkan kedepannya Kota Sawahlunto melalui Badan Perencancanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mendorong adanya inovasi pada setiap program kegiatan yang dilakasanakan oleh setiap perangkat daerah, tidak hanya penjaringan inovasi dikembangkan sampai tingkat Desa dan Kelurahan melalui lomba inovasi tingkat Desa dan Kelurahan, sehingga peningkatan daya saing daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih prima.

Tabel 2.245
Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan
Tahun 2022 dan 2023

No	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	SABESTI (Sapu Bersih Stunting)
		2	JEBOL SIPERA (Jemput Bola Inovasi Perangkat Daerah)
		3	TIM PASTI-PD (Pendampingan, Asistensi Inovasi Perangkat Daerah)
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	BASELO (Bersama Tertibkan Sekolah)
		2	GETUK (Gerakan Sukarela Membantu Pemadam Kebakaran)
		3	Peta dan Kantong Air
3	Dinas Pendidikan	1	MEMANG ASIK (Melaksanakan manasik haji dengan semnagat bersama SMP Kota Sawahlunto Terbaik)
		2	SNAKERS (Sistem Layanan Prediksi Kepribadian Siswa)
		3	CHECKLIST CLEAN (Cekricek Sekali 3 Jam Kebersihan Kantor)
		4	Gerakan Cinta Usia Dini
		5	PAUD S1 (Pendidikan Untuk kenaikan kulifikasi pendidik ke jenjang S1)
		6	KELOK ES (Kelompok Game Edukasi Berbasis Sawahlunto Herritage)
		7	DISDIK TV (Dinas Pendidikan Televisi dengan Saluran Youtube)
		8	COMMANDISK (Command Centre Mini Disdik)
		9	CLINIK DISDIK (Klinik IT Disdik)
		10	COCOCHIP (Coding Coding Anak Cemerlang)
		11	UBI JALAR (UMKM berbasis Sekolan Jenjang Pembelajaran)
		12	PELURU (Penjualan Buku Karya Guru Online)
		13	PELAYAN (Pelatihan Layanan Receptionist Dan Unit Lalu Lintas)
		14	PODCAST DISDIK (Podcast Dinas Pendidikan)
		15	SAWAHLUNTO POST (Majalah Digital Disdik Berbentuk PDF)
		16	D'PRESTO (Dewan Pakar Riset Kota Sawahlunto)
		17	SALJU ABADI (Sawahlunto Jurnal dan Karya Ilmiah)
		18	GURU INGGRIS (Translate Buku Karya Guru ke Bahasa Inggris)
		19	DISDIK INNOVATION AWARD 62 (SD dan SMP lomba inovasi disdik)
		20	GETUK (Gerakan tukar buku antar siswa bisa)
		21	PERFEK (Pendidikan Non Formal Penuh Edukasi Dilapangan)
		22	ONE IN ONE (1 Guru 1 anak didik angkat untuk PNF)
		23	PENDEKAR (Pendidikan Karakter)
		24	MERPATI (Memberikan Reward Masuk Perguruan Tinggi)
		25	BASEKOLAH (Bantuan Seragam Sekolah)
		26	BOS Online (Bantuan Operasional Sekolah Online)

No	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	
		27	KAHFI (Kegiatan pengujian tAHFIzh)
4	Dinas Kebudayaan	1	DADA WARSINA (Digitalisasi Data Warisan Budaya Dunia)
		2	MARINA SELINGKU (Mengenalkan Warisan Dunia lewat Museum Keliling dan Sekolah masuk museum)
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	PeErKu SIAP(Pelayanan Herbal dan Akupresur Sehat Insyaallah Aman dari Zat Kimia)
		2	KARI PINDANG GURAMI (Kartu Digital Fisioterapi Penyandang Disabilitas Berguna Di Era Pandemi)
		3	MAS LITA (MASyarakat peduLI gizi baliTA)
		4	SINGKOK TUDUANG (menyingkap atau membuka tudung saji sasaran yang memiliki masalah gizi)
		5	GEBU ALINDI (Gerakan Ibu Hamil Anti Bersalin Dirumah)
		6	GELORA CINTA KASIH (Gerakan Kelola Limbah Rumah Tangga dengan Menciptakan Sarana Penyaringan Air Bersih
		7	JEMPOL SAKTI (Jemput Bola Sasaran Kolok dengan Hipertensi)
		8	POSE MENARI (Podcast Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri)
		9	Sibad Siti (Siti Konsultasi Antara Obat Lansia Resti)
		10	MAWAS DIRI (PeMantauan, PengaWAsan DIabetes dan HipeRtensI)
		11	Bertabur Sampah Jadi Emas
6	RSUD	1	AKU SILARAS (Ayo Ikut Sistem Latihan Di Rumah Agar Sehat)
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	PENA BATU (Percepatan Pelaksanaan Batas Administrasi Tanah Ulayat)
		2	TAMU CANTIK (Taman Uang Cantik)
		3	SISABER RT (Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga)
		4	E-labling
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	1	DIMANJA (Disabilitas Mandiri Berjaya)
		2	SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto)
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1	PPTK (Pelayanan Perizinan Dengan Tanda Tangan Elektronik)
		2	SiMas Publish (Sistem Informasi Pelayanan Publik Sawahlunto)
		3	SIAP BOS (Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Online)
		4	KIPER (Klinik Perizinan)
		5	LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Kenotarisan)
		6	LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS)
		7	Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online)
		8	Super Online (Surat Pengantar Online)
		9	Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu)
		10	Jebol Gila (Jemput Bola Tagih LKPM)
		11	SISTER (Sawahlunto Invesment Service Center)

No	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	
		12	Klinik LKPM (Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
		13	ANTUM SADIS (Antar Jemput Pelayanan dengan Sasaran Disabilitas)
		14	SASIKEK (Sawahlunto Siap Kerja)
		15	ANDA BAPERAN (Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Online)
		16	NAN PARALU (Pelayanan Pengaduan Kota Sawahlunto)
		17	PEDATI (Pelayanan Data Hubungan Industrial)
		18	OLAHAN PERASAAN (Online Pelayanan Pengesahaan Peraturan Perusahaan)
		19	CATAT JANJI KETEMUAN (Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Online)
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1	Layanan "Call POPT"
		2	SEGEH TANAM (Semai Segera Mudah Tanam)
		3	LAMBANG MATA (Lahan Bekas Tambang Menjadi Agroeduwisata)
		4	Blender Sunto
		5	Layanan Gratis Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto (LAKEH SATO)
		6	Pelestarian Padi Gadang Rumpun Kumbayau
		7	PENA WAMEN (Peternak Bertanya Puskeswan Menyilau)
		8	Kampung Manggis
		9	INFO BAREK (Informasi via Billboard Running Teks)
		10	BUHAI (Buru Hama Tupai)
		11	BIASCA (Biorap Asap Cair)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Kejar Literasi (Kelompok Belajar Literasi)
		2	Dokter Online (Dokumentasi Terdigitalisasi secara Online)
		3	*Lib Tour (Library Tour)*
		4	Geng Puskel (Mendongeng di Layanan Pustaka Keliling)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	NIKMAD SEKALI (Nikah Mantap Dokumen Sekali Jadi)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	SI PETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	TTE (Tanda Tangan Elektronik)
		2	Sawahlunto-CSRIT
		3	WIT (Website Kota Terintegrasi)
		4	Live Streaming
15	Inspektorat	1	MATA ELANG (Mari Tata dan Evaluasi Langsung APIP)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Layanan Konsultasi Kepegawaian Online (Lakonpeg Online)
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Host To Host BPHTB
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaganggan	1	Kampung Digital Marketing
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	IKON SABU (hIbah KONi SAwahlunto BUgar)

No	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	
20	Dinas Perhubungan	1	JALAH SELALIN (Jaga Sekolah Selamat Berlalu lintas)
		2	SIFALAN (Sistem Fasilitas Keselamatan Jalan)
		3	SIPATWAL PAMPIMPUM (Sistem Patroli Pengawalan, Pengamanan Pimpinan Pemerintahan Dan Masyarakat Umum)
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	PERDANA (Panggilan Darurat Bencana)
22	Kecamatan Talawi	1	Pelestarian Adat, Seni dan Budaya
23	Kecamatan Silungkang	1	GAMESROTAN (Gathering Positif Bermedia Sosial Dalam Birokrasi Kecamatan)
		2	TAS BERCORAK (Kecamatan Silungkang Bercorak Tanam dan Berkebun)
24	Kecamatan Barangin	1	SAWANGI (Sabun Serai Wangi)
25	Kecamatan Talawi	1	SEKOLAH LAPANG

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

Berdasarkan data dari tabulasi di atas dapat disajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.246
Sebaran Data Usulan Inovasi Daerah Dari Perangkat Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022-2023

NO.	NAMA INOVASI	JUMLAH INOVASI	PERSENTASE (%)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	3,74
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	0,93
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaganggan	1	0,93
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	2,80
5	RSUD	1	0,93
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	10,28
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1,87
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	19	17,76
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11	10,28
10	Sekretariat Daerah	0	0,00
11	Sekretariat DPRD	0	0,00
12	Dinas Kebudayaan	2	1,87
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	2,80
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4	3,74
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0,93
16	Kecamatan Talawi	1	0,93
17	Kecamatan Barangin	1	0,93
18	Kecamatan Lembah Segar	1	0,93
19	Kecamatan Silungkang	2	1,87
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0,93
21	Dinas Pendidikan	27	25,23
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	3,74
23	Inspektorat	1	0,93
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0,93
25	Dinas Perhubungan	3	2,80
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0,93

27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0,93
TOTAL		107	100%

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Inspektorat

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan harus diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara prioritas. Perkembangan indikator pembangunan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.247
Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian Jabatan Fungsional	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
1	**Auditor**	**10**	**10**	**13**	**12**	**11**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	4	7	7	7	6	
	Muda	4	1	2	1	2	
	Pertama	1	1	2	2	1	
	Penyelia	-	-	-	1	1	
	Pelaksana Lanjutan	1	-	1	1	1	
2	**P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)**	**9**	**10**	**17**	**17**	**13**	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Madya	3	3	6	5	6	
	Muda	3	3	5	6	5	
	Pertama	3	4	6	6	2	
3	**Auditor Kepegawaian**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Total	**13**	**19**	**20**	**29**	**24**	

Sumber Data : Inspektorat Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa SDM Inspektorat kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 terdapat dua orang yang pensiun dan tiga orang promosi ke jabatan struktural pada Perangkat Daerah lain. Dengan adanya penambahan jabatan fungsional Aditor dan penambahan jabatan fungsional P2UPD, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto ke Perangkat Daerah serta desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Dengan adanya penambahan SDM Inspektorat Kota Sawahlunto diharapkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien sehingga terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

A. Kecamatan

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.248
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) persentase lembaga kemasyarakatan di Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2022 sudah cukup baik. Untuk tahun 2020 dan 2021 pelaksanaannya lebih banyak ke penanggulangan Covid 19. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 permasalahn Covid sudah selesai, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lebih difokuskan Edukasi perekonomi akibat dampak Covid 19.

B. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, berikut ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan strategis Kota Sawahlunto dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang. Ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan Strategis Kota Sawahlunto dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya adalah:
- Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya
- Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukug Lingkungan Hidup

Kawasan strategis terkait aspek lingkungan di Kota Sawahlunto adalah upaya rehabilitasi dan penataa Kawasan bekas tambang untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup serta untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan talawi untuk Pengembangan Pariwisata. Dengan fokus pada pengembangan kawasan bekas tambang .

Pengembangan genangan bekas penambangan sebagai Kawasan rekreasi air ini adalah dalam rangka penigkatan ruang terbuka hijau, pegendalian banjir, peningkatan resapan air kota dan sebagai cadangan air di musim kemarau. Pengembangan genangan bekas penambangan tanam rekreasi kota dan Pendidikan *Aqua Culture*.

Pengembangan hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tangkapan air, memperbaiki kualitas udara dan keindahan (*landscape* kota). Hutan kota ditanami dengan tanaman keras/ tahunan yang dapat menunjang estetika kota dan pelestarian/pengembangan tanaman durian kubang.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto melaksanakan urusan pemerintahan umum yakni urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Sesuai dengan tugasnya Kesbangpol Kota Sawahlunto melaksanakan koordinasi di bidang politik, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan dan organisasi masyarakat, partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik daerah.

Kesbangpol Kota Sawahlunto di tahun 2024 telah melakukan koordinasi kegiatan Pemilu Presiden dan legislatif yang telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023 dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Kesbangpol Kota Sawahlunto juga melakukan antisipasi terjadinya konflik dengan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pencegahan terjadinya konflik sosial. Kesbangpol juga melakukan pemantauan kondisi politik pra dan pasca Pemilu/Pilkada serta mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 belum ada terjadi demonstrasi di Kota Sawahlunto.

Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kota Sawahlunto, pemerintah daerah melalui Kesbangpol dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kemenag Kota Sawahlunto telah melakukan sosialisasi dan mencanangkan Kampung Moderasi Beragama di Kota Sawahlunto di 2 (dua) Desa/Kelurahan yakni Desa Sikalang dan Kelurahan Tanah

Lapang. Targetnya secara bertahap adalah semua Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto menjadi Kampung Moderasi Beragama.

Sebagai bentuk inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto menggaet perwakilan masyarakat di masing-masing Kecamatan dan anggota kepolisian sebagai pemantau dalam rangka mencegah konflik sosial dan mengamati gejala-gejala konflik yang ada di masyarakat.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing (competitiveness) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, Ffasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, persentase pengeluaran konsumsi non makanan per kapita, produktivitas total daerah, nilai tukar petani dan lapangan usaha unggulan.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi Pengeluaran rumah tangga mengindikasikan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Berikut disajikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Sawahlunto beserta variabel pembentuknya selama kurun waktu 2019-2023 :

Tabel 2.249
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto	Juta Rupiah	2.086.707,65	2.059.425,35	2.151.133,30	2.385.065,83	2.556.268,38
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa	62,524	65,138	65,807	66,778	67,758
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	**Juta Rupiah / jiwa**	**33,37**	**31,62**	**32,69**	**35,72**	**37,73**
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	%	9,92%	-1,31%	4,45%	10,87%	7,18%

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 saat merebaknya wabah pandemic covid 19, yang mana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar 1,75 juta rupiah /jiwa atau turun sebesar 5,24 %.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran (demand side). Rumah Tangga melakukan pengeluaran konsumsi untuk mempertahankan taraf hidup. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Klasifikasikan barang dan jasa tersebut adalah makanan/minuman/rokok, pakaian dan alas kaki, perumahan/perkakas/perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi/komunikasi/rekreasi/budaya, hotel dan restoran, dan lainnya.

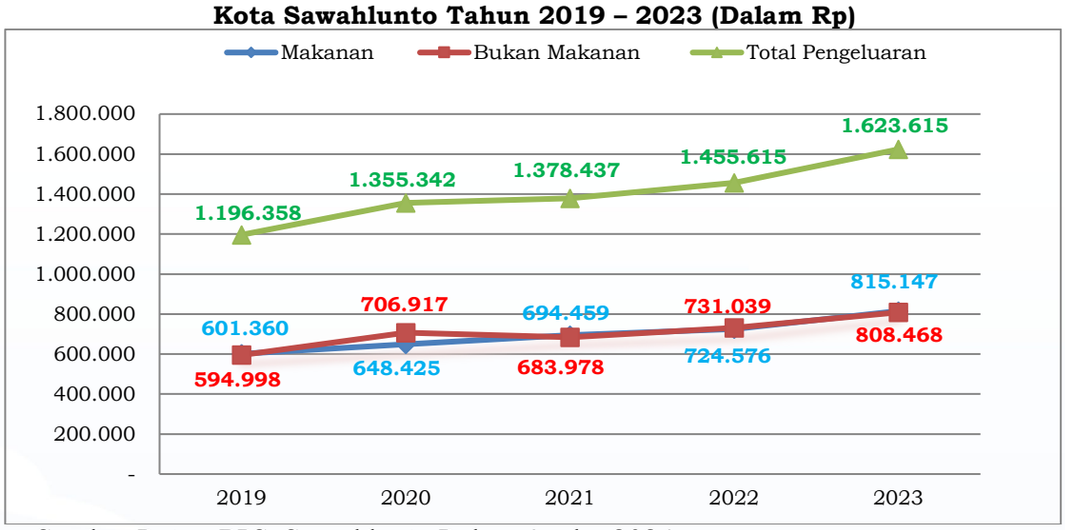
2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. "Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan". Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.. "Makin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, makin membaik tingkat kesejahteraan"

Pengeluaran konsumsi untuk makanan digunakan untuk membeli padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telor dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sedangkan "pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan" digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berikut disajikan perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan makanan dan bukan makanan Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 :

Grafik 2.15
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi
Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan
Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 (Dalam Rp)



Sumber Data : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2019-2023, "pengeluaran konsumsi kelompok makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga" di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2020 dan 2022, dimana kondisi pada kedua tahun ini "pengeluaran konsumsi kelompok bukan makanan lebih tinggi" dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan. Pada Tahun 2020, terjadi peningkatan tajam rata-rata pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan dengan nilai sebesar 706.917 rupiah per kapita per bulan, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 594.998 rupiah per kapita per bulan. Meningkatnya rata-rata pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan di Kota Sawahlunto tahun 2020 digunakan untuk membeli kuota internet karena sistem pembelajaran yang dilakukan secara online. Demikian juga halnya dengan kondisi tahun 2022, pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan sebesar 731.039 rupiah per kapita per bulan, angka ini "lebih besar" dari pengeluaran konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan nilai sebesar 724.576 rupiah per kapita per bulan.

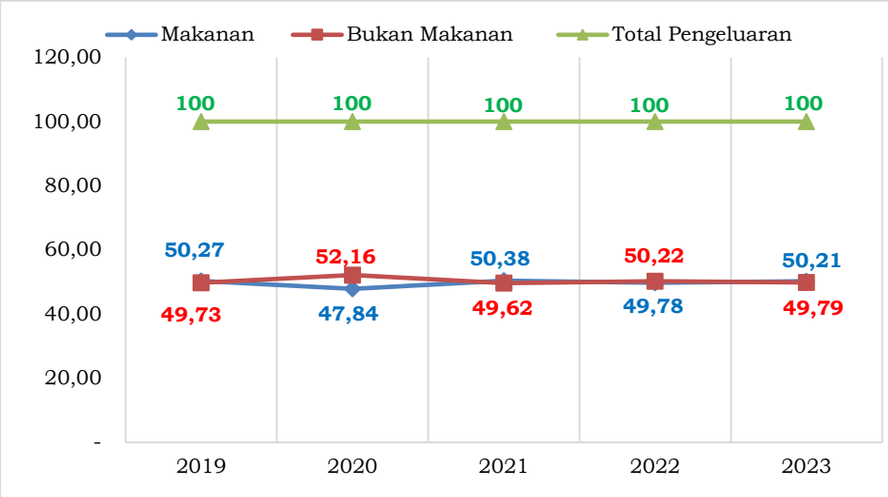
Pengeluaran konsumsi kelompok bukan makanan pada tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 313.519, selanjutnya pengeluaran untuk aneka komoditas dan jasa sebesar Rp. 201.815, berikutnya pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi sebesar Rp. 84.419, pengeluaran untuk komoditas tahan lama sebesar Rp.59.283, pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar Rp. 48.814 dan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar Rp. 23.189.

Sedangkan Pengeluaran konsumsi kelompok makanan pada tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 195.259, selanjutnya pengeluaran untuk rokok sebesar Rp. 102.253, berikutnya pengeluaran untuk padi-padian

sebesar Rp.74.503, pengeluaran untuk sayur-sayuran sebesar Rp.72.781, pengeluaran untuk ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp.63.110, pengeluaran untuk daging sebesar Rp.50.019, pengeluaran untuk telor dan susu sebesar Rp.42.924, pengeluaran untuk minyak dan kelapa sebesar Rp.31.974, pengeluaran untuk buah-buahan sebesar Rp.29.819, pengeluaran untuk bahan minuman sebesar Rp.16.370, pengeluaran untuk konsumsi lainnya sebesar Rp.12.706, pengeluaran untuk kacang-kacangan sebesar Rp.12.583, pengeluaran untuk bumbu-bumbuan sebesar Rp.10.728, pengeluaran untuk kacang-kacangan sebesar Rp.12.583, pengeluaran untuk umbi-umbian sebesar Rp.9.546.

Untuk melihat komposisi pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan bukan makanan dapat dilihat pada besarnya persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan makanan dan bukan makanan. Berikut disajikan perkembangan persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan makanan dan bukan makanan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.16
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019-2023 di atas 50 % kecuali tahun 2020 dan 2022 dengan kecenderungan berfluktuasi. Hal ini berartinya pembiayaan rumah tangga di Kota Sawahlunto lebih dari separohnya digunakan untuk membeli kebutuhan kelompok makanan. Pada tahun 2020, pengeluaran untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar 47,84% dan untuk konsumsi bukan makanan sebesar 52,16%. Dengan demikian pada tahun 2020, distribusi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk bukan makanan di Kota Sawahlunto "lebih besar" dari pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk makanan. Begitu juga dengan tahun 2022, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan di Kota Sawahlunto sebesar 50,22% dan pengeluaran untuk kebutuhan makanan 49,78%.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dan 2022 lebih baik atau lebih sejahtera". Karena proporsi "pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar" dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi modern/maju (Walt Whitman Rostow), salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, "semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan semakin tinggi".

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun adalah diduga karena turunnya laju inflasi pada kelompok bahan makanan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok bukan makanan). Sedangkan pada "tahun 2022, inflasi pada kelompok bukan makan lebih tinggi" dari pada kelompok makanan yang dipicu oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan

harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi.

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli dimaksud maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.250
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.796.536,42	2.760.924,18	2.829.350,04	2.941.269,30	3.072.346,38
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	29.117	30.310	30.186	32.275	34.018
Pertumbuhan Tenaga Kerja %)	-3,97	4,10	-0,41	6,92	5,40
Produktivitas Total Daerah (Juta/Jiwa)	**96,04**	**91,09**	**93,73**	**91,13**	**90,32**

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun. Produktivitas Total Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 (sebelum covid 19 melanda) yang mencapai 96,04 juta rupiah/jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 90,32 juta rupiah/jiwa. Tingginya Produktivitas Total Daerah pada tahun 2019 disebabkan tingginya jumlah output (PDRB ADHK) tahun 2019 yang tumbuh mencapai 5,31% , sementara input (tenaga kerja) berkurang sebanyak 3,97%. Ketika pandemic covid 19 melanda pada tahun 2020, Produktivitas Total Daerah menurun menjadi 91,09 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan output (PDRB ADHK) berkurang sebanyak 1,27%, sebaliknya input (tenaga kerja) meningkat sebanyak 4,10%. Setelah covid 19 usai tahun 2021, Produktivitas Total Daerah kembali meningkat menjadi 93,74 juta rupiah/jiwa seiring dengan meningkatnya jumlah output (PDRB ADHK) sebesar 2,49% dan berkurangnya jumlah input (tenaga kerja) sebesar 0,41%. Dan pada tahun 2022 ketika output (PDRB ADHK) semakin meningkat mencapai 3,98%, justru Produktivitas Total Daerah menurun menjadi 91,16 juta rupiah/jiwa, hal ini disebabkan tinggi pertambahan input (tenaga kerja) yang mencapai 6,92%, jauh melebihi pertumbuhan output (PDRB ADHK). Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2023, dimana Produktivitas Total Daerah kembali menurun

Untuk melihat Lapangan usaha mana yang paling produktif, maka Produktivitas Total Daerah dirinci berdasarkan output (produksi) dan input dari masing-masing lapangan usaha yang ada. Dengan kata lain Produktivitas Total Daerah diperoleh dengan membandingkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha tertentu yang dihasilkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tertentu dimaksud. Produktivitas total daerah dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengindentifikasi kinerja lapangan usaha perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.

Sejak tahun 2019 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga lapangan usaha besar, yaitu : “Pertanian; Manufaktur; dan Jasa”. Lapangan usaha Pertanian terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha Manufaktur terdiri dari Lapangan usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha Jasa terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.251
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	217.981,59	219.533,32	235.048,04	246.628,78	252.708,32
Manufaktur	872.139,94	860.221,60	829.590,12	843.735,70	879.530,55
Jasa	1.706.414,89	1.681.169,26	1.764.711,88	1.850.904,82	1.940.107,51
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	4.027	5.646	5.547	4.646	5.300
Manufaktur	8.367	7.361	7.350	8.766	8.126
Jasa	16.723	17.303	17.289	18.863	20.592
Produktivitas Total Daerah (Juta Rupiah / Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian	54,13	38,88	42,37	53,08	47,68
Manufaktur	104,24	116,86	112,87	96,25	108,24
Jasa	102,04	97,16	102,07	98,12	94,22

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data diolah tahun 2024

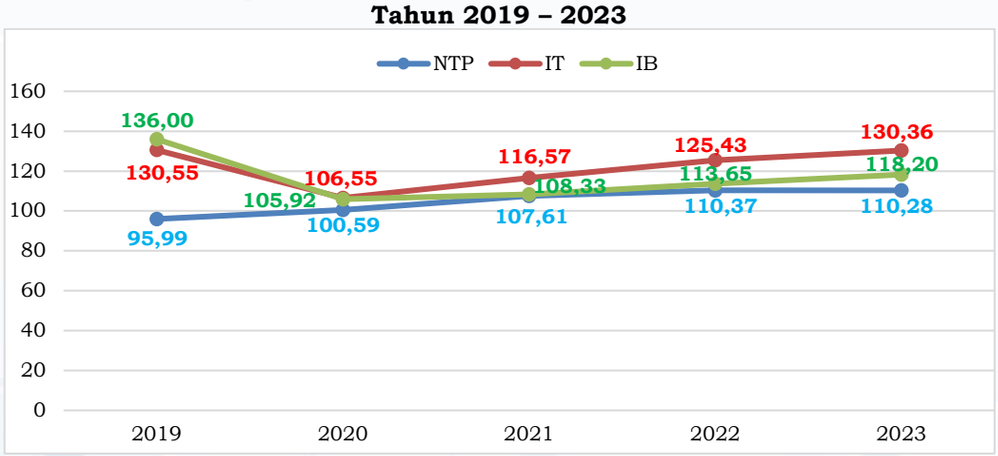
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif adalah manufaktur, kecuali pada tahun 2022 lapangan usaha Jasa lebih produktif. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa. Pada Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha Jasa "empat kali lipat" lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha pertanian dan "dua kali lipat" lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha manufaktur. Dan lapangan usaha yang paling rendah produktivitasnya adalah lapangan usaha pertanian.

4. Nilai tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani merupakan rasio Indeks harga yang diterima petani (IT terhadap Indeks harga yang dibayar petani (IB).

Berikut disajikan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 :

Grafik 2.17
Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023



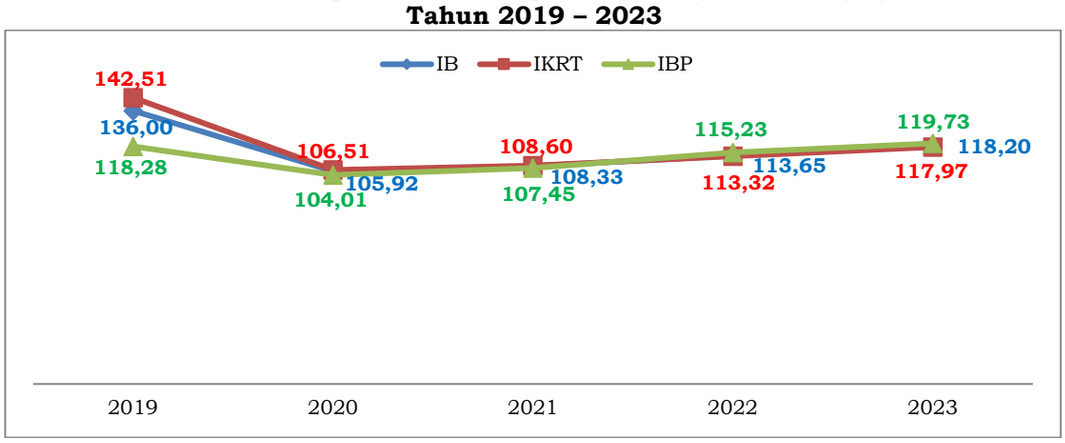
Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019, NTP <100 yang berarti petani mengalami defisit, karena nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB). Sebetulnya pada periode ini sudah terjadi peningkatan pendapatan petani (IT), namun peningkatan pendapatan petani tersebut diiring oleh peningkatan Indeks harga yang dibayar petani (IB) yang lebih tinggi.

Mulai tahun 2020 Nilai Tukar Petani atau NTP sudah lebih dari 100 (NTP >100). Hal Ini berarti "nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih besar" dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain "petani mengalami surplus".

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP). Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2019 – 2023.

Grafik 2.18
Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)
Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada periode 2019-2021, "Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih dominan" dari pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk membeli kebutuhan rumah tangganya dari pada digunakan untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Namun pada tahun 2022, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP) lebih besar dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). Ini menunjukkan para petani sudah menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan agar produktivitas hasil pertanian meningkat dan nilai tambah hasil pertanian juga meningkatkan melalui pengendalian harga hasil pertanian. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan tergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul hasil pertanian.

5. Analisis Lapangan Usaha Unggulan Kota Sawahlunto

A. Metode *Shift Share*

Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan lapangan usaha/sektor/industry di wilayah yang sempit (daerah/kabupaten/kota) dengan wilayah yang lebih luas (nasional/Provinsi) (Tarigan, 2005). Dengan kata lain metode shift share menganalisis pergeseran struktur perekonomian daerah (kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi) terkait dengan peningkatan perekonomian daerah di atasnya (kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional).

Pada analisis ini akan dilihat pertumbuhan lapangan usaha di Kota Sawahlunto dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan Metode Shift Share untuk mengetahui kondisi lapangan usaha di Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.252
Hasil Analisis *Shift Share* (SS) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KOMPONEN				KATEGORI
		Provinsi (Rip)	SWL (Rij)	NSij	DSij	PSij	SSij	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,03	0,04	6.245,01	-135,14	2.779,60	8.889,46	Basis/ Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	-0,06	4.400,98	-2.949,11	-11.057,67	-9.605,80	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,02	0,02	8.559,42	-2.121,29	1.234,22	7.672,35	Basis/ Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	1.537,13	-1.002,00	165,07	700,20	Basis/ Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,02	284,53	13,29	-85,44	212,38	Non Basis
6	Konstruksi	0,02	0,02	8.053,69	-2.308,09	-460,32	5.285,27	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,04	0,03	12.408,58	4.242,34	-1.034,91	15.616,02	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,01	0,01	6.710,09	-7.998,86	2.876,00	1.587,23	Basis/ Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,04	1.393,64	332,92	473,64	2.200,20	Basis/ Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	0,08	0,07	7.469,16	13.993,17	-1.327,61	20.134,72	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	0,05	2.512,83	1.522,85	580,23	4.615,92	Basis/ Potensial
12	Real Estat	0,04	0,04	1.347,65	514,46	323,65	2.185,76	Basis/ Potensial
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	99,77	6,60	-7,99	98,38	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	0,01	8.852,33	-6.278,89	1.190,26	3.763,70	Basis/ Potensial
15	Jasa Pendidikan	0,03	0,04	2.338,48	695,99	298,35	3.332,83	Basis/ Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,06	940,61	1.401,54	-114,34	2.227,80	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,04	0,04	3.585,39	2.112,71	-871,22	4.826,88	Non Basis

Berdasarkan tabel di atas diketahui lapangan usaha unggulan berdasarkan Analisa Shift Share (Proportional Shift (PSij) yang positif), dimana lapangan usaha dimaksud di Kota Sawahlunto yang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan;
3. Pengadaan Listrik dan Gas
4. Transportasi dan Pergudangan;
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
6. Jasa Keuangan dan Asuransi;
7. Real Estat;
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
9. Jasa Pendidikan;

B. Metode Location Quotient

Metode Location Quotient adalah perbandingan peran sektor/lapangan usaha suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/lapangan usaha tersebut secara nasional (Tarigan, 2014). Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah :

3. LQ > 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih besar di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan dimungkinkan ekspor pada lapangan usaha/sektor tersebut (sektor basis/potensial).
4. LQ < 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih kecil di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan perlunya dilakukan impor pada lapangan usaha/sektor tersebut karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut (sektor non basis)
5. LQ = 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut di daerah sama dengan nasional.

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Location Quotient untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.253
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					LQ	KATEGORI
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,36	0,35	0,37	0,38	0,38	**0,37**	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,63	1,79	1,32	1,26	1,20	**1,44**	Basis/Potensial
3	Industri Pengolahan	1,20	1,16	1,19	1,20	1,22	**1,19**	Basis/Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,57	19,63	20,16	20,00	19,99	**19,87**	Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,74	3,75	3,78	3,61	3,66	**3,71**	Basis/Potensial
6	Konstruksi	1,14	1,11	1,13	1,14	1,14	**1,13**	Basis/Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	**0,98**	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,77	0,82	0,84	0,82	0,82	**0,82**	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,58	1,68	1,76	1,70	1,68	**1,68**	Basis/Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,15	1,17	1,16	1,16	**1,16**	Basis/Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,11	1,10	1,12	1,13	1,15	**1,12**	Basis/Potensial
12	Real Estat	0,86	0,86	0,89	0,89	0,89	**0,88**	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	**0,30**	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	2,04	2,08	2,11	2,10	**2,08**	Basis/Potensial
15	Jasa Pendidikan	0,72	0,71	0,74	0,74	0,74	**0,73**	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,75	0,77	0,77	0,77	**0,77**	Non Basis
17	Jasa Lainnya	2,63	2,65	2,66	2,61	2,60	**2,63**	Basis/Potensial

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient, di Kota Sawahlunto terdapat sepuluh (10) Lapangan Usaha yang Potensial/Basis selama lima tahun terakhir (tahun 2019-2023), yakni :

1. Pertambangan dan Penggalian;
2. Industri Pengolahan;
3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Konstruksi;
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
7. Informasi dan Komunikasi;
8. Jasa Keuangan dan Asuransi;
9. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
10. Jasa Lainnya.

C. Metode Tipologi Klassen

Metode Tipologi Klassen merupakan salah satu instrument analisa ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Metode ini akan menghasilkan empat klasifikasi lapangan usaha dengan karakteristik yang berbeda (Sjafrizal, 2008), yaitu :

1. Lapangan usaha maju dan tumbuh pesat (warna ungu)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si ≥ S)**
2. Lapangan usaha maju tapi tertekan (orange)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski ≥ Sk, Si < S)**
3. Lapangan usaha potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (hijau)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si ≥ S)**
4. Lapangan usaha relatif tertinggal (biru)
   Lapangan usaha dengan kondisi (**Ski < Sk, Si < S)**

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil perhitungan *Metode Tipologi Klassen* lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 :

Tabel 2.254
Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,03	0,04	0,22	0,08	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	-0,06	0,04	0,06	maju tapi tertekan
3	Industri Pengolahan	0,02	0,02	0,09	0,11	maju dan tumbuh pesat

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,02	maju dan tumbuh pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,02	0,00	0,00	maju tapi tertekan
6	Konstruksi	0,02	0,02	0,09	0,10	maju dan tumbuh pesat
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,04	0,03	0,16	0,16	maju tapi tertekan
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,01	0,01	0,11	0,09	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,04	0,01	0,02	maju dan tumbuh pesat
10	Informasi dan Komunikasi	0,08	0,07	0,08	0,10	maju tapi tertekan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	0,05	0,03	0,03	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	0,04	0,04	0,02	0,02	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,00	0,00	maju dan tumbuh pesat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	0,01	0,06	0,12	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	0,03	0,04	0,04	0,03	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,06	0,02	0,01	relatif tertinggal
17	Jasa Lainnya	0,04	0,04	0,02	0,05	maju dan tumbuh pesat

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen, di Kota Sawahlunto tahun 2019-2023, terdapat sembilan (9) lapangan usaha maju dan tumbuh pesat, yakni :

1. Industri Pengolahan;
2. Pengadaan Listrik dan Gas;
3. Konstruksi;
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi;
6. Real Estat;
7. Jasa Perusahaan;
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
9. Jasa Lainnya.

Dalam upaya untuk melihat lapangan usaha mana yang unggul secara ekonomi di Kota Sawahlunto, dilakukan perbandingan hasil analisis ketiga metode dimaksud sebagai berikut.

Tabel 2.255
Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen
Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Basis/ Potensial	Non Basis	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
2	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
3	Industri Pengolahan	Basis/ Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Basis/ Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Non Basis	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
6	Konstruksi	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis	Non Basis	maju tapi tertekan
8	Transportasi dan Pergudangan	Basis/ Potensial	Non Basis	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basis/ Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		Shift Share (PSij)	LQ	Klassen
10	Informasi dan Komunikasi	Non Basis	Basis/Potensial	maju tapi tertekan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Basis/ Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
12	Real Estat	Basis/ Potensial	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
13	Jasa Perusahaan	Non Basis	Non Basis	maju dan tumbuh pesat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Basis/ Potensial	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat
15	Jasa Pendidikan	Basis/ Potensial	Non Basis	potensial/ masih dapat berkembang dengan pesat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	Non Basis	relatif tertinggal
17	Jasa Lainnya	Non Basis	Basis/Potensial	maju dan tumbuh pesat

Pada tabel di atas terlihat perbandingan hasil analisis ketiga metode (Shift Share, Location Quotient dan Tipologi Klassen) yang digunakan untuk melihat sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto, terdapat lima (5) Lapangan Usaha Unggulan yang beririsan/bersesuaian dengan ketiga metode tersebut, yakni :

1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Listrik dan Gas;
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
4. Jasa Keuangan dan Asuransi.
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi topografi dan terjadinya pergerakan tanah di beberapa daerah di Kota Sawahlunto sangat mempengaruhi kondisi fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kota Sawahlunto. Hal tersebut membutuhkan penanganan dengan perlakuan khusus terhadap infrasturktur yang dibangun agar dapat bertahan lebih lama. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi fasilitas wilayah/infrastruktur tersebut, yaitu : rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

Nilai rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (kilometer). Nilai ini berarti 1 kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Untuk Panjang jalan, dihitung baik itu jalan kota, jalan propinsi maupun jalan nasional. Sementara untuk jumlah kendaraan, mengacu pada data jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Indikator ini untuk melihat kelayakan jalan di Kota Sawahlunto dalam menampung jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.256
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

NO	JENIS DATA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Panjang Jalan Kota	Km	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi	Km	30,65	30,65	43,20	43,20	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara	Km	11,35	11,35	12,37	12,37	12,37
4	Jumlah panjang jalan total	Km	496,87	496,87	510,44	510,44	510,44
5	Jumlah Kendaraan	unit	19.858	20.389	21.567	22.155	22.155
6	**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**		**0.025**	**0.024**	**0.023**	**0,023**	**0,023**

Sumber Data: Pengolahan Pata Dinas PUPR Dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2023

Dilihat dari tabel di atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki penurunan setiap tahunnya, dalam artian terjadinya peningkatan kepadatan jalan atas jumlah kendaraan yang ada.

Berdasarkan tabel Kota Sawahlunto mempunyai panjang jalan total sepanjang 510,44 kilometer, jumlah ini masih mampu menampung jumlah kendaraan dan tidak terjadi kemacetan di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang (penumpang) atau barang yang terangkut angkutan umum (angkutan umum, bus, kereta api) adalah banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum. Semakin banyak jumlah orang terangkut angkutan umum, semakin tinggi penggunaan angkutan umum, semakin sedikit kendaraan yang berada di jalan (penggunaan kendaraan pribadi berkurang), kemacetan dapat berkurang

Berikut perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.257
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	149.474	25.200	28.350	55.006	23.385

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini disebabkan jumlah armada kendaraan umum seperti angkutan kota yang semakin berkurang, karena masyarakat lebih senang menggunakan ojek sebagai angkutan kota yang tidak memerlukan waktu tunggu untuk digunakan.

3. Ketaatan terhadap RTRW

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persolan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk

menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.258
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto
Tahun 2019–2023

no	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi RTRW	17	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	85	85	85	85	85

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032, untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 ditargetkan penyelesaian 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Namun sampai tahun 2023 yang sudah terealisasi sebanyak 17 komponen.

Saat ini dokumen RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 masih dalam proses revisi dan belum dilegalkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan dan perubahan isu akan menjadi dasar dalam revisi RTRW Kota Sawahlunto, sehingga persentase ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Berikut data persentase realisasi kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang Kota Sawahlunto :

Tabel 2.259
Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang	86,00	87,50	84,15	84,15	84,15

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pada tabel di atas terlihat realisasi kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,5% dari tahun 2019. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 3,35% atau turun menjadi 84,15 %, angka ini tidak mengalami perubahan sampai tahun 2023. Hal ini disebabkan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang dan belum adanya sistem informasi tata ruang secara digital serta masih kurangnya pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang.

4. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kota Sawahlunto tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana luas wilayah produktif kurang lebih 18 persen dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 hektar.

5. Luas wilayah industri

Luas wilayah industri di Kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.260
Luas Wilayah Industri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Wilayah Industri (ha)	39.84	39.84	39.84	39.84	39.84

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

6. Luas wilayah kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 persen, tidak memungkinkan terjadi kebanjiran di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada di sekitar kawasan sungai, antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi

genangan antara 0,10 sampai dengan 0,50 meter yang berlangsung selama 1 sampai dengan 3 jam.

7. Luas wilayah kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

8. Luas wilayah perkotaan

Walaupun disebut sebuah "Kota", Wilayah Kota Sawahlunto secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 27 desa dan 10 Kelurahan, dengan luas 231,94 km^2. Dalam mengkategorikan wilayah perkotaan, yang dijadikan acuan perhitungan luas wilayah perkotaan adalah luas wilayah kelurahan.

Tabel 2.261
Luas Wilayah Kota Sawahlunto

No	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	**Kecamatan Barangin**	
03	Kel. Saringan	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	1,00
05	Kel. Durian I	1,17
06	Kel. Durian II	1,25
2	**Kecamatan Lembah Segar**	
06	Kel. Pasar	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	0,16
11	Kel. Air Dingin	0,14
Jumlah		**5,78**

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2024

9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel. 2.262
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	16.542	16.542	16.542	16.603	16.940
2	Jumlah Rumah yang menggunakan listrik (RT)	14.732	15.150	15.567	15.998	16.378
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%)	89,06	91,59	94,11	96,36	96,68

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. namun belum 100%, masih ada ±3,5% masyarakat sawahlunto yang belum terlayani dan menikmati energi listrik yang ada, dan ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

10. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan

teknologi modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2.263
Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP
Tahun 2019- 2023

NO	Alat Komunikasi dan Informasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	HP / Telepon	84,72	86,43	89,21	na	na

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki telepon selular sudah mencapai 86,43 persen pada tahun 2021. Hal ini dinilai tinggi dengan artian sebagian besar masyarakat Kota Sawahlunto telah menggunakan HP sebagai sarana komunikasi. Didukung dengan jaringan komunikasi yang sudah baik sehingga memudahkan akses dan keterbukaan informasi di Kota Sawahlunto. Namun data penggunaan telepon/HP oleh masyarakat Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Berikut disajikan angka kriminalitas di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.264
Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Tindak Kejahatan *Crime*	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Curat (Pencurian dengan Pemberatan	21	19	9	6	11
2	Penggelapan	2	3	1	3	11
3	KDRT	3	4	-	1	2
4	Penipuan	4	3	2	4	3
5	Pengrusakan	4	2	1	3	1
6	Pencurian Kendaraan Bermotor	6	8	5	4	3
7	Pembakaran	1	-	-	-	-
8	Anirat (Penganiayaan dengan Pemberatan)	1	1	1	1	1
9	Perkosaan	6	-	-	-	-
10	Pembunuhan	-	-	-	-	-

Sumber Data: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kriminalitas di Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan pencurian dengan pemberatan, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor mendominasi. Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perizinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping

itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya dan lain-lain. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Di Kota Sawahlunto dalam periode waktu tahun 2019-2023 tidak ada terjadi aksi demonstarsi alias nihil (sumber data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto).

3. Lama Proses Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 jenis perizinan dan non perizinan.

Dan berdasarkan Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan Perpres RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka Pemerintah Kota Sawahlunto melalui DPMPTSPNaker telah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), yang pada saat ini sudah aktif/sudah beroperasi, sudah selesai penandatanganan naskah kerjasama atau MoU dengan beberapa lembaga terkait perizinan dan non perizinan (Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, dan Lembaga sebanyak 25 gerai) dan sudah diresmikan oleh Menteri PANRB pada tanggal 26 September 2022. Yang mana MPP ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi, efektif dan efisien (pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal di DPMPTSNaker juga telah dilaksanakan beberapa inovasi antara lain : 1) PPTK (Pelayanan Perizinan dengan Tanda Tangan Elektronik) yaitu penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin melalui aplikasi Si CANTIK CLOUD dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan secara online, darimana saja dan kapan saja, cukup melalui aplikasi ini; 2) Super Online (Surat Pengantar Online) yaitu pengiriman data/dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respon yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta; 3) SIMas Publish (Sistem Informasi Pelayanan Publik Sawahlunto) yaitu media informasi pelayanan publik teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan

mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online; 4) SIAP BOS (Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Online) yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media dalam memanagement antrian pelayanan kepada publik yang berbasis online atau web; 5) Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online) yaitu penggunaan Smartphone berbasis android untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien/menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp; 6) LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS) yaitu dengan sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses; 7) Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu) yaitu dengan layanan OSS Mandiri, masyarakat yang megurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online; 8) KIPER (Klinik Perizinan) yaitu merupakan program pelayanan konsultasi dan bimbingan pelayanan untuk seluruh jenis perizinan yang ada pada DPMPTSPNaker. KIPER ini juga diperuntukkan bagi para investor yang membutuhkan segala macam perizinan untuk dapat memulai usaha ataupun mengoperasikan usahanya agar proses perizinan dapat menjadi lebih cepat, hemat biaya dan tidak melanggar aturan; 9) LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Notaris) yaitu membantu memberikan informasi praktis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan service Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah); 10) JEBOL GILA (Jemput Bola Tagih Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yaitu pelayanan publik kepada perusahaan yang wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal melalui metode pendekatan persuasif kepada perusahaan untuk memudahkan pelaku usaha/perusahaan dalam melaporkan LKPM nya dengan pendampingan langsung oleh petugas dari DPMPTSPNaker.

Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.265
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perizinan	700	272	411	411	2.571
2	Jumlah Non Perizinan	867	680	428	456	339
3	Jumlah Total Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1.567	952	839	867	2.910

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berfluktuatif setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2019 adalah 1.567, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 952, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 839, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 867, tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 2.910. Kenaikan ini disebabkan oleh kemudahan pengurusan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), yang mana berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Kenaikan perizinan ini juga disebabkan oleh telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai dari bulan Maret tahun 2022. Yang mana di MPP ini terdapat 134 jenis layanan yang terintegrasi pada satu tempat dan terdapat 25 gerai yang sudah bergabung dan menandatangani PKS.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut disajikan jumlah SDM dalam pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.266
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	OPD	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dinas PMPTSPNaker	9 orang	9 orang	10 orang	10 orang	10 orang
2	Dinas Teknis	35 orang	43 orang	43 orang	41 orang	41 orang
	Jumlah	**44 orang**	**52 orang**	**53 orang**	**51 orang**	**51 orang**

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah pegawai yang berada diluar DPMPTSPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.267
Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	**Pajak Daerah**	**5.973.337.400**	**5.502.589.718**	**5.666.500.000**	**5.602.920.091.75**	**6.134.000.000**	**5.993.540.247**	**7.303.500.000**	**7.434.834.333,40**	**7.909.000.000**	**8.149.995.371**
1	Pajak Hotel	105.000.000	94.965.756	22.500.000	47.335.931	148.000.000	168.914.129	170.000.000	266.384.955,80	300.000.000	224.164.516
2	Pajak Restoran	514.000.000	532.945.719	399.700.000	477.464.758.75	704.500.000	617.303.460	837.000.000	993.108.403,60	922.000.000	899.703.543
3	Pajak Hiburan	400.137.400	109.385.500	5.300.000	1.650.000	107.000.000	-	156.000.000	61.170.000	133.500.000	66.241.500
4	Pajak Reklame	34.200.000	47.810.243	38.000.000	48.692.318	39.500.000	42.613.818	39.500.000	45.912.393	45.000.000	51.533.668
5	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000	3.339.015.131	3.500.000.000	3.344.827.881	3.300.000.000	3.434.721.546	3.700.000.000	3.735.969.454	4.057.000.000	4.163.723.869
6	Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	1.000.000	511.000	1.500.000	1.000.000
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000	12.979.400	1.000.000	769.600	23.000.000	10.651.360	100.000.000	74.030.951	100.000.000	46.408.921
8	PBB-P2	1.055.000.000	958.272.261	1.100.000.000	963.603.643	1.112.000.000	1.057.891.430	1.500.000.000	1.661.104.059	1.600.000.000	1.668.008.854
9	BPHTB	350.000.000	407.215.708	600.000.000	718.575.960	700.000.000	661.444.504	800.000.000	596.643.117	750.000.000	1.029.210.500
II	**Retribusi Daerah**	**4.093.327.838**	**3.625.062.865**	**3.108.095.850**	**2.787.376.593**	**3.108.095.850**	**2.724.639.922**	**4.649.762.464**	**3.550.241.052**	**4.133.470.000**	**2.691.622.325**
A.	**Retribusi Jasa Umum**										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	511.926.030	518.014.000	582.406.850	483.055.400	582.406.850	293.176.700	352.072.464	362.942.700	0	0
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	78.556.000	85.986.000	92.000.000	114.030.000	92.000.000	132.276.000	138.500.000	124.303.000	138.500.000	112.105.500
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	166.750.000	166.750.000	78.200.000	78.200.000	78.200.000	169.400.000	181.200.000	176.200.000	133.100.000	133.200.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	765.348.000	494.482.500	419.034.000	428.224.000	419.034.000	363.876.000	589.840.000	537.933.500	564.840.000	343.024.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	119.509.740	32.000.000	33.630.580	32.000.000	1.035.000	150.000.000	52.522.500	100.000.000	84.340.000
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.700.000	32.150.000	28.700.000	29.900.000	28.700.000	30.100.000	48.200.000	42.400.000	48.200.000	35.100.000
B	**Retribusi Jasa Usaha**										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.443.747.808	1.359.739.525	1.039.855.000	966.718.013	1.039.855.000	1.173.842.422	1.304.950.000	1.322.331.070	1.120.500.000	1.141.724.017
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	13.200.000	-	13.200.000	1.800.000	23.000.000	3.600.000	23.000.000	7.750.000
3	Retribusi Termpat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	37.150.000
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.200.000	59.927.500	53.500.000	60.745.000	53.500.000	57.182.500	65.000.000	55.862.000	58.655.000	53.600.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	788.700.000	683.052.000	698.800.000	516.801.000	698.800.000	436.595.000	1.746.600.000	847.974.000	1.766.875.000	726.647.000
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**										
1	Retribusi IMB	130.000.000	105.131.600	70.000.000	75.992.600	70.000.000	65.196.300	-	-	-	-
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung							50.000.000	24.172.282	79.800.000	16.981.808
3	Retribusi Izin Trayek	400.000	320.000	400.000	80.000	400.000	160.000	400.000	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	**10.066.665.238**	**9.127.652.583**	**8.774.595.850**	**8.390.296.684.75**	**9.242.095.850**	**8.718.180.169**	**11.953.262.464**	**10.985.075.385,40**	**12.042.470.000**	**10.841.617.696**

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023

Untuk tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupatan/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.268
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d selanjutnya

No	Uraian
I	**Pajak Daerah**
1	PBB-P2
2	BPHTB
3	PBJT
4	Pajak Reklame
5	PAT
6	Pajak MBLB
7	Pajak Sarang Burung Walet
8	Opsen PKB
9	Opsen BBNKB
II	**Retribusi Daerah**
1	**Retribusi Jasa Umum**
a.	Pelayanan Kesehatan
b.	Pelayanan Kebersihan
c.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
d.	Pelayanan Pasar
e.	Pengendalian Lalu Lintas
2	**Retribusi Jasa Usaha**
a.	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
b.	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
c.	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
d.	Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
e.	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
f.	Pelayanan jasa kepelabuhanan
g.	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
h.	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
i.	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
j.	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**
a.	Persetujuan bangunan gedung
b.	Penggunaan tenaga kerja asing
c.	Pengelolaan pertambangan rakyat

Sumber : Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Berdasarkan tabel target dan realisasi PDRD diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. Target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2019-2023 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 5.973.337.400 pada tahun 2019 menjadi Rp. 7.909.000.000 pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 5.502.589.718 pada tahun 2019 menjadi Rp. 8.149.995.371 pada tahun 2023. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), disusul oleh Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2019-2021 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Pajak parkir ini mulai tahun 2019 tidak lagi dikelola oleh Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tapi dikelola oleh Pemda/diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak termasuk objek pajak. P

Target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 4.093.327.838 pada tahun 2019 menjadi Rp. 4.133.470.000 pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 3.625.062.865 pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 2.691.622.325 pada tahun 2023. Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2019-2023 berfluktuatif. Retribusi yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, sedangkan retribusi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2023 tidak ada memberikan kontribusi sama sekali.

Belum tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari yang ditargetkan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/masyarakat dalam

membayar kewajibannya, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dan belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyaraat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Berikut ini disajikan jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto yang ditetapkan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.269
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perda terkait Perizinan	Buah	0	0	0	0	0
2	Perda terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	Buah	0	0	0	0	0
3	Perda terkait Ketenagakerjaan	Buah	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Hukum Setdako Sawahlunto Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan dari tahun 2019-2023 tidak ada alias nihil. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus berkomitmen, dengan memberikan rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Sawahlunto yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Sawahlunto.

6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya di atur dalam pasal 11 PEMENDAGRI pasal 84 tahun 2015, tentang susunan organisasi pemerintahan desa, di mana dalam aturan tersebut adanya perbedaan susunan organisasi yang berada pada tingkat desa yang di sesuaikan dengan tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa terdiri dari tiga tingkatan yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan yang tertinggi adalah desa swasembada. Desa Swasembada adalah desa yang lebih maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal tersebut selaras dengan prinsip resolusi desa yakni adil dan merata, efektif , efisien,akuntabel dan mandiri. (Yansen T.P 2014). Untuk Kota Sawahlunto, status desa berdasar inputan aplikasi Profil Desa/Kelurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.270
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengentasan Desa Tertinggal (%)	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	23,8	52,94	85,71	140	283

Pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal dari tahun 2019 hinggal tahun 2023 konsisten berada pada angka 0. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun seluruh desa pada kota Sawahlunto sudah tidak ada lagi yang berada pada klasifikasi desa tertinggal. Untuk indikator persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2023 berada pada angka 283%. Hal ini dapat dijelaskan sesuai dengan rumus indikator tersebut yang tertuang pada Permendagri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu "Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasar Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang dikali 100%. Dalam hal ini di tahun 2023 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri atau bisa disebut dengan desa maju sejumlah 17 desa, sedangkan untuk desa berkembang itu sendiri adalah sebanyak 6 desa. Oleh sebab itu capaian indikator persentase peningkatan status desa mandiri berada pada angka 283%.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atau sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.271
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1	4.149	4.358	4.692	4.873	5.071
2	Jumlah lulusan S2	255	270	289	315	331
3	Jumlah lulusan S3	3	2	3	3	5
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.407	4.630	4.984	5.191	5.407
5	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	31.249	33.019	32.243	33.973	35.800
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	14,10	14,02	15,46	15,28	15,10

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data diolah

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut disajikan rasio ketergantungan Kota Sawahlunto padaa tabel di bawah ini.

Tabel 2.272
Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.836	16.632	16.663	15.452	16.454
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.884	4.897	4.911	5.773	5.617

3	Jumlah penduduk usia non produktif (1) & (2)	21.721	21.529	21.574	21.225	22.071
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	45.133	45.478	45.580	46.544	46.309
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	48,14	47,34	47,33	45,60	47,66

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2023, Data Diolah 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kota Sawahlunto selama tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari 48,13 pada tahun 2019 menjadi 47,66 pada tahun 2023, artinya tiap 100 orang penduduk yang berusia produktif (15-64) pada tahun 2023 mempunyai tanggungan sebanyak kurang dari 48 orang penduduk non produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin tinggi produktivitas angkatan kerja dan sebaliknya.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2023

2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2023. Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, berikut disajikan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 :

Tabel 2.273
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Sawahlunto
Tahun 2023

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dinas Pendidikan																						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Dinas Pendidikan
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			286.116.819.882		106.144.369.954		129.308.814.398		12.495.832.292		28.957.371.527	0	46.372.100.025		34.810.769.461	0	103.832.682.526					Dinas Pendidikan
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)	100	251.972.440.592	100	91.542.115.249	100	111.001.285.324	30	12.256.615.852	30	27.317.592.585	0	23.229.412.781	14	27.145.885.806	60	89.348.469.840	160	180.890.585.089	16000%	7178,98%	Dinas Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP Lulusan SD Hafiz tahfiz juz 30	101,3 93,5 30	32.903.225.988	100,2 93 25	13.709.776.403	101,3 93,5 30	18.229.186.274	0	239.216.440	0	1.636.826.942		23.115.443.744	1874	7.625.838.655	0	14.481.260.686	#VALUE!	28.191.037.089	#VALUE!	86%	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase Anak Putus Sekolah yang Melanjutkan ke Pendidikan NonFormal - Persentase Sekolah yang Melaksanakan Pendidikan Karakter - Persentase Lulusan SD yang Hafal Al Qur'an Juz 30	39	1.241.153.302	11	892.478.302	15	78.342.800	0	-	3	2.952.000		27.243.500	5	39.045.000	8	2.952.000	19	895.430.302	49%	72%	Dinas Pendidikan
			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.541.574.510		46.255.476.763		45.736.089.643		4.407.786.458		15.597.798.699		12.035.192.833		12.723.982.092		44.764.760.082					Dinkes dalduk KB
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			59.541.574.510		46.255.476.763		45.736.089.643		4.407.786.458		15.597.798.699		12.035.192.833		12.723.982.092		44.764.760.082					Dinkes dalduk KB
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12	36.095.227.500		31.261.773.646	12	31.787.464.649	3	4.352.065.053	3	11.311.183.498	3	7.348.955.352	3	8.868.751.934	12	31.880.955.837	12	63.142.729.483	100,0	174,9	Dinkes dalduk KB
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang	97	22.876.002.010		14.935.667.890	97	13.455.209.044	99,48	50.033.905	0,26	4.246.346.601	0,97	4.589.594.330	-0,42	3.700.623.303	100,29	12.586.598.139	100	27.522.266.029	103	120,31	Dinkes dalduk KB

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				memiliki jaminan kesehatan																					
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82				81,3		0		2,4		83,7		84		102		
1	02	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ketersediaan tenaga Kesehatan dan Tenaga medis sesuai standar (%)	92	177.231.000		-	92	3.450.000	0	-	79,2	-	0	1.798.400	2,8	-	82	1.798.400	82	1.798.400	89,1	1,0	Dinkes dalduk KB
1	02	4	PROGRAM SEDIAAN ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	78	178.114.000		13.485.480	78	377.523.950	0	5.687.500	87,4	39.248.000	0	82.113.808	0	132.558.855	87,4	259.608.163	87	273.093.643	112,1	153,3	Dinkes dalduk KB
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	215.000.000		44.549.747	37	112.442.000	30	-	2	1.020.600	1,8	12.730.943	9,2	22.048.000	43	35.799.543	43	80.349.290	116,2	37,4	Dinkes dalduk KB
2			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR			383.675.000		2.419.581.564		1.826.281.000		117.745.175		104.375.600		268.619.700		595.070.761		1.085.811.236					Dinkes dalduk KB
2	14		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			383.675.000		2.419.581.564		1.826.281.000		117.745.175		104.375.600		268.619.700		595.070.761		1.085.811.236					Dinkes dalduk KB
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	2,22	85.895.000		144.549.264	2,22	120.000.000	0	13.264.975	2,52	7.096.000	2,22	4.391.400	0	31.102.761	2,22	55.855.136	2	200.404.400	100	233	Dinkes dalduk KB
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	69,21	159.950.000		1.915.454.800	69,21	1.028.731.000	0	103.730.200	89,7	52.279.600	70,5	118.544.100	0	100.491.800	70,5	375.045.700	71	2.290.500.500	101,8638925	1432,010316	Dinkes dalduk KB
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	235	137.830.000		359.577.500	235	677.550.000	58	750.000	58	45.000.000	58	145.684.200	61	463.476.200	235	654.910.400	235	1.014.487.900	100	736,0428789	Dinkes dalduk KB
			RSUD Sawahlunto																						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						RSUD Sawahlunto
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							75.542.507.352		14.710.153.710		18.979.425.314		17.845.403.182		22.014.708.383		73.549.690.589					RSUD Sawahlunto
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib	60	277.878.000.000	48	180.200.246.049	12	62.442.538.027	3	14.644.354.814	3	18.943.900.314	3	14.780.318.782	0	13.986.749.369	9	62.355.323.279	57	242.555.569.328	95,00	87,29	RSUD Sawahlunto
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase upaya kesehatan	100	15.082.000.000	81,45	5.669.920.056	83	13.099.969.325	0,45919474 6	65.798.896	0,24792047 2	35.525.000	21,3904904	3.065.084.400	56,0252044 6	8.027.959.014	78,1228100 7	11.194.367.310	93	16.864.287.366	92,90	111,82	RSUD Sawahlunto

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				perorangan yang terpenuhi (%)																					
			UPTD PUSKESMAS KOLOK																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			940.150.496		915.464.297	97	1.157.753.260								1.025.897.697	0	1.025.897.697	0	1.941.361.994	#DIV/0!	206,5	UPTD PUSKESMAS KOLOK
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			940.150.496		915.464.297	82	1.157.753.260								1.025.897.697	0	1.025.897.697	0		#DIV/0!		UPTD PUSKESMAS KOLOK
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12	-		109.449.917	12	410.755.260							12	491.953.925	12	491.953.925	12	601.403.842	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS KOLOK
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	940.150.496		781.514.380	97	587.438.000								384.468.472	100,29	384.468.472	100	1.165.982.852	103,4	124,0	UPTD PUSKESMAS KOLOK
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37			12.000.000	37	159.560.000		-		-				149.475.300	43	149.475.300	43	173.975.300	116,2	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS KOLOK
			UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.049.308.682		956.761.615	97	1.159.974.701								1.071.728.250	0	1.071.728.250	0	2.028.489.865	#DIV/0!	193,3167904	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			1.049.308.682		956.761.615	82	1.159.974.701								1.071.728.250	0	1.071.728.250	0		#DIV/0!		UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12	-		154.409.225	12	606.165.701							12	774.970.731	12	774.970.731	12	929.379.956	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	1.049.308.682		802.352.390	97	460.519.000								255.285.919	100,29	255.285.919	100	1.057.638.309	103,4	100,8	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		
1	02	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar				12.000.000																	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37			8.578.500	37	93.290.000								41.471.600	43	41.471.600	43	53.471.600	116,2	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
			UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.124.054.625		853.642.215		1.378.942.754								1.276.676.631	0	1.276.676.631	0	2.130.318.846	#DIV/0!	189,520936	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			1.124.054.625		853.642.215		1.378.942.754								1.276.676.631	0	1.276.676.631	0		#DIV/0!		UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12			183.338.919	12	703.119.754							12	835.913.372	12	835.913.372	12	1.019.252.291	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	1.092.213.375		662.453.296	97	579.663.000								369.029.819	100,29	369.029.819	100	1.031.483.115	103,4	94,4	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	31.841.250			37	96.160.000								71.733.440	43	71.733.440	43	86.933.440	116,2	273,0214423	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
			UPTD PUSKESMAS TALAWI																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.898.790.850		1.844.874.455	97	2.390.518.153								2.082.642.294	0	2.082.642.294	0	3.927.516.749	#DIV/0!	206,8430417	UPTD PUSKESMAS TALAWI
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			1.898.790.850		1.844.874.455	82	2.390.518.153								2.082.642.294	0	2.082.642.294	0		#DIV/0!		UPTD PUSKESMAS TALAWI

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12			340.478.653	12	1.448.297.153							12	1.546.427.369	12	1.546.427.369	12	1.886.906.022	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS TALAWI
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	1.880.571.250		1.504.395.802	97	784.146.000								454.574.525	100,29	454.574.525	100	1.958.970.327	103,4	104,2	UPTD PUSKESMAS TALAWI
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		
1	02	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar				24.000.000																	UPTD PUSKESMAS TALAWI
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	18.219.600		2.400.000	37	158.075.000								81.640.400	43	81.640.400	128	105.640.400	345,9	579,8173396	UPTD PUSKESMAS TALAWI
			UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			879.474.190		891.647.281	97	1.051.381.298								974.159.782	0	974.159.782	0	1.865.807.063	#DIV/0!	212,1502921	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			879.474.190		891.647.281	82	1.051.381.298								974.159.782	0	974.159.782	0		#DIV/0!		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12			118.764.435	12	497.572.298							12	646.583.056	12	646.583.056	12	765.347.491	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	861.633.640		765.032.846	97	477.546.500								291.749.006	100,29	291.749.006	100	1.056.781.852	103,4	122,6	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	17.840.550		7.850.000	37	76.262.500								35.827.720	43	35.827.720	43	51.027.720	116,2	286,0210027	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
			UPTD PUSKESMAS LUNTO																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			703.329.302		741.704.963		921.038.880								696.555.177		696.555.177					UPTD PUSKESMAS LUNTO
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			703.329.302		741.704.963		921.038.880								696.555.177		696.555.177					UPTD PUSKESMAS LUNTO
1	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12			91.640.185	12	369.262.880							12	396.720.377	12	396.720.377	12	1.138.425.340	100	#DIV/0!	UPTD PUSKESMAS LUNTO
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	703.329.302		634.376.778	97	462.489.100								233.789.700	100,29	233.789.700	100	868.166.478	103,4	123,4	UPTD PUSKESMAS LUNTO
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7		84		102,1		
1	02	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar				12.000.000																	UPTD PUSKESMAS LUNTO
1	02	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Sehat	37	17.150.050		3.688.000	37	89.286.900								66.045.100	43	66.045.100	43	78.045.100	116,2	455,0721426	UPTD PUSKESMAS LUNTO
			UPTD INSTALASI FARMASI KOTA																						
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.381.169.938		1.466.164.663		1.393.646.124	0	9.276.800	0	13.038.750	0	473.553.619	0	722.447.282	83,7	1.218.316.451					UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			3.381.169.938		1.466.164.663		1.393.646.124	0	9.276.800	0	13.038.750	0	473.553.619	0	722.447.282	83,7	1.218.316.451					UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki	97	3.381.169.938		1.466.164.663	97	1.393.646.124		9.276.800		13.038.750		473.553.619		722.447.282	100,29	1.218.316.451		2.684.481.114	0	79,40	UPTD INSTALASI FARMA

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				jaminan kesehatan																					SI KOTA
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82				82										83,7				0		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Monev																						
1	03	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib	36	35.342.499.274	24	16.753.825.247	12	9.932.925.757	3	1.582.891.994	3	2.617.717.531	3	2.131.628.014	3	1.868.318.457	12	7.902.898.056	36	24.656.723.303	100	70	Dinas PUPR
1	03	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan air dalam kondisi baik	50,35	28.915.566.300	46,87	11.732.962.672	50,35	7.675.000.000		76.525.000		87.135.000	0,7	1.443.173.250	0,18	1.028.465.000	47,75	2.558.773.250	95	14.291.735.922	188	49	Dinas PUPR
1	03	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik	91	14.456.757.500	98,18	7.867.062.850	91	3.660.000.000		-		-	0	1.097.050.000	0,16262121 3	2.773.351.000	98,34262121	3.870.401.000	197	11.737.463.850	216	81	Dinas PUPR
1	03	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi air limbah yang ditangani	88	4.326.434.000	91	3.933.965.500	88	1.385.300.000					0,29225523 6	100.614.430	0,98810103 7	1.141.180.000	92,2803562 7	1.241.794.430	183	5.175.759.930	208	120	Dinas PUPR
1	03	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	52,34	7.710.000.000	44,91	3.282.045.245	52,34	1.350.000.000		25.300.000		282.703.000	0,36	893.812.000	0,11	158.515.000	45,38	1.335.030.000	90	4.617.075.245	173	60	Dinas PUPR
1	03	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata	79,34	28.704.796.500	76	16.167.885.545	79,34	6.486.725.000	5	382.635.000	3	863.077.000	0	3.218.537.000		2.637.968.525	79	6.719.582.525	155	22.887.468.070	195	80	Dinas PUPR
1	03	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	66	40.947.841.772	62,84	21.455.543.465	66	14.300.128.650		1.144.096.638		1.583.597.338		1.650.059.000	62,84	8.136.636.225	62,84	11.370.292.563	126	32.825.836.028	190	80	Dinas PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	72,21	129.465.133.031	73,62		72,21	29.186.528.561		353.392.260		656.374.390	1,137	7.115.966.860	0,72	16.326.874.140	75,477	24.099.215.390	149	24.099.215.390	206	19	Dinas PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	22,22	4.266.039.550	11,11	297.215.350	22,22	307.246.513		13.358.700		20.115.700		36.406.575	0	103.735.800	11,1	163.702.575	22	460.917.925	100	11	Dinas PUPR
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup																						
1	04	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintah daerah berjalan lancar & tertib	36	27.583.353.684	24	14.017.353.964	12	11.131.495.254	3	1.356.478.811	3	3.036.889.666	3	2.484.874.287	3	2.497.866.505	12	9.376.109.269	36	23.393.463.233	100,00	84,81	DPKP2LH

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase rumah yg direhabilitasi	90	2.165.251.293		1.323.057.584		814.686.715		71.963.128		97.902.871		242.742.560		213.037.419	0	625.645.978	0	1.948.703.562	0	90,00	DPKP2LH
1	04	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman	85	9.906.623.365		3.616.376.980		2.145.617.500		14.800.000		28.786.800		536.664.500		1.016.155.800	0	1.596.407.100	0	5.212.784.080	0	52,62	DPKP2LH
1	04	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	19,08	269.891.600		134.590.512		122.496.000		-		966.500		4.770.500		192.283.080	0	198.020.080	0	332.610.592	0	123,24	DPKP2LH
1	04	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yg tertata	%	7.618.096.630		4.478.496.316		1.530.000.000		2.325.000		839.804.950		1.362.216.550		250.762.400	0	2.455.108.900	0	6.933.605.216		91,01	DPKP2LH
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SANGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yg terfasilitasi		56.981.150		19.913.700		26.167.500		-		426.500		235.800		-	0	662.300	0	20.576.000		36,11	DPKP2LH
2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah & ganti kerugian tanah yg dilaksanakan	100	167.829.930		116.048.370		28.174.000		-		96.500		-		3.764.700	0	3.861.200	0	119.909.570		71,45	DPKP2LH
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	persentase tanah ulayat yg lokasinya dalam daerah kota	100	66.456.100		34.111.922		14.400.000		-		-		83.300		-	0	83.300	0	34.195.222		51,46	DPKP2LH
2	10	3	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yg dikeluarkan	100	59.380.557		52.407.950		17.910.000		390.000		961.000		5.976.700		-	0	7.327.700	0	59.735.650		100,60	DPKP2LH
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah budidaya yg memiliki aspek hukum	80	8.253.000		3.864.500		3.930.000		-		-		-			0	-	0	3.864.500		46,83	DPKP2LH
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			200.000.000		-		288.208.000		-		550.000		7.322.500		98.906.000	0	106.778.500	0	106.778.500		53,39	DPKP2LH
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	persentase ketaatan pengelolaan & pemantauan lingkungan	75	855.573.518		17.993.000		277.117.430		2.548.000		64.931.650		137.142.585		1.999.550	0	206.621.785	0	224.614.785		26,25	DPKP2LH
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase wilayah yg dilaksanakan konservasi SDA	100	2.506.960.910		1.589.465.943		287.841.200		92.234.301		89.139.713		62.353.563		127.022.460	0	370.750.037	0	1.960.215.980	0	78,19	DPKP2LH
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)	persentase ketaatan pengelolaan & pemantauan lingkungan	75	251.808.380		660.000		8.549.500		516.000		1.490.000		198.500		2.001.300	0	4.205.800	0	4.865.800	0	1,93	DPKP2LH

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTK MASYARAKAT	persentase masyarakat yg mendapat akses diklat/penyuluhan tentang LH	100	131.394.583		13.904.000		72.420.600		-		3.943.720		30.215.000		11.850.000	0	46.008.720	0	59.912.720	0	45,60	DPKP2LH
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah penghargaan bidang LH yg diperoleh	1	84.038.010		56.144.900		22.000.100		-		-		6.700.000		-	0	6.700.000	0	62.844.900	0	74,78	DPKP2LH
2	11	11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN	persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah	100	7.303.338.905		5.839.829.861		1.154.913.450		163.480.524		336.501.415		2.015.700.346		2.923.521.425	0	5.439.203.710	0	11.279.033.571	0	154,44	DPKP2LH
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Satpol PP Damkar
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	27.497.242.080	97,41	8.514.452.945	100	8.100.137.819	17,5780331	1.373.055.166	28,9289153 6	2.259.695.171	21,5168484 9	1.680.723.872	27,1745834 8	2.122.660.815	95,1983805	7.436.135.024	193	15.950.587.969	1,93	0,58	Satpol PP Damkar
1	05	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	23.946.209.709	12	8.264.789.719	12	7.862.542.319	3	1.328.787.166	4	2.212.101.571	4	1.606.679.444	3	2.097.729.475	14	7.245.297.656	26	15.510.087.375	0,72	0,65	Satpol PP Damkar
1	05	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda (%)	100	2.362.216.147	99,6	217.697.226	100	78.615.500	25	22.067.000	25	10.170.000	0	7.404.000	0	16.884.000	50	56.525.000	150	274.222.226	1,50	0,12	Satpol PP Damkar
1	05	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	100	1.188.816.224	99,27	31.966.000	100	158.980.000	100	22.201.000	100	37.423.600	0	66.640.428	0	8.047.340	200	134.312.368	299	166.278.368	2,99	#DIV/0!	Satpol PP Damkar
				Persentase Kerjasama Penanganan Pencegahan (%)	50		99,27		100		100		100		0		0		200	-					Satpol PP Damkar
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.555.165.526		679.279.246		1.249.129.021		1.106.760.984			0	3.035.169.251		6.833.229.315	49,29		BPBD
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	100	13.864.039.899	100	3.798.060.064	100	4.142.304.476	100	663.192.427	100	1.174.015.556	100	959.483.953	100		100	2.796.691.936	100	6.594.752.000	100	47,57	BPBD
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	100	23.583.363.674	100	10.515.449.067	100	412.861.050	100	16.086.819	100	75.113.465	100	147.277.031			100	238.477.315	100	10.753.926.382	100,00	45,60	BPBD
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			20.766.992.480		10.568.951.361		5.565.493.386		924.397.858		1.605.004.311		924.707.220		1.738.400.188		5.192.509.577		15.761.460.938		75,90	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan pemerintah daerah yang berjalan lancar & tertib	12	15.397.452.321	12	8.624.674.922	12	4.912.906.136	3	908.169.858	3	1.419.100.359	3	828.741.407	3	1.445.907.848	12	4.601.919.472	24	13.226.594.394	200,00	85,90	Sekre
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	100	1.116.203.569	100	521.186.304	100	43.436.000	25	1.300.000	25	10.000.000	25	9.000.000	25	19.400.000	100	39.700.000	200	560.886.304	200,00	50,25	Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	100	3.642.559.590	89,84	1.114.238.313	100	483.562.500	25	12.750.000	25	164.982.952	25	69.072.063	25	220.585.000	100	467.390.015	190	1.581.628.328	189,84	43,42	Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	228.962.000	100	181.471.126	100	27.995.600	25	2.178.000	25	3.500.000	25	5.236.000	25	6.500.000	100	17.414.000	200	198.885.126	200,00	86,86	Sosial
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi	100	159.955.000	100	24.043.246	100	60.160.150	25	-	25	7.421.000	25	9.487.000	25	21.887.500	100	38.795.500	200	62.838.746	200,00	39,29	Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi	100	221.860.000	100	103.337.450	100	37.433.000		-		-	75	3.170.750	25	24.119.840	100	27.290.590	200	130.628.040	200,00	58,88	Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		0		0,00		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.053.079.725		1.136.194.342		1.468.972.875		20.901.500		174.647.160		519.905.246		394.991.782	0	1.110.445.688	0	2.246.640.030	0,00	55,43	PPA
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65,65	421.078.000	65,62	207.787.767	65,65	357.010.000		3.442.500		25.116.200		154.993.800		160.589.067	0	344.141.567	66	551.929.334	99,95	131,08	PPA
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	100	541.545.000	100	100.911.650	100	144.118.000		-	25	2.000.000	50	21.937.000	25	51.591.250	100	75.528.250	200	176.439.900	200,00	32,58	PPA
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	100	1.610.482.975	100	272.716.337	100	394.172.875	25	300.000	25	78.700.100	25	229.745.250	25	81.044.750	100	389.790.100	200	662.506.437	200,00	41,14	PPA
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Nindya	232.999.000	Nindya	45.542.866	Utama	-		-	0	-	0	-		-	0	-	Utama	45.542.866	0,00	19,55	PPA
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak	100	1.246.974.750	100	509.235.722	100	573.672.000	25	17.159.000	25	68.830.860	25	113.229.196	25	101.766.715	100	300.985.771	200	810.221.493	200,00	64,97	PPA

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4.463.877.928		1.738.840.776		1.420.061.795		181.017.800		361.007.780		381.844.574		310.131.900	0	1.234.002.054	0	2.972.842.830	0,00	66,60	PEMDES
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang dibina	100	3.028.550.351	100	973.171.534	100	839.431.795	25	152.887.850	25	290.920.850	25	176.282.100	25	175.437.200	100	795.528.000	200	1.768.699.534	200,00	58,40	PEMDES
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	100	1.435.327.577	100	765.669.242	95	580.630.000	20	28.129.950	25	70.086.930	25	205.562.474	25	134.694.700	95	438.474.054	195	1.204.143.296	195,00	83,89	PM
			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																						
2	09		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN																						
2	09	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan lancar dan tertib	36	40.431.198.356	24	20.859.209.408	12	11.132.402.886	3	1.517.751.464	3	3.878.542.478	3	2.603.365.688	3	2.386.081.202	12	10.385.740.832	36	31.244.950.240	100,00	77,28	DKP3
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																0	-					DKP3
2	09	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal	75	204.250.000	100	22.097.628	75	4.215.000	0	840.000	0	980.000	0	-	190	-	190	1.820.000	290	23.917.628	386,67	11,71	DKP3
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86	1.479.570.000	85,1	834.536.539	86	179.383.850	0	1.678.000	0	9.546.500	0	128.258.000	88,2	-	88,2	139.482.500	85	974.019.039	98,95	65,83	DKP3
2	09	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	6	80.280.000	6	8.219.000	6	5.645.900	0	-	0	1.950.000	0	2.510.250	9	-	9	4.460.250	6	12.679.250	100,00	15,79	DKP3
2	09	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida	91	226.500.000	97,78	71.585.520	91	20.367.750	96	12.713.500	100	409.500	100	1.032.000	98	-	394	14.155.000	492	85.740.520	540,42	37,85	DKP3
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																0	-					DKP3
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	622,5	1.417.460.000	448,04	364.893.400	218	134.630.778	55,89	9.165.000	80,57	59.652.610	51,212	17.051.064	51,21	36.818.550	238,882	122.687.224	687	487.580.624	110,35	34,40	DKP3

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	36,7	200.000.000	41,49	99.776.750	36,67	50.111.000	0	-	0	-	0	312.000	43,83	-	43,83	312.000	41	100.088.750	113,05	50,04	DKP3
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																0	-					DKP3
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	46040	10.193.720.000	34425,06	2.370.158.384	15747	1.741.837.250	5222,23	45.399.450	3730,28	567.115.002	4881,68	964.528.714	4340,94	130.771.760	18175,13	1.707.814.926	52600	4.077.973.310	114,25	40,00	DKP3
				Jumlah Produksi Karet	4719		44544,77		1730		478,05		586,93		611,13		662,65		2338,76	-	6794		143,96		
				Jumlah Produksi Kakao	1677		1161,24		569		142,77		149		149,486		149,59		590,846	-	1752		104,48		
				Jumlah Produksi :									0						0	-					
				Daging Sapi	1064		659,42		355,68		46,87		164,43		63,63		69,51		344,44	-	1004		94,35		
				Daging Ayam	2698		2002,76		900,26		211,07		212,373		219,08		259,12		901,643	-	2904		107,65		
				Telur	406		675,73		135,86		100,96		99,981		99,41		98,234		398,585	-	1074		264,61		
				Rasio Ketersediaan Handtractor terhadap Lahan Pertanian	01 : 10		1 : 11,64		1 : 10		1 : 11,64		1 : 11,64		1:10,91		1:10,91		0,00329976 9	-	0		74,40		DKP3
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (yang dialiri)	13	9.712.770.000	9,25	2.446.741.422	2,5	846.052.750	0	67.742.000	0	17.764.550	0	648.108.890	5,64	9.474.800	5,64	743.090.240	9	3.189.831.662	71,15	32,84	DKP3
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	10	1.499.190.000	100	908.827.285	10	338.647.518	100	1.955.000	100	74.625.555	100	162.749.000	0	51.400.000	300	290.729.555	300	1.199.556.840	3.000,00	80,01	DKP3
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	10	662.100.000	14,075	235.416.718	10	116.261.000	7,53984575 8	11.765.000	2,29973890 3	42.754.333	11,5	28.377.000	3,39	22.295.000	24,72958466	105.191.333	26	340.608.051	264,40	51,44	DKP3
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan	16,65	1.632.650.000	18,195	417.020.901	5,55	240.040.310	0	14.180.000	0	115.552.020	0	41.944.500	29,63	46.396.760	29,63	218.073.280	18	635.094.181	109,28	38,90	DKP3
				Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	16		19		6		0		0		0		14		14	-	19		118,75		
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.318.446.210		3.599.280.953		3.614.381.342		659.724.139		966.525.294		800.476.317		672.144.793		3.120.322.793		6.719.603.746		126,35	Disduk capil
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		36	4.438.834.800	12	3.253.829.111	12	3.374.155.792	3	587.381.889	3	950.225.094		781.441.562		669.832.793	6	2.998.681.338	62	6.252.510.449	172,22	140,86	Disduk capil
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			471.640.410		286.766.492		176.255.850		66.722.150		13.480.200		12.253.750		1.998.000		99.690.750		386.457.242		81,94	Disduk capil

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			277.000.000		8.226.800		29.021.200		-		2.420.000						8.835.600		17.062.400		6,16	Disdukcapil
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			124.971.000		32.823.600		14.842.500		638.700		400.000		1.422.000		314.000		2.774.700		35.598.300		28,49	Disdukcapil
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.000.000		17.634.950		20.106.000		4.981.400		-		5.359.005		-		10.340.405		27.975.355		466,26	Disdukcapil
5	0 4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.000.000		17.634.950		20.106.000		4.981.400		-		5.359.005		-		10.340.405		27.975.355		466,26	Disdukcapil
5	0 4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.000.000		17.634.950		20.106.000		4.981.400		-		5.359.005		-		10.340.405		27.975.355		466,26	Disdukcapil
			Dinas Perhubungan																						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Dishub
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																						Dishub
2	1 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	36	23.270.399.757	24	13.679.429.636	12	7.716.094.185	3	1.628.713.492	3	2.138.952.053	3	2.064.517.247	3	1.844.157.530	12	7.676.340.322	36	21.355.769.958	100,00	91,77	Dishub
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	25	9.553.845.410	65	2.866.962.701	45	1.352.674.889	0	22.492.000	0	432.224.000	0	109.494.550	0,11	632.339.853	0,11	1.196.550.403	65	4.063.513.104	260,44	42,53	Dishub
2	1 5	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	65	510.000.000	85,7	18.803.250	65	121.996.460	0	6.000.000	0	43.976.000	60	28.030.000	0	-	60	78.006.000	146	96.809.250		18,98	Dishub
			Dinas Komunikasi dan Informatika																						
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			669.817.403				7.186.388.972										5.880.740.413					Dinas Kominfo
2	1 6	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK	65	101.036.793			95	1.337.310.523	25	10.580.488	25	227.589.149	25	494.001.664	20	151.714.870	95	883.886.171	160	984.922.964	0	0	Dinas Kominfo
2	1 6	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi	60	341.304.400			95	2.124.982.700	25	172.671.200	25	495.454.688	25	400.492.448	25	958.147.447	100	2.026.765.783	160	2.368.070.183	0	0	Dinas Kominfo
2	2 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	24	78.478.000			12	72.505.150	3	-	2	1.075.000	4	11.792.940	3	10.688.800	12	23.556.740	36	102.034.740	0	0	Dinas Kominfo
2	2 0	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	80	11.070.360			90	77.279.125	15	721.000	20	9.067.760	25	36.251.280	30	-	90	46.040.040	170	57.110.400	0	0	Dinas Kominfo

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)	24	137.927.850			12	3.574.311.474	3	654.469.083	2	810.708.607	4	678.671.924	3	756.642.065	12	2.900.491.679	36	3.038.419.529	0	0	Dinas Kominfo
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan																						
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		36	21.208.048.974	24	11.537.414.474	12	6.588.295.037	3	1.027.158.515	3	1.744.049.192	3	1.623.944.577	3	1.724.830.362	12	6.119.982.646	36	17.657.397.120	100	83	Diskoperindag
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	36	18.127.245.341	24	11.020.207.468	12	5.936.860.687	3	954.993.715	3	1.674.236.680	3	1.509.024.453	3	1.499.281.862	12	5.637.536.710	36	16.657.744.178	100	92	Diskoperindag
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	26,47	753.900.000	18	29.466.800	26,47	66.915.000		5.750.000		2.912.392		7.244.020	26,47	5.714.000	26,47	21.620.412	44	51.087.212	168	7	Diskoperindag
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	26	720.719.900	23	18.018.000	26	74.202.800		-		200.000	26	60.037.534		-	26	60.237.534	49	78.255.534	188	11	Diskoperindag
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	60	445.420.000	100	334.001.266	60	454.503.950		62.401.300		64.515.800		21.030.000	43,47	215.097.500	43,47	363.044.600	143	697.045.866	239	156	Diskoperindag
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	53	870.965.500	4,6	135.720.940	53	55.812.600		4.013.500		2.184.320		26.608.570	46	4.737.000	46	37.543.390	51	173.264.330	95	20	Diskoperindag
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)		289.798.233			1,5	-															Diskoperindag
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.647.467.500		27.278.853.925		26.146.618.967		80.862.511		1.168.429.705		4.804.063.214		13.931.459.329		19.984.814.759	0	47.263.668.684		618	Diskoperindag
3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							520.440.100								206.271.490							Diskoperindag
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat dengan minimal tipe C		1.202.542.000		97.959.000	50	244.997.500		-		12.307.303		23.310.000	20	192.220.000		227.837.303	0	325.796.303			Diskoperindag
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar	27015,9	609.264.000	25000	151.895.742	27015,9	49.440.100		9.643.130		13.972.360		15.072.540	26490	-	26490	38.688.030		190.583.772	-	31	Diskoperindag

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				tradisional Sawahlunto																					
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor	60	947.500.000	50	238.819.559	60	66.800.000		-		54.263.840		10.890.000	50	-	50	65.153.840	100	303.973.399	167	32	Diskoperindag
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur	30	460.760.000	30	230.000	30	10.000.000		-		-		9.508.000	28,57	-	28,57	9.508.000	59	9.738.000	195	2	Diskoperindag
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual	300	623.700.000	63,5	137.236.319	125	149.202.500		-		127.578.750		3.179.640	72	14.051.490	72	144.809.880	136	282.046.199	45	45	Diskoperindag
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							25.626.178.867								13.725.187.839							Diskoperindag
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	2	2.929.541.500		26.469.053.545	2	25.600.358.867		57.945.371		960.307.452		4.734.921.574	1,99	13.725.187.839	1,99	19.478.362.236	2	45.947.415.781	100	1.568	Diskoperindag
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin	30	699.160.000		183.659.760	30	25.820.000		13.274.010		-		7.181.460	44,5	-	44,5	20.455.470	45	204.115.230	148	29	Diskoperindag
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis	100	175.000.000																			Diskoperindag
			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja																						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.157.448.959		14.927.931.386		6.818.688.949		771.429.307		2.532.352.333		1.188.850.118		1.476.487.120	0	5.969.118.878	0	20.897.050.264		86,50%	DPMPTSP Naker
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			22.029.728.819		13.954.842.879		6.091.752.049		730.331.272		2.387.977.682		1.002.180.988		1.193.977.409	0	5.314.467.351	0	19.269.310.230		87,47%	DPMPTSP Naker
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	36	18.884.703.399	24	12.582.795.706	12	5.349.133.409	3	681.935.114	3	2.259.930.534	3	858.282.059	3	1.108.580.109	12	4.908.727.816	36	17.491.523.522	100,00%	92,62%	DPMPTSP Naker
2	07	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia	100	110.000.000	0	-	100	-		-		-		-		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	DPMPTSP Naker
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS	80	2.560.932.820	75,78	1.229.901.883	70	511.834.490		36.444.158		114.501.148		108.105.839	55,8	41.918.900	55,8	300.970.045	132	1.530.871.928	164,48%	59,78%	DPMPTSP Naker
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	75,35	304.474.850	70,85	84.427.400	75,35	150.752.400		11.952.000		6.490.000		8.769.000	69,9	-	69,9	27.211.000	141	111.638.400	186,79%	36,67%	DPMPTSP Naker

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI BIPARTIT (PERUSAHAAN)	10	169.617.750	10	57.717.890	10	80.031.750		-		7.056.000		27.024.090	1	43.478.400	1	77.558.490	11	135.276.380	110,00 %	79,75%	DPMPTSP Naker
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.127.720.140		973.088.507		726.936.900		41.098.035		144.374.651		186.669.130		282.509.711	0	654.651.527	0	1.627.740.034		76,50%	DPMPTSP Naker
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	25	150.000.000	103,5	-	25	100.000.000		-		-		-	0,88995470 3	99.622.500	0,88995470 3	99.622.500	104	99.622.500	417,56 %	66,42%	DPMPTSP Naker
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	NILAI INVESTASI LOKAL	80	75.914.900	102	83.422.334	30	16.264.500		-		541.000		8.736.200	172,9	-	172,9	9.277.200	275	92.699.534	343,63 %	122,11%	DPMPTSP Naker
				NILAI INVESTASI NASIONAL	30		55		10								39,89		39,89		95	-	316,30 %		DPMPTSP Naker
				NILAI INVESTASI ASING	3		0		1								0		0		0	-	0,00%		DPMPTSP Naker
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DPMPTSPNAKER	B	555.057.550	A	422.372.488	B	108.334.100		23.353.980		24.863.460		27.207.290	A	15.806.550	150	91.231.280	100	513.603.768	100,00 %	92,53%	DPMPTSP Naker
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL	100	751.309.390	72,825	355.022.955	100	406.900.000		5.700.000		105.421.736		114.304.400	76	157.686.911	76	383.113.047	149	738.136.002	148,83 %	98,25%	DPMPTSP Naker
2	18	5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN MPP	B	595.438.300	B	112.270.730	B	95.438.300		12.044.055		13.548.455		36.421.240	B	9.393.750	100	71.407.500		183.678.230		30,85%	DPMPTSP Naker
			Dinas Kebudayaan																						
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Disbud
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																						Disbud
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)			12	496.012.598	-	8.745.744.863	0	518.009.417	0	1.138.484.032	0	1.089.856.920	0	968.710.164	0	3.715.060.533	0	4.211.073.131		0	Disbud
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31,1	921.992.705	40	802.162.705	31,1	194.830.000	0	54.218.200	0	2.759.400		30.424.100	20,93	42.477.480	20,93	129.879.180	67	54.218.267	216	6	Disbud
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13,3	550.284.575	28,29	574.802.429			0	-	0	-	0	-	48,15	-	48,15	-	0	-	-	-	Disbud

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60	158.468.320	96,6	158.468.320			0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Disbud
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92	776.855.000	117,6	1.258.257.108	63,92	753.855.000	16,23	13.459.600		-	30,09	24.947.250	17,6	15.000.000	63,92	53.406.850	182	1.311.663.958	283,98	168,84	Disbud
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33000	2.526.855.510			33000	2.526.855.510	12532	31.949.000	9094	259.649.943	2592	854.234.601	14121	775.971.487	38339	1.921.805.031	38339	1.921.805.031	116	76	Disbud
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.835.016.689	12	3.355.600.061	36	3.319.686.265	3	601.105.500	3	1.017.136.934	15	812.363.092	20	836.545.821	41	3.267.151.347	53	6.622.751.408		1,73	DPK
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.734.352.289	12	3.250.088.131	24	3.267.417.265	3	598.561.500	3	960.677.934	3	802.948.092	20	836.545.821	29	3.198.733.347	41	6.448.821.478		1,73	DPK
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.514.407.359	12	3.138.361.651	12	3.197.323.665	3	596.011.498	3	944.931.501	3	761.744.626	20	766.846.079	29	3.069.533.704	41	6.207.895.355		1,77	DPK
			BIDANG PERPUSTAKAAN			219.944.930	12	111.726.480	12	70.093.600	3	2.550.002	3	15.746.433	3	41.203.466	0	69.699.742	9	129.199.643	75	240.926.123		1,10	DPK
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		12	219.944.930	12	111.726.480	12	70.093.600	3	2.550.002	3	15.746.433	3	41.203.466	0	69.699.742	9	129.199.643	75	240.926.123	6,25	1,10	DPK
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota		100.664.400	596	105.511.930	12	52.269.000	3	2.544.000	3	56.459.000	12	9.415.000	0	-	18	68.418.000	600	173.929.930		1,73	DPK
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah sesuai Standar (OPD)	12	71.414.400	584	64.031.930	12	36.004.000	3	2.544.000	3	27.199.500	6	6.135.000	0	-	12	35.878.500	100	99.910.430	8,33	1,40	DPK
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaksalaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Bulan)		29.250.000	12	41.480.000	101	16.265.000	1	-	3	29.259.500	6	3.280.000	0	-	10	32.539.500	83	74.019.500		2,53	DPK
			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Disparpora
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																						Disparpora
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.120.070.583		5.607.198.877		7.045.274.583		777.414.346		1.783.837.043		1.378.408.381		-		3.939.659.770		9.546.858.647		5.470	Disparpora
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			446.979.500		391.987.364		668.619.500		3.220.000		750.000		8.300.000		26.560.000		38.830.000		38.981.330		60	Disparpora
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			4.625.000.000		3.028.554.482		4.652.500.000		1.024.159.000		379.893.950		450.385.898		903.984.163		2.758.423.011		1.982.847.745		1.386	Disparpora

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			450.000.000		349.960.600		450.000.000		-		360.000.000		-		3.050.619		363.050.619		713.011.219		158	Disparpora
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						Disparpora
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																						Disparpora
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			5.844.402.745		8.387.929.303		5.594.402.745		404.139.028		845.363.480		2.111.032.015		4.231.260.144		7.591.794.667		15.979.723.970		9.355	Disparpora
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			1.301.048.650		584.249.460		1.301.048.650		1.731.250		24.213.400		281.874.400		199.971.576		507.790.626		1.092.040.086		328	Disparpora
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			40.000.000		-		40.000.000		2.976.800		1.137.000		3.368.400		-		7.482.200		7.482.200		69	Disparpora
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			105.373.280		102.188.200		105.373.280		400.000		1.500.000		31.134.520		-		33.034.520		135.222.720		270	Disparpora
			Sekretariat Daerah																						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						Dinas Kominfo Dan Setdako
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			129.327.677.217		69.328.740.013		45.027.551.258		2.958.969.223		13.409.872.547		10.254.853.883		11.544.204.824		38.167.900.477					Dinas Kominfo Dan Setdako
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK	95	1.457.879.700	65	691.105.218		-										-	65	691.105.218	68%	47%	Dinas Kominfo Dan Setdako
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95	8.540.215.000	60	2.020.720.065													60	2.020.720.065	63%	24%	Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	36	200.166.750	24	68.295.990													24	68.295.990	67%	34%	Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah	90	1.025.824.842	80	88.067.030													80	88.067.030	89%	9%	Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dilingkup Sekretariat (bulan)	36	80.351.944.712	24	46.268.858.711	12	25.770.531.783	3	2.918.499.433	2	7.501.246.263	3	6.534.434.895	4	5.346.759.724	12	22.300.940.315	36	68.569.799.026	100%	85%	Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Jumlah	60		52		60				58						58		110		183%	101%	Sekreta

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (PondokTahfiz)																					tiat Daerah
				Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	100	34.825.159.263	100	19.473.180.916	100	18.800.120.875		37.473.340		5.890.132.134		3.584.061.438	100	6.159.602.350	100	15.671.269.262	200	35.144.450.178	200%		
				Persentase santri rumah/pondok tahfiz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	50		57,55		50				0				76,02		76,02		134		267%		
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan)	36	2.926.486.950	24	718.512.083	12	456.898.600	3	2.996.450	2	18.494.150	3	136.357.550	4	37.842.750	12	195.690.900	36	914.202.983	100%	31%	Sekretariat Daerah
			Sekretariat DPRD																						
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						Sekretariat DPRD
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	36	44.440.035.744	24	27.896.961.975	12	16.024.795.771	3	2.779.357.353	3	3.602.797.127	3	3.342.074.829	3	3.624.794.673	12	13.349.023.982	36	41.245.985.957	100%	92,81%	Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksanaya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100	31.912.280.625	100	12.325.476.528	100	9.224.760.000	100	2.163.606.128	100	2.771.508.388	100	4.349.672.817		3.294.740.919	100	12.579.528.252	100	24.905.004.780	100%	78,04%	Sekretariat DPRD
			Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						Barenlitbangda
5	1		PERENCANAAN			21.673.453.022		11.219.033.148		7.402.127.803		665.429.880		1.900.990.277		1.510.196.707		-		4.076.616.864		15.295.650.012			Barenlitbangda
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	36	15.677.630.272	24	9.645.754.260	12	6.254.750.984	3	613.545.700	3	1.777.024.029	3	1.285.456.538	0	-	9	3.676.026.267	33	13.321.780.527	92%	85,0%	Barenlitbangda
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI	100	3.511.872.750	100	1.013.871.966	100	831.405.069	25	35.735.750	25	63.513.575	25	61.066.859	0	-	75	160.316.184	175	1.174.188.150	175%	33,4%	Barenlitbangda

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD																					
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD	100	2.483.950.000	100	559.406.922	100	315.971.750	25	16.148.430	0	60.452.673	50	163.673.310	0		75	240.274.413	175	799.681.335	175%	32,19%	Barenlitbangda
5	5		PENELITIAAN DAN PENGEMBANGAN			632.363.300		274.130.240		320.831.000		650.000		2.590.000		105.530.850		1.590.000		110.360.850		384.491.090			Barenlitbangda
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN	120	632.363.300	45	274.130.240	25	320.831.000		650.000		2.590.000		105.530.850		1.590.000	20	110.360.850	65	384.491.090	54,2%	60,80%	Barenlitbangda
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						BPKAD
5	2		KEUANGAN			250.825.917.612		153.037.166.082		82.596.531.310		15.810.397.989		16.754.757.169		17.116.190.912		18.109.666.594	0	67.791.012.664	0	220.828.178.746		88,04%	BPKAD
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	27.018.607.031	24	15.993.048.461	12	9.388.817.062	3	1.432.305.866	3	2.390.374.360	3	1.856.203.543	3	1.807.311.302	12	7.486.195.071	36	23.479.243.532	100,00%	86,90%	BPKAD
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	WTP	218.880.423.581	WTP	3.114.132.379	WTP	72.025.551.715	3	14.315.971.763	3	14.243.700.546	3	14.990.708.520	WTP	16.130.495.708	WTP	59.680.876.537	100	62.795.008.916	100,00%	28,69%	BPKAD
				PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%)	90		93,235		90								90,71		90,71	-	184		204,38%		BPKAD
				MAKSIMAL DEFISIT APBD (%)	4,1		8		3								1		1	-	9		219,51%		BPKAD
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)	95	2.580.616.000	90	2.333.925.144	90	611.158.475		59.312.860		47.781.655		113.945.851	90	33.889.320	90	254.929.686	180	2.588.854.830	189,47%	100,32%	BPKAD

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)	100	2.346.271.000	98,135	1.936.277.174	100	571.004.058		2.807.500		72.900.608		155.332.998	100	137.970.264	100	369.011.370	198	2.305.288.544	198,14 %	98,25%	BPKAD
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						BKPSDM
5	3		KEPEGAWAIAN			24.296.013.002		11.299.176.777	12	7.558.464.223	3	986.105.452	3	1.482.581.548	3	1.331.417.963	3	951.313.607	12	4.812.948.170		16.112.124.947			BKPSDM
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib	36	17.926.789.442	12	8.350.159.156	13	5.701.154.004	3	866.812.852	4	1.295.744.798	3	916.416.985	3	914.055.607	13	3.993.030.242		12.343.189.398		68,85%	BKPSDM
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan	100	5.769.223.560	100	2.949.017.621	100	1.723.824.219	25	119.292.600	25	186.836.750	25	415.000.978	25	37.258.000	100	819.917.928		3.768.935.549			BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							133.486.000									0	-					BKPSDM
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			600.000.000		-		133.486.000									0	-					BKPSDM
			Inspektorat																						
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																						Inspektorat
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		36	21.911.403.189	24	13.558.250.859	12	6.944.981.210	3	1.245.077.470	3	1.921.139.223	3	1.540.514.583	3	1.347.142.609	12	6.053.873.885	36	19.612.124.744	100	89,51	Inspektorat
6	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	36	20.691.554.215	24	13.212.540.391	12	6.811.692.960	3	1.230.247.780	3	1.915.374.223	3	1.489.411.983	3	1.321.419.484	12	5.956.453.470	36	19.168.993.861	100	92,64	Inspektorat
6	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	948.940.390	100,08	258.497.080	100	76.326.350	25	8.343.690	25	3.625.000	25	24.462.400	25	24.798.125	100	61.229.215	100	319.726.295	100,00	33,69	Inspektorat
6	01	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP	3	270.908.584	2	87.213.388	3	56.961.900		6.486.000		2.140.000		26.640.200	3	925.000	3	36.191.200	5	123.404.588	166,67	45,55	Inspektorat
			Kecamatan Barangin																						
			UNSUR KEWILAYAHAN																						KEC BARANGIN
7				Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat		22.830.671.480		16.151.329.050		7.580.900.552		864.047.524		2.363.727.961		1.187.153.703		2.450.774.896		6.865.704.084	0	6.865.704.084		128,15	KEC BARANGIN
7	1		KECAMATAN			11.916.032.587	24	17.128.117.630	12	4.975.433.002	3	868.524.024	3	1.472.489.821	3	1.187.153.703	3	1.042.159.117	12	4.570.326.665		10.043.971.208		190,04	KEC BARANGIN
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan	36	10.248.852.587	48	15.212.870.660	12	4.873.202.502	3	861.842.324	3	1.455.671.121	3	1.138.974.953	3	1.042.159.117	6	4.498.647.515	18	9.724.225.088	83,33	135,13	KEC BARANGIN

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				tertib (Bulan)																					
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	1	814.500.000	100	835.216.930	100	11.960.000	100	6.681.700	100	1.214.000	100	3.604.000	100	-	100	11.499.700	200	142.016.630	200,00	39,10	KEC BARANGIN
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	1	622.000.000		643.451.960	100	80.329.500	100	-	100	13.106.700	100	44.574.750	100	-	100	57.681.450	100	104.133.410	200,00	30,61	KEC BARANGIN
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	1	73.100.000	100	77.299.400	100	2.500.000		-	100	2.498.000		-		-	100	2.498.000	200	6.697.400	200,00	62,76	KEC BARANGIN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan Baik	1	99.080.000	13	156.199.500	100	4.945.000	100	-	100	-	100		100	-	100	4.870.000	112	61.989.500	100,00	62,57	KEC BARANGIN
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum dengan Baik (%)	1	58.500.000	12	63.904.840	100	2.496.000		-		-					0	-	12	5.404.840	100,00	36,24	KEC BARANGIN
			KELURAHAN DURIAN I																						
	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100	1.942.060.000	24	2.538.784.441	100	363.999.700	25	11.514.516	25	96.250.704	25	117.338.321	25	164.634.679	100	309.785.460	50	2.848.569.901	50	146,68	Kel. Durian I
	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	716.000.000	112	906.628.430	100	297.799.000	25	-	25	168.503.992	25	40.370.352	25	79.952.760	100	288.827.104	50	1.195.455.534	50	166,96	Kel. Durian I
			KELURAHAN DURIAN II																						
	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100	1.952.060.000	100	#REF!	100	668.358.350	25	10.319.288	25	189.876.470	25	197.484.233	25	176.738.294	100	574.418.285	50	#REF!	50	#REF!	Kel Durian II
	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	716.000.000	100	#REF!	100	214.836.750	25	-	25	56.931.310	25	68.575.687	25	71.775.836	100	197.282.833	100	#REF!	100	#REF!	Kel Durian II
			KELURAHAN LUBANG PANJANG																						

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100	1.929.560.000	100	#REF!	100	591.741.000	25	20.595.754	25	151.226.282	25	197.435.316	25	138.727.684	100	507.985.036	50	#REF!	50	#REF!	Kel Lubang Panjang
	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	716.000.000	100	#REF!	100	202.718.290	25	-	25	47.814.128	25	86.015.248	25	33.252.732	100	167.082.108	50	#REF!	50	#REF!	Kel Lubang Panjang
			KELURAHAN SARINGAN																						
	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100	2.268.560.000	100	#REF!	100	683.569.500	25	42.326.238	25	159.946.824	25	207.565.192	25	174.663.406	100	609.491.534	50	#REF!	50,00	#REF!	Kel Saringan
	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	674.398.893	100	#REF!	100	236.735.200	25	-	25	24.989.874	25	115.200.000	25	85.000.000	100	225.189.874	50	#REF!	50,00	#REF!	Kel Saringan
			Kecamatan Lembah Segar																						
7			UNSUR KEWILAYAHAN																						Kec Lembah Segar
7	1		KECAMATAN			30.945.890.899		10.678.617.188		9.962.357.309		1.122.763.420		3.175.892.369		2.523.090.808		2.266.698.451		9.088.445.048	0	19.767.062.236		395.341.244.720	Kec Lembah Segar
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	36	14.794.934.774	12	6.149.323.263	12	6.315.817.359	3	816.188.850	3	2.257.854.759	3	1.472.004.837	3	1.312.420.050	12	5.858.468.496	112	12.007.791.759	277,78	240.155.835.180	Kec Lembah Segar
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	382.929.870	100	152.008.500	100	69.219.800	100	-	100	61.475.500	100	2.945.820	100	720.000	100	65.141.320	100	217.149.820	100,00	0,00	Kec Lembah Segar
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	355.418.235	100	52.209.800	100	60.792.501		-	100	21.178.500	100	20.806.100	100	6.000.000	100	47.984.600	100	100.194.400	100,00	0,00	Kec Lembah Segar
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi	100	34.320.000	100	1.837.980	100	12.613.750		-	100	7.648.500	100	840.000	100	144.000	100	8.632.500	100	10.470.480	100,00	0,00	Kec Lembah Segar

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				aman dan tertib																					
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100	2.500.000		241.900	100	3.500.000	0	-			100	2.469.000			100	2.469.000	200	2.710.900	100,00	0,00	Kec Lembah Segar
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK	100	8.500.000	100	4.773.230	100	5.100.000		-	100	1.565.120		751.680			100	2.316.800	100	7.090.030	100,00	0,00	Kec Lembah Segar
			KELURAHAN AIR DINGIN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	1.921.952.250	100	455.681.206	100	383.242.730	100	19.191.400	100	96.818.426		142.632.975		65.625.015	100	324.267.816	200	383.242.815	100	7.664.856.292,23	Kel Air Dingin
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara	3	636.744.750		124.484.500	3	200.210.000		-	3	116.482.000		36.649.409		42.441.112	3	195.572.521	100	200.210.098	100	4.004.201.953,67	Kel Air Dingin
			KELURAHAN AUR MULYO																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK		1.718.687.100		521.295.053	100	397.750.900	25	42.052.760	25	94.532.404	25	113.312.625	25	98.476.422	100	348.374.211	100	88	100	87,59	Kel Aur Mulyo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara		840.000.000		262.780.400	4	200.030.000		-	1	23.836.206	1	69.977.695	1	103.700.046	4	197.513.947	100	99	100	98,74	Kel Aur Mulyo
			KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		2.087.366.700		576.238.595	100	380.429.580	100	45.228.160	100	100.832.502		97.265.256		87.072.050	100	330.397.968	100	380.429.667	100	86,85	Kel KSU

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK																					
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara		471.330.300		134.328.700	4	201.607.250		-	4	20.000.000		66.518.210		96.387.100	4	182.905.310	100	201.607.341	100	90,72	Kel KSU
			KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK		1.658.697.000		435.545.467	100	366.897.526	100	24.600.000	100	95.904.280		93.033.743		70.899.990	100	284.438.013	100	78	100	77,53	Kel KSS
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara		900.000.000		245.959.230	5	200.000.078	5	8.000.000	5	12.000.000		37.040.432		117.674.393	10	174.714.825	200	200.000.165	200	0,00	Kel KSS
			KELURAHAN PASAR																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK		1.734.262.320		597.437.494	100	390.248.905	100	133.478.250	100	111.383.900		74.561.735		65.409.304	100	384.833.189	100	99	100	98,61	Kel Pasar
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara		839.550.600		229.107.700	4	195.271.000	1	8.300.000	1	22.358.282	1	58.510.322	1	91.892.465	4	181.061.069	100	93	100	92,72	Kel Pasar
			KELURAHAN TANAH LAPANG																						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.698.888.000		520.987.070	100	365.049.930	100	25.724.000	100	89.661.990	100	122.692.913	100	55.557.040	100	293.635.943	100	365.050.010	100	0,00	Kel Tanah Lapang

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK																					
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kawasan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dipelihara		859.809.000		214.377.100	5	214.576.000		-	5	42.360.000		111.078.056		52.279.464	5	205.717.520	100	214.576.096	100	0,00	Kel Tanah Lapang
			Kecamatan Silungkang Monev Renja																						
7			UNSUR KEILAYAHAN																						Kec Silungkang
7	1		KECAMATAN			3.589.450.000		5.268.610.278		3.011.845.604						788.341.205				2.138.330.473		7.406.940.751		2,063530834	Kec Silungkang
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	12	2.995.010.000	12	4.822.755.807	12	2.787.645.404	3	317.186.918	3	538.525.610	3	739.285.035	3	479.511.796	12	2.074.509.359	6	6.897.265.166	50	2,30291891	Kec Silungkang
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	29.000.000	22	220.392.792	100	17.219.900	25	-	25	-	25	5.647.560	25	539.460	100	6.187.020	122	226.579.812	122	7,813096966	Kec Silungkang
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	100	481.560.000	100	143.263.229	100	179.505.300	25	6.369.600	25	906.134	25	41.729.810	25	6.949.750	100	55.955.294	50	199.218.523	50	0,41369408 4	Kec Silungkang
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WILAYAH DALAM KONDISI AMAN DAN TERTIB (%)	100	30.850.000	3	14.258.250	100	9.465.000	0	-	0	-					0	-	3	14.258.250	3	0,46217990 3	Kec Silungkang
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK	100	8.680.000	0	55.840.200	100	2.500.000	0	-	0	-					0	-	0	55.840.200	0	6,43320276 5	Kec Silungkang
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK	100	44.350.000		12.100.000	100	15.510.000		-		-	75	1.678.800	25		100	1.678.800	100	13.778.800	100	0,31068320 2	Kec Silungkang

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kecamatan Talawi																						
7			UNSUR KEWILAYAHAN																						KEC. TALAWI
7	1		KECAMATAN			9.583.679.810		4.070.316.596		3.674.781.283		322.749.049		831.142.651		590.271.440		520.139.406		2.264.302.546		6.334.619.142		66,09798394	KEC. TALAWI
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36	7.912.888.870	24	3.543.487.151	12	3.336.163.278	3	310.192.549	3	810.036.651	3	573.697.335	3	514.589.406	12	2.208.515.941	36	5.752.003.092	100	72,69156924	KEC. TALAWI
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana dengan Baik (%)	100	989.693.990	100	229.162.835	100	12.499.850	25	1.378.000	25	-	25	2.009.500	25	-	100	3.387.500	100	232.550.335	100	23,49719584	KEC. TALAWI
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100	342.000.000	100	145.213.640	100	287.318.255	25	11.178.500	25	15.806.000	25	13.962.605	25	5.550.000	100	46.497.105	100	191.710.745	100	56,05577339	KEC. TALAWI
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	170.596.950	100	60.500.150	100	5.000.000		-		-		-		-		-	100	60.500.150	100	35,46379346	KEC. TALAWI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	63.000.000	100	63.292.600	100	11.300.000		-		-		-		-	0	-	100	63.292.600	100	100,4644444	KEC. TALAWI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100	105.500.000	100	28.660.220	100	22.499.900	25	-	25	5.300.000	25	602.000	25	-	100	5.902.000	50	34.562.220	50	32,7603981	KEC. TALAWI
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	5.382.037.989	100	5.185.620.247	100	11.963.777.382	100	393.385.148	100	1.360.354.754	100	1.300.535.784	300	6.189.046.521	100	9.243.322.207	100	14.428.942.454	100	268,0944	Kesbangpol
1	05	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	100	5.382.037.989	100	3.685.719.415	100	3.412.888.750	100	383.459.148	100	709.607.936	100	515.400.355	100	572.202.831	100	2.180.670.270	100	5.866.389.685	100	108,9994106	Kesbangpol
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		100	6.287.280.382		1.499.900.832		8.550.888.632	100	9.926.000	100	650.746.818	100	785.135.429	200	5.616.843.690	100	7.062.651.937	100	8.562.552.769	100	136,1884988	Kesbangpol
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100	6.287.280.382		1.499.900.832		8.550.888.632	100	9.926.000	100	650.746.818	100	785.135.429	200	5.616.843.690	100	7.062.651.937	100	8.562.552.769	100	136,1884988	Kesbangpol
8	01	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penurunan	15	450.504.700	13	88.552.230	15	789.321.400	0	-	0	26.682.800	6,4	392.993.705		148.862.050	4,3	568.538.555	17	657.090.785	115,3333333	145,8565882	Kesbangpol

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1			2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 =7+8+9+10		12 = 5+11		13 = 12/4x100%		14
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				angka kriminalitas																					
8	01	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu	78		78		80		0		0						82,56		161		205,8461538		Kesbangpol
				Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah	78,62	584.664.124	78.62	584.664.124	85	7.047.378.332	0	1.100.000	0	454.356.618		95.038.806		5.320.000.000	78,62	5.870.495.424	#VALUE!	6.455.159.548	78.62	1104,079981	Kesbangpol
				Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27		53,27		65		0		0						54,27		108		198,1573613		Kesbangpol
8	01	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					0		0		0		Kesbangpol
	01	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis	100	4.541.965.358	100	826.684.478	100	680.384.900	100	3.574.800	100	167.157.400	100	284.352.918	100	115.440.040	100	570.525.158	200	1.397.209.636	100	30,76222573	Kesbangpol
8	01	5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1	4.541.965.358	1	826.684.478	1	680.384.900	1	3.574.800	1	167.157.400	7	284.352.918	3	115.440.040	12	570.525.158	13	1.397.209.636	100	30,76222573	Kesbangpol
				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pekat	300														0		0	-	0		Kesbangpol
8	01	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti	100	685.146.200	100	-	100	33.804.000	100	5.251.200	100	2.550.000	100	12.750.000	100	32.541.600	100	53.092.800	200	53.092.800	200	7,749119823	Kesbangpol
										Rata-rata capaian kinerja (%)														
										Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk pencapaian target program dan kegaitan SPM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 2.274
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDIDIKAN**											**100**
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipas di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT (%)	100	100	100	100	100	85,99	92,09	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	85,05	56,7	50,3	100	100
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	100	78,76	93,27	100	100	100
2	**KESEHATAN**											**84,56**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	64,6	56,7	71,7	72,28	69,03
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	75,54	76,78	79,9	79,11	77,23
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	79,49	79,68	83,6	82,25	80,18
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38,36	38	74,6	89,5	88,73
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	97,91	100	68,36	100	94,24
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	86,2	76,05	49,83	52,29	78,65
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38,11	46,66	44,64	61,35	45,52

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	39,49	16,72	7,95	38,95	100
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	60,34	88,06	50,59	81,35	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	100	27,14	13,1	26,03	52,99	81,14
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	100	86,33	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**											**100**
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (%)	100	100	100	100	100	84	85,26	86	91,67	100
		Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	100	100	100	100	100	60	99,86	90	93,33	100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	100	92,5	78	93,23	94,66	
4	**PERUMAHAN RAKYAT**											**100**
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
5	**KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**100**
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**											**100**
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)										
	RATA-RATA CAPAIAN SPM											97,22

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 yang telah dilakukan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.275
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Tahun 2023

Prioritas Tahun 2023	Masalah
Peningkatan SDM yang berdaya saing	Perlunya Peningkatan Kualitas Pendidikan
	Perlunya peningkatan Derajat Kesehatan
Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Melambatnya pertumbuhan lapangaan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, lapangan pertanian perikanan serta industri pengolahan
	Pengeluaran perkapita dan PDRB perkapita masih dibawah rata-rata nasional
	Meningkatnya laju inflasi
	Belum Optimalnya Pengelolaan pendapatan asli daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata Melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia Dan Geopark Nasional	Melambatnya pertumbuhan lapangaan usaha penyediaan jasa akomodasi makan dan minum, lapangan pertanian perikanan serta industri pengolahan
Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Belum optimalnya aksesbilitas wilayah
	Perlunya Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Belum terpenuhinya tanah/lahan untuk pembangunan fasilitas umum
	Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pola ruang
	Masih tingginya resiko bencana daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dan Mall Pelayanan Publik (Mpp)	Iklim investasi yang belum kondusif
Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
	Belum Optimalnya pengelolaan inovasi daerah

Jadi pemasalahan daerah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk semua
2. Belum optimalnya Pendidikan yang berkualitas dan merata
3. Belumnya optimalnya perlindungan sosial yang adaptif
4. Belumnya optimalnya Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Belumnya optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau
6. Belumnya optimalnya Transformasi Digital
7. Belumnya optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

8. Belumnya optimalnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Belumnya optimalnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
10. H Belumnya optimalnya ukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
11. Belumnya optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro
12. Belumnya optimalnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13. Belumnya optimalnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14. Belumnya optimalnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
15. Belumnya optimalnya Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Belumnya optimalnya Berketahanan Energi Air dan Kemandirian Pangan
17. Belumnya optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

2.3.2.1 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Masih rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional.
2. Masi rendahnya angka rata-rata lama sekolah.
3. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah.
4. Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekualifikasi pendidikan tinggi.
5. Masih rendahnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Masih rendahnya angka usia harapan hidup.
2. Tingginya angka kematian Ibu.
3. Tingginya prevalensi stunting.
4. Memaksimalkan cpersentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis
5. Mengotimalkan angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis.
6. Mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum optimalnya persentase jumlah rumah tangga dengan sanitasi aman.
2. Belum optimalnya jumlah kapasitas air baku.
3. Belum optimalnya persentase akses rumah tangga dengan sanitasi aman.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terkangkau.
2. Belum optimalnya konsumsi listrik per kapita.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk penanggulangan bencana dan kebakaran)

1. Masih tingginya indeks resiko bencana.
2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto untuk menjaga ketertiban.
4. Masih terbatasnya operasional dan SDM penanganan kebakaran di Kota Sawahlunto
5. Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana

6. Masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam)

1. Mengoptimalkan penurunan tingkat kemiskinan.
2. Mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan persentase disabilitas yang bekerja di sector formal.

2.3.2.2 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Masih tingginya tingkat pengagguran terbuka.
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Masih rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sector pertanian, kehutanan danperikanan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih tingginya nilai indeks ketimpangan gender.
2. Masih rendahnya indeks perlindungan khusus anak.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Masih rendahnya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok.
2. Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya indeks kualitas tutupan lahan.
2. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup.
3. Maish rendahnya persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
4. Belum optimalnya proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan publik

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya jumlah persentase desa mandiri.
2. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masuk dalam DTKS (25.34 %).
3. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama antar desa dalam peningkatan pendapatan desa. Hal ini bisa dilihat pada salah satu contoh bahwa belum seluruh desa memiliki Bumdes dan hanya sebanyak 8 atau 34.7% dari 23 Bumdes yang aktif.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya nilai indeks pembangunan keluarga.
2. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
3. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
4. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
5. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;

6. kekurangan data dasar program KB didaerah sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Masih kurangnya pelayanan dan keselamatan transportasi jalan seperti rambu dan marka jalan di Kota Sawahlunto
2. Kurang optimalnya fasilitas pelayanan gedung uji kendaraan di Kota Sawahlunto
3. Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Masih rendahnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia.
2. Belum optimalnya Indeks SIstem Pemerintahan berbasis Elektronik.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih rendahnya proporsi jumlah UKM non pertanian.
2. Masih rendahnya jumlah industry kecil menengah.
3. Masih rendahnya rasio kewirausahaan.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Masih rendahnya ROA BUMD.
2. Belum optimalnya pembentukan modal tetap bruto.
3. Belum optimalnya persentase ekspor barang dan jasa.
4. Masih rendahnya total dana pihak ketiga.
5. Masih rendahnya nilai transaksi berupa nilai rata-rata tahunan.
6. Belum optimalnya total kredit.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya daya saing kepemudaan yang disebabkan Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
2. Masih rendahnya daya saing olahraga disebabkan Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga yang berkualitas, Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara propinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan dan Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral.
2. Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Belum optimalnya hasil forum satu data.
4. Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Belum optimalnya pengamanan informasi.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum terpelihara dan dilestarikan dengan baik disebabkan Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya dunia yang perlu ditingkatkan, Tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya, Sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yag terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh perusahan tambang/pihak ketiga sehingga dalam pengelolaan mengalami masalah, Masih rendahnya kualitas SDM situs warisan dunia, Belum di tetapkannya badan pengelola WTBOS dan Sebagian besar situs/cagar budaya belum dilestarikan dengan baik

2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi budaya lokal disebabkan Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan dan kurang optimalnya kelembagaan budaya

2.3.2.3 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Menurunnya jumlah produksi ikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dan Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota sawahlunto disebabkan Beberapa objek wisata strategis belum mempunyai dokumen perencanaan, Kualitas sarana pendukung objek wisata belum memadai, Kurang optimalnya pemeliharaan objek wisata, Akses dan konektivitas menuju destinasi wisata belum memadai dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata
2. Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata disebabkan Sarana dan prasarana atraksi tidak memadai, SDM pelaku atraksi belum mendukung
3. Kualitas Promosi masih rendah disebabkan SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung, Kemitraan/kerjasama biro perjalanan belum aktif, Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai dan Promosi pariwisata dilakukan secara manual
4. Industri Pariwisata belum berkembang disebabkan Kurangnya sarana dan presarana penginapan dan Akomodasi yang representative, Belum tersedianya rumah makan yang representative, Sarana dan prasarana transportasi belum memadai dan Belum tersedianya Biro perjalanan yang propesional
5. Kelembagaan Pariwisata yang belum professional disebabkan Belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan, Belum meratanya penguatan organisasi kelompok sadar wisata yang ada, Kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah dan Kurangnya SDM dari pokdarwis
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif disebabkan SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai, Sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif belum ada dan Akses pelaku ekonomi kreaatif terhadap sumber pendanaan belum luas.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Masih rendahnya rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. Lebih luas lahan Tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan Irigasi 693 Ha.
3. Rendahnya Pengunaan Benih Unggul Bersertifikasi.
4. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan pertanian masih terbatas
5. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi Masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan aman).
6. Masih Rendahnya Motivasi petani dalam berusaha tani

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Banyaknya UKM yang tidak berkembang
2. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
3. Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi informasi dalam berusaha
4. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar
6. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen melalui tertib ukur.
7. Besarnya pengaruh pasar online terhadap jual beli di pasar pada masa pandemic
8. PKL dilingkungan pasar dapat mengakibatkan gangguan terhadap pasar dan para pedagang didalamnya.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Meningkatkan rasio PDRB industry pengolahan
2. Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal
3. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil
4. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha indistri kecil dan menengah
5. Minimnya standarisasi produk industri
6. Masih lemahnya SDM pelaku industri
7. Belum optimalnya fasilitas yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitas kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan

2.3.2.4 Permasalahan Terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya indeks reformasi hokum.
2. Belum optimalnya Indeks Pelayanan Publik.
3. Belum optimalnya survey penilaian integritas (SPI) KPK
4. Belum optimalnya Indeks persepsi anti korupsi.

Inovasi Daerah

1. Belum optimalnya nilai Indeks Inovasi Daerah

2.3.2.5 Permasalahan Terkait Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Perencanaan

1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
2. Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan

Unsur Keuangan

1. Masih rendahnya proporsi kontribusi PDRB.
2. MAsih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB.
3. Masih tingginya tingkat inflasi.
4. Masih rendahnya Rasio PDRB sector jasa keuangan.

Unsur Kepegawaian

1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya
2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani
6. Masih rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun struktural.

2.3.2.6 Permasalahan Terkait Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

1. Faktor Internal
   a. Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
   b. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemeriksa Inspektorat dikarenakan masih adanya temuan pemeriksaan setiap kali pemeriksaan.

c. Adanya keterbatasan SDM pada Inspektorat Kota Sawahlunto untuk melakukan pembinaan pada OPD.
d. Kurangnya Jabatan Fungsional yang ada di Inspektorat Kota Sawahlunto, terutama pada Jabatan Ahli Muda dan Pertama.
e. Kualitas LHP belum sesuai yang diharapkan dan belum memenuhi standar pemeriksaan, dikarenakan belum memadainya kualitas SDM.

2. Faktor Eksternal
   a. Masih rendahnya anggaran pengawasan yang ada pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang mengakibatkan pemeriksaan yang dilaksanaakan tidak optimal.
   b. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan sehingga dalam pengembangan pengetahuan dan potensi pegawai dan pejabat fungsional dalam meningkatkan SDM tidak maksimal.
   c. Belum optimalnya OPD menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
   d. Adanya perubahan regulasi menuntut APIP agar segera dapat memahami aturan baru tersebut sebagai landasan dalam melakukan pengawasan.

2.3.2.7 Permasalahan Terkait Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Belum optimalnya pelayanan public kepada masyarakat
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas
3. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi

2.3.2.8 Permasalahan Terkait Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum optimalnya peran kelembagaan Kesbangpol Kota Sawahlunto
2. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan

2.3.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karateristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan keunggulan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional

Pemerataan ekonomi adalah tujuan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang progresif sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. Dengan pemerataan ekonomi kita dapat mencapai kesetaraan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Kota sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota sawalunto, ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah Kota sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka Panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas Nasional maupun Internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga akan menjadi perhatian karena sektor pertanian ini merupakan sektor yang dominan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto. Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang. Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Mengingat di tahun 2045 Indonesia akan memperoleh bonus demografi, maka harus dipersiapkan dari sekarang generasi yang berakhlak, tangguh, mandiri, berkualitas & punya daya saing. Untuk mendukung langkah ini, Pemerintah telah menyediakan Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD (UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ps 49 ayat 1). Kemudian urusan Pendidikan juga menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilakukan oleh setiap Provinsi/ Kab/Kota (Permendikbud RI nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan). Dan Pendidikan yang berkualitas dan merata masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045. Faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah dengan : Menciptakan pendidik & tenaga kependidikan yang berkualitas & berkuantitas, menyediakan sarana & prasarana sekolah yang berkualitas & berkuantitas, mendorong & menumbuhkan minat /bakat siswa untuk mau selalu meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat & pemerintah dalam mengawal proses tumbuh kembang pendidikan anak dan mengantisipasi kuatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat membawa efek positif maupun negatif bagi perkembangan pola pikir, sikap & adab siswa / guru/ tenaga pendidik.

Peningkatan kualitas kesehatan menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi dimana 68,3 % adalah penduduk usia produktif sehingga merupakan peluang untuk meraih Indoesia emas tahun 2045. Urusan kesehatan masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045 yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan Indonesia sehat diwujudkan melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat. Upaya transformasi kesehatan adalah melalui penguatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas & berkuantitas, menyediakan sarana & prasarana kesehatan yang berkualitas & berkuantitas, jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

Sebanyak 3.120 individu pada tahun 2023 termasuk ke dalam masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didominasi oleh fakir miskin dan lansia terlantar. Di sisi lain, kemiskinan menjadi 0% merupakan salah satu visi dari Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung visi tersebut, diperlukan sinergitas bersama untuk menekan angka kemiskinan yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan serta pemberian perlindungan sosial yang memadai dan menjadi aksi nyata bagi setiap unsur yang terlibat. Pertambahan jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dan pastinya menuntut kesiapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial guna menekan angka kemiskinan. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat yang ditujukan untuk percepatan penuntasan

kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pula pemberian bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi saat ini meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfregmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan penggunaan data mesih terfragmantasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih terjadi.

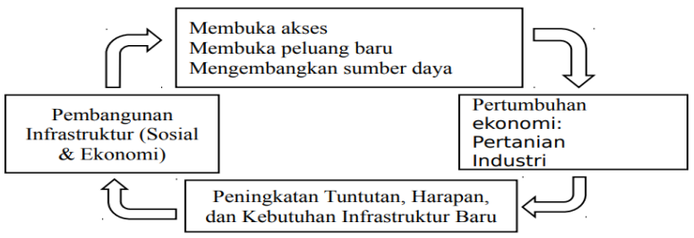
Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara garis besar capaian IPG Kota Sawahlunto di angka 95,17 dengan IPM laki-laki sebesar 77,08 dan IPM perempuan sebesar 73,36. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat perbedaan antara kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, serta ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah Pusat maupun Daerah mesti bersinergi untuk menggalakkan pembangunan berbasis kesetaraan gender, dengan salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu pembentukan kelembagaan PUG di Kota Sawahlunto. Sejalan dengan hal tersebut, upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan serta pemberdayaan perempuan harus selalu diperhatikan. Karena mengingat jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terlapor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, secara garis besar angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor belum lah bisa menjadi representasi dari kasus yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih merasa tabu dalam membahas atau menguak permasalahan KDRT sehingga hal ini seperti fenomena gunung es. Dalam hal ini perlu penguatan kelembagaan P2TP2A dalam rangka promotif (sosialisasi, kampanye, penyuluhan) preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), rehabilitatif (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan). Selain itu, diperlukan pula peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, Pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dan juga penguatan PUG dan inklusi sosial dalam pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pada RPJPN tahun 2025-2045.

Pembangunan dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Infrastruktur berperan sebagai roda penggerak ekonomi dan juga pembangunan. Infrastruktur mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi serta stimulan pengembangan lapangan usaha. Selain itu, keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, industri, dan juga kegiatan sosial masyarakat. Mulai dari transportasi jalan raya, sistem energi, bangunan sekolah dan perkantoran, sampai jaringan telekomunikasi, jaringan layanan air bersih, rumah ibadah, dan lainnya. Infrastruktur juga merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Gambar 2.3

Peran Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Usman, Sunyoto (2010)

Mengingat pentingnya peran infrastruktur dalam kegiatan ekonomi, sosial, pelayanan dan pembangunan, maka kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan. Ketika suatu daerah mengalami perkembangan dalam kegiatan perekonomian, maka tuntuntan terhadap ketersediaan infrastruktur juga akan terus bertambah. Selanjutnya, apabila ketersediaan infrastruktur terus berkembang, maka daerah tersebut mempunyai kemampuan produksi yang lebih besar. Keberadaan infrastruktur di Kota Sawahlunto juga memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi dan daya saing daerah. Terlebih untuk mendukung potensi

wisata sejarah dunia UNESCO *Ombilin Coal Meaning Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) dan Geopark Nasional Sawahlunto yang menjadi wisata unggulan dan memberikan *multiplier effect* dalam pertumbuhan sektor ekonomi lain. Keberadaan infrastruktur tentunya memberikan dampak besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata tersebut.

Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto hingga mendekati akhir berlakunya RPJPD Kota Sawahlunto, tentunya telah mengalami perkembangan yang cukup siginifikan, baik dari sektor pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan permukiman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di Kota Sawahlunto, maka penyediaan infrastruktur belum sepenuhnya terakomodir dengan baik. Masih terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan secara kuantitas maupun kualitas. Pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah juga belum terpenuhi seluruhnya. Perlu pemenuhan, peningkatan dan pemeliharaan yang optimal pada infrastruktur tersebut, hingga dapat menjadi penopang yang kuat dalam penggerak kegiatan ekonomi dan sosial Masyarakat di Kota Sawahlunto.

Pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum yang meliputi penyediaan jalan, pemenuhan air bersih dan air minum, sanitasi layak, sawah yang terairi irigasi serta drainase dalam kondisi baik, masih perlu peningkatan dan pemeliharaan. Pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase yang layak merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah secara maksimal, yang hingga saat ini pemenuhannya belum 100%. Padahal, jika dikaitkan dengan potensi yang dimiliki, Kota Sawahlunto memiliki sumber air baku dari 5 aliran Sungai dan 5 danau yang mampu memenuhi kebutuhan debit air. Namun keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat dalam pemanfaatan sumber air yang lebih besar. Pemenuhan sanitasi layak belum optimal, pengelolaan limbah terpadu dalam skala besar belum dimiliki oleh Kota Sawahlunto, pengelolaan masih secara mandiri di setiap rumah tangga. Pemenuhan sistem drainase masih dibawah 50% karena pemeliharaan yang sangat minim setiap tahunnya.

Konektivitas antar daerah baik didalam maupun diluar kota belum memadai. Kondisi jalan dan sarana prasarana pelengkap jalan sangat menentukan aksesibilitas dari dan menuju Kota Sawahlunto dan dapat mempengaruhi alur produksi dan distribusi barang jasa, kelancaran transportasi, biaya logistik, hingga kunjungan wisata. Konektivitas jalan dengan daerah perbatasan menuju Kabupaten Tanah Datar belum memadai untuk dilalui kendaraan berat, kondisi rusak dengan volume jalan yang kecil serta sarana dan prasarana jalan belum lengkap.

Belum optimalnya capaian infrastruktur urusan perumahan kawasan permukiman masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah**.** Setiap tahunnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penanganan RTLH, Kawasan kumuh, PSU perumahan permukiman. Namun kegiatan diatas perlu optimalisasi baik dari segi mekanisme pengajuan lokasi, besaran anggaran yang dibutuhkan serta stakeholder terkait.

Pembangunan dan pengembangan suatu daerah seringkali memberikan efek jangka panjang yang buruk terhadap kelestarian lingkungan. Begitupun dengan penyediaan sarana dan prasaranan kota yang pengembangannya tidak secara komprehensif berdasarkan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga memberikan pengaruh pada kualitas air, udara, ketersediaan lahan dan sampah yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, perlu analisis dan kajian mendalam pada aplikasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk pemenuhan infrastruktur, Kota Sawahlunto dihadapkan dengan peluang dan tantangan eksternal baik di tingkat provinsi maupun nasional. Infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan kawasan permukiman merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga dengan air minum dan sanitasi aman juga didukung pengembangannya dalam RPJPN 2025-2045, dalam arah kebijakan Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana untuk wilayah Sumatera. Sektor irigisi menjadi pendukung rencana pengembangan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kawasan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan dalam arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045.

Transformasi tata kelola pemerintahan

Kualitas Aparatur Kota Sawahlunto berpotensi untuk ditingkatkan berdasarkan Rasio ASN Kota Sawahlunto terhadap jumlah penduduk Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 3,1 % (2040 : 66.413). Sementara Rasio ASN secara nasional adalah sebesar 1,5 %. Dengan demikian Rasio ASN Kota Sawahlunto dua kali lebih besar dari Rasio ASN Nasional, angka ini merupakan

potensi yang cukup besar untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepda masyarakat Kota Sawahlunto.

Integritas pemberi layanan tata kelola pemerintahan masih rentan praktik korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Sawahlunto 83,96 (skala 100) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal 73,83 (skala 100). Disamping itu belum ada unit kerja/perangkat daerah yang memperoleh prediket menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberadaan desa di Kota Sawahlunto yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan masih belum banyak. Hal ini tercermin melalui persentase dari jumlah desa mandiri yang baru menginjak di angka 14.8% atau sebanyak 4 desa berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023. Di sisi lain, desa/kelurahan di Kota Sawahlunto memiliki berbagai kelembagaan yang jika dimanfaatkan dengan optimal tentunya akan memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan desa, seperti keberadaan 23 Bumdes di Kota Sawahlunto, dimana dalam hal ini baru sebanyak 35.5% yang sudah menghasilkan laba. Kurang optimalnya keberadaan berbagai kelembagaan yang ada juga mampu mengindikasi masih rendahnya daya saing, produktifitas dan ketahanan aktivitas perekonomian pedesaan. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fisik serta non fisik juga mesti dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemandirian serta peningkatan masing-masing desa di segala aspek.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi nasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Sumatera Barat, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 tidak lepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat. Tema RKP Tahun 2025 adalah *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dengan arah kebijakan : 1. SDM Berkualitas (SDM berdaya saing dan produktif); 2. Infrastruktur Berkualitas (infrastruktur untuk peningkatan produktivitas); 3.Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan), hal ini untuk mencapai Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2025 yang ditargetkan sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,6 %
- Tingkat Kemiskinan : 7,0 – 8,0 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5 – 5,0 %
- Rasio Gini : 0,379 - 0,382
- Indeks Modal Manusia : 0,56
- Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6 %

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah *"Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025 menargetkan capaian sasaran makro pembangunan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi : 5,00 % dan 5,05 %
- PDRB Per Kapita : 57,94 juta dan 62,29 juta
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,75 % dan 5,55 %
- Tingkat Kemiskinan : 5,83 % dan 5,65 %
- IPM : 76,67 dan 77,41
- Indeks Gini : 0,291 dan 0,290

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat tersebut, terdapat tujuh Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah ;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.**

Dengan berpedoman pada tema dan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025, tema dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan arah kebijakan ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta tidak lepas dari perkembangan ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka tema RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dengan Prioritas Pembangunan : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan; 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 4. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya local; 5. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

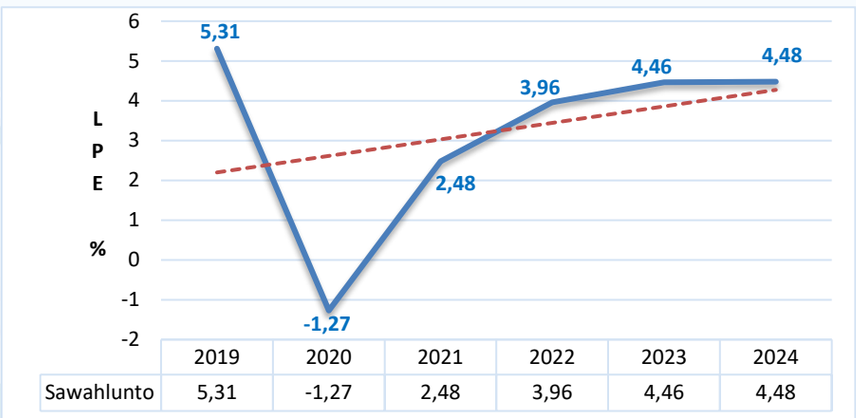
a. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga ke angka -1,27 persen yang merupakan dampak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, Kota Sawahlunto berupaya bangkit mulai Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh di angka 2,48 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 3,96 pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 berhasil mencapai angka 4,46 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh semua lapangan usaha yang kembali mulai menggeliat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto berdasarkan harga berlaku Tahun 2023 sebesar Rp. 4.825.295,86 juta. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 9,92% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.389.764,91 juta dengan selisih sebesar Rp. 435.530,95 juta.

Beberapa lapangan usaha yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2023 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 %), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 %), Konstruksi (10,98 %), Industri Pengolahan (10,87 %) dan Informasi dan Komunikasi (8,76 %). Sedangkan 12 lapangan usaha lain peranannya berada pada rentang 0,14 – 8,51 %. Diantara 12 lapangan usaha tersebut, terdapat 3 lapangan usaha dengan peranan yang paling kecil, yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan (0,14 %), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,36 %) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,33 %).

Perkiraan kondisi ekonomi daerah Tahun 2024 masih akan melanjutkan progres positif dengan target pertumbuhan hingga 4,48 %. Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tentunya upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor tersier, selain lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, konstruksi, industri pengolahan dan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang juga besar kontribusinya terhadap PDRB. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto ke depan juga penuh hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut :

Grafik 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023
Dan Prediksi Tahun 2024



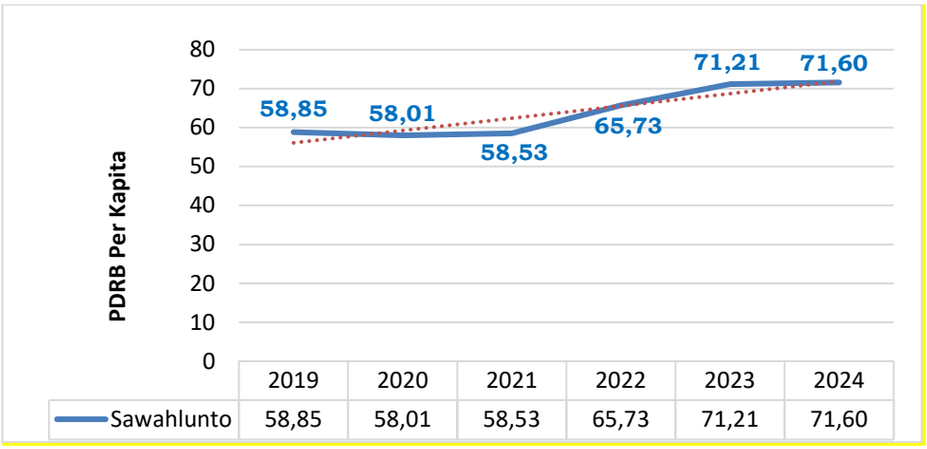
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,48

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 20234

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 memiliki tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 5,03 % kecuali tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Apabila PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat pada jangka waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Sumatera Barat, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 3.2
Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	58,85	58,01	58,53	65,73	71,21	71,60

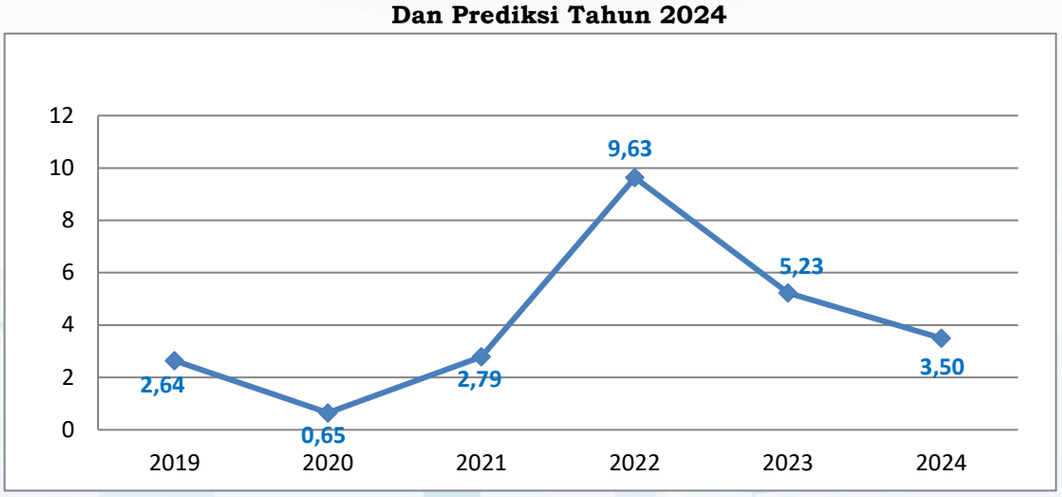
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Berdasarkan grafik di atas, PDRB per kapita tertinggi terjadi pada Tahun 2023, berdasarkan tren tersebut diperkirakan PDRB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2024 akan meningkat menjadi 71,60 juta rupiah per jiwa per tahun.

c. Inflasi

Inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 9,63 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 0,65 %. Namun pada tahun 2023 sejalan dengan penurunan harga BBM, inflasi Kota Sawahlunto menurun menjadi 5,23 %. Rata-rata laju inflasi Kota Sawahlunto dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan dan mengendalikan laju inflasi, maka diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.3
Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

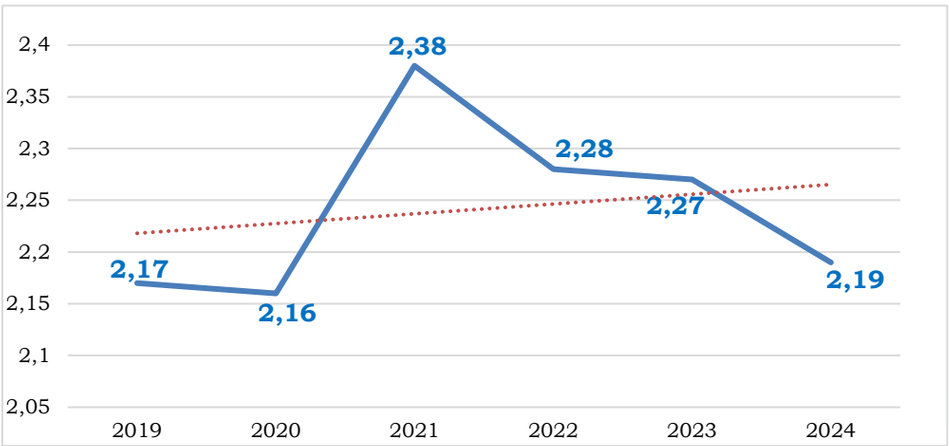
Pada tahun 2024, diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto dapat ditekan hingga 3,5 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021

tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 melalui berbagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan.

d. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah selama tiga tahun terakhir pada Level Nasional. Namun besaran tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir dengan kisaran 2,16 % hingga 2,38%. Memperhatikan tren lima tahun tersebut diprediksi tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.4
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023
Dan Prediksi Tahun 2024



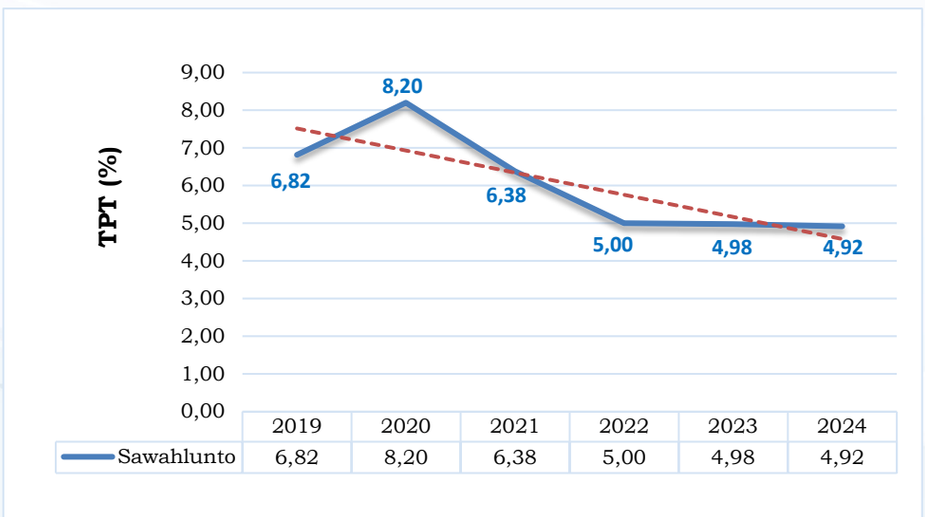
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto diperkirakan akan kembali turun menjadi 2,19 % dengan adanya berbagai upaya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 8,20% hingga 4,98 %. Berdasarkan evaluasi tersebut perkiraan TPT Kota sawahlunto untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024



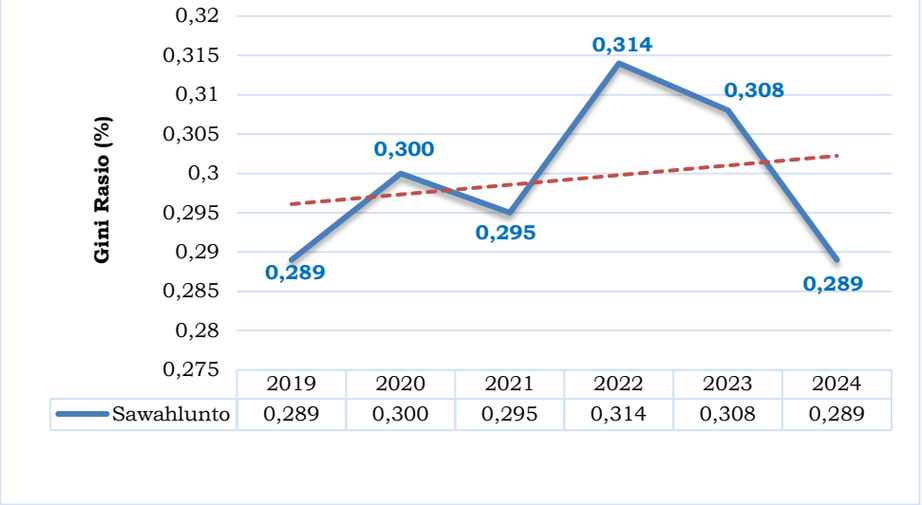
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto tahun 2024 diperkirakan akan turun pada angka 4,92 % dengan adanya bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Gini Rasio Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi dengan sangat signifikan dengan kisaran 0,289 hingga 0,308, diperkirakan Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.6
Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	0,289	0,300	0,295	0,314	0,308	0,289

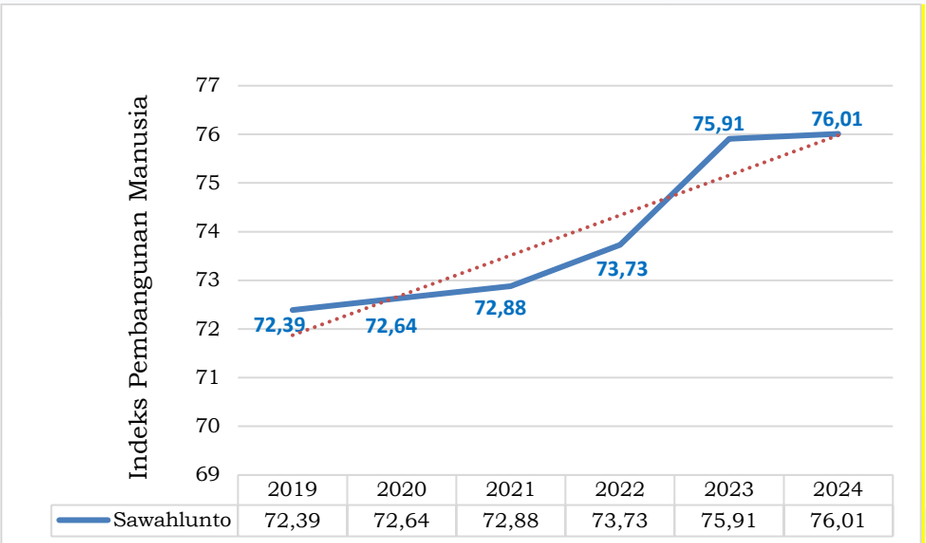
Sumber : BPS, Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2024

Gini Rasio Kota Sawahlunto diperkirakan akan mampu turun menjadi 0,289 pada tahun 2024 dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan sudah berada pada kategori tinggi karena indeks berada pada rentang 70 - 80. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat terjadi bencana covid 19 pada Tahun 2020 peningkatan IPM berhasil dipertahankan Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto tahun 2024 pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	72,39	72,64	72,88	73,73	75,91	76,01

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

IPM Kota Sawahlunto diperkirakan akan meningkat menjadi 76,01 pada tahun 2024 dengan semakin membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kota Sawahlunto sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik melalui anggaran daerah Kota Sawahlunto sendiri maupun anggaran pusat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan yang perlu dicermati ke depan adalah resiko ketidakpastian global terkait dengan Pertumbuhan global yang melemah disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin tinggi dan Eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi global.

Selain tantangan eksternal di atas, tantangan internal yang diperkirakan akan dihadapi Kota Sawahlunto pada tahun 2025 adalah :

1. Potensi inflasi sebagai dampak dari inflasi negara maju yang juga akan mempengaruhi inflasi nasional dan daerah yang akan menggerus daya beli masyarakat;
2. Perubahan iklim dan cuaca ektrem yang sedang terjadi pada tahun 2024 ini dan perkiraan tahun 2025 yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok;
3. Konsumsi Pemerintah yang masih rendah dan terus menurun menjadi tantangan bagi Kota Sawahlunto untuk melakukan belanja yang produktif;
4. Topografi Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit menyebabkan rawan longsor dan bencana alam lainnya membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar untuk memelihara kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
5. Pengembangan Sumber daya manusia yang masih berada pada posisi terendah untuk tingkat kota di Provinsi Sumatera Barat;
6. Daya saing perekonomian yang semakin ketat;
7. Jumlah angkatan kerja yang besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2025, namun terdapat juga beberapa hal yang akan mendorong prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan berupa dukungan dari pemerintah pusat dan regional Sumatera Barat serta pemerintah Kota Sawahlunto dengan upaya sebagai berikut :

1. Penguatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa guna menggerakkan dunia usaha sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan;
2. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui kemudahan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif bagi dunia usaha dan industri;
4. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produk-produk unggulan;
5. Meningkatkan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Mendorong hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
8. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto lima tahun terakhir, tantangan dan daya dukung perekonomian Kota Sawahlunto dan juga mengacu pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta prediksi ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, maka prediksi ekonomi makro Kota Sawahlunto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,73 %, hal ini merujuk pada perkembangan sektor utama perekonomian Kota Sawahlunto yang mulai meningkat aktivitasnya.
- Tingkat inflasi Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan lebih kecil dari 3,5 % dengan asumsi Pemerintah Kota Sawahlunto mampu mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan.
- PDRB Per Kapita ADHB Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,35 juta rupiah dengan asumsi pertumbuhan PDRB ADHB Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan turun menjadi 4,83 % karena diperkirakan dunia usaha akan mulai bangkit dan lapangan kerja/peluang kerja akan terbuka.

- Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan turun menjadi 2,18 % dengan asumsi perlindungan sosial masih tetap dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat hingga pemerintah Kota Sawahlunto untuk peningkatan daya beli masyarakat.
- Indeks Gini Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan akan turun menjadi 0,285 dengan asumsi semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal.
- Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 77,14 dengan asumsi semakin meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat serta meningkatnya aktivitas perekonomian Kota Sawahlunto sehingga pendapatan masyarakat juga meningkatkan, dan dengan demikian pengeluaran per kapita juga akan meningkat.

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,73
2	Inflasi (%)	3,5
3	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	74,35
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,83
5	Tingkat Kemiskinan (%)	2.18
6	Indeks Gini	0,285
7	IPM	77,14

Sumber : Perda Nomor 04 Tahun 2023 tentang RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Sawahlunto 2025

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Untuk Proyeksi Pendapatan pada tahun 2025, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendapatan yang sudah dilalui sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, serta target Pendapatan pada APBD tahun 2024 dan rencana tahun 2025. Proyeksi/Target Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Proyeksi APBD Kota Sawahlunto
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	APBD 2024	PROYEKSI 2025
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	**625.185.465.083,00**	**605.314.638.183,64**	**635.325.458.057,00**	**526.173.753.072,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**66.783.021.097,00**	**59.943.839.179,64**	**74.425.254.593,00**	**70.860.816.938,00**
Pajak Daerah	7.909.000.000,00	8.149.995.371,00	7.575.000.000,00	16.437.192.604,00
Retribusi Daerah	4.133.470.000,00	2.691.622.325,00	38.446.283.297,00	32.482.514.925,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	15.663.529.464,00	15.628.865.561,00	17.153.003.674,00
Lain-lain PAD yang Sah	39.111.685.536,00	33.438.692.019,64	12.775.105.735,00	4.788.105.735,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**66.783.021.097,00**	**59.943.839.179,64**	**74.425.254.593,00**	**70.860.816.938,00**
PENDAPATAN TRANSFER	**558.402.443.986,00**	**545.370.799.004,00**	**560.900.203.464,00**	**455.312.936.134,00**
Dana Perimbangan	496.122.518.000,00	492.739.272.002,00	501.191.593.128,00	414.537.483.128,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	32.671.991.128,00	32.671.991.128,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	381.865.492.000,00	381.865.492.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	50.548.393.204,00	35.173.088.000,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	50.233.600.418,00	51.481.022.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**496.122.518.000,00**	**492.739.272.002,00**	**501.191.593.128,00**	**414.537.483.128,00**
Dana Insentif Fiskal	-	-	13.892.503.000,00	10.412.503.000,00
Dana Desa	21.339.313.000,00	21.339.313.000,00	20.651.099.000,00	20.651.099.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**21.339.313.000,00**	**21.339.313.000,00**	**34.543.602.000,00**	**31.063.602.000,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	25.165.008.336,00	9.711.851.006,00
Pendapatan Bagi Hasil	37.140.612.986,00	27.492.214.002,00	25.165.008.336,00	9.711.851.006,00
Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**40.940.612.986,00**	**31.292.214.002,00**	**25.165.008.336,00**	**9.711.851.006,00**
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**558.402.443.986,00**	**545.370.799.004,00**	**560.900.203.464,00**	**455.312.936.134,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**625.185.465.083,00**	**605.314.638.183,64**	**635.325.458.057,00**	**526.173.753.072,00**
BELANJA DAERAH	**669.237.924.585,00**	**607.064.912.961,00**	**701.233.133.566,00**	**524.507.086.404,00**
BELANJA OPERASI	**508.679.565.969,00**	**465.316.924.124,00**	**541.878.998.805,00**	**441.711.045.710,00**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	APBD 2024	PROYEKSI 2025
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	262.287.661.176,00	246.879.933.557,00	313.470.374.633,00	284.822.809.287,00
Belanja Barang dan Jasa	214.877.895.657,00	189.393.433.222,00	203.937.760.048,00	152.327.104.833,00
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.122.101.270,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Belanja Hibah	26.746.034.136,00	24.475.356.075,00	18.622.164.124,00	1.823.131.590,00
Belanja Bantuan Sosial	3.517.975.000,00	3.446.100.000,00	4.598.700.000,00	1.488.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**508.679.565.969,00**	**465.316.924.124,00**	**541.878.998.805,00**	**441.711.045.710,00**
BELANJA MODAL	**97.876.748.616,00**	**84.381.971.361,00**	**90.167.452.710,00**	**16.047.064.507,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.202.204.963,00	12.084.173.858,00	39.301.080.979,00	6.677.964.507,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.136.755.083,00	35.635.719.133,00	18.023.094.131,00	463.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.266.106.060,00	36.392.598.160,00	32.672.891.000,00	8.894.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	271.682.510,00	269.480.210,00	170.386.600,00	12.100.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**97.876.748.616,00**	**84.381.971.361,00**	**90.167.452.710,00**	**16.047.064.507,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.250.000.000,00**	**836.646.211,00**	**5.868.328.051,00**	**3.430.622.187,00**
Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	836.646.211,00	5.868.328.051,00	3.430.622.187,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**1.250.000.000,00**	**836.646.211,00**	**5.868.328.051,00**	**3.430.622.187,00**
BELANJA TRANSFER	**61.431.610.000,00**	**56.529.371.265,00**	**63.318.354.000,00**	**63.318.354.000,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	790.914.000,00	620.462.410,00	757.500.000,00	757.500.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	413.356.000,00	334.048.338,00	459.515.000,00	459.515.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	60.227.340.000,00	55.574.860.517,00	62.101.339.000,00	62.101.339.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	**61.431.610.000,00**	**56.529.371.265,00**	**63.318.354.000,00**	**63.318.354.000,00**
JUMLAH BELANJA	**669.237.924.585,00**	**607.064.912.961,00**	**701.233.133.566,00**	**524.507.086.404,00**
SURPLUS/DEFISIT	**(44.052.459.502,00)**	**(1.750.274.777,36)**	**(65.907.675.509,00)**	**1.666.666.668,00**
PEMBIAYAAN DAERAH	**44.052.459.502,00**	**10.746.689.591,38**	**65.907.675.510,00**	**(1.166.666.668,00)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**45.719.126.171,00**	**12.116.356.259,38**	**67.574.342.178,00**	**-**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.260,00	12.114.946.259,38	55.514.775.394,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.604.179.911,00	1.410.000,00	12.059.566.784,00	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**45.719.126.171,00**	**12.116.356.259,38**	**67.574.342.178,00**	**-**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.666.666.669,00**	**1.369.666.668,00**	**1.666.666.668,00**	**1.166.666.668,00**
Penyertaan Modal Daerah	-	-		-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	203.000.000,00	500.000.000,00	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.666.666.669,00**	**1.369.666.668,00**	**1.666.666.668,00**	**1.166.666.668,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**44.052.459.502,00**	**10.746.689.591,38**	**65.907.675.510,00**	**-**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**8.996.414.814,02**	**-**	**-**

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto (LKPD Audited 2023)

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025 adalah Pemulihan Ekonomi Melalui Keungggulan Pariwisata dan Produk Lokal dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.
2. Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark.
4. Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP).
6. Pemantapan reformasi birokrasi pemerintah.

3.2.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dijabarkan sebagai berikut.

3.2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.2.2 Kinerja Pendapatan

Untuk menghitung kerangka pendanaan tersebut, maka perlu mempertimbangkan kinerja keuangan di masa lalu. Untuk pendapatan, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	%
PENDAPATAN	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**620.647.226.213,62**	**605.314.638.183,64**	**-0,01**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**66.920.994.265,62**	**59.943.839.179,64**	**0,03**
Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	0,11
Pendapatan Retribusi Daerah	3.625.062.865,00	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	-0,05
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	0,10

Lain-lain PAD yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	**571.997.269.623,00**	**497.369.022.340,00**	**538.147.448.116,00**	**551.073.826.548,00**	**545.370.799.004,00**	-0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**495.141.841.033,00**	**445.561.937.322,00**	**509.421.068.591,00**	**516.814.855.288,00**	**514.078.585.002,00**	0,01
Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	0,69
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00				
Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	-0,02
Dana Alokasi Khusus	76.333.533.741,00	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	0,11
Dana Insentif Daerah	3.044.355.666,00	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		-0,95
Dana Desa			30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	-0,14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**50.404.370.000,00**	**28.631.236.000,00**	**-**	**-**	**-**	
Dana Penyesuaian	22.193.148.000,00	-	-	-	-	
Dana Alokasi Desa	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**26.451.058.590,00**	**23.175.849.018,00**	**28.726.379.525,00**	**34.258.971.260,00**	**31.292.214.002,00**	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	0,03
Bantuan Keuangan				600.000.000,00	3.800.000.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.858.200.000,00**	**19.951.455.793,90**	**8.418.079.800,00**	**2.652.405.400,00**	**-**	
Pendapatan Hibah	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00		
Bantuan Keuangan		11.503.247.000,00	-	-	-	

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023 (audited)

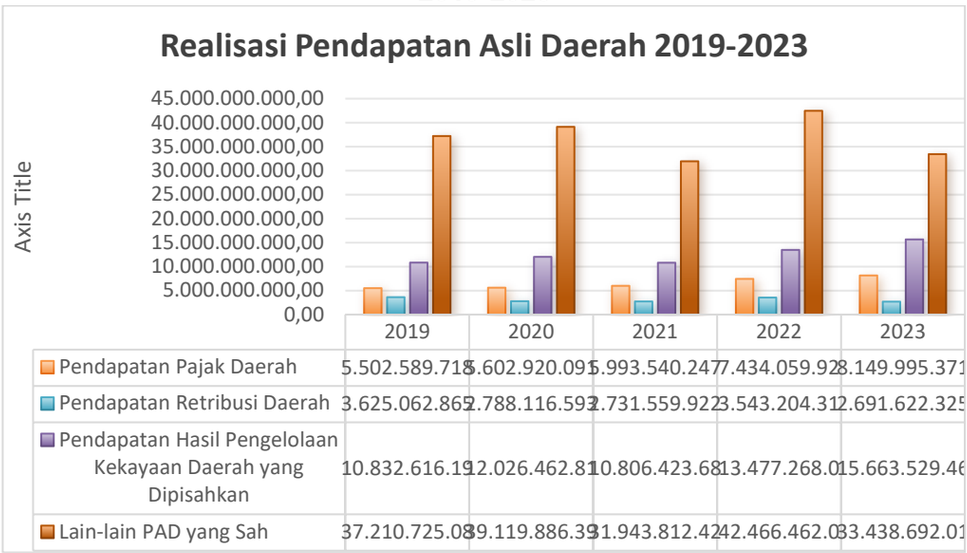
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan pada Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi. Untuk penerimaan pajak daerah, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tingkat pertumbuhan menunjukkan tren yang positif dimana rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah 0,11%. Sedangkan untuk penerimaan retribusi mengalami fluktuasi dan rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,05%. Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,1%. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8% di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Kinerja realisasi pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.8
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto
2019-2023



Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto (LKPD Audited 2023)

Grafik 3.9
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto
2019-2023



Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto (LKPD Audited 2023)

3.2.2.3 Kinerja Belanja

Adapun realisasi belanja dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Kota Sawahlunto
2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
BELANJA	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**643.653.414.741,00**	**607.064.912.961,00**	0,03
Belanja Operasi	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	0,01
Belanja Pegawai	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	0,02
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	0,16
Belanja Bunga	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	0,02
Belanja Hibah	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	0,99
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	0,08
Belanja Modal	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	0,11
Belanja Modal Tanah	577.625.000,00	800.006.000,00	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	-0,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	0,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	1,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	0,12
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00			
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00			
BeLanja Tak Terduga	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	0,03
BeLanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	0,03
TRANSFER	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**58.112.504.955,00**	**56.529.371.265,00**	-0,04
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	0,03
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800,00	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	0,03
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800,00	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		310.810.000,00	-	-		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**57.065.604.000,00**	**55.574.860.517,00**	-0,04
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	55.574.860.517,00	-0,04
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00				
Surplus/defisit	**15.553.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**-1.144.190.284,82**	**-23.006.188.527,38**	**-1.750.274.777,36**	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.116.356.260,00**	
Penggunaan SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	
Pinjaman Dalam Negeri	8.008.445.961,06	-	-			
Penerimaan Kembali Piutang	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	-	1.410.000,00	

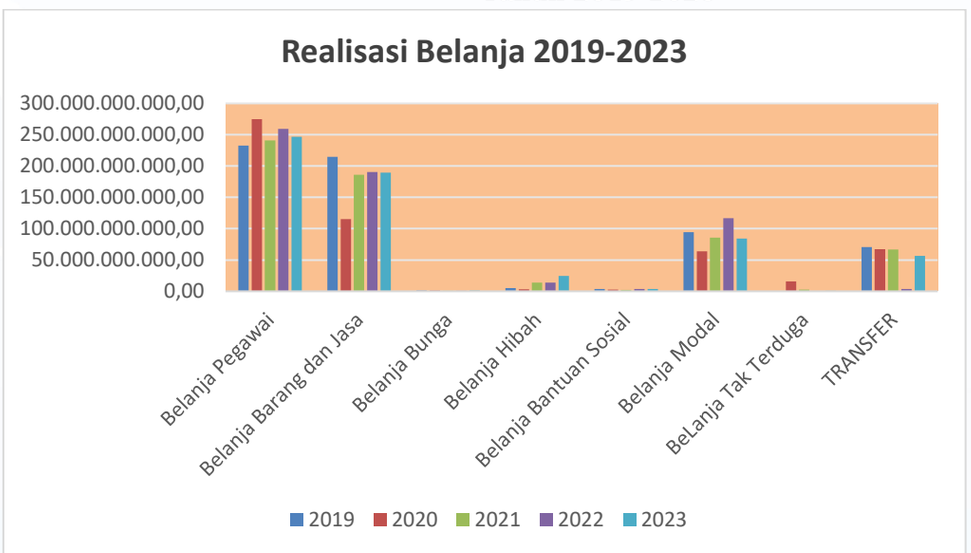
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**4.231.666.666,00**	**3.636.666.668,00**	**1.369.666.668,00**	
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.946.902.000,00	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	
Pemberian Pinjaman Daerah			65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00	
Pembiayaan Netto	**-2.184.587.830,61**	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**35.083.041.076,76**	**10.746.689.592,00**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**13.369.052.535,47**	**44.069.104.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.076.852.549,38**	**8.996.414.814,64**	

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2019-2023 (audited)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rentang dari tahun 2019-2022 belanja mengalami peningkatan, namun dari 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibanding 2022. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang lumayan berat dalam memenuhi mandatory spending, DAU yang ditentukan peruntukan, pemenuhan SPM serta pendanaan pemilihan umum. Namun secara keseluruhan, rata-rata peningkatan belanja selama 5 tahun terakhir adalah 0,03%. Realisasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Untuk proyeksi belanja pada tahun 2025, dikarenakan kecilnya kemungkinan peningkatan pendapatan yang signifikan, maka kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dengan merasionalkan belanja dengan cara peningkatan efisiensi dan melakukan perangkingan skala prioritas belanja. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang aturan mandatory spending serta upaya mencapai batas defisit yang diperkenankan. Selama 2 tahun terakhir, Pemerintah Kota Sawahlunto telah melewati ambang batas maksimal defisit APBD yang diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah , yaitu maksimal 4,35% dari perkiraan pendapatan daerah. Untuk realisasi belanja daerah, dapat dilhat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.10
Realisasi Belanja Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023



Berdasarkan realisasi belanja selama 5 tahun terakhir tersebut dan APBD 2024, maka dapat disusun proyeksi belanja pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2024	2025
BELANJA DAERAH	**701.233.133.566,00**	**616.107.670.565,00**
BELANJA OPERASI	**541.878.998.805,00**	**461.121.863.855,00**
Belanja Pegawai	313.470.374.633,00	256.213.239.683,00
Belanja Barang dan Jasa	203.937.760.048,00	189.437.760.048,00
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00

URAIAN	2024	2025
Belanja Hibah	18.622.164.124,00	10.622.164.124,00
Belanja Bantuan Sosial	4.598.700.000,00	3.598.700.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**541.878.998.805,00**	**461.121.863.855,00**
BELANJA MODAL	**90.167.452.710,00**	**88.667.452.710,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.868.328.051,00**	**3.000.000.000,00**
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**5.868.328.051,00**	**3.000.000.000,00**
BELANJA TRANSFER	**63.318.354.000,00**	**63.318.354.000,00**
JUMLAH BELANJA	**701.233.133.566,00**	**616.107.670.565,00**

Sumber Data : APBD Kota Sawahlunto TA 2024 (diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi belanja mengalami penurunan dikarenakan turunnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pendanaan dan pemenuhan aturan mandatory spending, yakni alokasi belanja pegawai maksimal 30%, belanja infrastruktur 40%, belanja untuk peningkatan SDM 0,16% serta pemenuhan SPM lainnya.

3.2.2.4 Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran tahun-tahun berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Realisasi pembiayaan Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir dapat dllihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

PEMBIAYAAN	2019	2020	2021	2022	2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**65.260.000.326,15**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**70.464.198.578,62**	**59.945.249.179,64**
Penggunaan SILPA	57.170.993.865,09	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64
Pinjaman Dalam Negeri	8.008.445.961,06	-	-		
Penerimaan Kembali Piutang	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	3.543.204.313,00	1.410.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**4.231.666.666,00**	**553.543.826.548,00**	**1.369.666.668,00**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.946.902.000,00	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	551.073.826.548,00	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah			65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00
Pembiayaan Netto	**50.137.985.698,43**	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**(483.079.627.969,38)**	**58.575.582.511,64**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**50.137.985.698,43**	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**(483.079.627.969,38)**	**58.575.582.511,64**

Untuk realisasi pembiayaan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan jumlah defisit dan SILPA yang mengalami perubahan. Pelampauan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

3.2.3 Permasalahan Umum APBD Kota Sawahlunto

Permasalahan Umum Pendapatan Daerah

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap

pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat idle mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.
5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut. Sedangkan dari BUMD yang ada, akibat kerugian yang diderita BUMD tersebut sehingga belum mampu memberikan kontribusi pendapatan.
6. Masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi sehingga diperlukan perbaikan tata kelola dan administrasi menjadi lebih efisien.
7. Masih rendahnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah yang makin meningkat serta persentase belanja yang belum sesuai dengan aturan mandatory spending.

Permasalahan Utama pembiayaan Daerah

Permasalahan pembiayaan pada Kota Sawahlunto adalah tingginya tingkat SiLPA dikarenakan banyaknya Program dan Kegitan yang tidak terealisasi sehingga SiLPA tersebut digunakan untuk menutupi beban belanja tahun berikutnya (defisit) serta pengembalian pinjaman daerah yang tidak sesuai dengan penganggaran. Hal tersebut berdampak pada penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto.

3.2.4 Kebijakan Terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto yang telah diambil sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan stake holder. Dengan adanya Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.
2. Melakukan tindak lanjut atas Opsen PkB dan BBNKB sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
3. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan push android yang menyajikan tagihan secara real time dan dukungan transaksi non tunai sekaligus memastikan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak pada kemampuan desentralisasi fiskal daerah yang saat ini hanya sebesar 9,9%.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.

5. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemerintah Kota Sawahlunto secara bertahap akan mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja OPD.
5. Pemerintah Kota Sawahlunto akan mengalokasikan secara bertahap belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 terkait penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, dimana penggunaan opsen PKB dan opsen BBNKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kota serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
    b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
    c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
    d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
    e. Mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaran Pemerintah Daerah , paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah
    f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah

6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar jumlah penerimaan pendapatan, sehingga direncanakan Kota Sawahlunto pada tahun 2025 tidak mengalami defisit.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional; SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPD. Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penentuan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multipler effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas pembangunan Kota Sawahunto pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan tahun kedua dari RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang dengan Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara tujuan RPD dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya tujuan RPD dan tercapainya kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 diturunkan berdasarkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".** Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Adapun pengertian dari visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Masyarakat Madani

Masyarakat madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani

dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu:

1. **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai adaah: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat**.
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandasan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keuarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**.
   Tujuan yaitu : untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya pendapatan petani hutan.

4. **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital**
   Tujuan yaitu : untuk mewujudkan perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai : Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, meningkatnya pertumbuhan investasi, Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah dan meningkatnya peran ekonomi digital.

5. **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**
   Tujuan yaitu : meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

6. **Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**
   Tujuan yaitu : terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian serta meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

7. **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.
   Tujuan yaitu : terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapabilitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu:

1. **Tujuan 1 : Terwujudya SDM yang berkualitas dan berkarakter.**
   Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

2. **Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**
   Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik, 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, 3) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, 4) meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.

3. **Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**
   Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) menurunnya tingkat pengganggguran, 2) meningkatnya kontribusi pariwisata, 3) meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, 4) terwujudnya ketahanan pangan, 5) meningkatnya produksi pertanian, 6) meningkatnya nilai investasi.

4. **Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**
   Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, 3) meningkatnya indeks inovasi daerah, 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, 5) meningkatnya kualitas ASN, 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan Pj. Kepala Daerah tahun 2024-2026. Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2023	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**75,91**	**74,74**	**75,24**	**75,74**	**77,17**
		1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,69	70,69	70,75	70,89	70,89
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	13,7	13,00	12,50	10,60	10,60
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,69	13,55	13,75	14,01	14,01
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,44	10,57	10,64	10,72	10,72
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak**	**69,67**	**72,35**	**74,00**	**75,22**	**75,22**

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2023	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
					huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2					
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	70,36	70,72	71,74	72,65	72,65
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	63,10	64,74	65,52	66,57	66,57
				Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	59,89	68,46	68,66	68,90	68,90
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	85	86,23	87,20	88,32	88,32
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi	85,00	84,00	86,00	87,00	87,00

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2023	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
				sudah dilengkapi PSU	PSU / jumlah unit rumah x 100 %					
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	8,94	7,16	7,05	7,00	7,00
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**4,46**	**4,48**	**4,73**	**4,98**	**4,98**
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**71,21**	**71,6**	**74,35**	**77,11**	**77,11**
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,27**	**2,19**	**2,18**	**2,17**	**2,17**
				Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**10,83**	**11,15**	**11,37**	**11,47**	**11,47**
		1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,98	4,92	4,83	4,75	4,75
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,22	2,26	2,30	2,34	2,34
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	10,87	11,50	11,78	12,06	12,06

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2023	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
				Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	15,05	14,94	14,96	14,98	14,98
		4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	84,38	73,85	73,88	73,90	73,90
		5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	410.681,37	398.524,76	414.465,75	431.044,38	431.044,38
		6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	9,76	8,63	8,83	9,03	9,03
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**55,68**	**56,50**	**57,32**	**58,14**	**58,14**
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,84	62,19	62,50	62,81	62,81
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	58,23	76,00	77,00	78,00	78,00
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	58,98	60,01	63,01	66,01	66,01
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	90,36	84,61	85,82	87,03	87,03

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2023	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	60,15	78,00	80,00	82,00	82,00
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,09	3,10	3,15	3,20	3,20

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Adapun keterkaitan antara misi Provinsi Sumatera Barat dan Tujuan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Matriks keselarasan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		TUJUAN KOTA SAWAHLUNTO 2024-2026	
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN			
MISI 1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengalaman, terampil dan berdaya saing	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	TUJUAN 1
MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah		
MISI 3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	TUJUAN 3
MISI 4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital		
MISI 5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan		
MISI 6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	TUJUAN 2
MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	TUJUAN 4

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan prioritas pembangunan daerah berdasarkan permasalahan/isu strategis pembangunan daerah di kota Sawahlunto seperti dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 4.3
Konsistensi Permasalahan/Isu Strategis Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk semua 2. Belum optimalnya Pendidikan yang berkualitas dan merata 3. Belumnya optimalnya perlindungan sosial yang adaptif 4. Belumnya optimalnya Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 5. Belumnya optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau 6. Belumnya optimalnya Transformasi Digital 7. Belumnya optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional 8. Belumnya optimalnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 9. Belumnya optimalnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 10. Belumnya optimalnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial 11. Belumnya optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro 12. Belumnya optimalnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 13. Belumnya optimalnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. Belumnya optimalnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 15. Belumnya optimalnya Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Belumnya optimalnya Berketahanan Energi Air dan Kemandirian Pangan 17. Belumnya optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan keunggulan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional 2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Pembangunan dan Infrastruktur yang berkelanjutan 4. Transformasi tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional 5. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal 6. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Dalam RKPD Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) serta selaras dengan pembangunan Nasional dan Provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan mengangkat tema pembangunan **"Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Penidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

5. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional
6. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional`

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran dan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut;

Program Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

Menitikberatkan pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.

Aspek ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui;

a) Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
b) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan
c) Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan
d) Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui;

a) Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
b) Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya
c) Pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas;
d) Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum;
e) Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan;
f) Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang ransparan, transformatif, dan responsif.

Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik;

g) Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta
h) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Aspek Hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut;

a) Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku;
b) Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya;

c) Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d) Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya;

e) Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

Program Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui;

a) Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI,

b) Memperkuat komponen cadangan,

c) Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara,

d) Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber,

e) Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI,

f) Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,

g) Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme

h) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta

i) Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Program Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Arah kebijakan yang dititikberatkan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 antara lain;

a) Melanjutkan pembangunan infrastruktur,

b) Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,

c) Penguatan koperasi,

d) Mengembangkan industri kreatif, serta

e) Pendalaman sektor keuangan.

Program Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pada prioritas nasional 4 ini menitikberatkan;

a) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

b) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi

c) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

d) Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

e) Meningkatkan Prestasi Olahraga

Program Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada;

(1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;

(2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta

(3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

Program Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

a) Membangun desa dan membangun dari desa antara lain meliputi peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, penguatan ekonomi lokal, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan, pengelolaan keruangan sumber daya desa, peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa,

b) Pemerataan ekonomi antara lain meliputi pembangunan 10 Wilayah Metropolitan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni, pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro pengembangan infrastruktur konektivitas

c) Memberantas kemiskinan antara lain meliputi penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan, pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan;

Program Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

a) Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan antara lain melalui mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi

b) Arah kebijakan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan antara lain melalui memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik

a) Arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan antara lain meliputi membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum

Program Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

a) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, antara lain melalui mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa;

b) Melestarikan budaya, antara lain melalui meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital

c) Penanganan bencana antara lain melalui peningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini.

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu **"Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Dalam mendukung program RKP Tahun 2025, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut in

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 Dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan RKP Tahun 2025

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
Program Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	718.511.800,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.812.200,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	59.987.800,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	543.653.200,00
Program Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.999.800,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31.356.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	15.000.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.484.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	80.998.400,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	19.640.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	534.295.470,00

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	479.090.770,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	141.382.225,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	46.868.750,00
Program Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	19.940.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	200.900.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.410.980,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.300.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.956.200,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	75.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	334.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	49.956.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	443.600.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.823.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	834.520.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	740.480.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.573.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.309.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.947.000.000,00

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Penyelenggaraan Jalan	6.409.056.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	149.891.000,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	165.987.220,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	224.646.820,00
		Program Kawasan Permukiman	600.375.000,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	50.000.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	130.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	36.716.900,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	13.682.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.600.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	759.009.165,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5.040.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.749.400,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.336.901.100,00
Program Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	5.396.710.804,00
		Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.964.178.731,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.929.000,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	17.289.800,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.221.000,00

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	447.947.276,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.553.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	45.382.180,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	145.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.383.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.383.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	127.112.600,00
		Program Perlindungan Perempuan	500.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	272.033.800,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	26.945.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	8.040.000,00
Program Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	162.860.575,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	110.399.800,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	13.126.300,00
		Program Pengembangan Ekspor	19.600.000,00
Program Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	492.554.362,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	419.667.115,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.405.084.600,00

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	339.557.470,00
Program Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	336.366.100,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	195.476.910,00
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	116.486.000,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	69.194.437.577,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	409.210.736,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	428.179.666,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	1.246.386.480,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	105.156.100,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	113.199.800,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.405.084.600,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	419.667.115,00
Program Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	177.146.000,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	301.278.000,00
		Program Penanggulangan Bencana	823.026.650,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	61.980.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	971.404.660,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	28.225.600,00
		Program Penanganan Bencana	69.606.900,00

RKP 2025	RKPD 2025		
Prioritas Nasional	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.358.140,00

4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat`

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dalam mendukung program unggulan provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 Dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan Provinsi Sumatera Barat

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
Prioritas Pembangunan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	5.396.710.804,00
		Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.964.178.731,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.929.000,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	17.289.800,00

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.221.000,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	447.947.276,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.553.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	45.382.180,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	145.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.383.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.383.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	127.112.600,00
		Program Perlindungan Perempuan	500.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	272.033.800,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	26.945.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	8.040.000,00
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	718.511.800,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	644.818.590,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.812.200,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	59.987.800,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	543.653.200,00

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
Prioritas Pembangunan 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	177.146.000,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	301.278.000,00
		Program Penanggulangan Bencana	823.026.650,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	492.554.362,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	419.667.115,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.405.084.600,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	339.557.470,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	61.980.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	971.404.660,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	28.225.600,00
		Program Penanganan Bencana	69.606.900,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.358.140,00
Prioritas Pembangunan 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.999.800,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31.356.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	15.000.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.484.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	80.998.400,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	19.640.000,00

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	534.295.470,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	479.090.770,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	141.382.225,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	46.868.750,00
Prioritas Pembangunan 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	19.940.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	200.900.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.410.980,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.300.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.956.200,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	75.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	334.000.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	49.956.000,00
Prioritas Pembangunan 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	443.600.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	162.860.575,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	110.399.800,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	13.126.300,00

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	2	3	4
		Program Pengembangan Ekspor	19.600.000,00
Prioritas Pembangunan 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.823.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	834.520.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	740.480.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.573.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.309.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.947.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	6.409.056.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	149.891.000,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	165.987.220,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	224.646.820,00
		Program Kawasan Permukiman	600.375.000,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	50.000.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	130.000.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	36.716.900,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	13.682.300,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.600.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	759.009.165,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	5.040.000,00

RKPD 2025	RKPD 2025		
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	**Bidang Urusan**	**Program**	**Pagu (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.749.400,00
		Program Pengelolaan Persampahan	1.336.901.100,00
Prioritas Pembangunan 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	336.366.100,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	195.476.910,00
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	116.486.000,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	69.194.437.577,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	409.210.736,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	428.179.666,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	1.246.386.480,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	105.156.100,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	113.199.800,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.405.084.600,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	419.667.115,00

4.2.2 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Sawahunto Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD tahun 2025, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang bersifat mendukung atau *supporting*. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan**				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	Setdako (Bagian Kesra)	9.405.084.600
		Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	100		
		Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	6,17		
		Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	650		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110.25	Dinas Pendidikan	5.396.710.804
		APK SD/MI/Paket A %	99.7		
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2.06		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1.82		
		APK PAUD	89.62		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73		50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	97	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	447.947.276
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100		
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	50		11.221.000
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	92		1.553.000.000
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	90		
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	80	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.289.800
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	80		
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86		45.382.180
2	**Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.823.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase RT yang memiliki akses terhadap	99		834.520.000

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)			
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47.78		1.573.000.000
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	75.13		6.409.056.000
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95.03		
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	85.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.309.000.000
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	64.56		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			165.987.220
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	100		
3	**Prioritas 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**				
1	PROGRAM PENGELOLAAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%	100		759.009.165
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97		1.336.901.100
4	**Prioritas 4 : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal**				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47		200.900.000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	50		19.940.000
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14		110.399.800
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80		13.126.300
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	50		19.600.000
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	479.090.770
		Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15800		
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1730		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		
		Daging Sapi (ton)	319		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900.26		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135.86		
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10		
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		141.382.225
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100		75.000.000
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1		46.868.750
		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200		80.998.400
12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		19.640.000
5	**Prioritas 5 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional**				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.423.258.208
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20		50.000.000
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70		443.600.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	31,1	Dinas Kebudayaan	75.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	13.3		334.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000		49.956.000
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92		30.000.000
6	**Prioritas 6 : Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi**				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi program rpjmd/rpd kedalam rkpd (%)	100	Barenlitbangda	336.366.100
		persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (%)	100		
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100		195.476.910
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	2.95	BKPSDM	1.246.386.480
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk	0.39		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		guru & tenaga kesehatan)			
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.25		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	100	Inspektorat	105.156.100
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,7		113.199.800
		Rekomendasi Kebijakan yang disusun	3		
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd)	76		69.194.437.577
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	95		409.210.736
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase kontribusi pad terhadap pendapatan daerah (%)	11.74		428.179.666
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100		
TOTAL					**Rp108.531.998.542**

4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Arah kebijakan untuk tahun 2025 difokuskan dalam pencapaian tema **"Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Adapun prioritas pembangunan tahun 2025 dan arah kebijakan masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan

Kebijakan yang akan diambil prioritas pembangunan ini adalah dengan meningkatkan kualitas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, meningkatkan pendidikan masyarakat dengan meningkatkan kualitas sekolah paket A,B dan C melalui pemberian bantuan operasional dalam proses belajar dan mengajar. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan juga akan diterapkan untuk tahun 2025. Reward bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi, selain bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru di SD dan SMP sederajat. Meningkatkan siswa yang hafiz Quran yang menjadikan dasar pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkarakter. Pada tahun 2025, Penambahan prodi baru pada program PSDKU akan tetap diwujudkan dalam meningkatan Pendidikan di Kota Sawahlunto. Disektor Kesehatan, difokuskan dalam penyelesaian stunting dengan pelaksanaan 8 aksi untuk pencegahan stunting dan pengoperasian RSUD secara optiomal

Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	**Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat**		

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,75
	Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	12,50
2	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**		
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,75
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,64

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.8
Sandingan prioritas daerah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan dengan arah kebijakan tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan	Mengoptimalkan pemenuhan dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan
	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan
	Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Mengoptimalkan pelayanan terhadap jaminan kesehatan masyarakat
	Implementasi Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam promosi kesehatan
	Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
	Meningkatkan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
	Meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga yang sejahtera
	Melanjutkan aksi konvergensi untuk pencegahan stunting
	Melanjutkan penguatan peranan pos gizi disetiap desa/kelurahan
	Menguatkan Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan menyusui
	Menguatkan Intervensi gizi sensitif untuk remaja putri, pasangan usia subur dan masyarakat umum
	Mengoptimalkan SPM bidang pendidikan
	Melakukan peningkatan terhadap pengelolaan pendidikan dasar

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	Melaksanakan Pemerataan terhadap Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	Mengelola kerjasama dengan perguruan tinggi
	Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar bercirikan kondisi daerah/nasional/global (WTBOS, Geopark, Perubahan Iklim)
	Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	Memfasilitasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Memfasilitasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Meningkatkan pengelolaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan daerah
	Melaksanakan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
	Meningkatkan Pengelolaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
	Melakukan bimbingan untuk meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
	Mengelola Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
	Meningkatkan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak
	Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan
	Mengelola Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Menguatkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Mengoptimalkan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah
	Meningkatkan Pembudayaan Gemar Membaca masyarakat di Daerah melalui sosialisasi dan pembinaan
	Pengeloaan terhadap pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya daerah
	Mengelola Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
	Mengoptimalkan pengelolaan arsip dinamis daerah
	Mengoptimalkan pengelolaan arsip statis daerah
	Mengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di daerah
	Memusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Melindungi dan menyelamatkan Arsip Akibat Bencana daerah
	Menyelamatkan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan desa/kelurahan
	Mengoptimalkan pengelolaan kebudayaan daerah
	Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah dengan pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan
	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat daerah
	Meningkatkan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya
	Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
	Mengelola Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal
	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan
	Meningkatkan Pengembangan Koleksi Secara Terpadu
	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana museum
	mengoptimalkan revitalisasi sarana dan prasarana museum

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Program Prioritas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan**				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	Setdako (Bagian Kesra)	9.405.084.600
		Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	100		
		Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	6,17		
		Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	650		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110.25	Dinas Pendidikan	5.396.710.804
		APK SD/MI/Paket A %	99.7		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2.06		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1.82		
		APK PAUD	89.62		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73		50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	97	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	447.947.276
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100		
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	50		11.221.000
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	92		1.553.000.000
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	90		
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	80	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.289.800

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	80		
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86		45.382.180
TOTAL					**Rp17.176.635.660**

Prioritas Pembangunan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

Dengan meningkatkan konektivitas antar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan pembangunan/rehabilitas jalan-jalan penghubung antar Kabupaten/Kota, sedangkan terkait dengan kualitas infrastruktur diarahkan pada peningkatkan kualitas pencapaian SPM di bidang infrastruktur. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik		
	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	71,74
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		
	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	87,20
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	86,00
	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,05

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.11
Sandingan prioritas daerah "**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah"** dengan arah kebijakan tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
	Mengelola Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Menyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi SPAM
	Meningkatkan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan
	Melaksanakan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dan skala permukiman
	Mengevaluasi Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dan skala permukiman
	Membangun dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
	Mengoptimalkan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
	Membangun dan mengembangkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
	Mengoptimalkan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
	Melaksanakan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
	Menyusun Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan serta pelaksanaan pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah
	Melaksanakan penyelenggaraan Bangunan Gedung , Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Melaksakanan Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Monitoring Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitas jalan dan jembatan
	Meningkatkan pembinaan terhadap Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
	Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	Mengoptimalkan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	Melaksanakan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan RTH
	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Mengoptimalkan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Menoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
	mengoptimalkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Meningkatkan pendampingan dan sosialisasi dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
	Melakukan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
	Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
	Menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
	Mengoptimalkan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
	Melaksaanakan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota
	melanjutkan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kota
	Mengoptimalkan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
	Melanjutkan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan
	mengoptimalkan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian
	Melanjutkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Melanjutkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
	melanjutkan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
	Melanjutkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
	Melanjutkan koordinasi dalam Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah
	Melaksanakan Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah
	Mengoptimalkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di kota
	Mengoptimalkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Mengoptimalkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Mengoptimalkan pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam kota
	Lanjutan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kota
	Memelihara Perlengkapan Jalan di Jalan kota
	Mengoptimalkan Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	Melanjutkan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1(Satu) Daerah

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.823.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99		834.520.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47.78		1.573.000.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	75.13		6.409.056.000
	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95.03		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	85.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.309.000.000
	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	64.56		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			165.987.220
	Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	100		
TOTAL				**Rp13.455.418.220**

Prioritas Pembangunan 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan pengelolaan sampah dan terkait dengan kebijakan nasional tentang perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	65,52
	Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	68,66

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Sandingan prioritas daerah **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** dengan arah kebijakan tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	Mengoptimalkan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	Melaksanakan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan RTH
	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Mengoptimalkan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
	Menoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
	mengoptimalkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Meningkatkan pendampingan dan sosialisasi dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
	Melakukan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
	Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Tahun 2025

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%	100		759.009.165
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97		1.336.901.100
TOTAL				**Rp2.095.910.265**

Prioritas Pembangunan 4 Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional

Tahun 2025 untuk mengoptimalkan keunggulan pariwisata Kota sawahlunto dalam mendatangkan wisatawan. Kebijakan yang akan diambil adalah bagaimana pengelolaan dan penataan bangunan dan benda cagar budaya menjadi objek daya Tarik wisata dengan penataan kawasan kota lama sebagai pusat daya Tarik nya. Disamping itu, status geopark nasional sawahlunto yang belum berdampak signifikan terhadap pariwisata daerah, akan dioptimalkan kembali. Mengoptimalkan Peran Pokdarwis untuk pengembangan desa wisata (diutamakan Kawasan Geopark dan WTBOS) juga akan ditingkatkan. Pelaksanaan event-event yang setara dengan Siscca juga akan ditambah, untuk menambah daya Tarik wisatawan berkunjung. Ekonomi kreatif ditingkatkan dengan memanfaatkan dua keunggulan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto untuk menggerakkan usaha mikro yang ada.

Dengan dibangunnya sentra IKM tahun 2022, kebijakan utama yang akan diambil tahun 2023 adalah bagaimana mengoperasikannya mulai dari alur pengelolaan sampai pengorganisasiannya. Untuk sector pertanian, kebijakan pemberian bantuan bibit tanaman dan terrnak tetap dilanjutkan serta meningkatakan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian. Pada tahun 2023, juga akan diupayakan pusat pelayanan dan pendampingan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dalam bentuk Pusat Layanan Usaha terpadu. Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata		
	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,30

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Sandingan prioritas daerah Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional dengan arah kebijakan Tahun 2025

	Arah kebijakan
	Meningkatkan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Arah kebijakan
Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional	Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terintegrasi dengan melibatkan stakeholders terkait (WTBOS, Geopark, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Meningkatkan fasilitasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	Meningkatkan kualitas Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar negeri (Geopark, OCMHS, desa wisata, agrowisata dan wisata halal)
	Meningkatkan kualitas Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata yang bersinergi dan efektif efisien baik Dalam dan Luar Negeri
	Meningkatkan kualitas update Data dan Menyebarkan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
	Meningkatkan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	Melanjutkan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Melaksanakan pengelolaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
	Meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia

	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar
	meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18
Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional Tahun 2025

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.423.258.208
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20		50.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70		443.600.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	31,1	Dinas Kebudayaan	75.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	13.3		334.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000		49.956.000
POGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92		30.000.000
TOTAL				**Rp2.405.814.208**

Prioritas Pembangunan 5 Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

Kebijakan mengoptimalkan sentra IKM tahun 2025 tetap dilakukan dalam pengoperasian dan pengelolaannya. Untuk sektor pertanian, dengan menjaga ketahanan pangan dan diversifikasi pangan untuk pencegahan stunting, serta peningkatan produksi pertanian melalui pemberian bantuan bibit tanaman dan terrnak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian. Pada tahun 2023. Meningkatkan pemeliharaan pasar-pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang.

Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.19
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan, IKM yang Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,83

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
2.	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan		
	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,78
	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,96
3.	Terwujudnya Ketahanan Pangan		
	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,88
4.	Meningkatnya produksi pertanian		
	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	414.465,75
5.	Meningkatnya nilai investasi		
	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,83

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya local** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Sandingan prioritas daerah Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal dengan arah kebijakan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	Mengimplementasikan Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro
	Meningkatkan kualitas Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi
	Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
	Meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi kreatif
	Lanjutan Menyusun Rencana Pembangunan Industri kota
	Melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Melanjutkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	meningkatkan kualitas Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Meningkatkan kualitas Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Meningkatkan kualitas Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
	Melaksanakan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan
	Melanjutkan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
	Melanjutkan pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Daerah
	Melanjutkan pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
	Melanjutkan pelaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota
	Meningkatkan kualitas Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kota
	Meningkatan kualitas pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan
	Meningkatkan kualitas Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
	melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dan UKM yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah
	Melakukan update Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
	melanjutkan pemberian Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Meningkatkan kualitas Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	memelihara Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan
	Melanjutkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
	Melanjutkan pengelolaan Cadangan Pangan Kota
	Meningkatkan kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kota
	Melanjutkan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
	Melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
	Meningkatkan kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota
	Meningkatkan Mutu dan pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
	Meningkatkan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,
	Memelihara bangunan prasarana pertanian
	meningkatkan kualitas Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
	Mengelola Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
	Meningkatkan kualitas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	melanjutkan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Prioritas Pembangunan Daerah	Arah kebijakan
	Meningkatkan kualitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
	Mengelola Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
	meningkatkan kualitas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan melakukan pembinaan terhadap petani ikan
	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	Mensosialisasikan Peta Potensi Investasi kota
	Melaksanakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
	Melaksanakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Melaksanakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Melaksanakan Pemantauan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal
	Melanjutkan Pengelolaan update Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah
	Melanjutkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	Pengelolaan update Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
	Meningkatakn pengelolaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial kota
	Melanjutkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota
	Pemberdayaan Terhadap Pemuda Pelopor Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
	Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota
	Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Meningkatkan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah
	Pengembangan Organisasi Olahraga tingkat daerah

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.21
Program Pembangunan Daerah Prioritas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47		200.900.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	50		19.940.000

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14		110.399.800
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80		13.126.300
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	50		19.600.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5		135.999.370
POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15800		479.090.770
	Jumlah Produksi Karet (ton)	1730		
	Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		
	Daging Sapi (ton)	319		
	Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900.26		
	Jumlah Produksi Telur (ton)	135.86		
	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		141.382.225
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100		75.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1		46.868.750
	Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200		80.998.400
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		19.640.000
TOTAL				**Rp1.505.806.190**

Prioritas Pembangunan 6 Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini adalah mengoptimalkan fungsi Mall Pelayanan Publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informatika yang terintegrasi dengan adanya command center dalam mewujudkan Kota Sawahlunto yang *smart city*. Penyederhanaan dan permapingan jabatan struktural yang telah dilaksanakan perlu adanya alur pelaksanaan kerja, pembagian kerja dan penyepakatan kinerja harus optimal pada tahun 2025. Kebijakan utama yang diambil adalah peningkatan kapasitas SDM fungsional penyetaraan dan penetapan alur kinerja yang jelas sebagai bentuk pemantapan reformasi birokrasi pemerintah. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dioptimalkan pada tahun 2025 dengan alur kerja dan fungsi yang jelas. Selain itu di tahun 2025 Inovasi daerah yang merupakan bukti kinerja dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah perlu dioptimalkan Prioritas pembangunan ini dalam pencapaian tujuan daerah yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif,** dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

No	Sasaran / indikator kinerja	Definisi Operasional	Target 2025
1	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas**		
	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,50
2.	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan**		
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	77,00
3.	**Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah**		
	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	63,01
4.	**Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat**		
	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	85,82
5.	**Meningkatnya Kualitas ASN**		
	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	80,00
6.	**Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi**		
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,15

Sumber : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Arah kebijakan untuk pencapaian target sasaran dalam prioritas pembangunan daerah **Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Sandingan prioritas daerah Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan arah kebijakan tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Menyusun perencanaan dan pegangaran tahun 2026
	Melaksanakan Analisis update Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2025
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2025
	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	Meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Meningkatkan kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	pengembangan penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
	Meningkatkan kualitas Pengawasan Internal
	melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah
	Meningkatkan kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan update Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah
	Update dan penerapan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk tahun 2025
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	Pengelolaan pajak daerah
	Melaksanakan Pengolahan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Penagihan pajak daerah untuk tahun 2025
	Meningkatkan kualitas Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
	Melaksanakan Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Melaksanakan peraturan daerah tahun 2024 dan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tahun 2025
	Pembahasan Kebijakan Anggaran tahun 2026
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat untuk tahun 2026
	Melaksanakan Kerja Sama Daerah
	Meningkatkan kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Meningkatkan kualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
	meningkatkan kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	Melakukan koordinasi dan fasilitasi program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Prioritas Pembangunan	Arah kebijakan
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Menyusunkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Melaksanakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Meningkatkan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah
	Mengoptimalkan Pelayanan Pencatatan Sipil
	Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil
	Penyajian data kependudukan dan Database Kependudukan
	Melaksanakan Pembinaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dapat terlihat pada program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2025, adapun dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Program Pembangunan Daerah Prioritas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi program rpjmd/rpd kedalam rkpd (%)	100	Barenlitbangda	336.366.100
	persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (%)	100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100		195.476.910

Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	2.95	BKPSM	1.246.386.480
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.39		
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.25		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	100	Inspektorat	105.156.100
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,7		113.199.800
	Rekomendasi Kebijakan yang disusun	3		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd)	76	BPKAD	69.194.437.577
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	95		409.210.736
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase kontribusi pad terhadap pendapatan daerah (%)	11.74		428.179.666
TOTAL				**Rp72.028.413.369**

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Sawahlunto untuk RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 dimulai dengan Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 050/67/Barenlitbangda-Swl/2024 untuk ketua DPRD perihal pokok-pokok pikiran DPRD untuk Tahun 2024 pada tanggal 1 Februari 2024. Pokok-pokok pikiran DPRD dientrikan oleh masing-masing anggota dewan melalui aplikasi SIPD-RI, yang dilanjutkan dengan proses verifikasi dari mitra bidang Barenlitbangda, Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok pikiran DPRD ditelaah oleh Barenlitbangda menjadi sub kegiatan, kegiatan dan program Perangkat Daerah dan penentuan pagu anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu. Adapun prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.25
Program Pemerintah Daerah Yang Memuat Pokok-pokok pikiran DPRD

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.396.710.804	DINAS PENDIDIKAN

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
	peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.553.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	447.947.276	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	971.404.660	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	419.667.115	
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.823.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.573.000.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.309.000.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.947.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.409.056.000	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	301.278.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	600.375.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.336.901.100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	579.444.100	DINAS PERHUBUNGAN
4	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	200.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	162.860.575	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	199.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	479.090.770	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	46.868.750	
5	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	75.000.000	DINAS KEBUDAYAAN

No.	Program Prioritas Daerah	Program Pemerintah Daerah yang Memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
		Program Pemerintah Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
	ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	145.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.383.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.423.258.208	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	443.600.000	
6	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.405.084.600	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.712.532.924	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	492.554.362	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Jumlah Pagu		**Rp63.836.834.244**	

4.5 Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2025 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 9 dan 10 bahwa untuk Perencanaan pembangunan yang beriorientasi pada substansi maka dilakukan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 ada beberapa yang beriorentasi terhadap substansi terkait dengan Program Prioritas Nasional.

Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 berada dikisaran 0-1 persen, dengan target tersebut jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 menargetkan untuk kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen sesuai dengan arahan dari presiden. Untuk pencapaian kemiskinan ektrem 0 persen tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar perangkat daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, Tingkat kemiskinan merupakan indikator dari tujuan kota yang ketiga yaitu **Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian,** dengan penetapan target tingkat kemiskinan di tahun 2025 adalah sebesar 2,18 persen. Dari indikator tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran pendukung sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.26
Tujuan 3 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat		**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/**	**4,73**

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian				**Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**74,35**
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,19**
			Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**11,37**
	1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,83
	2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,30
	3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,78
			Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,96
	4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,88
	5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	414.465,75
	6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,83

Dalam pencapaian tujuan dengan indikator tingkat kemiskinan ditindaklanjuti dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam program Perangkat Daerah. Program-program pendukung tersebut tersebar di berbagai Perangkat Daerah, ini menyatakan bahwa diperlukannya integrasi antara program diberbagai Perangkat Daerah dalam pencapaian indikator tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto. Adapun program-program Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan adaah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Program-Program Pendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	Setdako (Bagian Kesra)	9.405.084.600
		Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	100		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	6,17		
		Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	650		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	Dinas Pendidikan	5.396.710.804
		APK SD/MI/Paket A %	99,7		
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,06		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,82		
		APK PAUD	89,62		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73		50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	97	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	447.947.276
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100		
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	50		11.221.000
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	92		1.553.000.000
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	90		
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	80		17.289.800
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	80		
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86		45.382.180
	Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.823.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99		834.520.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47,78		1.573.000.000
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	75,13		6.409.056.000
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95,03		
	Prioritas 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.336.901.100
	Prioritas 4 : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47		200.900.000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	50		19.940.000
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14		399.800
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80		13.126.300
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	50		19.600.000
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	479.090.770
13	POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15800		534.295.470
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1730		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		
		Daging Sapi (ton)	319		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86		
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10		
14	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		141.382.225
15	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100		75.000.000

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
16	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1		48.000.000
		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1		
17	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	100		2.999.800
18	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH (Skor)	87		31.356.000
19	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	6		15.000.000
20	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	93		17.484.300
21	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200		80.998.400
22	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		19.640.000
	Prioritas 5 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.423.258.208
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20		50.000.000
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70		443.600.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	13,3	Dinas Kebudayaan	334.000.000
	Prioritas 6 : Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100	Barenlitbangda	195.476.910
JUMLAH					**Rp34.802.376.518**

Keberhasilan Kota sawahlunto dalam menekan pertumbuhan masyarakat miskin, berimplementasi terhadap peringkat kemiskinan Kota sawahlunto terendah se Indonesia pada tahun 2023. Ini merupakan capaian yang harus dipertahankan. Kebijakan pembangunan yang akan diambil di tahun 2025 untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mempertahan peringkat kemiskinan terendah se Indonesia adalah :

1. *Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin,*

Untuk meringankan kondisi ekonomi masyarakat miskin, permasalahn yang akan diprioritaskan untuk ditangani adalah mengurangi beban pengeluaran. beberapa kebijakan khusus untuk menindaklanjuti ini adalah :

a. Melanjutkan program bantuan dibidang pendidikan
   Walaupun program ini tidak secara khusus diberikan untuk masyarakat miskin, akan tetapi, yang menjadi prioritas untuk pelaksanaannya adalah keluarga miskin. Dalam memasuki ajaran baru, beban penbgeluaran untuk pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah, tentunya akan memberatkan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Inilah yang akan menjadi perhatian pemerintah. Ditambah lagi adanya reward bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi. Diharapkan, dengan kebijakan ini tetap dilanjutkan, beban pengeluaran masyarakat miskin untuk biaya pendidikan dapat berkurang.
b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Pengeluaran disektor kesehatan juga merupakan suatu beban yang berat bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kebijakan untuk memberikan jaminan kersehatan inilah yang diambil pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk miskin. Jika krepala keluarga dari masyarakat miskin tersebut mengalami sakit apalagi sampai diraway inap, akan menyebabkan kemampuan berusahanya berhenti, sedangkan biaya pengobatan akan tetap berjalan. Inilah yang menjadi perhatian. Saat ini, seluruh masyarakat miskin yang terdata pada data DTKS sudah mempunyai jaminan kesehatan di Kota sawahlunto.
c. Melanjutkan program-program bantuan sosial
   Secara spesifik, program bantuan social ini tidak hanya dari APBD, juga didapat dari APBN. Program seperti BPNT, Subsidi Listrik, Bantuan KUBE dan BLT oleh sebagian masyarakat miskin, menjadi hal mutlak yang harus diberikan. Terutama bagi masyarakat miskin yang rendah produktivitasnya. Ditingkat kota, bantuan bagi masyarakat dengan status PMKS tetap jadi prioritas. Hal ini dikarenakan, rata-rata PMKS di Kota sawahlunto berasal dari keluarga kurang mampu.

2. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Pendapatan Bagi Masyarakat Miskin

Kebijakan berikutnya yang akan tetap diambil adalah meningkatakn kemampouan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan pendapatannya. Dari analisa usahanya, sebagian besar lapangan usaha masyarakat miskin adalah sector pertanian. Beberapa program seperti bantuan ternak ayam dan kambing, bantuan bibit ternak sapi, dan juga itik, akan tetap dilanjutkan untuk tahun 2023. Seperti halnya program lainnya, prioritas kelompok sasaran penerima manfaat adalah maasyarakat miskin. Untuk jangka panjangnya, bantuan bibit manggis, karet dan pinang juga akan tetap dilanjutkan. Disektor perdagangan, bantuan permodalan dari UPTD Dana bergulir juga diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang terdata pada data DTKS. Bantuan gerobak dan paying juga akan tetap dilanjutkan, terutama bagi keluarga miskin. Hal ini dilaksanakan untuk memberdayakan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Lingkungan Dan Kawasan Permukiman/ Perumahan Bagi Keluarga Miskin

Salah satu factor penyebab seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah dengan keterbatasan sarana perumahan yang dimilikinya. Tidak tersedianya sarana perumahan yang standar, sarana MCK yang baik, dan lingkungan yang bersih akan menyebabkan sesorang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kebijakan inilah yang akan digunakan untuk mengantisipasinya. Program bantuan RTLH, program santiasi, program KOTAKU dan program PAMSIMAS

4. Melakukan inovasi Pembinaan oleh perangkat Daerah kepada masing-masing Desa dan Kelurahan.

Pimpinan daerah sudah merencanakan untuk tahun 2025, akan ditetapkan PD pembina desa, dengan target sasaran PD dapat mengawal langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap pengentasan kemiskinan di masing-masing desa. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dari program penanggulangan kenmiskinan di masing-masing desa serta program dan bantuanm yang telah diberikan dapat tepat sasaran dan berhasil guna

5. Mengoptimalkan dan Koordinasi Terhadap Sumber Pendanaan Lain Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lembaga dan pihak lainnya. Lembaga lain seperti BAZ, Perusahaan Tambang melalui CSR-nya dan Lembaga swadayua masyarakat seperti Farisha Peduli akan lebih dioptimalkan. Untuk

Baznas Kota sawahlunto, total anggaran yang dikelola lebih dari 4 Milyar rupiah. Focus utama penyalurannya adalah masyarakat miskin yang ada di Kota sawahlunto.

Warisan Dunia UNESCO Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS)/Geopark

Pengembangan Wilayah Sumatera dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan dan pemantapan sektor pariwisata yang berdaya saing internasional melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan; mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Produktivitas sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditargetkan sebesar 6,5%–7,4%.

Sejalan dengan arah pengembangan wilayah Sumatera tersebut, Kota Sawahlunto di Tahun 2025 untuk sektor pariwisata lebih mengembangkan kearah status Nasional yang telah didapat oleh Kota Sawahlunto yaitu Warisan Dunia UNESCO Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) dan status Geopark Nasional. Pengembangan Pariwisata terkait status Kota Sawahlunto ini dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dimasukkan dalam tujuan ketiga dengan sasaran meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.28
Tujuan 3 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**4,73**
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**74,35**
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,18**
			Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**11,37**
	1	Menurunnya Tingkat Pengganggguran	Tingkat Penganggguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,83
	2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,30
	3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,78
			Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,96
	4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses	73,88

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
				pangan dan pemanfaatan pangan.	
	5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian pada (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	414.465,75
	6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,83

Menindaklanjuti status Nasional Kota Sawahlunto ini maka ditahun 2025 dibutuhkan integrasi antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mempertahankan status Nasional tersebut. Upaya dalam menjaga objek-objek OMCHS ini dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan, termasuk melangsungkan rasa kerbersamaan identitas sejarah. Sedangkan untuk status Geopark pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang mengharmonisasikan warisan geologi (*geoheritage*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (cultural diversity) bertujuan untuk mencapai tujuan pengelolaan Geopark yang bersinergi dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan strategi konservasi dan pariwisata berkelas dunia demi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan dari status tersebut tergambar dalam program-program Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Program-Program Pendukung Pengembangan dari Status OMCHS dan Geopark Nasional

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
	Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73	Dinas Pendidikan	50.000.000
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
	Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah				
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	834.520.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47,78		400.000.000
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	75,13		6.409.056.000
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95,03		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	85,12		1.309.000.000
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	64,56		
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			165.987.220
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	100		
	Prioritas 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
3	PROGRAM PENGELOLAAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%	100		759.009.165
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97		1.336.901.100
	Prioritas 4 : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47		200.900.000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14		110.399.800
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80		13.126.300
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	50		19.600.000
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	479.090.770
11	POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15800		328.545.270
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1730		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		
		Daging Sapi (ton)	319		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86		
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10		
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		141.382.225

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
	Prioritas 5 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.423.258.208
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20		50.000.000
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70		443.600.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	31,1	Dinas Kebudayaan	75.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	13,3		334.000.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33		49.956.000
9	POGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92		30.000.000
	Prioritas 6 : Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi program rpjmd/rpd kedalam rkpd (%)	100	Barenlitbangda	336.366.100
		persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (%)	100		
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100		195.476.910
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	100	Inspektorat	105.156.100
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd)	76		69.194.437.577
5	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	95		409.210.736
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase kontribusi pad terhadap pendapatan daerah (%)	11,74		428.179.666
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100		
JUMLAH					**Rp87.385.874.722**

Pasca penetapan status Nasional ini sangat perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjaga dan mempertahankan status tersebut. Selain dari program-program yang mendukung dari Perangkat Daerah, juga ada berupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait hal tersebut, yaitu :

1. *Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain terkait dengan Status OMCHS dan Geopark Nasional*
   Melakukan kerjasama dengan Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang terkait dengan jaringan infrastruktur perkeretaapian yang dilewati dalam transportasi batubara dari Kota Sawahlunto. Untuk Status Geopark Nasional yang ada di Sumatera Barat yaitu, Geopark Sawahlunto, Geopark Silokek Kabupaten Sijunjung dan Geopark Ngarai Sianok Maninjau, Pemerintah juga melakuka kerjasama terkait dengan pengembangan status geopark kedepannya. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian tetap dilakukan dalam rangka pengembangan kedua Status tersebut di Kota Sawahlunto;
2. *Meningkatkan kerjasama dengan Universitas Negeri dan Swasta lain terkait dengan Status OMCHS dan Geopark Nasional*
   Dalam memperkuat narasi sejarah dan penelusuran arsip, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap melakukan kerjasama dengan para ahli dari berbagai bidang dan Universitas, selain itu juga meminta pendampingan secara rutin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengevaluasi terhadap perkembangan status tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penyusunan dokumen masterplan Geopark Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian di Universitas Negeri Padang, selain itu dalam menggali potensi-potensi geopark dan rencana pengembangan geopark, Pemerintah Kota Sawahlunto juga melakukan kerjasama dengan Universitas Riau, Institut Teknologi Bandung, Universitas Jambi dan beberapa Universitas lain yang akan direncanakan kedepannya dalam meningkatkan status geopark Kota Sawahlunto ini menuju UNESCO Global Geopark.
3. *Meningkatkan promosi Kota Sawahlunto untuk Status OCMHS dan Geopark Nasional*
   Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Pimpinan Perangkat Daerah melakukan promosi Kota Sawahlunto terkait dua status tersebut dengan memaparkan potensi-potensi Status tersebut dalam setiap pertemuan ataupun rapat koordinasi yang dilakukan diluar daerah, sehingga status OCMHS dan Geopark Nasional ini diketahui oleh daerah lain dan menambah keinginan dan minat mereka untuk datang ke Kota Sawahlunto. Selain itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor untuk kedua status tersebut lebih meningkatkan promosi melalui sosial media, leaflet, spanduk dan sebagainya.
   Pelaksanaan dari dokumen Rencana Induk Geopark dan masterplan OCMHS Tahun 2025 telah ditampung dalam program-program perangkat daerah terkait.

Prevalensi *Stunting*

Prevalensi *stunting* merupakan sasaran dari Prioritas Nasional "Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" dengan target untuk tahun 2025 sebesar 0%. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto sudah mengakomodir dalam tujuan dan sasaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.30
Tujuan 1 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**75,24**
		1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,75
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	12,50
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,75

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,64

Dilihat dari evaluasi *prevalensi stunting* dua tahun terakhir Kota Sawahunto menargetkan untuk Tahun 2025 sebesar 13%. Untuk pencapaian target tersebut di tahun 2025 ada beberapa program di Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pencapaian *prevalensi stunting* di Kota Sawahlunto. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Program-Program Pendukung *prevalensi stunting*

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
	Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	Dinas Pendidikan	9.405.084.600
		APK SD/MI/Paket A %	99,7		
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,06		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,82		
		APK PAUD	89,62		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73		50.000.000
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	97	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	447.947.276
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100		
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	50		11.221.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	92		1.553.000.000
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	90		
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	80	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.289.800
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	80		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86		45.382.180
	Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.823.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99		834.520.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47,78		1.573.000.000
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
	Prioritas 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97		1.336.901.100
	Prioritas 4 : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	13.126.300
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	100	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	2.999.800
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH (Skor)	87		31.356.000
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	6		15.000.000
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	93		17.484.300
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200		80.998.400

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		19.640.000
	Prioritas 6 : Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi program rpjmd/rpd kedalam rkpd (%)	100	Barenlitbangda	336.366.100
		persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (%)	100		
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100		195.476.910
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	2,95	BKPSDM	1.246.386.480
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,39		
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,25		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	100	Inspektorat	105.156.100
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,7		113.199.800
		Rekomendasi Kebijakan yang disusun	3		
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd)	76		69.194.437.577
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase opd dengan laporan bmd yang akurat dan akuntabel (%)	95		409.210.736
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase kontribusi pad terhadap pendapatan daerah (%)	11,74		428.179.666
JUMLAH					**Rp90.897.219.125**

Dalam melaksanakan program-prpgram tersebut ada juga beberapa kebijakan dari Pemerintah Daerah yang akan dilakukan dalam percepatan penurunan *prevalensi stunting* di Kota Sawahlunto, antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap 8 aksi percepatan penurunan *stunting* yang diaksanakan di Kota Sawahlunto
   Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan SK Walikota Sawahlunto tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, sehingga dapat dilihat pergerakan yang telah dilakukan oleh masing-masing tim terhadap percepatan penurunan *Stunting* di Kota Sawahlunto dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah pendukung penurunan *Stunting*.

2. Melanjutkan inovasi Sawahlunto Besti (Bebas *Stunting*)
   Dengan meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Sawahlunto. Inovasi konvergensi bersama yang dikoordinatori oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto merupakan upaya bersama yang terdiri dari 6 layanan
   1. Layanan Gizi
   2. Layanan PAUD
   3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi
   4. Layanan Peningkatan Pola Asuh
   5. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
   6. Layanan Bangga Kencana
3. Meningkatkan inovasi yang dilaksanakan oleh puskesmas serta Perangkat Daerah yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kota Sawahlunto
   Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto secara keseluruhan sangat peduli terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target Pemerintah Daerah, ini dibuktikan dengan indikator sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 pada tujuan 4 salah satunya adalah Indeks Inovasi Daerah.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pengembangan Geopark.

Dalam membangun kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan mengantisipasi perubahan iklim yang merupakan Prioritas Nasional maka ditahun 2025 Prioritas Nasional akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran Nasional yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan mengantisipasi perubahan iklim adalah meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target ditahun 2025 sebesar 65,52, berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan indikator kinerja penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB dengan target tahun 2025 sebesar 1,25% dan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan indikator kinerja persentase penurunan emisi GRK dengan target tahun 2025 sebesar 27,30%.

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyikapi Prioritas Nasional tersebut, maka dalam RKPD tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPD Kota Sawahunto Tahun 2024-2026 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.32
Tujuan 2 dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2**	**74,00**
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	71,74

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)	65,52
				Indeks Pengelolaan Persampahan	(Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah) x 100%	68,66
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	87,20
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	86,00
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,05

Target Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 yang terkait dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sawahunto adalah nilai dari IKLH itu sendiri yang mana targetnya 65,52 dan Indeks Pengelolaan Sampah sebesar 68,66%. Untuk pencapaian target tersebut dapat melalui pelaksanaan pembangunan yang menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penggunaan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. Sinergitas antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, pihak swasta, pemangku kepentingan dan masyarakat sangatlah diperlukan dalam pencapaian target tersebut. Adapun Program-program yang mendukung pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
Program-Program Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
	Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan Pendidikan dan kesehatan				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A %	110,25	Dinas Pendidikan	5.396.710.804
		APK SD/MI/Paket A %	99,7		
		Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	2,06		
		Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	1,82		
		APK PAUD	89,62		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	73		50.000.000
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100		250.000.000
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	97	Dinas Kesehatan Pengendalian	447.947.276

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	100	Penduduk dan KB	
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	50		11.221.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	92		1.553.000.000
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	90		
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	80	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.289.800
		Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	80		
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	86		45.382.180
	Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.823.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	99		834.520.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	92		740.480.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	47,78		1.573.000.000
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman (%)	83		600.375.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			165.987.220
		Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	100		
	Prioritas 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
3	PROGRAM PENGELOLAAAN KENANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%	100		759.009.165
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang terkelola (%)	97		1.336.901.100
	Prioritas 4 : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	47		200.900.000
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14		110.399.800

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	80		19.999.900
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	50		19.600.000
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	135.999.370
13	POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15800		328.545.270
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1730		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		
		Daging Sapi (ton)	319		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86		
		Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	01:10		
14	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	90		141.382.225
15	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanam	100		75.000.000
16	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	1		46.868.750
		Jumlah Ketenangan Penyuluh yang berprestasi	1		
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan	200		80.998.400
18	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	39		80.998.400
	Prioritas 5 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan Geopark Nasional				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.423.258.208
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	20		50.000.000
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	70		443.600.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33	Dinas Kebudayaan	49.956.000
6	POGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63,92		30.000.000
	Prioritas 6 : Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi program rpjmd/rpd kedalam rkpd (%)	100	Barenlitbangda	336.366.100
		persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (%)	100		
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang mitra (%)	100		195.476.910
	JUMLAH				**Rp19.537.033.453**

Untuk percepatan pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan hidup ini, maka Pemerintah Kota Sawahlunto membuat kebijakan pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah*;
   Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan yaitu dengan pengelolaan sampah yang efektif sesuai dengan jenis sampah. Salah satu caranya dengan memilah sampah padat menjadi sampah organik dan anorganik untuk dilakukan proses selanjutnya. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, bigas dan pakan ternak, sedangkan anorganik dapat didaur uang menjadi berbagi macam prabot rumah tangga. Pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui perangkat daerah terkait terus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait juga memberikan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah dimasyarakat seperti tempat sampah yang sudah disediakan dipisahkan berdasarkan jenis sampah.
   Pembinaan pengelolaan sampah ini juga dilakukan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini, pembinaan ini dengan menambahkan materi untuk muatan lokal yang ada disekolah-sekolah. Dengan ini disekolah-seklah sudah dilakukan pengelolaan sampah dengan mengolah sampah yang ada disekolah masing-masing.

2. *Menjaga kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*
   Untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan didaerah salah satunya dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat peduli terhadap Ruang Terbuka Hijau, ini dibuktikan dengan pembangunan beberapa taman-taman kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan menambah kualitas lingkungan. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, pembangunan taman-taman ini juga menambah pendapatan masyarakat melalui penambahan budidaya kloni-kloni lebah galo-galo yang sangat cocok untuk dikembangkan di Kota Sawahlunto. Ditahun 2025 pengembangan RTH juga diarahkan pada pegembangan budidaya lebah galo-galo untuk menuju Kota Sawahlunto sebagai pusat madu di Provinsi Sumatera Barat.

3. *Menjaga Kelestariaan Kawasan Geopark Nasional Kota Sawahlunto*
   Dengan status Geopark Nasional Pemerintah Kota Sawahlunto meningkatkan kelestarian Kawasan geopark yang ada di Kota Sawahlunto. Pembangunan Geopark adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sehingga dapat mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Geopark yang dalam proses pengerjaan akan memberikan arahan kedepannya terhadap pengembangan Kawasan geopark di Kota Sawahlunto. Pembangunan geopark dengan tiga pilar yaitu konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat akan menjadikan Kota Sawahlunto sebagai pusat studi lapangan geologi di Sumatera Barat sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2025 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAWAHLUNTO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DINAS PENDIDIKAN				84.673.769.254,00						0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.673.769.254,00						0,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				84.673.769.254,00						0,00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	78.977.058.450,00					-	0,00	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	-	40.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9 Dokumen	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	72.680.308.904,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	637 Orang/bulan	72.680.308.904,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	14 Orang/bulan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	265.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	100 Orang	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	868.899.750,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	9.999.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	110.262.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	24.990.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	164.965.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	308.683.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	4.745.624.796,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.557.584,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.631.067.212,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	277.225.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	63 Unit	215.750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	32 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	149 Unit	61.475.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	5.396.710.804,00					-	0,00	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	94,20% 2,25% 2,03% 40,50%	-	1.760.327.360,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui	94,20% 2,25% 2,03% 40,50%	0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							97,10%						peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	97,10%		
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10,00 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	10,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1,00 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	410,00 Paket	1 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	410,00 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6235 Peserta Didik	544 Peserta Didik	342.719.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6235 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	560,00 Orang	150 Orang	25.599.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	560,00 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	546,00 Orang	278 Orang	215.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	546,00 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63,00 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	116.699.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	63,00 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63,00 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	10.436.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	63,00 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang		63 Dokumen	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pendidikan										
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2,00 Paket	1 Paket	273.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2,00 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		63 Satuan Pendidikan	74.552.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10,00 Ruang	1 Ruang	65.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	10,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		6058 Peserta Didik	442.000.060,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	78,75% 2,37% 2,12% 93,65%	-	1.078.621.720,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	78,75% 2,37% 2,12% 93,65%	0,00	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium											
						Jumlah Ruang Laboratorium	1,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						yang Telah Dibangun				Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISIK		Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah											
						Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3,00 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6,00 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6,00 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2,00 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2,00 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500,00 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	500,00 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3,00 Paket	0 Paket	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3,00 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2329 Peserta Didik	2185 Peserta Didik	204.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2329 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2329 Peserta Didik	488 Peserta Didik	347.105.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2329 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga	248,00 Orang	50 Orang	30.239.900,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	248,00 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248,00 Orang	153 Orang	18.735.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	248,00 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12,00 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	188.990.780,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12,00 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	12,00 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	29.542.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12,00 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		4 Dokumen	44.999.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2329 Satuan Pendidikan	2185 Satuan Pendidikan	49.808.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2329 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	90,35%	-	2.003.151.166,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	90,35%	0,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	4 Unit	90.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD											
						Jumlah	5 Paket	3 Paket	370.000.000,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	5 Paket	0,00	DINAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						perlengkapan PAUD yang Tersedia				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	77 Orang	51 Orang	548.772.616,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	77 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	183 Orang	51 Orang	360.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	183 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	199.999.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	115 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	115 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	183 Orang	115 Orang	63.130.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	183 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5 Dokumen	125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		115 Satuan Pendidikan	246.248.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan	-	100%	-	554.610.558,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	100%	0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Nonformal/Kesetaraan								Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27 Orang	7 Orang	151.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	27 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	37 Orang	127.710.860,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	60 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	260 Peserta Didik	100 Peserta Didik	79.999.798,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	260 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	69.999.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		1 unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03			PROGRAM	-	-	-	50.000.000,00					-	0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PENGEMBANGAN KURIKULUM											
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	100%	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100%	0,00	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	115 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	115 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	250.000.000,00					-	0,00	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	1:15- 1:15- 2:1- 3:1_	-	250.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1:15- 1:15- 2:1- 3:1_	0,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	900 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	900 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				53.739.225.756,00						56.702.182.926,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				53.693.843.576,00						56.650.856.518,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				53.693.843.576,00						56.650.856.518,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	39.652.225.045,00					-	41.721.637.536,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	22Dokumen	-	36.399.701.517,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	22Dokumen	38.221.734.382,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	438 Orang/bulan	36.395.785.917,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	300 Orang/bulan	38.215.575.213,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan	10 Laporan	16 Laporan	3.915.600,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	10 Laporan	6.159.169,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	26Dokumen	-	135.215.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	26Dokumen	163.636.830,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	4.395.500,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Paket	4.615.275,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	36.621.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3 Paket	44.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	4.900.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3 Paket	10.290.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	9.942.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Paket	15.321.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	79.357.100,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	89.309.955,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3Dokumen	-	59.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	3Dokumen	1.500.000,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	59.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4Dokumen	-	2.282.097.928,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	2.396.202.824,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Laporan	1.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	213.157.928,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	36 Laporan	223.815.824,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.067.940.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	2.171.337.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4Dokumen	-	776.210.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	938.563.500,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	187 Unit	184 Unit	771.720.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	187 Unit	928.956.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15 Unit	4.490.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Unit	9.607.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	13.964.178.731,00					-	14.844.735.558,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	-	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	123.062.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	136.118.237,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kabupaten/Kota								peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	15 Unit	57.026.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	5 Unit	62.006.544,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	318 Unit	20 Unit	66.036.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	318 Unit	71.360.693,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga											
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	16750 Keluarga	16000 Keluarga	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	16750 Keluarga	2.751.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2Dokumen 2Dokumen	-	13.817.661.951,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2Dokumen 2Dokumen	14.673.126.089,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1461 Orang	1392 Orang	28.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1461 Orang	34.222.881,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1772 Orang	1688 Orang	66.874.700,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1772 Orang	82.890.003,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1273 Orang	1213 Orang	71.664.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1273 Orang	76.894.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	4603 Orang	4384 Orang	79.996.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui	4603 Orang	84.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kesehatan Sesuai Standar							peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9957 Orang	9957 Orang	22.078.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	9957 Orang	37.306.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.735 Orang	41435 Orang	96.701.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	41.735 Orang	113.354.850,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4930 Orang	4695 Orang	60.269.867,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4930 Orang	63.283.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16541 Orang	16341 Orang	48.963.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	16541 Orang	71.662.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	962 Orang	932 Orang	76.709.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	962 Orang	93.712.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	141 Orang	139 Orang	49.541.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	141 Orang	63.262.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	661 Orang	1528 Orang	88.867.190,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	661 Orang	125.265.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sesuai Standar										
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1600 Orang	1550 Orang	70.801.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1600 Orang	78.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	6.937.440,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	9.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.895.476,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	4.363.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.993.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	2.512.941,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	1 Dokumen	3.290.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	5.512.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	3.675.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya											
						Jumlah	6 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	6 Dokumen	3.343.400,00	DINAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				Sawahlunto, Talawi, Sikalang	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.599.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	4.725.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	13.753.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	32.739.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	4 Dokumen	12.790.537.680,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	13.440.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	48.589.780,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	51.019.395,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Dokumen	1 Dokumen	39.188.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	13 Dokumen	35.053.295,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	2 Dokumen	9.749.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	13.650.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan		1 Unit	126.790.018,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		134.265.199,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1 Dokumen	7.820.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	8.212.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	6Dokumen	-	19.632.080,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Dokumen	30.679.950,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	3 Dokumen	19.632.080,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Dokumen	30.679.950,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	20Dokumen	-	3.822.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	20Dokumen	4.811.282,00	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7 Unit	6 Unit	3.822.100,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	7 Unit	4.811.282,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	48.929.000,00					-	51.375.874,00	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	300Dokumen	-	3.041.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	300Dokumen	3.193.348,00	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga	150 Dokumen	1 Dokumen	3.041.200,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	150 Dokumen	3.193.348,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kesehatan										
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	9Dokumen	-	25.033.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	9Dokumen	26.285.763,00	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen	25.033.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	26.285.763,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2Dokumen	-	20.854.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2Dokumen	21.896.763,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120 Orang	1 Orang	20.854.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	120 Orang	21.896.763,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	17.289.800,00					-	20.128.500,00	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	63Dokumen	-	1.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	63Dokumen	1.050.000,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	1.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	-	1Dokumen	-	1.720.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1Dokumen	1.806.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.720.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	1.806.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	1Dokumen	-	3.009.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1Dokumen	4.546.500,00	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.009.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	4.546.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	-	9.440.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-	10.500.000,00	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											
						Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	9.440.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				Sikalang			Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	11Dokumen	-	2.120.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	11Dokumen	2.226.000,00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan											
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	11 Unit	70 Unit	2.120.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	11 Unit	2.226.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	11.221.000,00					-	12.979.050,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4Dokumen	-	3.610.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	3.790.500,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	1 Dokumen	3.610.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Dokumen	3.790.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4Dokumen	-	3.641.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	5.020.050,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	4 Dokumen	1 Dokumen	3.641.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Dokumen	5.020.050,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dan Sehat										
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	6Dokumen	-	3.970.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Dokumen	4.168.500,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	1 Dokumen	3.970.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Dokumen	4.168.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45.382.180,00						51.326.408,00	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				45.382.180,00						51.326.408,00	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	45.382.180,00					-	51.326.408,00	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	45.382.180,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-	51.326.408,00	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
						Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 Laporan	45.382.180,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		51.326.408,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				70.390.078.357,00						73.971.198.107,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.112.219.524,00						73.629.040.080,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.112.219.524,00						73.629.040.080,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.111.272.248,00					-	71.527.990.080,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	-	22Dokumen	-	40.673.538.793,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	22Dokumen	42.707.229.451,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perangkat Daerah								Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	372 Orang/bulan	40.673.538.793,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	300 Orang/bulan	42.707.229.451,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3Dokumen	-	16.389.999,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3Dokumen	28.350.000,00	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	16.389.999,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Unit	28.350.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4Dokumen	-	1.025.763.456,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	1.077.051.629,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	1.025.763.456,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	36 Laporan	1.077.051.629,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4Dokumen	-	395.580.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	415.359.000,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	187 Unit	28 Unit	395.580.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	187 Unit	415.359.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	26.000.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	27.300.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	26.000.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	6 Unit Kerja	27.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				Aur Mulio			Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	447.947.276,00					-	470.400.000,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	348.007.276,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	365.463.000,00	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	1 Unit	113.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Unit	118.650.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	5 Unit	52.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	99.990.176,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	5 Unit	105.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	318 Unit	193 Unit	85.017.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	318 Unit	89.313.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2Dokumen 2Dokumen	-	99.940.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2Dokumen 2Dokumen	104.937.000,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	99.940.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Dokumen	104.937.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	1.553.000.000,00					-	1.630.650.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	9Dokumen	-	1.553.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	9Dokumen	1.630.650.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	7 Orang	1.553.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	50 Orang	1.630.650.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X					NON URUSAN				277.858.833,00						342.158.027,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				277.858.833,00						342.158.027,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	277.858.833,00					-	342.158.027,00	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4Dokumen	-	277.858.833,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Dokumen	342.158.027,00	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	277.858.833,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	342.158.027,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
					UPTD PUSKESMAS KOLOK				369.347.221,00						440.314.582,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				369.347.221,00						440.314.582,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				369.347.221,00						440.314.582,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	369.347.221,00					-	440.314.582,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	369.347.221,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	440.314.582,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	369.347.221,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	440.314.582,00	UPTD PUSKESMAS KOLOK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN				650.594.024,00						693.623.724,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				650.594.024,00						693.623.724,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				650.594.024,00						693.623.724,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	650.594.024,00					-	693.623.724,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	650.594.024,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	693.623.724,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	650.594.024,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	693.623.724,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
					UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG				696.542.236,00						748.169.348,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				696.542.236,00						748.169.348,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				696.542.236,00						748.169.348,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	696.542.236,00					-	748.169.348,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	696.542.236,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	748.169.348,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	696.542.236,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	748.169.348,00	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
					UPTD PUSKESMAS TALAWI				1.228.192.593,00						1.384.102.223,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.228.192.593,00						1.384.102.223,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.228.192.593,00						1.384.102.223,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.228.192.593,00					-	1.384.102.223,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	1.228.192.593,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	1.384.102.223,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.228.192.593,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	1.384.102.223,00	UPTD PUSKESMAS TALAWI
					UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG				551.154.833,00						578.712.627,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				551.154.833,00						578.712.627,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				551.154.833,00						578.712.627,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG	-	-	-	551.154.833,00					-	578.712.627,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	551.154.833,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	578.712.627,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	551.154.833,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	578.712.627,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
					UPTD PUSKESMAS LUNTO				338.169.042,00						355.077.494,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				338.169.042,00						355.077.494,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				338.169.042,00						355.077.494,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	338.169.042,00					-	355.077.494,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	6Unit Kerja	-	338.169.042,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6Unit Kerja	355.077.494,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1 Unit Kerja	338.169.042,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	6 Unit Kerja	355.077.494,00	UPTD PUSKESMAS LUNTO
					UPTD INSTALASI FARMASI KOTA				492.431.390,00						517.053.023,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				492.431.390,00						517.053.023,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				492.431.390,00						517.053.023,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	492.431.390,00					-	517.053.023,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	431.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	7Fasilitas Pelayanan Kesehatan	452.970.000,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	2 Paket	431.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Paket	452.970.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2Dokumen 2Dokumen	-	61.031.390,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan	2Dokumen 2Dokumen	64.083.023,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													kesehatan			
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Dokumen	4 Dokumen	61.031.390,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	13 Dokumen	64.083.023,00	UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.292.197.798,00						29.332.500.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.292.197.798,00						29.332.500.000,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.292.197.798,00						29.332.500.000,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.340.263.578,00					-	19.776.500.000,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	7.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	7.500.000,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.115.618.076,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	17.000.000.000,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		143 Orang/bulan	9.115.618.076,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	37.600.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	80.000.000,00	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	37.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	276.215.810,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	515.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	16.996.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	63.193.110,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.732.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	30.750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	155.544.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	3.795.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	40.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	3.795.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.455.334.692,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	1.464.000.000,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		12 Laporan	246.334.692,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Kel/Desa						
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	444.700.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	670.000.000,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		34 Unit	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	36.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	8.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	1.823.000.000,00					-	1.300.000.000,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	18Unit	-	1.103.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	7Unit	800.000.000,00	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai											
						Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.650 KM	0.100 KM	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0.300 KM	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kel/Desa						
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai											
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	2.050 KM	0 KM	703.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0.750 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai											
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya											
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya											
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	3 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1,380 meter	-	720.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	500meter	500.000.000,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan											
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2.450 KM	0 KM	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0.850 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi											
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	4 Bendung	0 Bendung	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 Bendung	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	0.600 KM	0 KM	190.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0.200 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Direhabilitasi				Kel/Desa						
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi											
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	0 Bendung	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2 Bendung	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.850 KM	0.150 KM	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0.300 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa											
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	834.520.000,00					-	700.000.000,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	328 RT	-	834.520.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	94 RT	700.000.000,00	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	594.040.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Liter/Detik	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	200 Liter/Detik	7 Liter/Detik	240.480.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	200 Liter/Detik	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	740.480.000,00					-	800.000.000,00	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	607Unit 607Unit	-	740.480.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	205Unit 205Unit	800.000.000,00	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman											
						Kapasitas Sistem	315 M³/Hari	0.17 M³/Hari	740.480.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan	315 M³/Hari	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	1.573.000.000,00					-	400.000.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	3700M	-	1.573.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1300M	400.000.000,00	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan											
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.173.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	3 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan											
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan											
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	45 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	15 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	1.309.000.000,00					-	1.350.000.000,00	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	98Unit 98Unit	-	1.309.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	98Unit 98Unit	1.350.000.000,00	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	98 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	98 Bangunan Gedung	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Pembangunan	36 Dokumen	29 Dokumen	1.049.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	12 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dokumen	60 Dokumen	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	100 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	1.947.000.000,00					-	1.000.000.000,00	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	12Unit	-	1.947.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	4Unit	1.000.000.000,00	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya											
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	12 Kawasan	2 Kawasan	1.947.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	4 Kawasan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	-	6.409.056.000,00					-	2.800.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					JALAN											
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	33KM	-	6.409.056.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	11.5KM	2.800.000.000,00	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	18 Dokumen	4 Dokumen	108.056.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	6 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan											
						Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	0 KM	1.318.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan											
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6.96 KM	0.05 KM	2.726.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2.32 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	17 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	7 Jembatan	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan											
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	9 Jembatan	0 Jembatan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	4 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan											
						Jumlah Jembatan yang Dibangun	7 Jembatan	0 Jembatan	260.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan											
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	441,42 KM	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2 KM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan											
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7.5 KM	0 KM	1.047.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2.5 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan											
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	0.5 KM	700.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	149.891.000,00					-	200.000.000,00	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	150Orang	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	55Orang	50.000.000,00	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi											
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		50 Lembaga	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.891.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	150.000.000,00	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi											
						Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		10 Perangkat Pendukung	49.891.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	165.987.220,00					-	1.006.000.000,00	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	6Dokumen	-	85.663.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	2Dokumen	360.000.000,00	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota											
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang											
						Jumlah publikasi informasi penataan		1 Publikasi	22.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ruang				Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah			RUANG
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota											
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	38.463.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang											
						Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		1 Laporan	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	4Kali	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1Kali	500.000.000,00	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota											
						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang											
						Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	93Kali	-	13.969.450,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	31Kali	6.000.000,00	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang											
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		12 Layanan	13.969.450,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	3Kali	-	66.354.670,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1Kali	140.000.000,00	
1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan		0 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR											
						Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		10 Kasus	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK											
						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	19.654.670,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		12 Laporan	41.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang											
						Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang		0 Berita Acara	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal											
						Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		0 Berita Acara	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					UPTD ALAT BERAT				565.945.978,00						870.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				565.945.978,00						870.000.000,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				565.945.978,00						870.000.000,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	565.945.978,00					-	870.000.000,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.881.875,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	120.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17 Unit	20.881.875,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		120.000.000,00	UPTD ALAT BERAT
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	545.064.103,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	750.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah								Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	545.064.103,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		750.000.000,00	UPTD ALAT BERAT
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				13.472.042.137,00						13.586.989.278,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.297.343.272,00						11.692.069.572,00	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.297.343.272,00						11.692.069.572,00	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.292.321.452,00					-	11.419.720.946,00	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1Dokumen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1Dokumen	0,00	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	40/14orang/ bulan	-	5.489.853.380,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	40/14orang/bul an	6.038.838.718,00	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40/14 Orang/bulan	40/14 Orang/bulan	5.489.853.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	40/14 Orang/bulan	6.038.838.718,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	0,00	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1paket	-	208.066.820,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1paket	316.057.500,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Paket	1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.826.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Paket	77.054.450,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.205.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Paket	13.425.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.162.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Paket	26.477.550,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	140.122.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	150 Laporan	198.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	0,00	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12bulan	-	3.888.161.252,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	12bulan	4.277.014.848,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Laporan	605.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kel/Desa						DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	242.798.936,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Laporan	267.078.830,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	2.405.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Laporan	2.645.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	3.642.407.316,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Laporan	4.006.685.518,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	706.240.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	100persen	787.809.880,00	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	696.860.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		772.046.880,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	20 Unit	9.380.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	35 Unit	15.763.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	224.646.820,00					-	272.348.626,00	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	-	30Unit	-	11.308.520,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	10Unit	26.918.276,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Relokasi Program Kabupaten/Kota								Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		10 Dokumen	11.308.520,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		26.918.276,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	6unit	-	10.080.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2unit	19.074.000,00	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana											
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	10.080.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	60 Orang	19.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	30unit	-	202.895.300,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	10unit	225.957.050,00	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	202.895.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	10 Unit Rumah	225.957.050,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota											
						Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		0 Unit Rumah	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	30Unit	-	363.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	10Unit	399.300,00	
1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena	40 Dokumen	10 Dokumen	363.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	10 Dokumen	399.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Relokasi Program Kabupaten/Kota										LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	600.375.000,00					-	0,00	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	1persen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1persen	0,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP											
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevіew/Terlegalisasi	87 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	87 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	91,05persen	-	600.375.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	91,05persen	0,00	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni											
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	60 Unit Rumah	0 Unit Rumah	600.375.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	60 Unit Rumah	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU											
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	5 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	50.000.000,00					-	0,00	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	0,00	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		0 Unit Rumah	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	130.000.000,00					-	0,00	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	30.6persen	-	130.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	30.6persen	0,00	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	0 Lokasi	130.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	9 Lokasi	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.174.698.865,00						1.894.919.706,00	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				50.399.200,00						58.636.410,00	
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-	36.716.900,00					-	43.585.770,00	
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1persen	-	36.716.900,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1persen	43.585.770,00	
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah											
						Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	36.716.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		43.585.770,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100persen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	100persen	0,00	
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah		0 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kel/Desa						DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-	13.682.300,00					-	15.050.640,00	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	13.682.300,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	15.050.640,00	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong											
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		1 Laporan	13.682.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		15.050.640,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	1persen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1persen	0,00	
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah											
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.124.299.665,00						1.836.283.296,00	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	4dokumen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1dokumen	0,00	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota											
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						mengakomodir arahan RPPLH Provinsi										
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	2dokumen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2dokumen	0,00	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	5.600.000,00					-	5.500.000,00	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	86,67persen	-	5.600.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	86,67persen	5.500.000,00	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	5.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	25persen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	25persen	0,00	
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi											
						luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		0 Ha	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	-	-	-	759.009.165,00					-	338.601.445,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					HAYATI (KEHATI)											
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	100persen	-	759.009.165,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	100persen	338.601.445,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		6.4 Ha	703.356.815,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		272.102.540,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		1 Unit	41.039.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		48.004.605,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan											
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Unit	14.613.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		18.494.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	27rekomendasi 27Rekomendasi	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	11rekomendasi 11Rekomendasi	0,00	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3											
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		0 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	5.040.000,00					-	8.470.000,00	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	-	150persen	-	5.040.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	60persen	8.470.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		5 Badan Usaha	5.040.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		8.470.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	70persen	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	70persen	0,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup											
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat											
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		0 Lembaga	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	17.749.400,00					-	21.999.340,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.749.400,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	21.999.340,00	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		4 Entitas	17.749.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		21.999.340,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0,00					-	0,00	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	22Kasus	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	9Kasus	0,00	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		0 Pengaduan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	-	1.336.901.100,00					-	1.461.712.511,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	99,00ton	-	1.336.901.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	99,00ton	1.461.712.511,00	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan		0 Dokumen	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sampah dan Mengacu pada Jakstrada										
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		1 Unit	431.967.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		543.286.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota											
						Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		6950 Ton	874.933.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		918.425.811,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					UPTD RUSUNAWA				274.113.845,00						312.293.435,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				274.113.845,00						312.293.435,00	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				274.113.845,00						312.293.435,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	274.113.845,00					-	312.293.435,00	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	-	12bulan	-	274.113.845,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan	12bulan	312.293.435,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan/atau Rumah Khusus								berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	4 Laporan	149.521.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Laporan	167.473.540,00	UPTD RUSUNAWA
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	124.592.445,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Dokumen	144.819.895,00	UPTD RUSUNAWA
					UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				104.504.686,00						118.403.274,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.504.686,00						118.403.274,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				104.504.686,00						118.403.274,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	104.504.686,00					-	118.403.274,00	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	86,67persen	-	104.504.686,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	86,67persen	118.403.274,00	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota											
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		1 Dokumen	104.504.686,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		118.403.274,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				11.514.208.129,00						12.914.921.702,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.514.208.129,00						12.914.921.702,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.514.208.129,00						12.914.921.702,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.035.784.129,00					-	12.420.941.216,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.247.755.002,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	10.323.661.134,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	131/14 Orang/bulan	9.247.755.002,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Orang/bulan	10.323.661.134,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	-	160.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													komunikasi yang terintegrasi			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	1 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	140 Paket	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	162.647.995,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	230.089.080,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	6.576.625,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	7.235.360,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	44.787.370,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	47.940.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	40.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	51.336.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		12.038.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.364.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	111.539.120,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	15.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	13.264.339,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	13.264.339,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.319.439.132,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1.372.976.463,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.290.812,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	94.280.613,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.226.948.320,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.277.375.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	290.042.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	320.950.200,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	285.402.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		303.437.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	10 Unit	4.640.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	46 Unit	9.933.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		7.580.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	177.146.000,00					-	191.387.000,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	73.280.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	-	74.272.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													komunikasi yang terintegrasi			
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	65 laporan	12 laporan	56.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	65 laporan	56.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8 Laporan	12 Laporan	16.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Laporan	17.952.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	24.638.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	27.115.000,00	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Laporan	3 Laporan	11.475.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Laporan	12.385.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	12 Laporan	13.163.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	36 Laporan	14.730.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik	-	-	-	79.228.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola	-	90.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	2 Laporan	79.228.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	301.278.000,00					-	302.593.486,00	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	274.013.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	265.580.800,00	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	12 Laporan	35.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	25 Laporan	40.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	14.712.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	15.047.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran											
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulang	20 Orang	4 Orang	82.784.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Orang	55.656.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						an Kebakaran										
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	32 Unit	3 Unit	141.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	32 Unit	154.657.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	-	3.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	5.775.000,00	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran											
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	13 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	13 Dokumen	5.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	11.088.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	15.964.250,00	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat											
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	111 Orang	111 Orang	11.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	111 Orang	15.964.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	13.177.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	15.273.436,00	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi											
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak	10 Unit	1 Unit	13.177.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Unit	15.273.436,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						an Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis										
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.780.216.221,00						5.434.855.924,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.780.216.221,00						5.434.855.924,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.780.216.221,00						5.434.855.924,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.957.189.571,00					-	4.755.010.554,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	15.066.540,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	12.832.300,00	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	15.066.540,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		12.832.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.763.497.255,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	3.177.557.610,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23/14 Orang/bulan	2.763.497.255,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		3.177.557.610,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.660.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	75.000.000,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	10.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	139.230.700,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	272.932.000,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	3.282.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	37.338.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	16.040.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	10.050.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		360 Dokumen	2.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		173.932.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	38.706.120,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	65.206.644,00	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	38.706.120,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		65.206.644,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	820.190.956,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	847.482.000,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	50.064.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Semua Kel/Desa			konektivitas antar wilayah			
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	769.126.656,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		786.882.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	169.838.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	304.000.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	167.066.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	2.772.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	823.026.650,00					-	679.845.370,00	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	50.037.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	50.042.520,00	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,		7065 Orang	50.037.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		50.042.520,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun										
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	409.512.200,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	256.326.200,00	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		10 Unit	74.995.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		75.002.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana											
						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		1 Kawasan	60.003.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		60.004.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di		1 laporan	233.353.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						kawasan tempat tinggalnya										
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		1 Kawasan	41.160.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		41.320.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	284.785.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	294.785.000,00	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		250 Orang	74.785.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		74.785.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		800 Orang	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/K		4 Laporan	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ota										
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	78.691.650,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	78.691.650,00	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota											
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		12 Kegiatan	78.691.650,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		78.691.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.201.507.176,00						8.612.498.128,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.854.654.299,00						7.354.624.918,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.854.654.299,00						7.354.624.918,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.688.078.999,00					-	6.474.074.998,00	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100persen	-	4.221.696.317,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	4.791.538.018,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.221.696.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	31 Orang/bulan	4.791.538.018,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100persen	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100persen	22.000.000,00	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	10 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Orang	22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100persen	-	407.828.314,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100persen	560.627.475,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	6.997.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	9.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	102.450.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	128.485.275,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	71.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	100.793.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	75.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	80 Laporan	181.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90 Laporan	247.249.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	733.916.368,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100persen	755.069.152,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	4.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	99.998.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Laporan	110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	629.568.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	639.569.152,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	304.638.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100persen	344.840.353,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	235.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Unit	265.254.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	165 Unit	20 Unit	69.498.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	60 Unit	79.586.353,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	61.980.000,00					-	52.239.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	41Orang	-	61.980.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	41Orang	52.239.000,00	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	41 Orang	45.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	38 Orang	32.560.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	4 Orang	41 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan	4 Orang	13.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				Kel/Desa			kesehatan			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	3.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Lembaga	4.059.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)											
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Sertifikat	31 Sertifikat	1.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	37 Sertifikat	2.420.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	971.404.660,00					-	702.843.006,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	315Orang	-	951.404.660,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	315Orang	680.843.006,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	675 Orang	380 Orang	262.229.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	250 Orang	82.470.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	4 Orang	10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	20 Orang	4.620.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
						Jumlah Peserta	105 Orang	250 Orang	192.275.460,00	Semua Kota/Kab,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,	35 Orang	211.503.006,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	100 Orang	198.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	85 Orang	140.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	120 Orang	288.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	150 Orang	242.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	240Orang	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	240Orang	22.000.000,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	60 Orang	22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	28.225.600,00					-	31.290.160,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	3071Orang	-	28.225.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3071Orang	31.290.160,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah	1582	6181 Keluarga	8.730.000,00	Semua	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya	1582 Keluarga	9.603.000,00	DINAS SOSIAL,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga			Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1582 Keluarga	900 Keluarga	19.495.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1582 Keluarga	21.687.160,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	69.606.900,00					-	55.000.000,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	100persen	-	29.966.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	22.000.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	30 Orang	29.966.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	50 Orang	22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	100persen	-	39.640.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	33.000.000,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	39.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	30 Orang	33.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	35.358.140,00					-	39.177.754,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	4Makam	-	35.358.140,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4Makam	39.177.754,00	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	4 Makam	35.358.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Makam	39.177.754,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.346.852.877,00						1.257.873.210,00	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				434.631.400,00						515.293.956,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	127.112.600,00					-	148.500.000,00	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3Lembaga	-	39.465.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3Lembaga	55.000.000,00	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota											
						Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		50 Orang	39.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100persen	-	35.457.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	22.000.000,00	
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi											
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		1 Lembaga	35.457.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1Lembaga	-	52.190.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1Lembaga	71.500.000,00	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9 Dokumen	1 Dokumen	52.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan	3 Dokumen	71.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				Kel/Desa			kesehatan			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	500.000,00					-	5.500.000,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	12kegiatan	-	500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12kegiatan	5.500.000,00	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	272.033.800,00					-	317.293.956,00	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	12Laporan	-	248.649.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12Laporan	279.343.900,00	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	15.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	28 Perangkat Daerah	22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/K	2 Dokumen	2 Dokumen	223.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	246.343.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ota yang Tersedia										
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2Lembaga	-	22.885.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2Lembaga	37.400.056,00	
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	9.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Lembaga	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	41 Orang	13.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	3 Orang	26.400.056,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1Lembaga	-	499.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1Lembaga	550.000,00	
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah	2 Layanan	2 Layanan	499.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Layanan	550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia										
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	26.945.000,00					-	38.500.000,00	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100persen	-	22.215.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	33.000.000,00	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	37 Organisasi	1 Organisasi	11.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	37 Organisasi	16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	42Lembaga	-	4.730.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	42Lembaga	5.500.000,00	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	4.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	8.040.000,00					-	5.500.000,00	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	12Laporan	-	3.040.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12Laporan	0,00	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA											
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30 Orang	30 Orang	3.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	10 Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	42Lembaga	-	5.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	42Lembaga	5.500.000,00	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/											
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	86 Orang	30 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	35 Orang	5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				912.221.477,00						742.579.254,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	492.554.362,00					-	395.788.233,00	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	100persen 100persen	-	492.554.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100persen 100persen	395.788.233,00	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	13.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	27 Dokumen	15.681.755,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	3.813.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	27 Dokumen	4.194.966,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	370 Orang	314 Orang	425.199.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	370 Orang	311.812.934,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	35.691.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	23 Dokumen	41.306.578,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	37 Dokumen	37 Dokumen	14.209.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	37 Dokumen	22.792.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	419.667.115,00					-	346.791.021,00	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	195Laporan	-	419.667.115,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	195Laporan	346.791.021,00	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	195 Lembaga	195 Lembaga	167.387.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	195 Lembaga	69.283.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											
						Jumlah Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	252.279.965,00	Semua Kota/Kab,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	37 Dokumen	277.507.961,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				12.194.090.334,00						17.328.710.100,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.816.814.719,00						15.068.710.100,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.816.814.719,00						15.068.710.100,00	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.749.974.619,00					-	14.942.710.100,00	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	31Dokumen	-	5.196.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	10Dokumen	5.500.000,00	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	5.196.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42Dokumen	-	9.112.313.234,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	14Dokumen	12.987.210.100,00	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	255 Orang/bulan	123 Orang/bulan	9.112.313.234,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	85 Orang/bulan	12.987.210.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18%	-	34.994.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	6%	40.000.000,00	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5 Orang	34.994.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	5 Orang	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36dokumen	-	437.512.303,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	12dokumen	595.000.000,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen	3 Paket	1 Paket	9.987.781,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan,	1 Paket	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	87.699.712,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Paket	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 Paket	12 Paket	48.539.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	60 Paket	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	12 Paket	43.235.610,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	6 Paket	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	248.050.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	150 Laporan	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	751.989.082,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	12Bulan	812.000.000,00	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.999.368,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	24.999.475,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	649.990.239,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan,	12 Laporan	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	407.970.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	100%	503.000.000,00	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	90 Unit	337.584.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	90 Unit	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	20 Unit	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	67.386.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	2.999.800,00					-	3.000.000,00	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	3desa	-	2.999.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1desa	3.000.000,00	
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik											
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 Laporan	4 Laporan	2.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	31.356.000,00					-	85.000.000,00	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	147%	-	1.500.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	147%	5.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	56Gr/Kapita /Tahun 1.850Kkal/Kapita/Tahun	-	29.856.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	56Gr/Kapita/Tahun 1.850Kkal/Kapita/Tahun	80.000.000,00	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	26.860.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Laporan	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	2.996.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	15.000.000,00					-	15.000.000,00	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3Desa	-	15.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1Desa	15.000.000,00	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota											
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	17.484.300,00					-	23.000.000,00	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	30Persen	-	17.484.300,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	30Persen	23.000.000,00	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Rekomendasi Keamanan	4 Dokumen	1 Dokumen	1.988.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen	5 Dokumen	15.496.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	5 Dokumen	18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.377.275.615,00						2.260.000.000,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				100.638.400,00						170.000.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	80.998.400,00					-	120.000.000,00	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	15.95kg/m2	-	80.998.400,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	5.23kg/m2	120.000.000,00	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Unit	80.998.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat											
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	-	19.640.000,00					-	50.000.000,00	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	19.640.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	50.000.000,00	
3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko											
						Jumlah rekomendasi perizinan		1 Rekomendasi	19.640.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.276.637.215,00						2.090.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	534.295.470,00					-	670.000.000,00	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	15% 85%	-	34.499.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	15% 85%	55.000.000,00	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	4.499.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian											
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	29.999.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5.42Ton GKG/Ha 1,28ton/ha 1,13ton/ha	-	208.039.970,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	5.42Ton GKG/Ha 1,28ton/ha 1,13ton/ha	280.000.000,00	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman											
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman											
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	195.039.970,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman											
						Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit	-	95%	-	65.795.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan,	95%	60.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil											
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	6 Laporan	2 Laporan	65.795.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2 Laporan	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	37%	-	14.640.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	37%	25.000.000,00	
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak											
						Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1125 Laporan	4 Laporan	14.640.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	400 Laporan	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	15022ekor 71827ekor 49845ekor 2210ekor 4750ekor	-	211.319.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	15022ekor 71827ekor 49845ekor 2210ekor 4750ekor	250.000.000,00	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor	9 Ekor	211.319.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	100 Ekor	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	479.090.770,00					-	990.000.000,00	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100%	-	33.679.720,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	100%	35.000.000,00	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	9 Laporan	3 Laporan	33.679.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Laporan	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota											
						Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	- Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	1050Meter 1050meter	-	445.411.050,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	350Meter 350meter	955.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	1 Unit	166.533.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Unit	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya											
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	1 Unit	18.999.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Unit	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya											
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	10 Unit	124.877.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Unit	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani											
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	9 Unit	1 Unit	104.999.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Unit	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan											
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	141.382.225,00					-	230.000.000,00	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	90%	-	60.051.600,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	90%	100.000.000,00	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	4 Laporan	60.051.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan	-	10500ekor	-	52.350.725,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan,	3500ekor	80.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium											
						Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	2.999.225,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	49.351.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	2UPH	-	28.979.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	2UPH	50.000.000,00	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan											
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	4 Laporan	23.979.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan											
						Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	9 Unit Usaha	1 Unit Usaha	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	3 Unit Usaha	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	75.000.000,00					-	100.000.000,00	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	1jenis	-	75.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	1jenis	100.000.000,00	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Ha	30 Ha	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	35 Ha	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	46.868.750,00					-	100.000.000,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	6klmpk/wkpp 5%	-	46.868.750,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber	6klmpk/wkpp 5%	100.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													daya lokal			
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa											
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	36.868.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	4 Unit	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit	170 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	170 Unit	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.444.330,00						5.371.360.906,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.088.444.330,00						5.371.360.906,00	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.444.330,00						5.371.360.906,00	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.965.070.210,00					-	5.151.361.346,00	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	4.328.428.952,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	4.328.428.956,00	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.328.428.952,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	24 Orang/bulan	4.328.428.956,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	18.950.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	34.050.000,00	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	45 Paket	14.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	1 Orang	8.950.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	15 Orang	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	131.032.775,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	204.622.700,00	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	865.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	871.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.256.175,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	69.532.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.862.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	16.632.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.071.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	16.092.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.978.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	101.494.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90%	-	15.910.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90%	32.156.580,00	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	15.910.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	9.287.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		22.869.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95%	-	334.412.883,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	95%	335.482.710,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													komunikasi yang terintegrasi			
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.552.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.865.751,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	96.867.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237.047.132,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	237.063.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90%	-	136.335.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90%	216.620.400,00	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	101.335.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Unit	121.966.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Unit	47.327.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		47.327.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	86.291.720,00					-	160.749.380,00	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	100%	-	10.725.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	21.594.650,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	10.725.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	21.594.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	100%	-	56.685.720,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	124.550.580,00	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan											
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	56.685.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	124.550.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	12Laporan	-	18.880.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Laporan	14.604.150,00	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	10 Dokumen	18.880.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Dokumen	14.604.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	17.738.600,00					-	24.246.420,00	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	1Laporan	-	17.738.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Laporan	24.246.420,00	
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam											
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/K	1 Laporan	1 Laporan	8.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	9.139.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam										
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil											
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	4.118.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	6.416.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil											
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	5.311.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	8.690.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	3.568.800,00					-	3.928.760,00	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	100%	-	3.568.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	3.928.760,00	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan											
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.568.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	3.928.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	15.775.000,00					-	31.075.000,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	100%	-	15.775.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	31.075.000,00	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	15.775.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	31.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					DINAS PERHUBUNGAN				9.379.856.122,00						9.487.033.455,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.656.385.854,00						8.691.142.254,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				8.656.385.854,00						8.691.142.254,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.038.941.754,00					-	8.021.442.252,00	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	13bulan	-	3.891.011.729,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	13bulan	4.280.112.901,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	30/14 Orang/bulan	3.891.011.729,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	14 Orang/bulan	4.280.112.901,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100bulan	-	5.100.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	100bulan	11.000.000,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	2 Orang	5.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	15 Orang	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100bulan	-	32.042.025,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	100bulan	74.029.351,00	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.599.525,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Paket	20.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	1.987.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.945.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Paket	7.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Paket	8.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	12 Laporan	11.510.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Laporan	32.829.351,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Konsultasi SKPD										
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1bulan	-	0,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1bulan	2.200.000,00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Unit	2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12bulan	-	4.068.288.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12bulan	3.596.900.000,00	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Laporan	1.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.067.788.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Laporan	3.595.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1bulan	-	42.500.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1bulan	57.200.000,00	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	12 Unit	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	3 Unit	2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3 Unit	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	579.444.100,00					-	559.700.001,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	85%	-	520.844.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	85%	427.700.001,00	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	1 Unit	110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	85 Unit	1 Unit	210.097.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	85 Unit	110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan											
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200 Unit	12 Unit	48.195.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	200 Unit	73.480.001,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	76 Unit	12 Unit	262.551.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	76 Unit	354.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	70%	-	25.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	70%	55.000.000,00	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
						Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12 Unit	1500 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12 Unit	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	3%	-	33.600.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	3%	77.000.000,00	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K	0 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0 Laporan	77.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ota										
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-	-	38.000.000,00					-	110.000.001,00	
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	38.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-	110.000.001,00	
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Laporan	38.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		110.000.001,00	DINAS PERHUBUNGAN
X					NON URUSAN				723.470.268,00						795.891.201,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				723.470.268,00						795.891.201,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	723.470.268,00					-	795.891.201,00	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12bulan	-	723.470.268,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	12bulan	795.891.201,00	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	12 Laporan	723.470.268,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	14 Laporan	795.891.201,00	DINAS PERHUBUNGAN
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.329.670.434,00						6.816.759.012,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.329.670.434,00						6.816.759.012,00	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.252.261.734,00						6.718.784.635,00	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.038.818.434,00					-	5.320.804.160,00	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100Persen	-	1.723.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persen	4.000.000,00	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	1.723.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100Persen	-	3.423.634.688,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	100Persen	4.480.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	490 Orang/bulan	3.423.634.688,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	35 Orang/bulan	4.480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100Persen	-	14.320.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persen	17.000.000,00	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	3 Orang	14.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	15 Orang	17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100Persen	-	148.944.405,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persen	299.000.000,00	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	2.748.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	3 Paket	35.844.105,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Paket	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	4 Paket	14.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	10.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	36 Laporan	40 Laporan	84.844.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Konsultasi SKPD										
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100Persen	-	378.298.341,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persen	393.804.160,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	54.994.181,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	322.804.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	322.804.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100Persen	-	71.898.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persen	127.000.000,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	2 Unit	58.998.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	10 Unit	7.980.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	30 Unit	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	4.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	-	268.119.700,00					-	383.493.394,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	85Persen	-	268.119.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	85Persen	383.493.394,00	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media											
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		25 Laporan	193.490.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		279.269.248,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		37 Komunitas	4.550.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		5 Permohonan	3.159.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		7.111.541,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		2 Rekomendasi	3.345.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		8.473.490,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		1 Media	45.630.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		1 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		1.416.763,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten											
						Jumlah Konten Informasi Publik		5 Konten	17.943.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		22.883.070,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		1 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		1.339.282,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	945.323.600,00					-	1.014.487.081,00	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	85Persen	-	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	85Persen	1.951.311,00	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa											
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		1.951.311,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	85Persen	-	945.323.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	85Persen	1.012.535.770,00	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda											
						Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1 Laporan	3.699.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		5.305.189,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah											
						Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		1 Dokumen	1.668.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		3.222.525,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		2 Aplikasi	2.390.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		8.409.221,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		27 Perangkat Daerah	4.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		6.204.429,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas											
						Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		1 Program	3.829.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		10.016.949,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											
						Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan		1 Aplikasi	3.346.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		6.143.896,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE											
						Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		27 Perangkat Daerah	926.289.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		973.233.561,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				61.115.150,00						75.350.157,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	61.115.150,00					-	75.350.157,00	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	3Buku	-	61.115.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3Buku	75.350.157,00	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		2 Orang	7.326.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		9.246.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional											
						Persentase Perangkat Daerah yang		100 Persentase	46.306.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		56.565.236,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			INFORMATIKA
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia											
						Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1 Dokumen	7.482.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		9.538.253,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				16.293.550,00						22.624.220,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	16.293.550,00					-	22.624.220,00	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	20Persen	-	13.838.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20Persen	18.214.361,00	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dokumen	1 Dokumen	1.112.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	1.168.383,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	1 Laporan	8.080.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	8.484.549,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	1 Laporan	1.712.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	3.538.405,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	84 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.933.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Perangkat Daerah	5.023.024,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	20Persen	-	2.454.850,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20Persen	4.409.859,00	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	84 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.454.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Perangkat Daerah	4.409.859,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				9.296.328.859,00						13.065.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.990.342.184,00						11.765.000.000,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.990.342.184,00						11.765.000.000,00	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.769.502.184,00					-	11.345.000.000,00	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.805.151.469,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	7.615.000.000,00	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		42 Orang/bulan	6.805.151.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		7.615.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	1.300.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	220.000.000,00	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	358.384.315,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	910.000.000,00	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	2.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	245.451.515,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	13.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	9.572.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	87.260.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.482.366.800,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	2.155.000.000,00	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	292.816.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah		12 Laporan	1.189.450.000,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan		1.850.000.000,00	DINAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	122.299.600,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	445.000.000,00	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	118.080.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	249.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		22 Unit	3.970.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	-	19.940.000,00					-	120.000.000,00	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.940.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	120.000.000,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		35 Unit Usaha	19.940.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	200.900.000,00					-	300.000.000,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	-	-	-	200.900.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	300.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		20 Unit Usaha	200.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				305.986.675,00						1.300.000.000,00	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				143.126.100,00						800.000.000,00	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	110.399.800,00					-	500.000.000,00	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	110.399.800,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	500.000.000,00	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		50 Unit	110.399.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-	13.126.300,00					-	100.000.000,00	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	13.126.300,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	100.000.000,00	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	13.126.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	19.600.000,00					-	200.000.000,00	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.600.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	200.000.000,00	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal											
						Jumlah Pelaku Usaha yang		4 Pelaku Usaha	19.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				Kecamatan, Semua Kel/Desa			perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				162.860.575,00						500.000.000,00	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	162.860.575,00					-	500.000.000,00	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	162.860.575,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-	500.000.000,00	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		6 Dokumen	106.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2 Dokumen	56.560.575,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				5.829.663.447,00						5.938.619.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.829.663.447,00						5.938.619.000,00	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.669.707.247,00						5.738.619.000,00	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.218.996.367,00					-	5.267.619.000,00	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95%	-	4.282.038.967,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	95%	4.300.000.000,00	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.282.038.967,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	26 Orang/bulan	4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	80%	-	125.659.692,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80%	105.619.000,00	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.618.692,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	15.619.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.040.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.999.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.002.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%	-	761.358.108,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80%	802.000.000,00	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	288.250.416,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	471.107.692,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	49.939.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	60.000.000,00	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	14 Unit	20.009.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Unit	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	10.010.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	20 Unit	19.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80 Unit	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	15.410.980,00					-	25.000.000,00	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	100%	-	15.410.980,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	25.000.000,00	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6 Dokumen	1 Dokumen	15.410.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-	199.300.000,00					-	210.000.000,00	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	30% 85%	-	199.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	30% 85%	210.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													komunikasi yang terintegrasi			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	480 Orang	32 Orang	194.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	160 Orang	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											
						Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	4 Lembaga	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Lembaga	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	235.999.900,00					-	236.000.000,00	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	85%	-	235.999.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	85%	236.000.000,00	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	235.999.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	236.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				159.956.200,00						200.000.000,00	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	159.956.200,00					-	200.000.000,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	-	159.956.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	200.000.000,00	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	0 Dokumen	1 Dokumen	159.956.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan										
					DINAS KEBUDAYAAN				5.352.848.230,00						5.874.350.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.352.848.230,00						5.874.350.000,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.352.848.230,00						5.874.350.000,00	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.863.892.230,00					-	5.710.350.000,00	
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.578.529.363,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	4.320.000.000,00	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35/14 Orang/bulan	3.578.529.363,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		4.320.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	80.669.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	56.750.000,00	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4.650.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		3.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		8.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	70.019.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.147.671.067,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	1.236.000.000,00	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan		12 Laporan	235.996.849,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		255.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Aur Mulio			Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			
2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	14.999.650,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		16.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	896.674.568,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		965.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	57.022.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	97.600.000,00	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	47.922.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		85.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	6.100.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		8.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		3.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	75.000.000,00					-	25.000.000,00	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	75.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	25.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		2 Objek	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-	334.000.000,00					-	55.000.000,00	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	334.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	55.000.000,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga	334.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	30.000.000,00					-	31.500.000,00	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	30.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	31.500.000,00	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya											
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		2 Objek	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		31.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	-	49.956.000,00					-	52.500.000,00	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	49.956.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-	52.500.000,00	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		5 Unit	49.956.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.432.652.286,00						4.730.980.785,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.432.652.286,00						4.730.980.785,00	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.376.663.486,00						4.637.980.785,00	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.816.903.586,00					-	4.364.480.985,00	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.248.345.137,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	3.735.596.917,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	3.248.345.137,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		3.735.596.917,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.960.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	11.454.000,00	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	9.960.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		11.454.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	104.234.120,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	119.073.392,00	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2.150.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		2.472.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	33.671.620,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		38.721.972,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	6.837.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		9.641.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	13.643.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		19.442.590,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		6.265.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						yang Disediakan										
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	47.932.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		42.529.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	341.749.529,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	393.019.176,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		1.725.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	137.743.776,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		158.405.342,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	202.505.753,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		232.888.834,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	112.614.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	105.337.500,00	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	105.764.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		97.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		19 Unit	6.850.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		8.337.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN	-	-	-	559.759.900,00					-	273.499.800,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PERPUSTAKAAN											
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.834.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-	83.499.800,00	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		20 Perpustakaan	2.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		2 Perpustakaan	4.326.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		5.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		500 Eksemplar	14.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		62.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	538.925.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-	190.000.000,00	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		2 Perpustakaan	5.399.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah sarana Perpustakaan yang		2 Perpustakaan	510.840.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Semua Kel/Desa			peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		21 Orang	9.079.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		37 Lokus	13.605.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				55.988.800,00						93.000.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	-	42.489.400,00					-	71.000.000,00	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	21.499.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	36.000.000,00	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis											
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		10 Berkas	11.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Laporan	9.999.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.999.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	15.000.000,00	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis											
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		250 Arsip	8.999.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul	-	-	-	11.989.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola	-	20.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN											
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		10 Pengguna	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	5.989.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	13.499.400,00					-	22.000.000,00	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-	7.499.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	10.000.000,00	
2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana											
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		100 Arsip	7.499.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	-	5.999.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	12.000.000,00	
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip											
						Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		100 Arsip	5.999.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				9.040.268.599,00						12.308.610.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.123.410.391,00						11.395.510.000,00	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.123.410.391,00						11.395.510.000,00	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	5.520.410.391,00					-	6.345.510.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					KABUPATEN/KOTA											
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12Bulan	-	3.280.454.684,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12Bulan	3.800.000.000,00	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	100% Orang/bulan	3.280.454.684,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	322 Orang/bulan	3.800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12Bulan	-	233.454.100,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12Bulan	264.510.000,00	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100% Paket	5.010.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Paket	5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100% Paket	79.452.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Paket	99.300.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100% Paket	38.338.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Paket	44.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100% Paket	11.553.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Paket	12.710.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	12 Laporan	99.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	350 Laporan	103.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12Bulan	-	1.868.102.007,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12Bulan	2.076.000.000,00	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12 Laporan	74.973.912,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata	12 Laporan	76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			OLAHRAGA
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.793.128.095,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12Bulan	-	138.399.600,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12Bulan	205.000.000,00	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	15 Unit	89.639.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	16 Unit	141.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	12 Unit	13.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	12 Unit	28.760.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	1 Unit	38.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	15 Unit	13.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	145.000.000,00					-	1.150.000.000,00	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	1Orang	-	97.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	1Orang	1.150.000.000,00	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota											
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat		20 Orang	77.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				Kecamatan, Semua Kel/Desa			dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			OLAHRAGA
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda											
						Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		800 Orang	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		4 Orang	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1Organisasi	-	48.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Organisasi	0,00	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota											
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		10 Organisasi	48.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	1.383.000.000,00					-	3.700.000.000,00	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	0Unit	-	478.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	0Unit	0,00	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota											
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		5 Unit	478.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100Orang	-	245.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	100Orang	150.000.000,00	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											
						Jumlah Kejuaraan		1 Kegiatan	175.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA,

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		0 Orang	70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	100Orang	-	460.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	100Orang	3.250.000.000,00	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga		150 Orang	175.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											
						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		150 Orang	285.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	8Kegiatan	-	200.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	8Kegiatan	300.000.000,00	
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan											
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1 Laporan	200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	75.000.000,00					-	200.000.000,00	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2Organisasi	-	75.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	2Organisasi	200.000.000,00	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	2 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	2 Organisasi	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kapasitasnya										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.916.858.208,00						913.100.000,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.916.858.208,00						913.100.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	1.423.258.208,00					-	0,00	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	1Destinasi	-	0,00			-	-	1Destinasi	0,00	
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	2Kawasan	-	190.000.000,00			-	-	2Kawasan	0,00	
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit	0 Unit	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	0 Laporan	170.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	4 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	3Destinasi	-	1.193.258.208,00			-	-	3Destinasi	0,00	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	0 Unit	1.193.258.208,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	10Dokumen	-	40.000.000,00			-	-	10Dokumen	0,00	
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota											
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kel/Desa						
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	443.600.000,00					-	748.000.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	160000Orang	-	443.600.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	160000Orang	748.000.000,00	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri											
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	7 Dokumen	33.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	5 Kegiatan	660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	10 Promosi	43.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	10 Promosi	55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	0,00					-	12.800.000,00	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	40Orang	-	0,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	40Orang	12.800.000,00	
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	4 Laporan	12.800.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	50.000.000,00					-	152.300.000,00	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	20Orang	-	30.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	20Orang	136.200.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	1 Laporan	136.200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	2Orang	-	20.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	2Orang	16.100.000,00	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	0 Orang	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	20 Orang	16.100.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					SEKRETARIAT DAERAH				34.457.174.994,00						33.120.110.891,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.457.174.994,00						33.120.110.891,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				34.457.174.994,00						33.120.110.891,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)	100 %	100 %	24.712.532.924,00					100 %	23.383.479.423,00	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12bulan	12 bulan	4.508.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	4.340.000,00	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	1.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.568.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	2.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12bulan	12 bulan	11.765.949.042,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	12.338.481.013,00	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1232 Orang/bulan	1232 Orang/bulan	11.744.184.042,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1232 Orang/bulan	12.315.607.013,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	17.835.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	21.316.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.930.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.558.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	12bulan	12 bulan	59.508.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	143.000.000,00	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	59.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	30 Orang	143.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum	Tersedianya	12bulan	12 bulan	2.391.648.620,00			Memperk	Meningkatkan kualitas tata kelola	12bulan	2.594.460.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perangkat Daerah	sarana dan prasarana administrasi						uat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.188.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	189.033.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	313.841.240,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	108.685.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1.739.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		1.916.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	35Unit	-	2.835.434.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	35Unit	200.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	2.604.608.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	20 Unit	230.826.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	35 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12bulan	12 bulan	2.257.515.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	2.370.623.524,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	707.152.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	757.252.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1 Laporan	1.545.362.820,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Laporan	1.595.370.724,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12bulan	12 bulan	1.761.964.500,00			-	-	12bulan	1.933.350.000,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		17 Unit	611.594.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		611.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170 Unit	95 Unit	426.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	170 Unit	591.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	250 Unit	129.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	250 Unit	130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	594.550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Unit	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12bulan	12 bulan	1.429.409.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	1.489.781.280,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	581.709.760,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Orang/Bulan	618.681.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	379.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	399.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	7 Orang	68.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7 Orang	71.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	24 Orang/Bulan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	12bulan	12 bulan	643.766.932,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12bulan	703.775.740,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	354.378.552,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	384.379.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	289.388.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	319.395.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun	27OPD 2Laporan	27 OPD 2 Laporan	195.562.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	27OPD 2Laporan	213.000.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	24.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhnkam Dan Transformasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Pelayanan Publik				
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		3 Laporan	90.230.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		97.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	80.632.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	12Laporan	12 Laporan	1.367.265.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Laporan	1.392.667.866,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	1.046.257.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.067.057.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	150.603.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	150.610.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan											
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	170.405.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100% 100% 700Orang 6,58Milyar Rupiah	100 % 6,17 Milyar Rupiah 650 Orang	9.405.084.600,00					100% 100% 700Orang 6,58Milyar Rupiah	9.199.631.468,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)										
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90%	85 %	363.750.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90%	432.000.000,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan											
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	41.813.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 Dokumen	6 Dokumen	137.447.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	184.490.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	90% 80% 90%	80 % 85 % 75 %	8.714.166.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90% 80% 90%	8.411.631.468,00	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	6 Dokumen	6 Dokumen	1.346.768.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Dokumen	1.346.769.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Spiritual						Transformasi Pelayanan Publik				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial											
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	5.915.357.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Dokumen	6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	1.452.040.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Dokumen	1.064.861.968,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	90%	85 %	232.167.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	90%	256.000.000,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											
						Jumlah Produk Hukum	300 Dokumen	300 Dokumen	27.355.760,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	300 Dokumen	49.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah yang Disusun				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Polhukhanakam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum											
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus	150.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanakam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Kasus	152.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum											
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	300 Dokumen	54.011.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanakam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	300 Dokumen	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah	95%	90 %	95.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanakam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	95%	100.000.000,00	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanakam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase kebijakan Perekonomian	96% 0,37Rasio 67% 0% 100%	0 % 0,36 Rasio 100 % 66 % 94 %	339.557.470,00					96% 0,37Rasio 67% 0% 100%	537.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)										
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	100% 100%	100 % 100 %	114.399.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100% 100%	210.000.000,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	94.091.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	20.307.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Laporan	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%) Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang	100% 100% 100%	90 % 98 % 90 %	24.172.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100% 100% 100%	85.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						berkualitas										
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2.988.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	14.884.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan											
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	6.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK	100% 4level 4Laporan 650paket	4 level 4 Laporan 625 paket 100 %	188.582.640,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100% 4level 4Laporan 650paket	213.000.000,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	650 Dokumen	625 Dokumen	9.880.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	650 Dokumen	11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Publik				
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	87.454.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	285 Orang	95 Orang	91.248.440,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100 Orang	112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air	100%	100 %	12.403.110,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	29.000.000,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	6.023.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.299.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian										
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.080.630,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					SEKRETARIAT DPRD				21.289.551.233,00						26.287.000.000,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				21.289.551.233,00						26.287.000.000,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				21.289.551.233,00						26.287.000.000,00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	15.905.378.233,00					-	15.801.500.000,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	10.750.100.734,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	12.000.000.000,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40/14 Orang/bulan	10.750.100.734,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	40 Orang/bulan	12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	9.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	33.000.000,00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	9.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Orang	33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	657.227.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	847.000.000,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera	6 Paket	2 Paket	11.687.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan	2 Paket	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				Semua Kel/Desa			melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	30.766.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	212.274.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Paket	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	217.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Paket	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Dokumen	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	150 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	150 Laporan	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	2.258.910.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	175.000.000,00	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2.108.910.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	100%	-	957.842.499,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	1.029.500.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemerintahan Daerah								yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	235.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	25.692.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	47.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	693.999.999,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	720.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	455.670.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	765.000.000,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 Unit	339.430.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	22.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	37.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	86.240.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	100%	-	285.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	390.000.000,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Orang	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	100%	-	530.727.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	562.000.000,00	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	36 Laporan	0 Laporan	13.920.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	360 Laporan	120 Laporan	270.130.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	120 Laporan	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	246.677.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	5.384.173.000,00					-	10.485.500.000,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	100%	-	130.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	157.500.000,00	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											
						Jumlah Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	8 Dokumen	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dokumen	10 Dokumen	110.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Dokumen	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	5Dokumen	-	220.710.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5Dokumen	293.000.000,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	5 Dokumen	178.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	1 Dokumen	42.610.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	63.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	100%	-	1.058.163.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	1.705.000.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	360 Dokumen	6 Dokumen	900.043.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	120 Dokumen	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2 Dokumen	13.420.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	20 Dokumen	144.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	100%	-	225.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	330.000.000,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
						Jumah	180	60 Dokumen	225.300.000,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas tata kelola	60 Dokumen	330.000.000,00	SEKRETARIAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen			Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	100%	-	3.750.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	8.000.000.000,00	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1296 Dokumen	432 Dokumen	2.249.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	432 Dokumen	6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12 Dokumen	1.500.190.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6.883.214.171,00						7.208.062.753,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.883.214.171,00						7.208.062.753,00	
5	01				PERENCANAAN				545.295.010,00						622.262.753,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.452.000,00					-	55.000.000,00	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	13.452.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	55.000.000,00	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	13.452.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Unit	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	336.366.100,00					-	352.000.000,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	9dokumen	-	315.961.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2dokumen	327.000.000,00	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	6 Dokumen	3 Dokumen	63.682.520,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik											
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	2 Berita Acara	40.501.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Berita Acara	42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	2 Berita Acara	88.749.960,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Berita Acara	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	3 Dokumen	123.028.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3dokumen	-	7.628.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1dokumen	10.000.000,00	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	27 Orang	27 Orang	7.628.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	27 Orang	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	92%	-	12.776.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	92%	15.000.000,00	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1 Laporan	12.776.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	195.476.910,00					-	215.262.753,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	9dokumen	-	54.464.070,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2dokumen	61.500.000,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	9 Dokumen	3 Dokumen	8.231.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	9.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	9.466.330,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	4 Laporan	10.834.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	14.149.910,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	7.927.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	3.854.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan	-	9dokumen	-	69.835.230,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola	2dokumen	93.762.753,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	14.109.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	15.520.505,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	13.476.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Laporan	14.827.776,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	12.915.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Laporan	14.206.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	11.620.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	12.782.198,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	3 Laporan	10.457.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Laporan	11.503.470,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
						Jumlah Laporan Hasil	4 Laporan	3 Laporan	7.256.640,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	4 Laporan	7.982.304,00	BADAN PERENCANAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	16.940.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	9dokumen	-	71.177.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2dokumen	60.000.000,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	17.637.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	20.167.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Laporan	21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	10.328.480,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Laporan	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	9 Dokumen	3 Dokumen	7.578.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	9.334.730,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	6.131.300,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Laporan	7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03				KEPEGAWAIAN				6.221.433.161,00						6.465.800.000,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.221.433.161,00					-	6.465.800.000,00	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	-	2.620.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	3.000.000,00	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.620.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	5.414.277.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	5.600.000.000,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.414.277.445,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	40 Orang/bulan	5.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	20.000.000,00	
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah	80 Orang	30 Orang	50.000.000,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas tata kelola	24 Orang	20.000.000,00	BADAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	375.290.940,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	445.900.000,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	9.872.625,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Paket	9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	88.696.515,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	22.882.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Paket	22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	253.839.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	171.480.776,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	185.400.000,00	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	2.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan	36 Laporan	12 Laporan	49.014.944,00	Kota Sawahlunto, Barangin,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	12 Laporan	51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Lubang Panjang			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	120.065.832,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	207.764.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	211.500.000,00	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	13 Unit	188.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	21 Unit	192.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.914.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	40 Unit	14.350.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	23 Unit	14.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				116.486.000,00						120.000.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	116.486.000,00					-	120.000.000,00	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	3dokumen	-	116.486.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1dokumen	120.000.000,00	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	1 Laporan	116.486.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah yang Bersifat Inovatif										
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				78.152.957.818,00						90.471.172.219,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				78.152.957.818,00						90.471.172.219,00	
5	02				KEUANGAN				78.152.957.818,00						90.471.172.219,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.121.129.839,00					-	9.914.482.927,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	-	9.435.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	15.531.285,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	4.930.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	9.292.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	3.290.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	1.772.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	12 Laporan	1.120.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.176.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95%	-	6.349.296.144,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	95%	6.191.701.404,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang	165	48	6.349.296.144,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas tata kelola	55 Orang/bulan	6.191.701.404,00	BADAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100%	-	2.030.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	2.682.645,00	
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2.030.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	2.682.645,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	20Orang	-	144.360.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20Orang	203.691.600,00	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	2 Dokumen	64.360.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	100.791.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	0 Orang	80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Orang	102.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	80%	-	556.535.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80%	692.662.194,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	13.594.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	20.561.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	83.632.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	99.965.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik	36 Paket	12 Paket	66.274.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	12 Paket	75.579.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	89.343.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	99.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	301.832.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	393.523.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	1.860.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	3.282.594,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	5.680.950,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	1.659.000.000,00	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	4 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Unit	1.575.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4 Unit	5.680.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Unit	52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80%	-	833.126.145,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80%	874.861.609,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	5.775.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan	36 Laporan	12 Laporan	82.498.629,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Laporan	86.623.560,00	BADAN PENGELOLAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	745.127.516,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	782.463.049,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	220.665.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	274.352.190,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 Unit	23 Unit	144.675.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	23 Unit	178.319.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	9.910.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Unit	10.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105 Unit	35 Unit	66.080.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	35 Unit	85.533.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	69.194.437.577,00					-	79.599.542.590,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	78%	-	873.006.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	78%	964.951.628,00	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	15.410.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	18.397.365,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
						Jumlah Dokumen Perubahan	6 Dokumen	2 Dokumen	11.029.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	2 Dokumen	13.339.988,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	24 Dokumen	28 Dokumen	15.471.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Dokumen	21.457.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	336 Dokumen	112 Dokumen	11.707.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	112 Dokumen	15.326.745,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	7.812.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Dokumen	10.760.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	336 Dokumen	112 Dokumen	16.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	112 Dokumen	22.784.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	375.964.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	402.122.070,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	15 Dokumen	5 Dokumen	376.264.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	400.909.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30 Dokumen	10 Dokumen	9.246.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Dokumen	15.094.695,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	720 Orang	240 Orang	34.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	240 Orang	44.758.140,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemerintah Kabupaten/Kota										
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	78%	-	154.523.090,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	78%	225.377.745,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	14.361.730,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	24.537.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dokumen	8 Dokumen	6.311.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	78 Dokumen	9.843.435,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	330 Dokumen	70 Dokumen	27.749.510,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	110 Dokumen	42.595.676,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9 Dokumen	1 Dokumen	14.646.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	18.378.938,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	36 Laporan	12 Laporan	10.041.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	16.866.129,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen	12 Dokumen	9.105.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	13.864.935,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30 Dokumen	8 Dokumen	42.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Dokumen	53.360.580,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	720 Orang	108 Orang	30.307.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	240 Orang	45.930.728,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kabupaten/Kota										
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	100%	-	114.632.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	169.952.265,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 Laporan	2 Laporan	7.677.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	11.017.860,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	393 Dokumen	131 Dokumen	8.204.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	131 Dokumen	13.138.230,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	84 Laporan	28 Laporan	2.270.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Laporan	3.527.790,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	15 Dokumen	5 Dokumen	42.408.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	67.766.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Ti	3 Dokumen	1 Dokumen	8.257.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Dokumen	12.779.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ndak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	5.625.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Dokumen	8.725.710,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	9.380.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		14.680.155,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	450 Orang	120 Orang	30.808.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	150 Orang	38.316.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100%	-	67.998.976.187,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	78.181.405.952,00	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	1.250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	36 Laporan	12 Laporan	62.101.339.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	65.206.405.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Keuangan										
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	36 Laporan	12 Laporan	3.430.622.187,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	10.447.134.252,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota											
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	36 Laporan	12 Laporan	1.217.015.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.277.865.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	100%	-	53.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	57.855.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	53.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	57.855.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	409.210.736,00					-	472.095.834,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	95%	-	409.210.736,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	95%	472.095.834,00	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	28.740.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	45.572.688,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	22.474.780,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	33.860.516,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	54 Laporan	3 Laporan	23.671.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	18 Laporan	27.912.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	36 Laporan	6 Laporan	85.685.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan	12 Laporan	91.561.743,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah				Semua Kel/Desa			melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAERAH
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	199.627.096,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	215.743.022,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84 Laporan	28 Laporan	22.944.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Laporan	27.830.145,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	195 Orang	65 Orang	26.068.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	65 Orang	29.614.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	428.179.666,00					-	485.050.868,00	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	12,43%	-	428.179.666,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12,43%	485.050.868,00	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	5.318.340,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	8.475.248,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	10.037.930,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	12.684.957,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	1 Laporan	24.560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	25.954.163,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
						Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit	2 Unit	10.863.700,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	2 Unit	46.775.878,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pengelolaan Pajak Daerah				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan	12 Laporan	52.410.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	56.447.339,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1 Laporan	29.925.870,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	32.242.856,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	24.245.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	500 Obyek Pajak	27.562.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	111 Dokumen	37 Dokumen	39.012.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	37 Dokumen	19.613.239,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	36 Layanan	12 Layanan	11.229.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Layanan	14.176.260,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah											
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	400 Dokumen	29.550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	400 Dokumen	31.032.421,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	170.393.196,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	179.690.402,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	7.100.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	10.732.397,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	6 Laporan	2 Laporan	6.873.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	2 Laporan	10.580.708,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pengelolaan Retribusi Daerah				Kel/Desa			komunikasi yang terintegrasi			
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9 Laporan	3 Laporan	6.658.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Laporan	9.082.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.080.946.140,00						6.961.115.679,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.080.446.140,00						6.960.540.679,00	
5	03				KEPEGAWAIAN				6.080.446.140,00						6.960.540.679,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.834.059.660,00					-	5.592.736.229,00	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100persen	-	4.409.645.691,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	5.090.532.517,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.409.645.691,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	30 Orang/bulan	5.090.532.517,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100persen	-	98.926.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	111.471.800,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1.002.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	5 Paket	1.152.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	50 Paket	20.676.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	80 Paket	23.777.630,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	12.383.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	50 Paket	20.344.995,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7.562.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	8.696.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	57.302.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	80 Laporan	57.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	246.637.969,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	283.636.149,00	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	39.999.851,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	36 Laporan	45.999.914,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	206.638.118,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	12 Laporan	237.636.235,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	78.849.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	107.095.763,00	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	76.649.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	10 Unit	104.565.763,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	8 Unit	2.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	28 Unit	2.530.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	1.246.386.480,00					-	1.367.804.450,00	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	95persen 100persentase	-	23.419.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	95persen 100persentase	33.936.900,00	
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,	12 Laporan	12 Laporan	23.419.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui	12 Laporan	33.936.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				Semua Kel/Desa			peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			AN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	95persen 100persentase	-	105.960.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	95persen 100persentase	133.795.200,00	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	105.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	4 Dokumen	133.795.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	100persentase 95persen	-	1.043.189.080,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persentase 95persen	1.102.739.450,00	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center											
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	97.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	1 Dokumen	109.934.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	45 Dokumen	2 Dokumen	647.485.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	45 Dokumen	679.859.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	298.044.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2 Dokumen	312.946.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	95persen 100persentase	-	73.818.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	95persen 100persentase	97.332.900,00	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2150 Dokumen	2395 Dokumen	38.854.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2150 Dokumen	55.064.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	150 Orang	18.224.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100 Orang	20.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	52 Orang	15 Orang	16.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	52 Orang	21.793.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X					NON URUSAN				500.000,00						575.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				500.000,00						575.000,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	500.000,00					-	575.000,00	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen	-	500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	100persen	575.000,00	
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	120 Laporan	575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					INSPEKTORAT				7.001.430.647,00						8.610.291.993,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.001.430.647,00						8.610.291.993,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				7.001.430.647,00						8.610.291.993,00	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.783.074.747,00					-	8.505.554.493,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100Persentase	-	6.149.185.857,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persentase	7.391.320.373,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.149.185.857,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	45 Orang/bulan	7.391.320.373,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	156orang	-	85.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	54orang	132.300.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	91 Orang	33 Orang	85.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	33 Orang	132.300.000,00	INSPEKTORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dan Pelatihan										
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12/150Paket /Laporan	-	184.073.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4/50Paket/Laporan	302.050.445,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	5.512.500,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.931.990,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	49.164.917,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	7.032.010,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	8.346.325,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	24.088.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	47.862.330,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	24.780.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	31.255.844,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	50 Laporan	100.241.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	50 Laporan	159.908.529,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	77Unit	-	38.300.410,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11Unit	0,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	38.300.410,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	8 Unit	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	144Laporan	-	146.095.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	48Laporan	273.636.272,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	5.788.125,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	44.540.364,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	41.706.103,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	100.555.416,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	226.142.044,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	49Unit	-	180.419.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	49Unit	406.247.403,00	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	162.539.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	16 Unit	188.171.423,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	5 Unit	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7 Unit	11.025.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	6.980.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	25 Unit	17.792.696,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	157.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	31.758.284,00	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	105.156.100,00					-	49.612.500,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	100Persentase	-	105.156.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100Persentase	49.612.500,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150 Laporan	50 Laporan	52.541.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	50 Laporan	33.075.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	28 Laporan	52.615.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	28 Laporan	16.537.500,00	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	113.199.800,00					-	55.125.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	3,60Persentase BBNilai 85Persentase	-	113.199.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3,60Persentase BBNilai 85Persentase	55.125.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1 Kegiatan	113.199.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Kegiatan	55.125.000,00	INSPEKTORAT
					KECAMATAN BARANGIN				5.842.743.765,00						841.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.839.943.765,00						841.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				5.839.943.765,00						841.000.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.505.144.965,00					-	500.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42Bulan	-	4.954.078.568,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14Bulan	0,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang	42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.954.078.568,00	Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	14 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN BARANGIN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Barangin, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2kegiatan	-	10.820.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang	7.320.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Orang	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36Bulan	-	69.244.385,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	1.251.925,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	23.032.460,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	11.140.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	6.240.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	36 Laporan	12 Laporan	27.580.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BARANGIN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Konsultasi SKPD										
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3Kegiatan	-	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Kegiatan	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	419.961.212,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	430.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	29.998.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	13 Laporan	389.962.912,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	13 Laporan	400.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	51.040.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	70.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	9 Unit	42.186.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	70.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	3.940.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		2 Unit	4.914.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		0,00	KECAMATAN BARANGIN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	12.490.000,00					-	11.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2Kegiatan	-	4.991.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan	11.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	4 Laporan	4.991.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5kegiatan	-	7.498.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Laporan	12 Laporan	7.498.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	292.289.600,00					-	330.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	6kegiatan	-	292.289.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6kegiatan	330.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.495.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	25 Laporan	9 Laporan	284.794.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Laporan	330.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kecamatan										
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	9.991.600,00					-	0,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2kegiatan	-	9.991.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	0,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	4 Laporan	9.991.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	5.890.000,00					-	0,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2kegiatan	-	5.890.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	0,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 Orang	100 Orang	2.494.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	150 Orang	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	100 Orang	3.396.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	150 Orang	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	14.137.600,00					-	0,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	6Kegiatan	-	14.137.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6Kegiatan	0,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Dokumen	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	18 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Dokumen	0,00	KECAMATAN BARANGIN
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	9.993.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BARANGIN
X					NON URUSAN				2.800.000,00						0,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.800.000,00						0,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.800.000,00					-	0,00	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	1.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	0,00	
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	1 Laporan	1.300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BARANGIN
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	1.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	0,00	
X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	100 Unit	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	0,00	KECAMATAN BARANGIN
					KELURAHAN DURIAN 1				424.820.880,00						0,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				424.820.880,00						0,00	
7	01				KECAMATAN				424.820.880,00						0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5kegiatan	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KELURAHAN DURIAN 1
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	324.820.880,00					-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9Kegiatan	-	324.820.880,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9Kegiatan	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	0,00	KELURAHAN DURIAN 1
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.820.880,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN DURIAN 1
					KELURAHAN DURIAN 2				423.728.460,00						0,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				423.728.460,00						0,00	
7	01				KECAMATAN				423.728.460,00						0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5kegiatan	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	36 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	12 Laporan	0,00	KELURAHAN DURIAN 2

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dilimpahkan							komunikasi yang terintegrasi			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	323.728.460,00					-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9Kegiatan	-	323.728.460,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9Kegiatan	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	0,00	KELURAHAN DURIAN 2
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.728.460,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN DURIAN 2
					KELURAHAN LUBANG PANJANG				423.806.730,00						0,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				423.806.730,00						0,00	
7	01				KECAMATAN				423.806.730,00						0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5kegiatan	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KELURAHAN LUBANG PANJANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	323.806.730,00					-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9Kegiatan	-	323.806.730,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9Kegiatan	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	0,00	KELURAHAN LUBANG PANJANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.806.730,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN LUBANG PANJANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						n Masyarakat di Kelurahan										
					KELURAHAN SARINGAN				424.823.240,00						0,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				424.823.240,00						0,00	
7	01				KECAMATAN				424.823.240,00						0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	99.999.880,00					-	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5kegiatan	-	99.999.880,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Laporan	4 Laporan	99.999.880,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	0,00	KELURAHAN SARINGAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	324.823.360,00					-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	9Kegiatan	-	324.823.360,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9Kegiatan	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Unit	0,00	KELURAHAN SARINGAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.823.360,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN SARINGAN
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR				6.804.627.665,00						8.152.322.137,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.804.627.665,00						8.152.322.137,00	
7	01				KECAMATAN				6.804.627.665,00						8.152.322.137,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.474.006.325,00					-	7.680.422.137,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42Bulan	-	5.965.501.774,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14Bulan	6.965.501.774,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.965.501.774,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Orang/bulan	6.965.501.774,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2Kegiatan	-	13.060.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	2Kegiatan	19.660.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	2 Orang	9.560.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Orang	16.160.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36Bulan	-	73.334.355,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	113.778.625,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	975.375,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5 Paket	25.806.980,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	38.778.625,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	11.628.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	4.470.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	4 Laporan	30.454.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	40.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	9Kegiatan	-	728.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	3Kegiatan	20.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													komunikasi yang terintegrasi			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	728.400,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		20.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	346.871.876,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	456.981.738,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	1 Laporan	200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	250.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	29.999.796,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	39.999.870,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	13 Laporan	316.672.080,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	13 Laporan	416.731.868,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	74.509.920,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	104.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	73.840.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Unit	97.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	1 Unit	499.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	70.720,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan	1 Unit	3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dipelihara/Direhabilitasi							komunikasi yang terintegrasi			
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	17.419.200,00					-	24.293.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2Kegiatan 12bulan	-	9.419.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan 12bulan	15.293.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	4 Laporan	9.419.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	15.293.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	8.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	9.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	278.037.740,00					-	401.607.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	5kegiatan	-	278.037.740,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	401.607.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.750.500,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.750.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	9 Laporan	269.287.240,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Laporan	391.857.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	13.760.000,00					-	17.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2kegiatan	-	13.760.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	17.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4 Laporan	13.760.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	17.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	6.998.000,00					-	9.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2kegiatan	-	6.998.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	9.000.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	240 Orang	80 Orang	2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	80 Orang	3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 Orang	75 Orang	4.498.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100 Orang	5.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	14.406.400,00					-	20.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	5Kegiatan	-	14.406.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5Kegiatan	20.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	5 Dokumen	4.816.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	5 Dokumen	2.090.400,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	0 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
					KELURAHAN AIR DINGIN				416.777.800,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				416.777.800,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				416.777.800,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN AIR DINGIN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	316.777.800,00					-	120.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	316.777.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN AIR DINGIN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.777.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN AIR DINGIN
					KELURAHAN AUR MULYO				420.160.100,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				420.160.100,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				420.160.100,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN AUR MULYO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	320.160.100,00					-	120.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	320.160.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN AUR MULYO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	295.160.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN AUR MULYO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan							melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
					KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA				413.231.100,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				413.231.100,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				413.231.100,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	313.231.100,00					-	120.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	313.231.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	288.231.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
					KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN				416.525.700,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				416.525.700,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				416.525.700,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
7	01	03			PROGRAM	-	-	-	316.525.700,00					-	120.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	316.525.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.700,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
					KELURAHAN PASAR				419.673.731,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				419.673.731,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				419.673.731,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	99.999.895,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	99.999.895,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	99.999.895,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN PASAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	319.673.836,00					-	120.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	319.673.836,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN PASAR
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	294.673.836,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN PASAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Lembah Segar, Pasar						
					KELURAHAN TANAH LAPANG				416.525.300,00						320.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				416.525.300,00						320.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				416.525.300,00						320.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	100.000.000,00					-	200.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7Kegiatan 1tahun	-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	7Kegiatan 1tahun	200.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN TANAH LAPANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	316.525.300,00					-	120.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	12kegiatan	-	316.525.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12kegiatan	120.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	35.000.000,00	KELURAHAN TANAH LAPANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.300,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	48 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	KELURAHAN TANAH LAPANG
					KECAMATAN SILUNGKANG				2.566.847.327,00						2.982.083.800,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.566.847.327,00						2.982.083.800,00	
7	01				KECAMATAN				2.566.847.327,00						2.982.083.800,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.202.882.067,00					-	2.794.783.800,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42Bulan	-	1.884.556.144,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14Bulan	2.200.000.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	266 Orang/bulan	1.884.556.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Silungkang,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Orang/bulan	2.200.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa						
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2Kegiatan	-	9.860.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan	36.500.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	2 Orang	6.360.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Orang	30.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36Bulan	-	65.717.475,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	147.700.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	1.015.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5 Paket	29.177.225,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	44.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	11.579.250,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	27.400.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	6.900.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	19.800.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	4 Laporan	17.046.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	205.468.448,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	265.383.800,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	29.977.200,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	41.800.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	13 Laporan	174.991.248,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	222.483.800,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Bulan	-	37.280.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	145.200.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	8 Unit	35.070.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Unit	72.600.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	9 Unit	2.210.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	6 Unit	72.600.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	16.321.660,00					-	38.500.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	3kegiatan 36bulan 2Kegiatn	-	8.040.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1kegiatan 12bulan 2Kegiatn	22.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah	12 Laporan	4 Laporan	8.040.000,00	Kota	DANA TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas tata kelola	4 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			SILUNGKANG
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1Kegiatan	-	8.281.660,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Kegiatan	16.500.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	4 Laporan	8.281.660,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	309.810.600,00					-	86.600.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	5kegiatan	-	309.810.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5kegiatan	86.600.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	9 Laporan	303.210.600,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	6.000.000,00					-	16.500.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2Kegiatan	-	6.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan	16.500.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	6 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan	2 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Kel/Desa			melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	20.053.000,00					-	22.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2kegiatan	-	20.053.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2kegiatan	22.000.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	750 Orang	250 Orang	20.053.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	250 Orang	22.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	11.780.000,00					-	23.700.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	5Kegiatan	-	11.780.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5Kegiatan	23.700.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	15 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	7.700.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Tata Pemerintahan Desa										
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	5 Dokumen	2.080.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
					KECAMATAN TALAWI				2.736.380.804,00						2.983.895.332,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.736.380.804,00						2.983.895.332,00	
7	01				KECAMATAN				2.736.380.804,00						2.983.895.332,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.422.475.104,00					-	2.597.895.332,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42Bulan 100%	-	2.060.396.022,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14Bulan 100%	2.160.395.332,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	224 Orang/bulan	2.060.396.022,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Orang/bulan	2.160.395.332,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2Kegiatan 100%	-	15.327.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan 100%	13.500.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	2 Orang	11.827.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Orang	9.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	108% 36Bulan	-	62.016.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	36% 12Bulan	94.500.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5 Paket	25.530.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	9.540.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	4 Laporan	19.446.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	6Kegiatan 100%	-	399.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan 100%	14.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	399.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 36Bulan	-	246.516.182,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100% 12Bulan	252.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan	36 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TALAWI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jasa Surat Menyurat				Mudiak			Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	33.355.978,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	13 Laporan	212.660.204,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	13 Laporan	215.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36Kegiatan 100%	-	37.820.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Kegiatan 100%	63.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	37.320.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	9 Unit	52.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	1 Unit	500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Unit	1.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		4.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	12.489.400,00					-	50.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2Kegiatan	-	8.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan	15.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1Kegiatan	-	4.489.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Kegiatan	35.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	4 Laporan	4.489.400,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	258.916.800,00					-	286.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	11Kegiatan	-	258.916.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11Kegiatan	286.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28 Laporan	9 Laporan	250.916.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	10 Laporan	275.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	10.000.000,00					-	12.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	-	2Kegiatan	-	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	2Kegiatan	12.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ketertiban Umum								Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	12.499.800,00					-	16.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2Kegiatan	-	12.499.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan	16.000.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	750 Orang	100 Orang	4.999.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	250 Orang	6.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	400 Orang	100 Orang	7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	200 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN TALAWI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	19.999.700,00					-	22.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	11Kegiatan	-	19.999.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11Kegiatan	22.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	33 Dokumen	11 Dokumen	4.999.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	3 Dokumen	7.499.800,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	5 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.213.075.482,00						5.466.215.663,00	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.212.825.482,00						5.465.390.663,00	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.212.825.482,00						5.465.390.663,00	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.041.892,00					-	3.165.812.637,00	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	14Bulan/Org	-	1.891.915.239,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14Bulan/Org	2.690.162.855,00	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	18/14 Orang/bulan	1.891.915.239,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	14 Orang/bulan	2.690.162.855,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.730.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	33.567.900,00	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		4 Orang	10.730.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		33.567.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pendidikan dan Pelatihan										
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	142.503.995,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100%	211.946.200,00	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.082.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	2.154.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.825.195,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Paket	52.467.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.770.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Paket	20.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.822.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Paket	25.478.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	12 Laporan	70.003.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	120 Laporan	110.895.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1Unit	-	14.881.250,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1Unit	35.000.000,00	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	14.881.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	1 Unit	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	14Bulan/Org	-	94.071.408,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	14Bulan/Org	100.586.932,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	41.598.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	12 Laporan	44.729.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Kel/Desa						
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.472.708,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Laporan	55.857.352,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12Bulan	-	63.940.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Bulan	94.548.750,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	6 Unit	61.670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Unit	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	18 Unit	1.050.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	6.398.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6 Unit	1.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Unit	3.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	718.511.800,00					-	859.865.000,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	718.511.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-	859.865.000,00	
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	4 Dokumen	224.576.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	4 Dokumen	262.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						yang Disusun										
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	18.668.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	3 Dokumen	31.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	475.267.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	100 Orang	565.865.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	644.818.590,00					-	680.000.000,00	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	10Parpol 10Parpol	-	644.818.590,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Parpol 0Parpol	680.000.000,00	
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	11 Dokumen	8 Dokumen	621.881.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	11 Dokumen	650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun										
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Orang	30 Orang	22.937.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	0 Orang	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	27.812.200,00					-	30.000.000,00	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	41Laporan	-	27.812.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	41Laporan	30.000.000,00	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		1 Laporan	27.812.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						di Daerah										
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	59.987.800,00					-	66.000.000,00	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	2Kegiatan 100% 100%	-	59.987.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2Kegiatan 100% 100%	66.000.000,00	
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2 Dokumen	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	100 Orang	9.987.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	20 Orang	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	543.653.200,00					-	663.713.026,00	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	12Kegiatan	-	543.653.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12Kegiatan	663.713.026,00	
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	12 Dokumen	12 Dokumen	31.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan	12 Dokumen	33.495.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				Semua Kel/Desa			melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	511.753.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	12 Dokumen	630.218.026,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X					NON URUSAN				250.000,00						825.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				250.000,00						825.000,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	250.000,00					-	825.000,00	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	14Bulan/Org	-	250.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	14Bulan/Org	825.000,00	
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	12 Laporan	825.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									**524.507.086.404,00**						**482.497.589.520,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indicator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dario indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indicator Kinerja Makro tahun 2023 dan target Indiktor Kinerja Makro Kota Sawahlunto tahun 2025 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Makro Kota sawahlunto
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2023		Target Kinerja tahun 2025	
			Target	Realisasi	Proyeksi Provinsi 2025	RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,48	4,46	5,11	4,73
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	71,60	71,21	84,13	74,35
3	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,289	0,308	0,313	0,285
4	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,19	2,27	2,28	2,18
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,92	4,98	4,36	4,83
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	74,74	74,42	76,96	75,24
	a. Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,15	10,829	10,997	11,37

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2023		Target Kinerja tahun 2025	
			Target	Realisasi	Proyeksi Provinsi 2025	RKPD 2025
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,57	10,44	10,78	10,64
	c. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,55	13,69	13,92	13,75
	d. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,75	70,69	70,35	70,75

Sumber : Data Olahan Barenlitbangda tahun 2025

Untuk target Indikator Makro Kota Sawahlunto sudah mengacu kepada Target yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Beberapa indikator yang tidak sama, tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,11 persen sedangkan pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 ditargetkan 4,73 persen. Dengan mempertimbangkan capaian LPE Kota Sawahlunto tahun 2023 yang terealisasi sebesar 4,46 persen dari target 4,48 persen akibat menurunnya kontribusi sektor pertambangan secara signifikan. Namun secara umum kontribusi sektor lainnya sudah kembali menunjukkan tren positif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kota Sawahlunto untuk menargetkan LPE Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 adalah sebesar 4,73 persen.

(2) Target PDRB Per Kapita pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 untuk Kota Sawahlunto sebesar Rp.84.130.000,- sedangkan didalam RKPD Kota Sawahlunto tahun 2025 ini menargetkan Rp.74.350.000,-. Berdasrakan realisasi capaian target di tahun 2023 sebesar Rp.71.210.000,- maka dari target RKPD Kota Sawahlunto tersebut masih dapat dicapai dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran di tahun 2025.

(3) Angka kemiskinan Kota Sawahlunto pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, dengan posisi Sawahlunto secara nasional adalah daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Indonesia. Artinya, secara umum Kota Sawahlunto dapat lebih bertahan terhadap dampak inlasi ekonomi global dan paandemi. Oleh karena itu target angka kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2,18 persen.

(4) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,36 persen sedangkan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 menargetkan 4,83 persen. Berdasarkan realisasi capaian Kota Sawahlunto Tahun 2023 bahwa tingkat penganganggguran terbuka (TPT) Kota Sawahlunto sebesar 4,98 persen dengan capaian tersebut, maka target 4,83 persen pada tahun 2025 diperkirakan masih dapat dicapai. Hal ini juga dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran untuk intervensi program kegiatan yang relevan dengan penurunan angka pengangguran.

(5) Target Indeks Pembangunan manusia pada RKPD Kota Sawahlunto tahun 2025 sebesar 75,24 persen sedangkan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk Kota Sawahlunto ditargetkan sebesar 76,96 persen, hal ini berdasarkan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 75,97. Target ini masih bisa tercapai dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran di tahun 2025.

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai aat ukur kuantitatif yang akan memberikan infrmasi sejauh mana keberhasilan peaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaiakan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai daam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sawahlunto
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	75,24
2	Indeks Infrastruktur Wilayah	[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2	74,00
3	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,73
4	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	74,35
5	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,18
6	Pengeluaran per-kapita (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,37
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	57,32
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN		
1	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,75
2	Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	12,5
3	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,75
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,64
5	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	71,74
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	65,52
7	Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	68,66

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Tahun 2025
8	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	87,20
9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	86,00
10	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,05
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,83
12	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,30
13	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	11,78
14	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,96
15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,88
16	Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (juta)	Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	414.465,75
17	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	8,83
18	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	62,50
19	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	77,00
20	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	63,01
21	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	85,82
22	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	80
23	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	3,15

Sumber : Data Olahan Barenlitbangda Tahun 2025

6.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan,

ketenagakerjaan dan gender.Adpek pelayanan umum mengukur kinerja pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, serta urusan pilihan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Sawahlunto Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/ Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	95,62
APK PAUD (%)	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	100
Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	111,21
APK SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	95,20
APK SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99,80
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(Jumlah Murid SD/sederajat usia 7-12 tahun /Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	100
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama/ Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto x 100 %	84,30
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(Jumlah Murid SMP/sederajat usia 13-15 tahun /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	2,16
Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi literasi SD adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus di kalikan bobot setiap kompetensi	1,94
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Numerasi SD adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,21
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	capaian kompetensi Literasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,27
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Capaian kompetensi Numerasi SMP adalah presentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP) (%)	Jumlah izin yang dikeluarkan (dibagi) / seluruh usulan yang masuk	100
Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	Jumlah satuan pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar baik kuantitas maupun kualitas disetiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah satuan pendidikan	100
Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan (%)	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi dengan satuan pendidikan yang ada	100
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Sawahlunto x 100 %	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Cakupan Layanan Rujukan (%)	Jumlah Pasien Rujukan yang Dilayani / Jumlah Pasien yang Dirujuk ke RSUD Sawahlunto x 100%	100
Cakupan Layanan Dasar (%)	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	B
Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100 %	100
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x100 %	100
Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 %	0,16
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter / dengan jumlah penduduk dikali 1000	100
Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya (%)	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	100
Jumlah kasus kematian bayi (kasus)	Jumlah Kematian bayi pada satu tahun tertentu	0,39
Jumlah Kasus Kematian IBU (kasus)	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	100
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Balita di Kota Sawahlunto x 100	10
Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan (%)	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	1
Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin (%)	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	7,1
Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan (%)	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	85
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ Jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x 100%	85
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan/Jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x 100%	75
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah balita di Kota Sawahlunto x 100%	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar /Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang usia15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase warganegara usia 60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /Jumlah penderita hipertensi di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar (%)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah penderita DM di kota sawahlunto x100%	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah penderita ODGJ di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar /Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota sawahlunto x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Nilai SAKIP Dinas PUPR	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100	0,63
Presentase sawah yang terairi (%)	Luas sawah yang terairi/luas sawah x 100	53,13
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota sawahlunto/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota sawahlunto x 100%	99,01
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kota sawahlunto x 100%	92,25
Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	51,72
Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100	99,50
Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	48,66
Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	81,9

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintah x 100	86,89
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	78,23
Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	95,21
Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	100
Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan (%)	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100	50
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di kota sawahlunto yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis /Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di kota sawahluntox 100%	1,5
Rasio kepatuhan PBG kab/ kota	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku x 100%	86,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Nilai SAKIP Dinas KP2LH	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	8,00
Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	84
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%	100
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	Jumlah unit rumah tidak layak huni/Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%	1,05
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/Jumlah unit rumah di kota sawahlunto x 100%	86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100
Persentase Penurunan kasus kebakaran (%)	(jumlah kasus kebakaran tahun (n-1) -jumlah kasus kebakaran tahun n)/ jumlah kasus kebakaran tahun (n) x 100%	13,3
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	100
Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota sawahlunto dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
	pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah/Jumlah kejadian kebakaran di kota sawahlunto x 100%	
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15
Nilai SAKIP BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100
Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,56
Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) - jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Nilai SAKIP Dinas Sosial PMDesPPA	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Nilai SAKIP DPMPTSPNaker	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	75
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB ADHK tahun berjalan / Jumlah tenaga kerja x 100%	96,25
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	100
Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	7
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	25
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja(%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	25
Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan / Jumlah pekerja pada perusahaan se-Kota Sawahlunto x 100%	95

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n / Jumlah perusahaan di wilayah Kota Sawahlunto pada tahun n x 100%	45
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD) (%)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,89
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	6
Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	20
Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualiasnya/ jumlah seluruh keluarga x 100 %	100
Persentase Kelurahan ramah anak (%)	Jumlah kelurahan ramah anak / jumlah seluruh kelurahan x 100 %	100
Persentase sekolah ramah anak (%)	Jumlah sekolah ramah anak/ jumlah seluruh sekolah x 100 %	100
Rasio KDRT (%)	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	0,01
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi/Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di kota sawahlunto x 100%	100
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x100%	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Nilai SAKIP Dinas KP3	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras (%)	Kebutuhan/Produksi X 100 %	100
Skor PPH	Komposisi kelompok Pangan Utama yang bila dikonsumsi dapat Memenuhi Kebutuhan	86,5
Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6
Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	93
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Jumlah cadangan pangan/ Jumlah kebutuhan pangan x 100%	167,7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%	100
Persentase Dokumen Pertanahan (%)	jumlah dokumen pertanahan yang terlaksana/jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	25

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	26,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9%	65,52
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	Total Vol sampah yang dapat ditangani /Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%	98
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izinlingkungan, izin PPLHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kota sawahlunto /usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%	78
Indeks Kualitas Air (IKA) 37,6 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu air	57,50
Indeks Kualitas udara (IKU) 40,5 %	Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu udara	87,54
Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL) 21,9 %	luas tutupan lahan	47,72
Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sambah	68,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Catpil	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	80
Perekaman KTP elektronik (%)	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP /jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	99,8
Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 th x100%	98,1
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	100
Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun/tahun x 100%	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,18
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR (%)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	68
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	12
Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga (%)	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0,56
Rasio konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	65
Kinerja lalu lintas (%)	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	60
Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	75
Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	95
Persentase sarana prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	Jumlah sarana yang tersedia/jumlah sarana yang dibutuhkan X 100%	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik) x 100 % (Permendagri 18/2020)	70
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	(jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	(jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/jumlah opd) x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Nilai SAKIP Dinas Koperindag	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	8,8
Persentase koperasi sehat (%)	(jumlah koperasi sehat/total kopoerasi)x100%	28
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (%)	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ Total UMKM)x100%	20
Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	77
Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya (%)	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKMx100%	0,6
Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	58
Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	56
Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya (%)	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	11
Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	5,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi (%)	(Jumlah investasi tahun njumlah investasi tahun n-1) di kota sawahlunto/jumlah investasi tahun n-1 di kota sawahluntox100%	8,83
Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	51
Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	29

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah Penerbitan Dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP/jumlah penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan x 100%	100
Persentase Peluang Investasi yang telah divalidasi (%)	Jumlah Peluang investasi yang telah divalidasi/jumlah peluang investasi x 100%	50
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Nilai SAKIP Dinas Parpora	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (%)	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	14,20
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota sawahlunto/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota sawahlunto x 100%	4,22
Jumlah pemuda berprestasi (orang)	Jumlah pemuda yang berprestasi	17
Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	17
Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional/jumlah organisasi kepramukaan x 100%	77
Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi	155
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	185
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yang yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100 % (Permendagri 18/2020)	100
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "	Ketersediaan Data (ada/tidak ada)	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 % (Permendagri 18/2020)	35
Persentase titik yang diamankan dibandingkan dengan seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	Jumlah itik yang diamankan / Jumlah seluruh titik pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang ditetapkan x 100 % (Permendagri 18/2020)	65
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase pelestarian budaya tak benda (%)	(Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari/ Jumlah Budaya Tak Benda) x 100%	77
Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%)	(Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100%	31,3
Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok)	Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri	13,6
Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%)	(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%	65
Persentase warisan Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah warisan Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah warisan budaya benda x 100%	70,7
Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%)	(Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%	65
Jumlah kunjungan museum (orang)	Jumlah kunjungan museum (orang)	33500
Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai survei terhadap 5% penduduk usia 15-69 tahun	51,2
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,6
Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	2
Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat (%)	Hasil survey terhadap 5% penduduk usia 15 s/d 69 tahun	52,2
Persentase perpustakaan aktif (%)	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	85
Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Jumlah naskah yang dinyatakan sebagai naskah kuno	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kota (ANRI)	Nilai Pengawasan kearsipan kab/kota	CC
Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan) (%)	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c =	50,58

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
	tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK	
Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat (%)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	50,56
Persentase arsip yang diberi akses (Lembar)	(Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan / Jumlah Arsip Yang diakses) * 100%	250
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Produksi Ikan (ton)	Jumlah produksi perairan umum dan budidaya	202
Tingkat Konsumsi Ikan (%)	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat indonesia selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan segar	39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) /Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	4,82
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota sawahlunto	(Jumlah wisatawan tahun n –Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	64
Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual/Jumlah kamar yang tersedia x 100%	17
Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,3
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4
Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	Jumlah Industri Pariwisata yang berdaya saing (sudah memenuhi syarat)/ Jumlah total industri Pariwisata x 100%	4
Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifkat HKI/jumlah total ekonomi kreatif x 100%	2
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profresional/Jumlah total pelaku ekonomi kreatif x 100%	25
jumlah wisatawan (orang)	Jumlah wisatawan yang dihitung berdasarkan tiket masuk objek wisata	150000
Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas/jumlah seluruh pengunjung x 100%	75
Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek wisata unggul/jumlah objek total jumlah wisata x 100%	55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Jumlah Produksi Padi (Ton)	Produktivitas x luas panen	15.850
Jumlah Produksi Karet (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	1.735
Jumlah Produksi Kakao (Ton)	Produktivitas x luas panen TM	570
Produksi Daging Sapi (Ton)	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	320
Produksi Daging Ayam (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	900,26
Produksi Telur (Ton)	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	135,86
Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam	Luas serangan OPT/ Luas tanaman	01:10

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi (orang)	Jumlah penyuluh yang memperoleh prestasi di tingkat prov/nasional	1
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Persentase peningkatan usaha perdagangan (%)	Jml pasar yang beroperasi setiap hari/ Total x 100 %	100
Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14
Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	242653
Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50
Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	28
Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	60
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/Jumlah pelaku usaha diwilayah Kab/Kota x 100%	15
Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Realisasi/ RDKK x 100%	82
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten/kota x 100%	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu (IKM)	Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal, AKG tahun ini - tahun sebelumnya	5
Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	Jml IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun ini - tahun sebelumnya	50
Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	40
Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	40
	Jumlah data IKM yang diperbaharui dalam Sinas	200
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
Nilai SAKIP SETDAKO	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Rasio Hafiz Qur'an terhadap santri rumah/pondok tahfiz (%)	(jumlah hafiz alquran/jumlah santri rumah hafiz x 100%	65
Persentase Peningkatan Zakat di Kota Sawahlunto (%)	(jumlah zakat tahun n - jumlah zakat tahun n-1)/jumlah zakat tahun n-1	6,54
Persentase Bantuan Hukum Yang Difasilitasi (%)	(jumlah bantuan hukum yang difasilitasi/jumlah permohonan bantuan hukum yang masuk)x 100%	100
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	(Jumlah kerjasama yang ditindakanjuti/jumah kerjasama ynag direncanakan) x 100%	100
Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto (Milyar)	jumlah zakat yang terkumpu pada tahun n pada BAZNAS Kota Sawahlunto	6,17

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
nilai kinerja Pemerintah dalam penerapan SPM	Penilaian kinerja Pemerintah daerah oleh Kementerian dalam negeri RI	94,60
Nilai Kinerja pemerintah berdasarkan hukum dan HAM (predikat)	Penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Kota Peduli HAM
Laju Inflasi (%)		< 3,5
SEKRETARIAT DPRD		
Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan (%)	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	100
PERENCANAAN		
Niai SAKIP Barenlitbangda	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
Indeks Perencanaan Pembangunan	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100%	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100
Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (BIDANG MITRA)	100
KEUANGAN		
Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan	WTP
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	77
Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap?	Ada
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ada
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,35
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA/total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	0,65
KEPEGAWAIAN		
Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	100
Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	80
Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah (Penilaian dari KPK)	165
Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2,95
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,40

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0,25
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan (%)	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) x 100%	100
Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan/perencanaan pembangunan/jumlah total data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan x 100%	100
INSPEKTORAT DAERAH		
Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 4
Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	Persentase PD yang mendapat Nilai SAKIP BB	100
Persentase pengawasan terlaksana sesuai PKPT (%)	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK		
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda/ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda x 100%	65
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda/total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%	85
PENGADAAN		
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x100%	66
Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	(jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam tiga kuartal yang ditandatangani pada kuartal prertama tahun n/ jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100%	0
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/total belanja langsung) x 100%	0,36
UNSUR KEWILAYAHAN		
Nilai SAKIP Kecamatan Talawi	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Nilai SAKIP Kecamatan Barangin	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Nilai SAKIP Kecamatan Silungkang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Nilai SAKIP Kecamatan Lembah Segar	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	100
PEMERINTAHAN UMUM		
Nilai SAKIP Badan Kesbang	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B

Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Defenisi Operasional/Penghitungan	Target 2025
Persentase potensi konflik yang dapat teredam (%)	Jumlah potensi konflik yang dapat teredam /jumlah potensi konflik x 100%	100
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya/jumlah peserta x 100%	60
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu/Jumlah DPT x 100%	86,25
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan kepala daerah (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilkada/Jumlah DPT x 100%	82,5
Tingkat partisipasi pemilih pada pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur (%)	Jumlah masyarakat yang memilih pada Pilgub/Jumlah DPT x 100%	65,8
Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto (%)	Jumlah organisasi yang terdaftar dan aktif/jumlah organisasi yang terdata x 100%	100
Persentase Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100
Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung	2,90

Sumber: DataOlahan Barenlitbangda 2025

BAB VII
PENUTUP

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Tahun 2025 menjadi bagian dari Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun pertama. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2025, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program, kegiatan dan subkegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025 dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
2. Terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang bersumber dana yang bersifat peruntukan khusus atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
3. Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Tahun 2025 merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan sebagai pedoman penentuan plafon anggaran;
4. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025 merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
5. Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan perkiraan, sedangkan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
6. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Sawahlunto wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;
7. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong.

7.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2025 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Sawahlunto guna mendapatkan kesepakatan bersama;
2. RKPD Tahun 2025 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

PJ. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

FAUZAN HASAN

BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO









RKPD | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO - TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
bappedaswl@gmail.com
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
barenlitbangda_sawahlunto
barenlitbangda.sawahlunto